

JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN



J. Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Vol. 9	No. 1	Hal. 1 - 125	Jakarta Juni 2014	ISSN 2088-8449
---	--------	-------	--------------	----------------------	-------------------

TERAKREDITASI dengan Nomor Akreditasi: 524/AU2/P2MI-LIPI/04/2013

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 9 Nomor 1, Juni 2014

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Dr. Sonny Koeshendrajana (*Ekonomi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*)

Anggota:

Prof. Dr. I. Wayan Rusastra (*Ekonomi Pertanian*)

Prof. Dr. Achmad Fauzi (*Ekonomi Sumber Daya Alam*)

Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)

Dr. Rilus A. Kinseng (*Sosiologi*)

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto (*Institut Pertanian Bogor*)

Prof. Dr. Sri Subekti Bendryman (*Universitas Airlangga*)

Dr. Agus Heri Purnomo (*BBP4BKP*)

Dr. Dedi S. Adhuri (*PMB-LIPI*)

Ir. Sumardi Suriatna (*Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional*)

Redaksi Pelaksana :

Yayan Hikmayani, M.Si

Tenny Apriliani, M.Si

Fatriyandi Nur Priyatna, M.Si

Heny Lestari, S.E

Asep Jajang Setiadi, S.Pi

Alamat Redaksi :

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: pt.osek@gmail.com

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

TERAKREDITASI dengan Nomor Akreditasi: 524/AU2/P2MI-LIPI/04/2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya, Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang berganti nama menjadi Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan tampilan dan tata letak baru telah diterbitkan.

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Keputusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 377/E/2013 tertanggal 16 April 2013, telah Terakreditasi dengan Nomor Akreditasi: 524/AU2/P2MI-LIPI/04/2013.

Guna peningkatan nilai akreditasi di masa mendatang maka Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9 No. 1 Tahun 2014 telah mengalami perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan petunjuk dari Tim Akreditasi Jurnal Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI).

Pada edisi kali ini, ditampilkan sepuluh tulisan yang meliputi; (i) Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) Pelagis Besar Tradisional; (ii) Kajian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengelolaan Berkelanjutan pada Budidaya Bandeng di Pesisir Kabupaten Karawang; (iii) Analisis Peran Kelembagaan Penyedia Input Produksi dan Tenaga Kerja dalam Usaha Tambak Garam; (iv) Pengembangan Sektor Pemasaran sebagai Dukungan Terhadap Program Industrialisasi Perikanan (Studi Kasus: Komoditas Nila di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan); (v) Analisis Pola Hubungan Kerja Ponggawa Sawi pada Usaha Perikanan Teripang Ditinjau dari Fungsi Ekonomi; (vi) Etos Kerja Perempuan di Sektor Perikanan Pada Kawasan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi (Studi Kasus Perempuan Pembudidaya Rumput Laut di Nusa Penida, Bali); (vii) Resiliensi Komunitas dalam Merespon Perubahan Iklim Melalui Strategi Nafkah (Studi Kasus Desa Nelayan di Pulau Ambon Maluku); (viii) Analisis Keberlanjutan Lilifuk: Tinjauan Persepsi Masyarakat Lokal; (ix) Analisis Kelembagaan Pengelola Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu; (x) Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi hasil penelitian di bidang sosial ekonomi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan bagi akademisi dan peneliti. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal di masa mendatang.

Redaksi

JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 9 Nomor 1, Tahun 2014

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ANALISIS NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PELAGIS BESAR TRADISIONAL <i>Oleh : Andrian Ramadhan, Maulana Firdaus dan Rizki Aprilian Wijaya</i>	1 - 12
KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS PENGELOLAAN BERKELANJUTAN PADA BUDIDAYA BANDENG DI PESISIR KABUPATEN KARAWANG <i>Oleh : Dicky Rachmanzah, Bambang Widigdo dan Yusli Wardiatno</i>	13 - 27
ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN PENYEDIA INPUT PRODUKSI DAN TENAGA KERJA DALAM USAHA TAMBAK GARAM <i>Oleh : Rizki Aprilian Wijaya, Rikrik Rahadian dan Tenny Apriliani</i>	29 - 40
PENGEMBANGAN SEKTOR PEMASARAN SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM INDUSTRIALISASI PERIKANAN (Studi Kasus: Komoditas Nila di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan) <i>Oleh : Hertria Maharani dan Rani Hafsaridewi</i>	41 - 50
ANALISIS POLA HUBUNGAN KERJA PONGGAWA SAWI PADA USAHA PERIKANAN TERIPANG DITINJAU DARI FUNGSI EKONOMI <i>Oleh : Naharuddin Sri dan Yusuf Kamlasi</i>	51 - 63
ETOS KERJA PEREMPUAN DI SEKTOR PERIKANAN PADA KAWASAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI (Studi Kasus Perempuan Pembudidaya Rumpit Laut di Nusa Penida, Bali) <i>Oleh : Nurlaili dan Fatriyandi Nur Priyatna</i>	65 - 75
RESILIENSI KOMUNITAS DALAM MERESPON PERUBAHAN IKLIM MELALUI STRATEGI NAFKAH (Studi Kasus Desa Nelayan di Pulau Ambon Maluku) <i>Oleh : Subair, Lala M. Kolopaking, Soeryo Adiwibowo dan M. Bambang Pranowo</i>	77 - 90
ANALISIS KEBERLANJUTAN LILIFUK: TINJAUAN PERSEPSI MASYARAKAT LOKAL <i>Oleh : Maharani Yulisti, Nendah Kurniasari dan Christina Yuliaty</i>	91 - 103
ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLA TAMAN NASIONAL LAUT KEPULAUAN SERIBU <i>Oleh : Hariyani Sambali, Fredinan Yulianda, Dietrich G. Bengen dan M. Mukhlis Kamal</i>	105 - 113

LUBUK LARANGAN: DINAMIKA PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERAIRAN SUNGAI DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

Oleh : *Christina Yuliaty dan Fatriyandi Nur Priyatna*

115- 125

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 330.133:639.2.037

ANALISIS NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PELAGIS BESAR TRADISIONAL

Andrian Ramadhan, Maulana Firdaus dan Rizki Aprilian Wijaya

Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap pelagis besar tidak hanya dilakukan oleh kapal-kapal besar berskala industri akan tetapi juga oleh kapal-kapal berskala kecil atau tradisional. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dinamika usaha perikanan tangkap berskala tradisional tersebut dan kaitannya dengan ekonomi rumah tangga nelayan dalam suatu ukuran bernama Nilai Tukar Nelayan (NTN). Metode survei digunakan dengan bantuan kuesioner untuk monitoring usaha, pendapatan dan harga bulanan input-output. Analisis penelitian menunjukkan bahwa usaha ini memiliki karakteristik usaha yang dinamis. Hal ini mempengaruhi indeks yang diterima oleh nelayan dimana berfluktuasi cukup tinggi antar bulannya. Pada awal tahun NTN mengalami tekanan karena merupakan musim barat yang sulit melakukan penangkapan ikan. Tren positif penangkapan terjadi pada awal pertengahan tahun dimana NTN secara general berada diatas 100. Pada sisi pengeluaran terjadi pula peningkatan pada pertengahan tahun karena terjadi inflasi umum akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan komponen yang diterima dan dibayar pada waktu yang sama membuat NTN relatif stabil meski terdapat tendensi penurunan dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: nilai tukar, nelayan, pelagis besar, tradisional

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 639.31 (621.4)

**KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS
PENGELOLAAN BERKELANJUTAN PADA BUDIDAYA BANDENG DI PESISIR KABUPATEN KARAWANG**

Dicky Rachmanzah, Bambang Widigdo dan Yusli Wardiatno

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai kesesuaian pelaksanaan dan capaian tujuan program pemberdayaan melalui penilaian Indeks Pelaksanaan Program dan Indeks Pencapaian Tujuan; (2) mengidentifikasi pengaruh variabel pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam pedoman pemberdayaan terhadap tujuan program pemberdayaan dalam dimensi ekologis, ekonomi, dan sosial, serta; (3) merumuskan strategi perbaikan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dapat terlaksana dan berlanjut secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indeks Pelaksanaan Program adalah sebesar 2,39 dengan kategori 'Baik'. Indikator yang memerlukan upaya perbaikan yaitu indikator ketepatan waktu penyaluran bantuan; (2) Indeks Pencapaian Tujuan sebesar 2,11 dengan kategori Cukup. Indikator capaian tujuan peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kelembagaan kelompok memerlukan upaya perbaikan guna pencapaian kategori yang lebih baik; (3) Terhadap pencapaian tujuan dalam dimensi ekonomi berupa peningkatan produksi budidaya, variabel ketepatan waktu penyaluran, kecukupan jumlah bantuan, dan aktivitas pendampingan berpengaruh positif, sedangkan variabel kejadian kekeringan berpengaruh negatif; (4) Untuk pencapaian tujuan dalam dimensi sosial, hanya variabel aktivitas pendampingan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kelembagaan kelompok, dan; (5) Keseluruhan variabel pelaksanaan tidak berpengaruh terhadap capaian tujuan dalam dimensi ekologis berupa peningkatan kualitas lingkungan. Dengan memperhatikan hasil analisis, beberapa opsi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: (1) penyesuaian waktu penyaluran bantuan dengan musim tanam untuk meningkatkan efektifitas capaian tujuan dalam dimensi ekonomi; (2) peningkatan dukungan terhadap aktivitas pendampingan oleh tenaga penyuluh, untuk meningkatkan capaian tujuan dalam dimensi sosial, dan; (3) meningkatkan capaian tujuan dalam dimensi ekologis, berupa peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberian intensif bagi pembudidaya yang memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

Kata Kunci: pemberdayaan, budidaya, Karawang, bandeng, indeks pelaksanaan program, indeks pencapaian tujuan

**INDEKS ABSTRAK JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)**

ISSN 2088-8449

Vol. 9 No. 1, 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 303.725

ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN PENYEDIA INPUT PRODUKSI DAN TENAGA KERJA
DALAM USAHA TAMBAK GARAM

Rizki Aprilian Wijaya, Rikrik Rahadian dan Tenny Apriliani

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan penyediaan sarana input produksi dan tenaga kerja pada usaha tambak garam skala tradisional di Kabupaten Sumenep dan Jenepono. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei melalui wawancara kepada 80 orang petambak garam dan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada delapan orang informan kunci. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabulasi silang. Hasil kajian menunjukkan kelembagaan penyedia input produksi lebih berperan dalam penyediaan akses permodalan dan kelembagaan tenaga kerja berperan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Kata Kunci: analisis peran, kelembagaan input, tenaga kerja, garam tradisional

INDEKS ABSTRAK JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2088-8449

Vol. 9 No. 1, 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 339.138:639.2

PENGEMBANGAN SEKTOR PEMASARAN SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM INDUSTRIALISASI PERIKANAN (Studi Kasus: Komoditas Nila di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan)

Hertria Maharani dan Rani Hafsaridewi

Industrialisasi perikanan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi. Peningkatan produksi yang tanpa disertai oleh upaya meningkatkan pemasaran akan berdampak pada kurang berhasilnya program tersebut. Penelitian ini mengkaji usaha budidaya, pasar, saluran pemasaran dan perdagangan ikan nila yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan. Studi lapangan dilakukan pada Bulan Maret-Juni 2012. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan bantuan kuesioner dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Responden terdiri dari pembudidaya, pengumpul, pedagang serta penentu kebijakan yang terkait dengan komoditas ikan nila. Metode analisis dilakukan secara analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan produksi budidaya ikan nila, namun pemasaran ikan terbatas pada pasar lokal. Pihak pembudidaya masih menjadi pihak *price taker* yang artinya tidak dapat meningkatkan posisi tawarnya. Struktur pasar pembudidaya bersifat persaingan sempurna, pada sisi lain dengan struktur pedagang bersifat oligopsoni sehingga harga di tingkat pembudidaya berada dibawah pengendalian pedagang. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani budidaya, dibutuhkan upaya menghilangkan pola *patron-client* dalam pembiayaan usaha dan pengembangan jalur pemasaran baru perlu dilakukan seperti dengan mencari pelanggan untuk keperluan restoran ataupun melakukan pemasaran ikan nila hingga ke daerah lain..

Kata Kunci: pemasaran, ikan nila, *price taker*, oligopsoni

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 330.35:639.4

ANALISIS POLA HUBUNGAN KERJA PONGGAWA SAWI PADA USAHA PERIKANAN TERIPANG
DITINJAU DARI FUNGSI EKONOMI

Naharuddin Sri dan Yusuf Kamlasi

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang ditinjau dari fungsi ekonomi telah dilaksanakan pada Bulan April sampai Juni 2011 di Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mewawancarai 8 orang *pongawa* dan 45 orang *sawi*. Pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Random Sampling*. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang dan analisis kuantitatif untuk menganalisis pendapatan *pongawa* dan *sawi*. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua (2) pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang, yaitu berdasarkan suku dan kontrak kerja. Sistem bagi hasil *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang ada dua (2) pola. Pada pola pertama *pongawa* mendapat bagian 25 persen dari hasil dan 75 persen dibagikan kepada *sawi*; sedangkan pada pola kedua *pongawa* mendapat bagian 50 persen dari hasil dan 50 persen sisanya dibagikan kepada *sawi*. Pendapatan rata-rata per bulan *pongawa* pada sistem bagi hasil 25 : 75 berkisar Rp. 3.300.000 sampai Rp. 4.500.000 sedangkan *sawi* berkisar Rp. 750.000 sampai Rp. 1.375.000. Pada sistem bagi hasil 50 : 50, pendapatan rata-rata per bulan *pongawa* berkisar Rp. 2.100.000,- sampai Rp. 2.980.000 dan *sawi* berkisar Rp. 480.000 sampai Rp. 1.650.000.

Kata Kunci: pola hubungan kerja, *pongawa sawi*, perikanan teripang

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 330.35

ETOS KERJA PEREMPUAN DI SEKTOR PERIKANAN PADA KAWASAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI (Studi Kasus Perempuan Pembudidaya Rumput Laut di Nusa Penida, Bali)

Nurlaili dan Fatriyandi Nur Priyatna

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan etos kerja perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan dikaitkan dengan strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Penelitian dilakukan pada tahun 2013 dengan fokus pada kawasan minapolitan Nusa Penida di 3 (tiga) gugusan pulau: Nusa Besar atau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan (observasi). Analisis data menggunakan deskriptif eksplanatoris dimana data-data yang dikumpulkan digambarkan secara rinci kemudian digunakan untuk menjelaskan strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida memiliki etos kerja yang tinggi, rajin, memiliki kesungguhan serta kemauan bekerja keras membantu suami dalam mencari nafkah. Pandangan perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida tentang pekerjaan yaitu bahwa tidak ada pekerjaan yang berat, sudah ada pembagian kerja dan saling membantu antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Strategi pemberdayaan dan pengembangan perempuan pembudidaya rumput laut dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yaitu dengan membuat kebijakan yang memihak melalui pengakuan peran dan partisipasi mereka serta melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kata Kunci: etos kerja, strategi pemberdayaan, pengembangan ekonomi, MP3EI

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 303.725

RESILIENSI KOMUNITAS DALAM MERESPON PERUBAHAN IKLIM MELALUI STRATEGI NAFKAH
(Studi Kasus Desa Nelayan di Pulau Ambon Maluku)

Subair, Lala M. Kolopaking, Soeryo Adiwibowo dan M. Bambang Pranowo

Studi ini dilakukan dengan dua tujuan: (1) mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan modal-modal dalam praktek strategi nafkah nelayan, dan (2) menganalisis dan menilai resiliensi komunitas nelayan dalam merespon perubahan iklim. Penelitian dilakukan pada komunitas nelayan perikanan tangkap di desa Asilulu, Pulau Ambon Maluku. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan berperan serta, *focus group discussion*, wawancara mendalam dan didukung oleh studi pustaka. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Asilulu Pulau Ambon Maluku sudah mengoptimalkan penggunaan modal (modal alami, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal sosial) dan aktivitas (ditengahi oleh hubungan sosial dan institusi) dalam membangun sistem nafkah yang diperlukan untuk hidup. Mereka juga telah memodifikasi modal-modal tersebut untuk mereduksi kerentanan dan meningkatkan resiliensi sosialnya. Hasilnya, sistem nafkah yang ada pada satu konteks kekinian, berkelanjutan dan oleh karenanya resilien tetapi dalam konteks ancaman dampak perubahan iklim, resiliensi yang ada adalah resiliensi yang terbatas (*limited resilience*). Pada skenario iklim yang sangat ekstrim, resiliensi yang berdasar kepada sistem nafkah yang tertekan terus menerus dan masih bergantung kepada sumber daya alam rapuh dan memiliki ambang batas.

Kata Kunci: perubahan iklim, adaptasi, strategi nafkah, kerentanan, resiliensi sosial

**INDEKS ABSTRAK JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)**

ISSN 2088-8449

Vol. 9 No. 1, 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 316.324.4

ANALISIS KEBERLANJUTAN LILIFUK: TINJAUAN PERSEPSI MASYARAKAT LOKAL

Maharani Yulisti, Nendah Kurniasari dan Christina Yuliaty

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dalam bentuk kearifan lokal merupakan wujud tanggung jawab mereka dalam melestarikan sumber daya sehingga dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Kearifan lokal tersebut bernama *Lilifuk*, yaitu kawasan di laut berbentuk kolam yang tergenang saat surut sehingga ikan terperangkap di dalamnya. Tulisan ini mengkaji persepsi masyarakat mengenai keberlanjutan *Lilifuk* di Kabupaten Kupang. Penelitian dilaksanakan di Desa Bolok dan Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang pada Oktober 2012 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus dan triangulasi digunakan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan terhadap tetua adat, kepala desa, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Data persepsi masyarakat dikumpulkan dari 30 responden. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis persepsi menunjukkan bahwa sebesar 93,3% masyarakat mengetahui tentang keberadaan *Lilifuk*, 60% tahu sejarahnya, 93,3% tahu lokasinya dan 26,7% tahu batas-batasnya. Sebanyak 44% masyarakat menyatakan otoritas pengambilan keputusan pengelolaan *Lilifuk* adalah pemiliknya. Keterlibatan Masyarakat dalam *Lilifuk* hanya sebagai pemanfaat saat *Lilifuk* dibuka (63%). Manfaat *Lilifuk* dapat diidentifikasi sebagai berikut: menambah penghasilan, menjalin hubungan sosial, rekreasi, menjaga sumber daya ikan, menjaga lingkungan dan menjaga tradisi. Faktor-faktor yang mengancam keberlanjutan *Lilifuk* adalah lahan yang sempit, penurunan produksi ikan, pencemaran perairan dan tidak adanya penjagaan. Prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan *Lilifuk* adalah (1) Menjaga dan melindungi serta memperbaiki kelestarian lingkungan; (2) Dukungan dan pengawasan pemerintah; (3) Menerapkan aturan dan sanksi hukum; (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelestarian, dan; (5) Menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Lilifuk*, keberlanjutan, masyarakat lokal, persepsi

INDEKS ABSTRAK JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2088-8449

Vol. 9 No. 1, 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 303.725

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLA TAMAN NASIONAL LAUT KEPULAUAN SERIBU

Hariyani Sambali, Fredinan Yulianda, Dietrich G. Bengen dan M. Mukhlis Kamal

Permasalahan kewenangan secara kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasikhususnya Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) masih terus mengemuka, hal ini dapat berpotensi konflik kewenangan yang berdampak terhadap keberlanjutan pengelolaan. Penelitian ditujukan untuk mengetahui kelembagaan yang paling berwenang dalam pengelolaan TNKpS dan dampak penambangan karang terhadap sumber daya terumbu karang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner. Analisis data menggunakan metode ISM (*Interpretative Structural Modelling*) dan data lapangan menggunakan metode *Line Intercept Transects* (LIT). Hasil penelitian menunjukkan Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah adalah kelembagaan yang mempunyai pengaruh kuat terhadap keberlangsungan pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Agar pengelolaan sumber daya Taman Nasional Kepulauan Seribu dapat berkelanjutan, maka elemen Tujuan Program yang dapat dirujuk sebagai kebijakan pengelolaan bersama kedua kelembagaan tersebut adalah Kelestarian Sumber daya Taman Nasional.

Kata Kunci: konservasi, taman nasional laut, interpretative structural modelling

INDEKS ABSTRAK JURNAL SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN (<i>ABSTRACT INDEX OF JOURNAL SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES</i>)
--

ISSN 2088-8449

Vol. 9 No. 1, 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

UDC 316.324.4

LUBUK LARANGAN: DINAMIKA PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERAIRAN SUNGAI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Christina Yuliaty dan Fatriyandi Nur Priyatna

Tulisan ini menggambarkan bagaimana masyarakat lokal memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai. Pengetahuan ini berwujud nilai kearifan lokal, falsafah hidup, religi dan norma-norma hukum lokal yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 pada masyarakat Minang Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang menetap di daerah aliran sungai Batang Kapur. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan melalui pendekatan studi kasus terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya perikanan perairan sungai secara lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lubuk larangan tidak hanya sebuah praktek pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ikan tetapi didalamnya terdapat aturan, mekanisme distribusi hak dan organisasi adat. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, maka pengetahuan pengelolaan lubuk larangan pun mengalami perubahan. Nilai Islam dan politik pemerintahan menjadi pendorong terjadinya perubahan dalam pengelolaan Lubuk Larangan.

Kata Kunci: pengetahuan lokal, pengelolaan sumber daya, Lubuk Larangan

ANALISIS NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PELAGIS BESAR TRADISIONAL

Term of Trade Analysis of Traditional Fishers of Big Pelagic

***Andrian Ramadhan, Maulana Firdaus dan Rizki Aprilian Wijaya**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

*email: iansosek30@yahoo.com

Diterima 12 Maret 2014 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap pelagis besar tidak hanya dilakukan oleh kapal-kapal besar berskala industri akan tetapi juga oleh kapal-kapal berskala kecil atau tradisional. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dinamika usaha perikanan tangkap berskala tradisional tersebut dan kaitannya dengan ekonomi rumah tangga nelayan dalam suatu ukuran bernama Nilai Tukar Nelayan (NTN). Metode survei digunakan dengan bantuan kuesioner untuk monitoring usaha, pendapatan dan harga bulanan input-output. Analisis penelitian menunjukkan bahwa usaha ini memiliki karakteristik usaha yang dinamis. Hal ini mempengaruhi indeks yang diterima oleh nelayan dimana berfluktuasi cukup tinggi antar bulannya. Pada awal tahun NTN mengalami tekanan karena merupakan musim barat yang sulit melakukan penangkapan ikan. Tren positif penangkapan terjadi pada awal pertengahan tahun dimana NTN secara general berada diatas 100. Pada sisi pengeluaran terjadi pula peningkatan pada pertengahan tahun karena terjadi inflasi umum akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan komponen yang diterima dan dibayar pada waktu yang sama membuat NTN relatif stabil meski terdapat tendensi penurunan dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: nilai tukar, nelayan, pelagis besar, tradisional

ABSTRACT

Large pelagic fisheries is not merely captured by large industrial ships but also by small boats or traditional scale. This paper was aimed to understand the dynamics of fishing condition of traditional scale regarding fishers' household economy by measuring Fishers Trade Index (NTN). The results indicated that the fishing activity was very dynamic and affected the fishers' revenue index and also the payment index which was highly varied for each months. In the beginning of the year, NTN was low due to "west season" where fishing activities were hardly being carried out. Positive trend of fisheries activities happened in the mid-year where NTN in general was above 100. However, there was also increasing in the expenditure in mid-year because of general inflation which was triggered by fuel price upturned. The increasing in both revenue and expenditure components in the same periods made NTN relatively steady in spite of decreasing trend over time.

Keywords: term of trade, fishers, large pelagic, traditional

PENDAHULUAN

Sejak terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 1999 telah banyak program-program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Pengukuran terhadap kesejahteraan tersebut membutuhkan indikator yang secara cepat dan tepat untuk melihat gambaran kesejahteraan yang telah dicapai. Salah satu indikator yang dipercaya dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan rumah tangga adalah Indeks Nilai Tukar (selanjutnya disebut NTN) dan indikator tersebut merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indeks nilai tukar berhubungan erat dengan penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tolak ukur kesejahteraan.

Pada awalnya kajian tentang indeks nilai tukar di dunia pertama kali dilakukan oleh Laspeyres pada abad ke-18 dan selanjutnya dikembangkan oleh Paasche, Walsh, Lowe dan Fisher (Silver, 2009; Armknecht and Silver, 2012). Penelitian tentang indeks nilai tukar di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Soeharjo (1976) yang mengkaji nilai tukar komoditas pertanian nasional dengan menggunakan konsep nilai tukar barter. Selanjutnya indeks nilai tukar dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1983 terhadap rumah tangga pertanian tanaman pangan di Pulau Jawa dan sejak tahun 1987 dikembangkan di luar Pulau Jawa. Menurut Hutabarat (1995), nilai tukar produk primer dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga di pedesaan, sedangkan Rahmat (2000) menyatakan bahwa nilai tukar dapat digunakan sebagai salah satu alat monitoring dan perencanaan pembangunan.

Pada sektor kelautan dan perikanan, pengukuran nilai tukar masih tertinggal dibandingkan dengan sektor pertanian. Pengukuran nilai tukar masyarakat nelayan telah dilakukan baik oleh perorangan (Ustriyana, 2007; Wenno, 2011) maupun lembaga instansi pemerintah (Pranadji *et al.*, 2001 ; Zulham *et al.*, 2010, Pusdatin, 2011) dimana objek pengukuran NTN masih bersifat masyarakat nelayan secara umum. Padahal masyarakat nelayan memiliki ciri dan karakteristik berbeda ditinjau dari skala usaha dan tipologinya. Menurut skala usaha, nelayan dapat dibedakan menjadi skala besar (termasuk di dalamnya skala industri) dan skala kecil (tradisional dengan ukuran kapal kurang dari 5 GT) yang mana produksi perikanan terbesar disumbang oleh nelayan

tradisional. Dilihat dari tipologinya, masyarakat nelayan dibedakan menjadi perikanan demersal dan pelagis. Ikan demersal merupakan ikan yang hidup di dasar perairan, sedangkan ikan pelagis merupakan ikan yang hidup diantara kolom perairan. Tipologi perikanan pelagis juga terbagi menjadi pelagis kecil dan besar. Jenis ikan pelagis kecil diantaranya adalah ikan layang (*Decapterus spp*), teri (*Stelopohorus spp*), lemuru (*Sardinella sardinella*), kembung (*Rastrelliger spp*) dan ikan sejenis lainnya. Jenis ikan pelagis besar adalah ikan tuna (*Thunnus spp*), Tongkol (*Auxis spp*), Cakalang (*Katsuwonus pelamis*) dan lainnya (Mallawa, 2006).

Perbedaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini fokus kepada pengukuran NTN perikanan tangkap pelagis besar tradisional. Komoditas pelagis besar (khususnya ikan tuna) merupakan komoditas ekspor perikanan primadona negara Indonesia yang terlihat dari hasil penerimaan devisa dari komoditas tersebut menempati posisi kedua setelah udang (Dahuri, 2008 ; Yudiarosa, 2009). Selain itu, terdapat perbedaan metode perhitungan nilai tukar dimana dalam penelitian – penelitian sebelumnya menggunakan Indeks Harga (*Price Index*) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Indeks Nilai (*Value index*). Pengukuran nilai tukar menggunakan indeks harga, ditenggarai dapat menimbulkan bias pemahaman karena hanya merepresentasikan pola produksi pada satu waktu dimasa lampau dengan kata lain tidak memperhitungkan perubahan kuantitas. Kondisi ini menyebabkan indeks harga tidak ada kaitannya secara langsung dengan nilai riil pendapatan rumah tangga (Simatupang dan Maulana, 2007). Berbeda dengan indeks nilai yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana indeks nilai mampu memberikan perubahan nilai yang diterima/dibayar dalam bentuk rasio yang dapat diperbandingkan antar waktu. Selain itu, indeks nilai dalam jangka pendek juga mampu merekam fluktuasi hasil tangkapan baik dari jenis kuantitas maupun harga dan juga (Ramadhan dan Safitri, 2012). Penelitian terkait NTN sangat strategis bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan karena telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah faktor – faktor apa yang mempengaruhi indeks nilai yang diterima dan indeks nilai yang dibayar oleh nelayan pelagis besar? Bagaimana hubungan antara indeks nilai yang

diterima dan indeks nilai yang dibayar tersebut? dan bagaimana dinamika NTN nelayan tipologi pelagis besar ikan tuna dengan menggunakan indeks nilai? Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis indeks nilai yang diterima, indeks nilai yang dibayarkan dan indeks nilai tukar nelayan tradisional pelagis besar di Kota Bitung, Kota Malang dan Kota Padang.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian meliputi 3 lokasi usaha perikanan tangkap pelagis besar yang mewakili keragaman Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kota Bitung, Kota Padang dan Kabupaten Malang merupakan pusat produksi perikanan tuna dengan karakteristik usaha tradisional. Selain itu ketiga lokasi dipilih untuk mewakili tiga WPP yang berbeda yaitu WPP 716, WPP 572 dan WPP 573. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2013.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud meliputi perkembangan produksi, nilai produksi dan biaya-biaya produksi menurut bulan. Data-data tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan indeks yang diterima oleh nelayan. Sementara data sekunder yang digunakan adalah data statistik perikanan dan literatur yang relevan dengan kegiatan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan pendekatan survey dan monitoring harga bulanan pada beberapa jenis input dan output. Pada penelitian survey digunakan pula kuesioner sebagai alat bantu meniadapatkan data dan informasi yang dibutuhkan melalui kegiatan wawancara kepada responden. Data monitoring harga berasal dari pengamatan enumerator pada setiap bulannya.

Metode Analisis Data

Indeks nilai tukar yang dihasilkan pada penelitian ini menggunakan metode indeks nilai. Secara teoritis, indeks nilai merupakan perbandingan dari nilai yang terbentuk dari harga dan kuantitas (Lind *et al.*, 2007). Indeks ini dapat mengukur perubahan nilai antar waktu sehingga menggambarkan rasio dari nilai yang terbentuk.

Indeks nilai menunjukkan perubahan nilai uang dari satu periode ke periode lainnya (Nazar, 2012). Penggunaan indeks nilai merupakan perbaikan dari metode penghitungan BPS yang didasarkan pada indeks harga Laspeyres. Metode pengukuran dengan menggunakan metode indeks Laspeyres menurut Apriliani *et al.* (2012) memiliki sejumlah kelemahan dan tidak dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari oleh metode penghitungan yang mengabaikan perubahan kuantitas produksi yang pada kenyataannya produksi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penerimaan pelaku usaha. Sebaliknya dinamika harga yang menjadi faktor penentu justru seringkali berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat. Naiknya harga-harga pada komponen yang diterima mengindikasikan terjadinya kelangkaan hasil perikanan akibat musim paceklik atau gagal panen secara masal. Secara matematis indeks nilai dapat ditulis secara sederhana sebagai berikut :

$$NTN = \frac{IT}{IB} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$IT = \frac{\sum_{i=1}^n P t_i^1 Q t_i^1}{\sum_{i=1}^n P t_i^0 Q t_i^0} \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$IB = \frac{\sum_{i=1}^n P b_i^1 Q b_i^1}{\sum_{i=1}^n P b_i^0 Q b_i^0} \quad \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan/Remarks

NTN	= Indeks Nilai Tukar Nelayan/ <i>Fishers Trade Index</i>
IT	= Indeks Yang Diterima Nelayan/ <i>Fishers Revenue Index</i>
IB	= Indeks Yang Dibayarkan Nelayan/ <i>Fishers Payment Index</i>
Pt	= Harga Komoditas Perikanan Pelagis Besar ke n/ <i>Price of Big Pellagic Fisheries</i>
Qt	= Kuantitas Komoditas Pelagis Besar ke n / <i>Quantity of of Big Pellagic Fisheries</i>
Pb	= Harga Biaya Usaha Penangkapan Ikan Pelagis Besar dan Harga Pangan - Non Pangan ke n/ <i>Price of Cost Variable and Price of Food and Non-Food Variable</i>
Qb	= Kuantitas Biaya Usaha Penangkapan Pelagis Besar dan Konsumsi Pangan - Non Pangan ke n/ <i>Quantity of Cost Variable and quantity of Food and Non-Food</i>
t	= Periode Waktu / <i>Time Period</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perikanan Pelagis Besar Skala Kecil

Sumber daya perikanan tangkap dapat diklasifikasikan menjadi pelagis besar, pelagis kecil, dan demersal. Perikanan pelagis besar merujuk pada sumber daya perikanan berukuran besar yang berada pada kolom perairan. Beberapa jenis ikan pelagis besar diantaranya adalah tuna, setuhuk, cakalang, tongkol dan beberapa jenis hiu (Mallawa, 2006). Potensi perikanan pelagis besar di Indonesia tersebar di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Pada wilayah barat potensi terbesar terdapat pada perairan Samudera Hindia yang terbagi WPP 572 dan WPP 573. Secara persentase kedua WPP tersebut menyimpan potensi sebesar 32% dari total potensi perikanan pelagis besar di Indonesia (Besweni *et al.*, 2011). Sementara pada wilayah timur, potensi ikan pelagis besar tersebar pada beberapa perairan laut yang diantaranya adalah Samudera Pasifik (WPP 717), Laut Banda (WPP 714), Selat Makasar dan Laut Flores (WPP 713), Teluk Tomini dan Laut Seram.

Skala pemanfaatan perikanan secara umum terbagi atas dua bagian, yaitu ; industri dan skala kecil atau tradisional. Menurut Smith (1983) perikanan skala kecil juga seringkali disebut sebagai perikanan tradisional. Pembagian perikanan industri dan tradisional diklasifikasikan berdasarkan ukuran kapal sebagaimana pendapat Charles (2001). Meskipun demikian, ukuran kapal yang disebut kecil atau besar bersifat relatif dan belum ada kesepakatan tertentu. Pada kasus ini jenis kapal yang digolongkan masuk ke dalam skala industri adalah kapal yang berukuran lebih besar dari 30 GT sedangkan skala kecil yang berukuran kurang dari 30 GT. Secara statistik, jumlah kapal di bawah 30 GT merupakan kapal yang dominan yaitu mencapai 91,3% (KKP, 2011).

Kapal di atas 30 GT yang melakukan penangkapan ikan pelagis besar dapat diidentifikasi berdasarkan alat tangkap yang digunakan. Umumnya kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap purse seine dan tuna long line. Jumlah kapal purse seine yang terdaftar berjumlah 4.070 unit dan 4,7% (192 unit) diantaranya diperkirakan merupakan kapal penangkap pelagis besar (Besweni *et al.*, 2011). Sementara jumlah kapal tuna long line berjumlah 1915 unit. Sehingga bila ditotal jumlah kapal ikan pelagis besar diatas 30 GT yang terdaftar diperkirakan mencapai 2107 unit. Sementara jumlah kapal dibawah 30 GT

yang melakukan penangkapan ikan pelagis besar umumnya menggunakan alat tangkap pancing tonda, huhate dan pancing ulur. Data statistik menunjukkan jumlah alat tangkap pancing tonda mencapai 64.554 unit, huhate 7.379 unit dan pancing ulur 71.046 unit (KKP, 2011). Pancing ulur digunakan untuk penangkapan ikan pelagis besar dan juga ikan demersal. Bila diasumsikan jumlah keduanya sama maka pancing ulur yang digunakan untuk pelagis besar adalah 35.523. Dengan demikian jumlah kapal dibawah 30 GT yang melakukan penangkapan ikan pelagis besar diperkirakan berjumlah 107.456 unit.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat didalam satu unit penangkapan berkisar antara 3 sampai dengan 7 orang tergantung dari besaran kapal. Jenis tenaga kerja yang terlibat di dalam usaha terdiri dari nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Sementara pemilik kapal seringkali tidak terlibat secara langsung didalam usaha penangkapan ikan. Mereka banyak yang bertindak sebagai juragan darat yang mengelola operasional usaha mulai dari penyedia barang operasional sampai dengan penjualan hasil tangkapan.

Secara produksi, kapal-kapal pelagis besar tradisional diperkirakan dapat menghasilkan 565.151 ton pertahun (59%). Jumlah tersebut didapat dengan mengurangi data hasil tangkapan tahun 2011 dengan estimasi tangkapan ikan pelagis besar oleh kapal-kapal diatas 30 GT sebesar 390.369 ton / tahun. Jumlah tersebut didapat dengan pendekatan rata-rata hasil tangkapan pertahun oleh kapal-kapal diatas 30 GT yang mencapai 87 ton/kapal pertahun (Erfan, 2008).

Merujuk pada kondisi tersebut, maka usaha perikanan tradisional /skala kecil penting untuk diperhatikan karena merupakan usaha yang dominan dilakukan oleh masyarakat. Oleh karenanya efek yang ditimbulkan dari kondisi pasang surut usaha penangkapan ikan kategori ini akan lebih terasa dimasyarakat bila dibandingkan usaha perikanan skala industri. Jentoft dan Eide (2011) menyatakan bahwa sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang penting bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan pedesaan. Menurut laporan HLPE (2014), jumlah pekerja yang terlibat dalam perikanan tangkap skala kecil mencapai 90% dari total jumlah pekerja disektor perikanan tangkap secara umum.

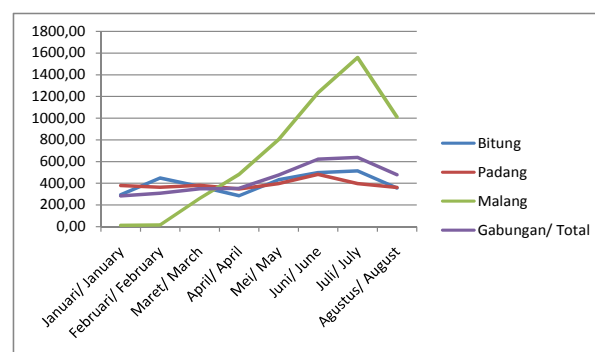
Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa kapal yang digunakan oleh nelayan pelagis besar tradisional bervariasi antara 5 sampai dengan 15 GT dengan waktu operasional berkisar antara 5 sampai dengan 28 hari. Variasi waktu penangkapan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi musim penangkapan dan kondisi WPP. Misalnya pada WPP 716 dan WPP 573 dimana waktu trip terpendek adalah 5 hari dan waktu trip terpanjang mencapai 12-14 hari. Hal ini menunjukkan kondisi penangkapan yang relatif tidak jauh berbeda antar dua lokasi tersebut. Sedangkan pada Kota Padang penangkapan berkisar antara 21-28 hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha penangkapan ikan di WPP 572 sudah semakin jauh dari lokasi pendaratan bahkan telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dinamika Indeks Nilai yang Diterima Oleh Nelayan

Perikanan tangkap laut merupakan usaha yang terkenal dengan ketidakpastian. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini seringkali menghadapi situasi sulit karena ikan sulit ditangkap atau karena tidak dapat menangkap ikan karena cuaca buruk. Charles (2001) menyatakan bahwa ketidakpastian di dalam sektor perikanan sudah menjadi pengetahuan umum yang terjadi dimana-mana. Kondisi tersebut mempengaruhi indeks nilai yang diterima sehingga pergerakan indeks menjadi dinamis.

Indeks yang diterima oleh nelayan sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu harga dan produksi. Dinamika harga pada perikanan tangkap laut tidak dapat dipisahkan dari besarnya produksi yang dihasilkan. Ketika produksi ikan sedang berlimpah, seringkali harga ikan mengalami penurunan dan begitupula sebaliknya. Berdasarkan data produksi

dari bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 diketahui bahwa produksi pada awal tahun masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya adalah kondisi cuaca yang kurang baik dan sumber daya ikan yang masih langka. Kondisi ini dapat diidentifikasi sebagai musim paceklik ikan bagi usaha penangkapan pelagis besar. Produksi secara bertahap mulai mengalami peningkatan pada bulan Mei dan mencapai puncaknya pada Bulan Juli. Rata-rata produksi pada saat bulan Juli mencapai 637 Kg / Kapal / bulan jauh diatas bulan Januari yang hanya sebesar 283 Kg / kapal / bulan (Gambar 1).



Gambar 1. Perkembangan Produktivitas Bulanan Nelayan Pelagis Besar (Kg/ Kapal/ Trip), 2013.

Figure 1. Monthly Productivity of Big Pelagic Fishers (Kilos/Fleet/Trip), 2013.

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Pada perikanan pelagis besar, turun naiknya produksi pada tingkat lokal tidak selalu berpengaruh terhadap harga ikan. Hal ini disebabkan oleh sebagian komoditas pelagis besar termasuk sebagai komoditas ekspor. Pengaruh produksi terhadap harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pada pasar global khususnya Jepang

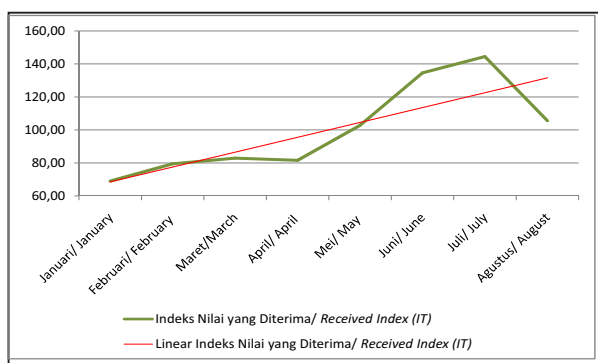
Tabel 1. Perbedaan Bentuk Usaha Perikanan Tangkap Pelagis Besar di Lokasi Penelitian, 2013.
Table 1. Types of Big Pelagic Capture Fisheries Business in Research Location, 2013.

Kategori / Category	Kota Bitung/ Bitung City	Kota Malang/ Malang City	Kota Padang/ Padang City
Lama melaut / Day of Trip	5-14 hari/ 5 – 14 days	5-12 hari/ 5 – 12 days	21-28 hari/ 21 – 28 days
Wilayah Operasional/ Operational Area	200 - 400 mil/ 200 – 400 miles	± 200 mil/± 200 Miles	300 - 400 mil/ 300 – 400 Miles
Ukuran Kapal/ Size	5-10 GT/ 5 – 10 Gross Tonnage	10-15 GT / 10 – 15 Gross Tonnage	5-6 GT / 5 – 6 Gross Tonnage
Biaya operasional/ Operational Cost	± 9-10 juta/ 9 – 10 Million IDR	±10-12 Juta/ 10 – 12 Million IDR	± 10-12 Juta/ 10 – 12 Million IDR
Tenaga Kerja/ Labour	4-6 orang/ 4 – 6 Persons	5-7 orang/ 5 – 7 Persons	3-4 orang/ 3 – 4 Persons

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

(Bose & McIlgorm, 1996; William & Reid, 2004). Dari tiga lokasi pengamatan, hanya Kota Bitung yang harga jual produknya sangat tergantung pada pasar ekspor. Sementara pada lokasi Padang dan Malang masih berorientasi pada pasar lokal, sehingga lebih dipengaruhi oleh produksi pada tingkat lokal. Perkembangan rata-rata harga ikan menurut bulan dan lokasi tersaji pada Tabel 2.

Perkembangan indeks yang diterima berdasarkan produksi dan harga yang diterima oleh nelayan menunjukkan pola yang relatif meningkat dari titik awal pengamatan di bulan Januari 2013. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kondisi paceklik sangat mempengaruhi indeks yang diterima oleh nelayan. Hal ini sejalan dengan kritik Apriliani *et al.* (2012) terkait perhitungan NTN oleh BPS dimana NTN hanya dipengaruhi oleh perkembangan harga sementara komponen produksi dianggap tetap.



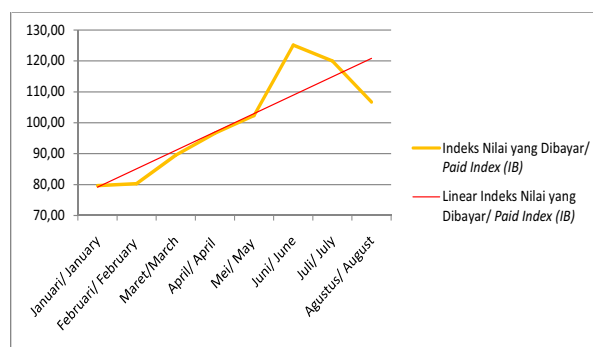
Gambar 2. Dinamika Bulanan Indeks Nilai yang diterima Nelayan Pelagis Besar, 2013.
Figure 2. Monthly Received Index of Big Pelagic Fishers, 2013.

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Dinamika Indeks Nilai yang Dibayar Oleh Nelayan

Perkembangan nilai yang diterima diikuti pula oleh kenaikan indeks yang dibayar. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran responden yang semakin besar untuk biaya operasional melaut. Semakin banyak trip yang dilakukan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Selain itu kenaikan biaya operasional dipengaruhi pula oleh kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013. Pada saat tersebut terlihat bahwa ada lompatan kenaikan biaya operasional yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa terjadi inflasi yang cukup besar setelah kenaikan BBM pada beberapa kelompok pengeluaran misalnya bahan makan sebesar 5,46% dan transportasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 9,6% (Gambar 2).

Diantara kelompok pengeluaran yang menyusun indeks yang dibayar, diketahui bahwa



Gambar 3. Dinamika Bulanan Indeks Nilai yang Dibayar Nelayan Pelagis Besar, 2013.
Figure 3. Monthly Paid Index of Big Pelagic Fishers, 2013.

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

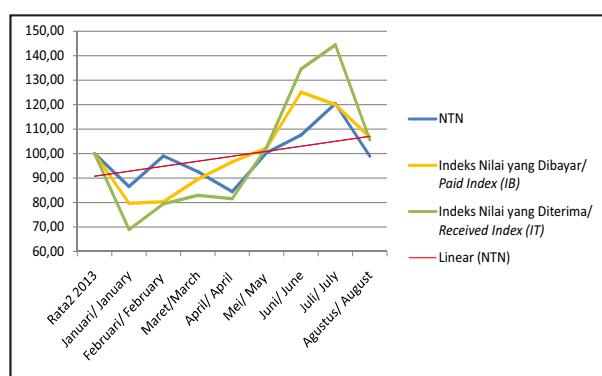
Tabel 2. Dinamika Harga Rata-rata Ikan pada Tingkat Produsen, 2013.

Table 2. Dynamic of Producer Average Fish Price, 2013.

Bulan / Month	Kota Bitung (Rp) / Bitung City (IDR)	Kota Padang (Rp) / Padang City (IDR)	Kota Malang / Malang City	Gabungan (Rp) / Combination
Januari / January	35,145	26,038	22,500	26,783
Februari / February	33,932	26,635	22,000	26,775
Maret / March	31,495	27,698	13,555	25,249
April / April	33,192	29,295	15,667	26,935
Mei / May	32,504	24,560	19,636	24,821
Juni / June	33,877	25,528	20,437	25,824
Juli / July	33,857	28,413	22,593	27,899
Agustus / August	27,729	28,130	20,780	26,091

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

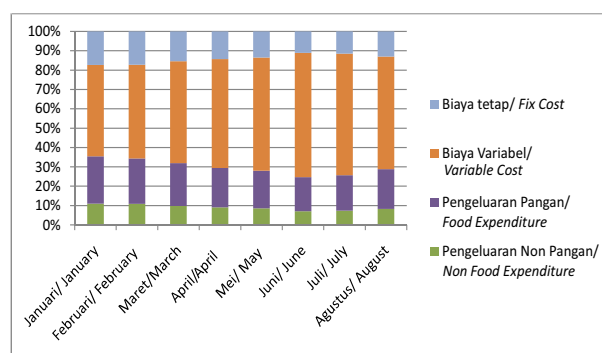
kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran biaya produksi khususnya yang terkait dengan pengeluaran operasional kapal. Terjadi beban pengeluaran yang lebih besar terhadap biaya produksi bila dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga. Bila dilihat dari proporsi pengeluaran responden, diketahui pula bahwa pengeluaran terbesar ternyata adalah untuk biaya produksi. Proporsi tersebut semakin besar pada bulan Mei, Juni, Juli seiring dengan semakin intensifnya usaha penangkapan ikan pada bulan-bulan tersebut (Gambar 4) .



Gambar 4. Dinamika Bulanan Proporsi Pengeluaran Nelayan Pelagis Besar, 2013.

Figure 4. Monthly Expenditure Proportion of Big Pelagic Fishers, 2013.

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)



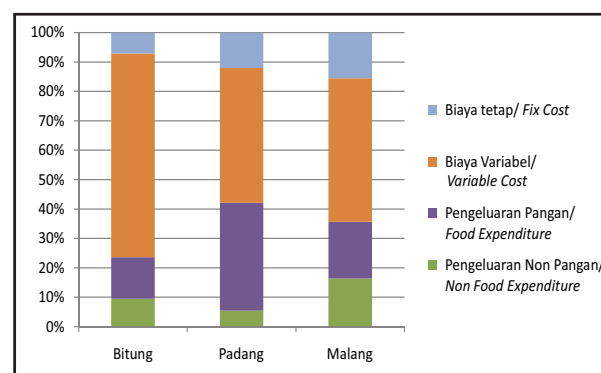
Gambar 5. Dinamika Bulanan Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Struktur Biaya Nelayan Pelagis Besar, 2013.

Figure 5. Monthly Expenditure Proportion Based on Cost Structure of Big Pelagic Fishers, 2013.

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Berdasarkan Gambar 5 juga diketahui bahwa secara keseluruhan pengeluaran usaha memiliki proporsi yang lebih besar (71%) dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga (29%). Atas dasar tersebut kenaikan biaya pada komponen biaya produksi yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel akan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap indeks nilai yang dibayar oleh nelayan. Bila dilihat pada masing-masing lokasi, rata-rata proporsi pengeluaran nelayan perbulan cukup bervariasi.

Pada lokasi Bitung proporsi biaya produksi (biaya tetap dan biaya variabel) mencapai 76,4 % dan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Sementara pada lokasi Padang dan Malang secara berturut-turut adalah 36,7 % dan 64,4%. Proporsi pengeluaran rumah tangga terbesar terlihat pada lokasi Padang khususnya untuk pengeluaran pangan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat Kota Padang yang cenderung konsumtif untuk pengeluaran pangan. Misalnya konsumsi daging yang jauh diatas rata-rata nasional. Berdasarkan Data Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang (2007) konsumsi daging di Kota Padang mencapai 11,37 Kg/Kapita/Hari, sedangkan rata-rata nasional konsumsi daging pada tahun 2014 hanya sebesar 4,38 Kg/Kapita/Hari (Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2007 – 2013 dalam Deptan, 2014)



Gambar 6. Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Struktur Biaya Menurut Lokasi pada Nelayan Pelagis Besar, 2013.

Figure 6. Expenditure Proportion Based on Cost Structure of Big Pelagic Fishers By Location, 2013.

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

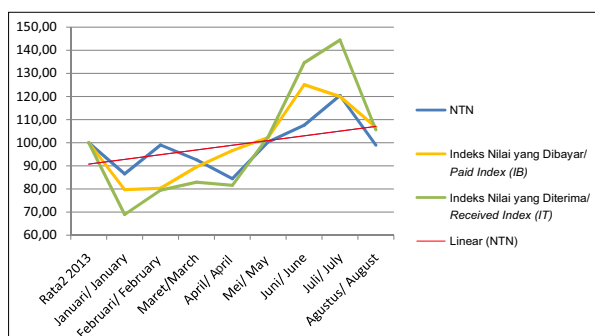
Tabel 3. Pengeluaran Rata-rata Menurut Struktur Biaya pada Nelayan Pelagis Besar, 2013.
Table 3. Average Expenditure of Big Pelagic Fishers Based on Cost Structure, 2013.

Kategori Pengeluaran / Expenditure Category	Kota Bitung (Rp) / Bitung City (IDR)	Kota Padang (Rp) / Padang City (IDR)	Kota Malang/ Malang City (IDR)
Total Pengeluaran (A+B) / Total Expenditure (A+B)	9,854,346	15,850 270	14 513,744
A. Total Pangan Non Pangan (A1+A2) / A. Total Food and Non Food (A1+A2)	2,328,712	4,231 389	5,171,486
A1. Pengeluaran NON PANGAN / A.1 Non Food Expenditure	934,192	547,483	2,372,333
A.2. Pengeluaran PANGAN / A.2. Food Expenditure	1,394,521	3,683,906	2,799,153
B. Pengeluaran BIAYA PRODUKSI (B1+B2)/ B. Cost Production Expenditure (B1+B2)	7,525,633	5,809,440	9,342,258
B.1. Biaya Variabel (Rp/Bulan/Kapal) / B.1. Variable Cost (IDR/Month/Fleet)	6,826,600	4,596,615	7,092,258
B.2. Biaya tetap (Rp/Bulan/Kapal) / B.2. Fix Cost (IDR/Month/Fleet)	699,033	1,212,825	2,250,000

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Nilai Tukar Nelayan Pelagis Besar Tradisional

Dinamika bulanan NTN menunjukkan nilai indeks yang rendah pada periode bulan Januari sampai dengan Mei. Hal ini disebabkan oleh kondisi penangkapan ikan yang sulit dilakukan. Cuaca buruk seperti seperti angin kencang dan gelombang tinggi menjadi alasan berkurangnya usaha penangkapan. Kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh datangnya musim barat yang terjadi sejak bulan November 2012. Peningkatan NTN mulai terjadi semenjak bulan Mei dan mengalami puncak pada bulan Juli. Pada bulan Agustus NTN kembali tertekan karena dua hal yaitu kegiatan penangkapan yang sedikit berkurang dan kenaikan biaya operasional akibat kenaikan BBM pada akhir bulan Juni 2013.

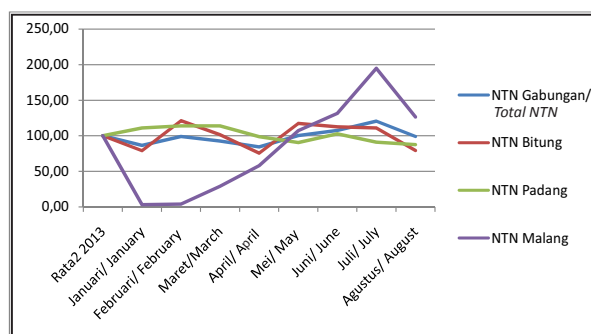


Gambar 7. Dinamika Nilai Tukar Bulanan pada Nelayan Pelagis Besar, 2013.

Figure 7. Monthly Term of Trade of Big Pelagic Fishers, 2013.

Ket : Rata-rata 2013 = 100 / Description: 2013 average = 100
 Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Perbandingan dinamika bulanan indeks NTN antar lokasi menunjukkan kondisi yang sedikit bervariasi antar satu lokasi dengan lokasi lainnya. Lokasi yang cukup ekstrem terjadi di Malang yang mewakili WPP 573. Pada awal tahun hampir tidak ada penangkapan oleh nelayan di Malang akibat banyaknya tenaga kerja atau anak buah kapal (ABK) yang pulang ke kampung halaman semenjak memasuki musim barat. Penangkapan hanya dilakukan oleh tenaga kerja lokal dan tenaga kerja yang tinggal selama masa musim barat. Para ABK mulai kembali dari kampung halaman kegiatan penangkapan sudah mulai dapat dilakukan sejak bulan Mei 2014.



Gambar 8. Dinamika Nilai Tukar Bulanan Menurut Lokasi pada Nelayan Pelagis Besar, 2013.

Figure 8. Monthly Term of Trade Dynamic By Location on Big Pelagic Fishers, 2013.

Ket : Rata-rata 2013 = 100 / Description: 2013 average = 100
 Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Tabel 4. Rata-rata Nilai Tukar pada Nelayan Pelagis Besar, 2013.**Table 4. Exchange Rate Average on Big Pelagic Fishers, 2013.**

Kategori / Category	Jan/ Jan	Feb/ Feb	Mar/ Mar	April/ Apr	Mei/ May	Juni/ June	Juli/ July	Agt/ Aug
Bitung								
a. Indeks yang Diterima/ Received Index	76.49	120.47	96.44	73.28	110.81	124.06	118.36	80.08
b. Indeks yang Dibayar/ Paid Index	96.66	99.43	95.12	96.91	94.31	110.11	106.50	100.96
c. NTN	79.14	121.15	101.39	75.62	117.50	112.67	111.15	79.31
Padang								
a. Indeks yang Diterima/ Received Index	94.23	92.41	100.86	97.05	92.58	117.72	107.81	96.95
b. Indeks yang Dibayar/ Paid Index	85.05	81.27	88.65	98.31	114.79	114.79	118.43	110.80
c. NTN	110.79	113.71	113.77	98.72	102.55	102.55	91.04	87.50
Malang								
a. Indeks yang Diterima/ Received Index	1.82	4.24	25.87	55.39	115.84	185.35	258.90	154.42
b. Indeks yang Dibayar/ Paid Index	54.88	56.87	88.51	95.53	107.92	141.15	133.00	122.14
c. NTN	3.32	2.41	29.23	57.98	107.34	131.32	194.66	126.43
Gabungan/Total								
a. Indeks yang Diterima/ Received Index	68.93	69.93	82.89	81.58	102.70	134.53	144.43	105.50
b. Indeks yang Dibayar/ Paid Index	79.64	80.26	89.51	96.61	102.33	125.05	119.94	106.67
c. NTN	86.54	98.98	92.61	84.45	100.36	107.58	120.42	98.90

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Pada lokasi Padang dan Bitung memiliki kondisi usaha yang relatif sama. Kegiatan penangkapan terus dilakukan meskipun memasuki musim barat. Meskipun demikian secara umum terlihat bahwa kondisi usaha relatif sulit yang terindikasi dari NTN yang dibawah nilai 100. Kondisi usaha mulai mengalami perbaikan pada bulan Mei dan mengalami puncaknya pada bulan Juli. Meski terdapat pola umum, perbandingan antar lokasi menunjukkan bahwa dinamika usaha sangat bervariasi menurut lokasi. Pola migrasi yang dimiliki oleh jenis sumber daya ini mempengaruhi secara langsung kondisi usaha.

Variasi NTN berimplikasi pada naikturunnya kondisi ekonomi dan aktivitas masyarakat nelayan. Hal ini perlu disikapi dengan suatu kebijakan yang tepat agar nelayan khususnya anak buah kapal (ABK) tetap bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sepanjang tahun. Selama ini para ABK lebih banyak menggantungkan nasib hidupnya kepada para juragan kapal yang memberikan pinjaman pada saat-saat musim paceklik ikan. Belum ada program atau jaminan dari pemerintah terhadap masyarakat nelayan disaat musim sulit khususnya ketika musim

barat. Padahal undang-undang dalam pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Salah satu bentuk jaminan sosial yang mendasar adalah jaring pengaman pendapatan disaat masyarakat kehilangan sumber penghidupannya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Dinamika bulanan pada indeks nilai yang diterima dan indeks nilai yang dibayar mempengaruhi kinerja Nilai Tukar Nelayan pelagis besar. Dinamika indeks nilai yang diterima memiliki kaitan langsung dengan sumber daya yang sarat dengan ketidakpastian dalam usaha perikanan tangkap. Informasi awal mengindikasikan sangat berpengaruhnya kondisi musim terhadap aktivitas penangkapan terhadap indeks yang diterima. Selain itu, indeks nilai yang diterima juga dipengaruhi oleh harga yang berlaku. Informasi awal mengindikasikan pergerakan harga relatif bergerak dalam kisaran yang tidak terlalu lebar. Hal ini disebabkan oleh

jenis komoditas yang dihasilkan dimana merupakan komoditas bernilai ekonomis tinggi dan komoditas ekspor. Pada sisi lain indeks yang dibayar sangat dipengaruhi oleh biaya operasional usaha. Biaya operasional ditentukan oleh banyaknya upaya yang dilakukan serta biaya per unit usahanya. Kenaikan komponen biaya operasional akan membuat indeks yang dibayar semakin tinggi. Pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan juga memiliki pengaruh terhadap dinamika NTN meski pengaruhnya tidak sebesar pengeluaran usaha.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tukar nelayan dapat dilakukan dengan dua strategi. Pertama indeks nilai yang diterima, yaitu dengan fokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kuantitas hasil tangkapan dan harga jual ikan. Kuantitas hasil tangkapan pada daerah yang *overfishing* sulit dilakukan yang bila dipaksakan justru akan mempercepat laju degradasi sumber daya. Oleh karena itu pilihan kebijakan sebaiknya tidak berorientasi pada peningkatan produksi. Peningkatan harga ikan merupakan pilihan yang lebih rasional dengan cara memperbaiki kualitas ikan hasil tangkapan dan penetrasi pasar baik domestik maupun internasional. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena memperbaiki kualitas tangkapan tanpa ada perluasan pasar hanya akan membuat kenaikan biaya operasional tanpa diikuti oleh kenaikan harga jual ikan. Sebaliknya penetrasi pasar domestik khususnya di kalangan menengah ke atas dan penetrasi pasar internasional hanya dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas ikan hasil tangkapan yang didukung dengan strategi pemasaran yang sesuai.

Strategi kedua adalah menurunkan indeks nilai yang dibayar, yaitu melalui pengendalian harga-harga input produksi dan harga-harga barang pengeluaran rumah tangga. Subsidi input khususnya BBM merupakan salah satu kebijakan yang dapat diambil meski hal ini mendapat tentangan serius dari para ekonom beraliran liberal. Kenaikan biaya BBM akan berakibat pada semakin tidak kompetitifnya usaha perikanan tangkap pelagis besar tradisional yang berakibat pada peningkatan indeks nilai yang dibayar. Kecenderungan harga BBM yang terus meningkat di tingkat internasional dan sebagai akibat menurunnya nilai mata uang rupiah akan membuat pemerintah cepat atau lambat menaikkan harga BBM dalam negeri.

Pada kasus ini dapat dipastikan indeks nilai yang dibayar akan meningkat bila tidak diikuti dengan kebijakan subsidi. Harga-harga barang kebutuhan rumah tangga juga akan mengikuti kenaikan seiring dengan inflasi yang terjadi. Oleh karena itu subsidi beberapa jenis pengeluaran rumah tangga dapat dilakukan sebagai bentuk kebijakan distiributif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan, beras murah dan dana jaminan sosial (*safety net*) pada saat nelayan kehilangan pendapatan disaat cuaca buruk atau kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, T., S. Saptanto & C. M. Witomo. 2012. Sejarah Dan Perkembangan Nilai Tukar Sebagai Salah Satu Indikator Kesejahteraan Masyarakat *In* Koeshendrajana, S (eds.). Nilai Tukar Perikanan Sebagai Salah Satu Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Balitbang-KP dan IMFISERN. Jakarta
- Armknrecht, P., and M. Silver. 2012. Post-Laspeyres: The Case for a New Formula for Compiling Consumer Price Index. IMF Working Paper (WP/12/105)
- Besweni, D. S Efendi, R. Agustineke, Nugroho, G.D Nugroho, A.W Susilo & Suhadi, 2011. Peta Keragaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Direktorat Sumber daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Bose, S. and A. McIlgorm. 1996. Substainability Among Species in the Japanese Tuna Market: A Cointegration Analysis. Marine Resource Economics, Volume 11, pp. 143–155, USA
- Charles, A, T. 2001. Sustainable Fishery Systems. Blackwell Science Ltd. London
- Dahuri, R. 2008. Restrukturisasi Manajemen Perikanan Tuna. Majalah Samudera—Online. Volume 68. <http://www.majalahsamudra.at.ua/news/2008-12-10-1> (Diakses pada 20 November 2012).
- Departemen Pertanian. 2014. Konsumsi Rata-rata per Kapita Setahun Beberapa Bahan Makanan di Indonesia, 2009-2013. www.deptan.go.id/Indikator/tabe-15b-konsumsi-rata.pdf . Di akses tanggal 02 Maret 2014

- Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang. 2007. Data Statistik Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang Tahun 2007. Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang, Padang.
- Erfan, E. R. 2008. Analisis Kegiatan Operasi Kapal Purse Seine Yang Berbasis Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- HLPE. 2014. Sustainable Fisheries and Aquaculture for Food Security and Nutrition : A Report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. Rome 2014
- Hutabarat, B. 1995. Dinamika Nilai Tukar Petani dan Dampaknya terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Pangan Lainnya. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor
- Jentoft, S. dan A. Eide. 2011. Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-Scale Fisheries. Springer Dordrecht Heidelberg. London
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Lind, D. A., W. G. Marchal dan S. A. Wathen. 2007. Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global. Edisi ke 13 Buku 2. Salemba 4. Jakarta
- Mallawa, A. 2006. Pengelolaan Sumber daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. *Makalah dalam Lokakarya Agenda Penelitian Program Coremap II Kabupaten Selayar*. Selayar: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
- Nazar, S. 2012. Statistik dan Probabilitas. Pusat Pengembangan Bahan ajar Universitas Mercu Buana. Jakarta
- Pranadji, T., N. Ilham, B. Rahmat, H. U. Prayogo, Sugianto, Hendiarto, B. Winarto, H. Daeng dan I. Setiawan. 2001. *Pedoman Umum Nilai Tukar Nelayan*. Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Pusat Data Statistik dan Informasi. 2011. Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2010. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Rachmat, M. 2000. Analisis Nilai Tukar Petani Indonesia [Disertasi]. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Ramadhan, A., dan N. Safitri, 2012. Problematika Indeks Harga dan Alternatif Perhitungan Nilai Tukar Perikanan. Dalam Hikmayani dkk. (Ed). *Nilai Tukar Perikanan Sebagai Salah Satu Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan*: 25 – 38. Jakarta: Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- Silver, M. 2009. An Index Number Formula Problem: The Aggregation of Broadly Comparable Items. IMF Working Paper (WP/09/19).
- Simatupang, P., dan M. Maulana, 2007. *Kaji Ulang Konsep Dan Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2003 – 2006*. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian
- Smith, I. R. 1983. A Research Framework for Tradisional Fisheries. ICLARMS Studies and Reviews No.2.
- Soeharjo, A. 1976. Nilai Tukar Hasil-Hasil Pertanian Selama Pelita I. Departemen Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Ustriyana, I. N. G. 2007. Model dan Pengukuran Nilai Tukar Nelayan (Kasus Kabupaten Karangasem). *Socio – Economic Of Agriculture And Agribusiness* 7 (1)
- Wenno, Y. 2011. Analisis Nilai Tukar Nelayan Rumah Tangga Nelayan Kampung Sowi IV Distrik Manokwari Selatan. *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 7 (2)
- Williams, P. and C. Reid. 2005. Overview Of Tuna Fisheries in The Western And Central Pacific Ocean, Including Economic Conditions-2004. 1st Meeting of the Scientific Committee of the Western and Central Pacific Fisheries Commission WCPFC–SC1. Noumea, New Caledonia
- Yudiarosa, I. 2009. Analisis Ekspor Ikan Tuna Indonesia. *Wacana* 12 (1) : 116 - 134
- Zulham, A., S. Saptanto, B. Wardono, M. Yulisti, Lindawati, R. E. Rahmawati, Muhibuddin, A. N. Hadi, Hanafi, R. I. Marwan, dan N. Mayasari, 2010. Analisis Nilai Tukar Rumah Tangga Perikanan. Laporan Penelitian, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS PENGELOLAAN BERKELANJUTAN PADA BUDIDAYA BANDENG DI PESISIR KABUPATEN KARAWANG

Implementation Study of The Coastal Communities Empowerment Program Based on Sustainable Management of Milkfish Cultured In The Coastal Regency of Karawang

***Dicky Rachmanzah¹, Bambang Widigdo² dan Yusli Wardiatno²**

¹Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana, IPB.

²Dosen pada Departemen MSP, FPIK-IPB

*email: rachmanzahdicky@gmail.com

Diterima 20 November 2013 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai kesesuaian pelaksanaan dan capaian tujuan program pemberdayaan melalui penilaian Indeks Pelaksanaan Program dan Indeks Pencapaian Tujuan; (2) mengidentifikasi pengaruh variabel pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam pedoman pemberdayaan terhadap tujuan program pemberdayaan dalam dimensi ekologis, ekonomi, dan sosial, serta; (3) merumuskan strategi perbaikan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dapat terlaksana dan berlanjut secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indeks Pelaksanaan Program adalah sebesar 2,39 dengan kategori 'Baik'. Indikator yang memerlukan upaya perbaikan yaitu indikator ketepatan waktu penyaluran bantuan; (2) Indeks Pencapaian Tujuan sebesar 2,11 dengan kategori Cukup. Indikator capaian tujuan peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kelembagaan kelompok memerlukan upaya perbaikan guna pencapaian kategori yang lebih baik; (3) Terhadap pencapaian tujuan dalam dimensi ekonomi berupa peningkatan produksi budidaya, variabel ketepatan waktu penyaluran, kecukupan jumlah bantuan, dan aktivitas pendampingan berpengaruh positif, sedangkan variabel kejadian kekeringan berpengaruh negatif; (4) Untuk pencapaian tujuan dalam dimensi sosial, hanya variabel aktivitas pendampingan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kelembagaan kelompok, dan; (5) Keseluruhan variabel pelaksanaan tidak berpengaruh terhadap capaian tujuan dalam dimensi ekologis berupa peningkatan kualitas lingkungan. Dengan memperhatikan hasil analisis, beberapa opsi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: (1) penyesuaian waktu penyaluran bantuan dengan musim tanam untuk meningkatkan efektifitas capaian tujuan dalam dimensi ekonomi; (2) peningkatan dukungan terhadap aktivitas pendampingan oleh tenaga penyuluh, untuk meningkatkan capaian tujuan dalam dimensi sosial, dan; (3) peningkatan capaian tujuan dalam dimensi ekologis, berupa peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberian intensif bagi pembudidaya yang memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

Kata Kunci: pemberdayaan, budidaya, Karawang, bandeng, indeks pelaksanaan program, indeks pencapaian tujuan

ABSTRACT

This study aimed to: (1) assess the suitability of the empowerment program implementation and goals through the introduction of programs implementation Indexes and achievement of goals indexes; (2) identify influences of enforcement variable mentioned in empowerment guidelines against goals of empowerment programs, the objectives in the form of economic, social, and ecology dimensions, and; (3) formulate strategy that needs to be done so the program can continue and be implemented effectively in achieving its goal. Survey was used as the research method. The result of studies have shown that: (1) Program Implementation Index that states performance level of coastal community empowerment program is worth 2.39 with the Good category. Performance indicators that require improvement efforts in order to achieve a better category, i.e. punctuality indicators of aid distribution; (2) Achievement Index that states the level of achievement goals of empowerment program is worth 2.11 with moderate

categories. The whole purpose of indicators that include increased production, increased institutional farmer group, and improving the quality of the environment in the category of quite and require attention and improvement efforts in order to achieve a better category; (3) against the objectives in the form of economic, variable aid delivery timeliness, adequacy of the amount of aid, and mentoring activity has a positive effect, while the incidence of drought has negative impact; (4) against the objectives in the form of social, only mentoring activities has a positive effect, and; (5) all of implementation variable hasn't effect against the objectives in the form of ecology. By considering the results of the analysis, some policy options that need to be done by Ministry of Marine Affairs and Fisheries are: 1) timing adjustment aid to the fish cultivation to increase the effectiveness of objectives in the form of economic; (2) Improved support for mentoring activities, to increase the objectives in the form of social; (3) and improvement of objectives in the form of ecology objectives through the provision of intensive to the farmers who are certified best aquaculture practiced.

Keywords: *empowerment, aquaculture, Karawang, milkfish, program implementation index, achievement index*

PENDAHULUAN

Kondisi pembudidaya yang berada di pesisir Kabupaten Karawang, hingga saat ini masih belum memenuhi harapan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, hasil penelitian Karim (2005) menunjukkan bahwa Indeks Kemiskinan Manusia di Kabupaten Karawang pada tahun 2002 yaitu sebesar 29,8%, dengan ketertinggalan dalam faktor kesehatan masyarakat. Dari aspek sosial, perkembangan kelembagaan ekonomi lebih berorientasi untung rugi dan menguntungkan juragan sebagai pemilik sumberdaya dibandingkan buruh. Begitu pula dari aspek lingkungan, hasil perhitungan menggunakan Indeks Mutu Lingkungan Perairan (IMLP) yang dikembangkan oleh *US-National Sanitation Foundation* menunjukkan bahwa status kualitas perairan di wilayah pesisir utara Karawang berkisar antara 58,71 sampai dengan 67,78 dari skala 1 sampai dengan 100 (Suriadarma, 2011). Hasil perhitungan tersebut jika dibandingkan dengan kriteria mutu lingkungan perairan menurut NSF-WQI (Qtt, 1978) berada dalam kualifikasi sedang mendekati buruk untuk memelihara organisme perairan seperti ikan atau udang. Namun, kondisi tersebut bukan disebabkan kelemahan pembudidaya semata, tetapi terkadang hal itu terjadi di luar kendali mereka. Biasanya, karena kebijakan yang buruk dari institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhatikan mereka (World Bank, 2001 dalam Mulyanto, 2012).

Untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial pembudidaya, serta meningkatkan kualitas lingkungan, pemerintah telah menginisiasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pengelolaan berkelanjutan. Saat ini di

Kabupaten Karawang, telah diimplementasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pengelolaan berkelanjutan, yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan-Perikanan Budidaya (PUMP-PB) sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP), serta melalui program Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau *Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction (Safver)* project.

Selanjutnya, agar program pemberdayaan masyarakat di pesisir Kabupaten Karawang berlanjut dan terlaksana secara efektif dalam mencapai tujuannya, maka diperlukan suatu kajian mengenai program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pengelolaan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menilai kesesuaian pelaksanaan dan capaian tujuan program pemberdayaan melalui penilaian Indeks Pelaksanaan Program dan Indeks Pencapaian Tujuan, 2) mengidentifikasi pengaruh variabel pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam pedoman pemberdayaan terhadap pencapaian tujuan program pemberdayaan dalam dimensi ekonomi, sosial dan ekologis, serta 3) merumuskan strategi perbaikan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dapat terlaksana dan berlanjut secara efektif.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu pada bulan April sampai dengan Juli 2013. Pengambilan data dilakukan di dua kecamatan

pesisir pada Kabupaten Karawang yang telah menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat, yaitu: Kecamatan Tirtajaya dan Kecamatan Cilamaya Wetan.

Metode Penelitian

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan *desk study* dan survei lapangan. *Desk study* dilakukan dengan membuat kompilasi dan sintesa data sekunder (data statistik, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan lainnya). Sedangkan survei lapangan berupa pengumpulan data primer melalui wawancara dengan berpedoman pada kuesioner. Secara umum, tahapan proses analisis dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan variabel dan skala penilaian kesesuaian pelaksanaan dan pencapaian tujuan program

Berdasar pada pedoman program pemberdayaan berupa Pedoman Teknis PUMP-PB (Ditjen Perikanan Budidaya, 2012), dan Pedoman Pemberian Input Produksi kepada Pembudidaya Ikan

Penerima Manfaat Proyek Safver (Ditjen Perikanan Budidaya, 2009), kesesuaian pelaksanaan dinilai berdasarkan enam variabel pelaksanaan, meliputi: lama pengalaman pembudidaya, kejadian kekeringan, aksesibilitas/jarak pembelian benih, ketepatan waktu penyaluran, kecukupan jumlah bantuan, dan aktivitas pendampingan. Sedangkan capaian tujuan dinilai berdasarkan tiga variabel tujuan, yaitu tujuan dalam dimensi ekonomi berupa peningkatan produksi budidaya, dalam dimensi sosial berupa peningkatan kelembagaan (kelas) kelompok, dan dalam dimensi ekologis berupa peningkatan kualitas lingkungan, sebagaimana pada Tabel 1.

2. Penyusunan dan pendistribusian kuesioner

Selanjutnya, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan, disusun kuesioner penelitian. Responden kuesioner penelitian dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu ditetapkan sebanyak 110 pembudidaya bandeng penerima program pemberdayaan (meliputi program PUMP-PB dan Safver) yang berada di Kecamatan Tirtajaya dan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dari jumlah keseluruhan penerima

Tabel 1. Variabel dan Skala Penilaian.
Table 1. Variable and Valuation Scale.

Indikator/Indicator			Skala Penilaian/Grading Scale	
Persyaratan/ Requirements	Variabel/ Variable	Kode/ Code	Interval/ Interval	Skor/ Scores
Variabel Pelaksanaan Program/ Variables of program attainment				
Ketepatan penerima bantuan/ <i>Exactly beneficiaries</i>	Lama pengalaman pembudidaya/ <i>experience time</i>	X1	< 2 tahun/ < 2 years	1
			2-4 tahun/ 2-4 years	2
			> 4 tahun/ > 4 years	3
Kesesuaian lokasi budidaya/ <i>Accuracy of location</i>	Kejadian kekeringan per tahun/ <i>Incidence of drought per year</i>	X ₂	2 kali / 2 times	1
			1 kali / 1 times	2
			0 kali (Terhindar kekeringan / Avoid drought) / 0 times	3
	Aksesibilitas- jarak pembelian benih/ <i>Accessibility-distance to buy</i>	X3	> 20 km	1
			10-20 km	2
			<10 km	3
Ketepatan penyaluran dan pemanfaatan bantuan/ <i>Accuration of distribution and utilization of aid facilities</i>	Ketepatan waktu penyaluran/ <i>Variable aid facilities delivery timeliness</i>	X4	2 bulan sebelum atau setelah musim tanam/ <i>2 months before or after fish cultivation</i>	1
			1 bulan sebelum/setelah musim tanam / 1 months before or after fish cultivation	2
			Sesuai musim tanam/ <i>Accuration of fish cultivation</i>	3

Lanjutan Tabel 1/Continues Table 1

Indikator/Indicator		Skala Penilaian/Grading Scale		
Persyaratan/ Requirements	Variabel/ Variable	Kode/ Code	Interval/ Interval	Skor/ Scores
Variabel Pelaksanaan Program/ Variables of program attainment				
	Kecukupan jumlah bantuan benih/ <i>Adequacy of the amount of aid facilities</i>	X5	dibandingkan jumlah benih yang biasa ditebar / <i>Ratio of juvenile stocked before and after aid facilities:</i> < 90% 90-110% >110%	1 2 3
Efektivitas pendampingan/ <i>Efectivity of mentoring</i>	Aktivitas pendampingan/ <i>Mentoring activity</i>	X6	Mencakup 1 diantara 3 kegiatan pendampingan**/ <i>Including 1 of 3 mentoring activities</i> Mencakup 2 diantara 3 kegiatan/ <i>Including 2 of 3 mentoring activities</i> Mencakup keseluruhan 3 kegiatan/ <i>Including 3 mentoring activities</i>	1 2 3
Variabel Pencapaian Tujuan / Variables of goal attainment				
Pencapaian tujuan dalam dimensi ekonomi/ <i>The goal in economic dimation</i>	Peningkatan produksi budidaya*** / <i>Increasing of Aquaculture production</i>	Y ₁	Prosentase terhadap jumlah produksi sebelum pelaksanaan program/ <i>Percentation of aquaculture production before and after implementation program</i> Menurun (< 90%)/ <i>Decreasing</i> Tetap (90%-110%) / <i>Fixed</i> Meningkat (>110%) / <i>Increasing</i>	1 2 3
Pencapaian tujuan dalam dimensi sosial/ <i>The goal in social dimation</i>	Peningkatan kelembagaan (kelas) kelompok ****/ <i>Increasing of institucional farmer group</i>	Y ₂	Pembandingan kelembagaan (kelas) kelompok sebelum dan sesudah pelaksanaan program/ <i>Ratio of grade farmer group before and after program implementation</i> Menurun / <i>Decreasing</i> Tetap / <i>Fixed</i>	1 2

Keterangan/Notes:

* Bulan September-Oktober/Month September-October

** Cakupan 3 kegiatan pendampingan: 1) Pendampingan pembuatan proposal, 2) Pelatihan teknis budidaya, 3) pembinaan manajemen usaha / *Three mentoring activities: 1) Mentoring of proposal making, 2) Cultivation technical training, 3) Business management training.**** Dihitung dari rata-rata produksi per siklus tanam pada 2-4 siklus setelah pelaksanaan program/ *Calculated from the average of production on 2-4 cycle after implementing program***** Didasarkan atas pengakuan pemerintah terhadap kemampuan kelompok (kelas pemula, madya, atau utama) / *Based on government recognition of the group ability****** Didasarkan atas perolehan sertifikat Cara Berbudidaya Ikan yang baik (CBIB) dari KKP/ *Based on CBIB certificates from Ministry of Marine Affairs and Fisheries*

bantuan sebanyak 313 orang, sebagaimana pada Lampiran 1. Penentuan jumlah sampel ini telah memenuhi ukuran keterwakilan, dikarenakan mengacu pada rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 90% atau taraf signifikansi 0,10, jumlah sampel yang dipersyaratkan adalah minimal 76 orang, sebagaimana pada Lampiran 2.

3. Penilaian atas kesesuaian pelaksanaan dan capaian tujuan program pemberdayaan

Berdasarkan hasil kuesioner dilakukan pengelompokan atas masing-masing variabel pelaksanaan dan variabel tujuan berdasarkan interval skala penilaian yang ada pada Tabel 1, sehingga didapat total nilai skor dari masing-

masing variabel. Capaian setiap variabel diperoleh dengan membagi total nilai skor dengan jumlah responden. Selanjutnya, nilai capaian keseluruhan variabel, dirata-ratakan untuk menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan program berdasarkan nilai Indeks Pelaksanaan Program, dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program pemberdayaan berdasarkan Indeks Pencapaian Tujuan, atau dihitung berdasarkan rumus: $\text{Indeks} = \Sigma \text{capaian variabel} / \text{jumlah variabel}$. Nilai variabel dan indeks dengan selang nilai 1-3, terbagi atas lima kategori, yaitu: sangat buruk, buruk, cukup, baik dan sangat baik, sebagaimana terdapat pada Tabel 2.

4. Pengidentifikasian pengaruh variabel pelaksanaan terhadap capaian tujuan program

Analisis ini mengidentifikasi pengaruh enam variabel pelaksanaan program pemberdayaan yang meliputi: lama pengalaman pembudidaya (X_1), kejadian kekeringan (X_2), aksesibilitas/jarak pembelian benih (X_3), ketepatan waktu penyaluran (X_4), kecukupan jumlah bantuan (X_5), dan aktivitas pendampingan (X_6) terhadap variabel tujuan dalam dimensi ekonomi (Y_1), dimensi sosial (Y_2), dan dimensi ekologis (Y_3).

a. Terhadap tujuan dalam dimensi ekonomi berupa peningkatan produksi budidaya (Y_1)

Variabel X dan variabel Y_1 berbentuk skala rasio, sehingga statistik parametrik analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) merupakan teknik analisis yang tepat digunakan (Latan & Temalagi, 2013), setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi regresi linear berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk menghindari munculnya bias dan kesalahan spesifikasi model regresi yang digunakan. Hasil analisis atas pengujian asumsi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah baik, yaitu terlihat dari data terdistribusi normal secara multivariat, tidak terdapat *problem multikolonieritas*, dan tidak terjadi permasalahan

heteroskedastisitas.

b. Terhadap tujuan dalam dimensi sosial berupa peningkatan kelembagaan kelompok (Y_2)

Tujuan dalam dimensi sosial berupa penguatan kelembagaan kelompok, dinilai berdasarkan pengakuan kelas kelompok, yang diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: Kelas Pemula, Kelas Madya, dan Kelas Utama sesuai kriteria pada Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan (KKP, 2012). Data dari variabel Y_2 dikelompokkan menjadi data dikotomi, yaitu terdapat peningkatan kelembagaan kelompok dan tidak terdapat peningkatan kelembagaan kelompok. Sesuai bentuk data tersebut, maka analisis yang tepat digunakan yaitu analisis regresi logistik (Agung, 2002 dalam Baroroh, 2013) dengan sebelumnya dilakukan pengujian asumsi kebaikan model (*test goodness of fit*). Pengujian kebaikan model menggunakan metode Pearson Chi Square (Iriawan & Astuti, 2006 dalam Baroroh, 2013) atas model dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, dapat diyakini bahwa model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini telah cukup mampu menjelaskan data/sudah memenuhi asumsi kelayakan model.

c. Terhadap tujuan dalam dimensi ekologis berupa peningkatan kualitas lingkungan (Y_3)

Pengukuran variabel peningkatan kualitas lingkungan didasarkan atas jumlah sertifikasi atas penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) oleh pembudidaya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP, 2007). Kebijakan penerapan CBIB, antara lain mencakup: (1) pembangunan tambak pada lokasi yang terhindar dari kemungkinan terjadinya pencemaran, jauh dari permukiman, industri, serta lahan pertanian dan peternakan; (2) kualitas air sumber sesuai dengan peruntukannya, tidak mengandung residu logam berat, pestisida,

Tabel 2. Nilai dan Kategori Capaian Variabel/Indeks.

Table 2. Score and Category of The Result on Variable/Index.

Nilai Variabel/Indeks/ Scoring Variabel/Index	Kategori / Categories	Warna Indikator / The Colours of Indicator
1.00 - < 1.40	Sangat Buruk / Worst	
1.40 - < 1.80	Buruk / Poor	
1.80 - < 2.20	Cukup / Moderate	
2.20 - < 2.60	Baik / Good	
2.60 - 3.00	Sangat Baik / Excellent	

organisme patogen, cemaran dan bahan kimia lainnya; (3) saluran pasok dan saluran buang dibuat terpisah, tidak melalui daerah pemukiman, daerah industri, serta lahan pertanian dan peternakan; (4) keberadaan fasilitas MCK, toilet dan *septic tank* yang terletak minimal 10 m dari petak pemeliharaan dan saluran; (5) tidak menggunakan pupuk, probiotik, pestisida, desinfektan, dan bahan kimia yang terlarang; (6) bebas hama/patogen dan binatang peliharaan serta melakukan tindakan isolasi terhadap ikan yang terserang penyakit, dan (7) penggunaan pakan ikan tidak mengandung zat beracun, bahan pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan ikan dan/atau manusia, atau yang mengakibatkan penurunan produksi, atau menyebabkan pencemaran/ kerusakan lingkungan.

5. Perumusan strategi perbaikan bagi pelaksanaan dan keberlanjutan program

Berdasarkan atas hasil kesesuaian pelaksanaan dan capaian tujuan serta pengidentifikasian pengaruh variabel pelaksanaan terhadap capaian tujuan program pemberdayaan, dirumuskan strategi perbaikan bagi pelaksanaan dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian atas kesesuaian pelaksanaan program pemberdayaan

Hasil penilaian, sebagaimana pada Tabel 3 menunjukkan bahwa capaian variabel pelaksanaan program pemberdayaan pada Kabupaten Karawang berada pada kisaran nilai 1,51 (kategori buruk) hingga 2,83 (kategori sangat baik).

Sebagian besar (93 responden) pembudidaya penerima program memiliki pengalaman budidaya yang sangat baik, yaitu dengan lama pengalaman lebih dari empat tahun. Hal ini dikarenakan usaha budidaya bandeng yang mereka lakukan merupakan usaha keluarga yang telah dilakukan secara turun temurun. Selain itu, hal lain yang sangat baik dalam pelaksanaan yaitu adanya kesesuaian lokasi budidaya, yang ditunjukkan dengan kondisi tambak dari sebagian besar pembudidaya (93 responden) yang terhindar dari kekeringan. Hal ini dikarenakan kecukupan sumber air payau yang berasal dari pertemuan antara air tawar dari hulu Sungai Citarum dan air asin dari hilir Pantai Utara Jawa.

Tabel 3. Capaian Variabel Pelaksanaan.

Table 3. Achievement of Implementation Variables.

Variabel Pelaksanaan/ Implementation Variable	Σ Responden Berdasarkan Skor/ Total Respondent Based on Score			Total Skor/ Total Score	Jumlah Responden/ Total Respondent	Capaian Variabel/ The Result	Kategori/ Category
	Skor 1/ Score 1	Skor 2/ Score 2	Skor 3/ Score 3				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)	(7)**	(8)
Lama Pengalaman pembudidaya/ Experience time	2	15	93	311	110	2.83	Sangat baik/ Excelent
Kejadian kekeringan/ Incidence of drought per year	5	12	93	308	110	2.80	Sangat baik/ Excelent
Aksesibilitas-jarak pembelian benih/ Accessibility-distance to buy	5	90	15	230	110	2.09	Cukup/ Moderate
Ketepatan waktu penyaluran/ Variable aid facilities delivery timeliness	70	24	16	166	110	1.51	Buruk/ Poor
Kecukupan jumlah bantuan benih/ Adequacy of the amount of aid facilities	18	10	82	284	110	2.58	Baik/ Good
Aktivitas pendampingan/ Mentoring activity	9	35	66	277	110	2.52	Baik/ Good

Sumber: Data primer, diolah (2013) / Source: Primary data, processed (2013)

Keterangan/Notes:

* (5) = 1 x (2) + 2 x (3) + 3 x (4)

** (7) = (5)/(6)

Kecukupan jumlah bantuan juga berada dalam kategori baik. Meskipun program pemberdayaan Safver memberikan bantuan benih bandeng kepada masing-masing pembudidaya dalam jumlah yang sama tanpa memperhatikan luasan lahan dan padat tebar sebelumnya, namun jumlah benih bantuan ternyata masih melebihi dibandingkan dengan jumlah benih yang biasa ditebar pembudidaya sebelumnya. Aktivitas pendampingan oleh tenaga pendamping juga sudah memadai, yaitu 66 responden menyatakan pernah menerima aktivitas pendampingan melalui bantuan pembuatan proposal, pelatihan teknis budidaya, dan pembinaan manajemen usaha, walaupun masih terdapat 35 responden yang hanya menerima 2 kegiatan pendampingan, dan 9 responden yang hanya menerima 1 kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan yang seringkali tidak direalisasikan kepada seluruh responden penerima bantuan, yaitu pemberian pelatihan teknis dan pembinaan manajemen usaha.

Variabel yang berada dalam kondisi buruk dan memerlukan upaya perbaikan, yaitu ketepatan waktu penyaluran bantuan. Sebanyak 70 responden menerima bantuan tersebut pada bulan yang tidak tepat yaitu bulan Desember, atau dua bulan setelah bulan September sampai dengan Oktober yang merupakan bulan saat pembudidaya biasa memulai musim tanam bandeng. Permasalahan ini disebabkan waktu penyaluran bantuan oleh program pemberdayaan belum memperhatikan kesesuaian musim tanam, namun lebih dipengaruhi oleh penyelesaian tahapan program, mulai dari pengusulan dan penetapan kelompok penerima bantuan hingga proses pencairan dana bantuan, yang seringkali terselesaikan pada akhir tahun.

Selanjutnya, tingkat kesesuaian pelaksanaan program ditunjukkan berdasarkan nilai Indeks Pelaksanaan Program (IPP) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPP = \sum \text{capaian variabel} / \text{jumlah variabel}$$

$$IPP = (2,83 + 2,80 + 2,09 + 1,51 + 2,58 + 2,52) / 6$$

$$IPP = 2,39$$

Berdasar perhitungan di atas, diperoleh hasil indeks sebesar 2,39 atau berada pada kisaran nilai 2,20 sampai dengan 2,60. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Karawang memiliki tingkat kesesuaian yang baik, jika dikaitkan dengan pedoman yang ada. Variabel dengan kategori buruk, yang memerlukan upaya perbaikan guna

pencapaian kategori yang lebih baik, yaitu variabel ketepatan waktu penyaluran bantuan.

Penilaian atas capaian tujuan program pemberdayaan

Hasil penilaian capaian tujuan program sebagaimana pada Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel tujuan berada pada kategori cukup, dengan capaian terendah hingga tertinggi yaitu: variabel peningkatan kualitas lingkungan (nilai capaian 2,00), peningkatan kelembagaan kelompok (nilai capaian 2,15), dan peningkatan produksi (nilai capaian 2,18) (Tabel 4).

Dalam dimensi ekonomi, jika dibandingkan rata-rata produksi pembudidaya sebelum dan setelah pelaksanaan program, 30 responden (27,27%) mengalami penurunan, 30 responden tetap, dan 50 responden lainnya mengalami peningkatan produksi. Penurunan total produksi antara lain disebabkan oleh ketidaktepatan waktu penyaluran bantuan, sehingga pembudidaya terpaksa menanam bandeng pada bulan dimana curah hujan sangat tinggi.

Tujuan dalam dimensi sosial berupa penguatan kelembagaan kelompok, dinilai berdasarkan pengakuan kelas kelompok. Setelah pelaksanaan program, 84,54% kelompok masih mendapat pengakuan kelas yang sama dengan sebelum pelaksanaan program, yaitu kelas pemula yang merupakan kelas terbawah dan terendah dari sisi kemampuan kelompok. Hal ini disebabkan aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping belum mencakup kegiatan fasilitasi dinamika kelompok, baik melalui pertemuan, diskusi, dan musyawarah antar anggota kelompok.

Analisis terkait jumlah pembudidaya yang memiliki sertifikat Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB), menunjukkan bahwa jumlah pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemberdayaan adalah tetap, yaitu 0, atau sebelum dan sesudah pelaksanaan program tidak terdapat satupun pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB. Keengganan pembudidaya memenuhi persyaratan untuk memiliki sertifikat tersebut dikarenakan tidak adanya intensif dari pemerintah bagi pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB, baik berupa peningkatan harga jual bandeng, kepastian pemasaran, maupun subsidi harga pengadaan sarana produksi perikanan.

Selanjutnya, sebagai cara untuk menentukan

Tabel 4. Capaian Masing-Masing Variabel Tujuan.
Table 4. Achievement of Each Objective's Variables.

Variabel Tujuan/ Goal Variables	Σ Responden Berdasarkan Skor / Σ Respondent Based on Score			Total Skor/ Total Score	Jumlah Responden/ Total Respondent	Capaian Variabel/ The Result	Kategori/ Category
	Skor 1/ Score 1	Skor 2/ Score 2	Skor 3/ Score 3				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)	(7)**	(8)
Peningkatan produksi/ <i>Increasing of aquaculture production</i>	30	30	50	240	110	2.18	Cukup/ Moderate
Peningkatan kelembagaan kelompok/ <i>Increasing of institutional farmer group</i>	0	93	17	237	110	2.15	Cukup/ Moderate
Peningkatan kualitas lingkungan/ <i>Increasing of environment quality</i>	0	110	0	220	110	2.00	Cukup/ Moderate

Sumber: Data primer, diolah (2013) / Source: Primary data, processed (2013)

Keterangan/Notes:

* (5) = $1 \times (2) + 2 \times (3) + 3 \times (4)$

** (7) = $(5)/(6)$

tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program, dilakukan penilaian Indeks Pencapaian Tujuan (IPT) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPT} = \Sigma \text{capaian variabel} / \text{jumlah variabel}$$

$$\text{IPT} = (2,18 + 2,15 + 2,00) / 3$$

$$\text{IPT} = 2,11$$

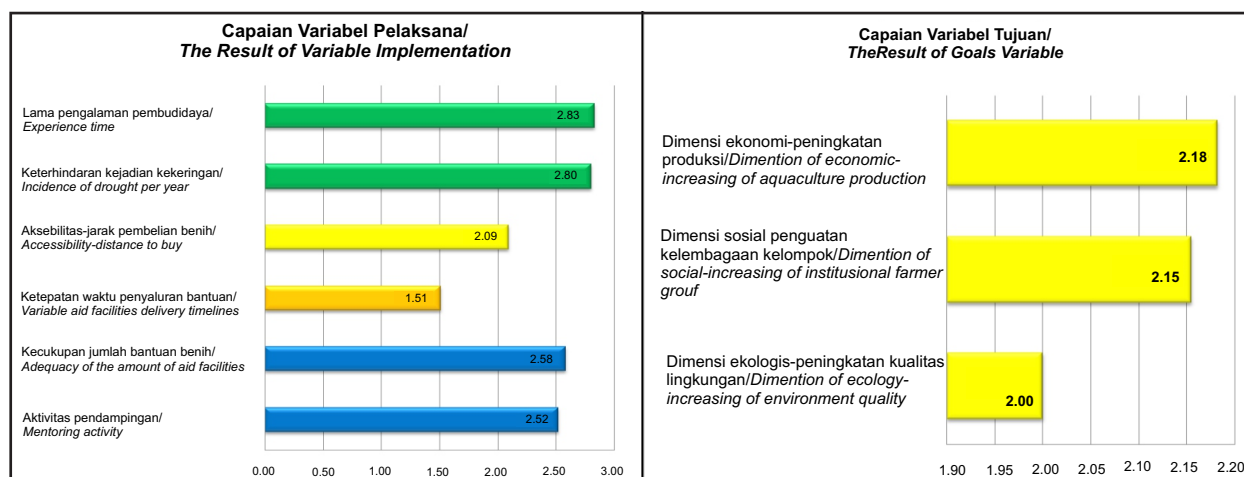
Nilai Indeks Pencapaian Tujuan sebesar 2,11 menunjukkan bahwa tingkatan keberhasilan pencapaian tujuan program berada pada kategori cukup. Perbedaan capaian kategori antara Indeks Pelaksanaan Program (kategori baik) dengan Indeks Pencapaian Tujuan (kategori cukup), menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang baik sesuai pedoman pemberdayaan belum mampu secara selaras meningkatkan capaian tujuan program pada kategori baik. Hal tersebut diduga disebabkan oleh belum seluruh intervensi kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang efektif diatur dalam pedoman pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu: penggunaan teknologi budidaya yang sesuai, yaitu dengan pengintegrasian antara pengetahuan ekologi tradisional pembudidaya dengan penelitian sains dan pengetahuan

manajemen modern (Butler *et al.*, 2012), penyediaan fasilitas kredit mudah dengan menghubungkan pembudidaya dengan lembaga-lembaga institusional (Sathiadhas *et al.*, 2014), dan kurangnya alokasi bantuan dana untuk kegiatan pengembalian kesuburan tanah (IFAD, 2001). Gambar 1 dimaksudkan untuk memperjelas perbandingan atas capaian setiap variabel pelaksanaan dan variabel tujuan (Gambar 1).

Pengidentifikasian Pengaruh Variabel Pelaksanaan Terhadap Capaian Tujuan Program

a. Terhadap tujuan dalam dimensi ekonomi berupa peningkatan produksi budidaya (Y_1)

Hasil analisis regresi linear berganda sebagaimana pada Tabel 6 menunjukkan bahwa lama pengalaman pembudidaya dan aksesibilitas/jarak pembelian benih tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan peningkatan produksi, sehingga peningkatan lama pengalaman pembudidaya dan aksesibilitas pembelian benih bukan merupakan kegiatan efektif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi budidaya. Tidak berpengaruhnya variabel pengalaman



Gambar 1. Capaian Variabel Pelaksanaan dan Tujuan.
Figure 1. Achievement of Implementation and Objective Variable.

pembudidaya terhadap pencapaian tujuan peningkatan produksi disebabkan teknologi budidaya bandeng secara tradisional yang dilakukan oleh pembudidaya penerima bantuan di pesisir Kabupaten Karawang merupakan teknologi sederhana yang mampu digeluti oleh masyarakat pesisir bahkan oleh pembudidaya pemula. Berdasarkan konfirmasi lebih lanjut terhadap pembudidaya bandeng yang memiliki pengalaman budidaya yang cukup lama, menunjukkan bahwa pembudidaya bandeng umumnya tidak memiliki sifat kritis terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan atau peningkatan hasil produksi budidaya, sehingga lama pengalaman pembudidaya tidak secara selaras meningkatkan pengetahuan mereka tentang hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan produksi budidaya.

Aksesibilitas / jarak pembelian benih juga tidak berpengaruh secara signifikan karena Unit Pembenihan Rakyat (UPR) selaku produsen benih telah memahami bagaimana mengemas benih, sehingga tidak terjadi tingkat kematian benih yang tinggi disebabkan jauhnya jarak pengiriman. Selain itu, terhadap perbedaan salinitas antara *hatchery* tempat nener dibeli dengan tambak budidaya, pembudidaya juga telah melaksanakan proses adaptasi (aklimatisasi) terhadap benih yang dibeli dengan cara meletakkan dan mengapung-apungkan wadah benih yang berisi nener pada permukaan air tambak dan memasukkan air tambak sedikit demi sedikit, sehingga memudahkan nener beradaptasi dengan perubahan kualitas air, mencegah benih

stres dan mampu mempertahankan tingkat daya tahan hidup benih.

Berdasarkan hasil analisis, variabel kejadian kekeringan mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai t_{hitung} negatif yang berarti variabel kejadian kekeringan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tujuan peningkatan produksi. Semakin tinggi intensitas kejadian kekeringan, maka akan berpengaruh terhadap penurunan hasil produksi pembudidaya bandeng di pesisir Kabupaten Karawang. Hal yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan peningkatan produksi budidaya adalah ketepatan waktu penyaluran, kecukupan jumlah bantuan benih, dan aktivitas pendampingan. Semakin baik waktu penyaluran bantuan, kecukupan jumlah bantuan atau aktivitas pendampingan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi pembudidaya bandeng di pesisir Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, juga diperoleh nilai koefisien determinasi (R -Square), yaitu sebesar 0,423. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pelaksanaan berupa: lama pengalaman pembudidaya, kejadian kekeringan, aksesibilitas/jarak pembelian benih, ketepatan waktu penyaluran, kecukupan jumlah bantuan, dan aktivitas pendampingan terhadap pencapaian tujuan dalam dimensi ekonomi berupa peningkatan produksi budidaya adalah sebesar 42,3% dan sisanya sebesar 57,73% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Hasil ini menjawab permasalahan tentang adanya perbedaan capaian kategori antara Indeks Pelaksanaan Program (kategori baik) dengan Indeks Pencapaian Tujuan (kategori cukup), yang diduga disebabkan belum keseluruhan variabel pelaksanaan yang berpengaruh terhadap capaian tujuan dipersyaratkan atau diatur dalam pedoman pemberdayaan masyarakat, sehingga mengakibatkan pelaksanaan program yang baik sesuai pedoman pemberdayaan belum mampu secara selaras meningkatkan capaian tujuan program pada kategori baik. Berikut adalah model regresi yang dihasilkan dalam analisis ini adalah:

$$Y_1 = -8,909 - 23,374 X_2 + 17,325 X_4 + 0,356 X_5 + 15,380 X_6$$

dimana:

Y_1 = Peningkatan produksi budidaya/ *Increased aquaculture production*

X_2 = Kejadian kekeringan/ *The incidence of*

drought

X_4 = Ketepatan waktu penyaluran/ *Timeliness of delivery*

X_5 = Kecukupan jumlah bantuan benih/ *The adequacy of the amount of seed aid*

X_6 = Aktivitas pendampingan/ *Mentoring activities*

Model ini menunjukkan bahwa setiap kejadian kekeringan akan mengurangi produksi budidaya sebesar 23,374%, ketepatan waktu penyaluran akan meningkatkan produksi budidaya sebesar 17,325%, peningkatan prosentase kecukupan jumlah bantuan sebesar 1% akan meningkatkan produksi budidaya sebesar 0,356%, dan setiap penambahan satu lingkup kegiatan pendampingan akan meningkatkan produksi budidaya sebesar 15,380%.

b. Terhadap tujuan dalam dimensi sosial berupa peningkatan kelembagaan kelompok (Y_2)

Berdasarkan hasil analisis regresi

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi.

Table 5. Result of Regression Analysis.

Persyaratan/ Requirement	Variabel/ Variable	Uji Signifikansi t (uji t)/ Significant Test (t test)		
		Nilai t Hitung/ t Score	Nilai Signifikansi/ Significant Score	Kesimpulan/ Conclusion
Ketepatan penerima bantuan/ <i>Exactly beneficiaries</i>	X_1 Lama Pengalaman pembudidaya/ <i>Experience time</i>	0.793	0.430	Tidak berpengaruh/ <i>Without influence</i>
Kesesuaian lokasi Budidaya/ <i>Accuracy of location</i>	X_2 Kejadian kekeringan/ <i>Incidence of drought</i>	-2.365	0.020	Berpengaruh negatif dan signifikan/ <i>Negative influence and significant result</i>
	X_3 Aksesibilitas-jarak pembelian benih/ <i>Accessibility-distance to buy</i>	0.332	0.741	Tidak berpengaruh/ <i>Without influence</i>
Ketepatan penyaluran dan pemanfaatan bantuan/ <i>Accuration of distribution and utilization of aid facilities</i>	X_4 Ketepatan waktu penyaluran / <i>Variable aid facilities delivery timeliness</i>	3.064	0.003	Berpengaruh positif dan signifikan/ <i>Positive influence and significant result</i>
	X_5 Kecukupan jumlah bantuan benih/ <i>Adequacy of the amount of aid facilities</i>	4.187	0.000	Berpengaruh positif dan signifikan/ <i>Positive influence and significant result</i>
Efektivitas Pendampingan/ <i>Mentoring activity</i>	X_6 Aktivitas pendampingan/ <i>Mentoring activity</i>	2.416	0.017	Berpengaruh positif dan signifikan/ <i>Positive influence and significant result</i>

logistik, sebagaimana pada Tabel 7, lima variabel pelaksanaan berupa lama pengalaman pembudidaya, kejadian kekeringan, aksesibilitas/jarak pembelian benih, ketepatan waktu penyaluran, dan kecukupan jumlah bantuan, tidak berpengaruh terhadap capaian tujuan dalam dimensi sosial berupa peningkatan kelembagaan kelompok. Hal ini dapat dipahami karena peningkatan kelembagaan kelompok lebih banyak ditentukan oleh kesamaan pengertian dan gerak dari para pembudidaya sebagai anggota kelompok, sehingga persyaratan berupa lama pengalaman, intensitas kejadian kekeringan, jarak pembelian benih, ketepatan waktu penyaluran dan kecukupan jumlah bantuan yang diatur dalam pedoman pelaksanaan program bukanlah merupakan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kelembagaan kelompok. Dari keseluruhan variabel pelaksanaan, hanya variabel aktivitas pendampingan yang berhubungan positif dengan peningkatan kelembagaan kelompok. Nilai *Odds Ratio* dari variabel aktivitas pendampingan sebesar 5,584 menunjukkan bahwa peluang penambahan jenis aktivitas pendampingan terhadap peningkatan kelembagaan kelompok lebih besar 5,584 kali dibandingkan jika tidak dilakukannya penambahan jenis aktivitas pendampingan.

- c. Terhadap tujuan dalam dimensi ekologis berupa peningkatan kualitas lingkungan (Y3)

Memperhatikan capaian variabel sebagaimana dinyatakan pada Tabel 5, terlihat bahwa setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai sertifikasi, diketahui bahwa jumlah pembudidaya di lokasi penelitian yang memiliki sertifikat CBIB sebelum dan sesudah pelaksanaan program

pemberdayaan adalah tetap, yaitu 0, atau tidak terdapat peningkatan jumlah pembudidaya yang memperoleh sertifikat CBIB. Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan program pemberdayaan, dengan enam variabel pelaksanaan didalamnya, seluruhnya tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Hasil ini mengandung pengertian bahwa program pemberdayaan dengan persyaratan dan pelaksanaan yang ada saat ini belum menyentuh kepentingan peningkatan kualitas lingkungan, atau terjadi ketimpangan dalam pencapaian tujuan dalam dimensi ekologis. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan konsep pengelolaan berkelanjutan, yang menyebutkan bahwa aspek berkelanjutan harus meliputi aspek ekologis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Mengatasi permasalahan ini diperlukan perubahan lingkup pelaksanaan kegiatan pemberdayaan atau bahkan program/kegiatan baru untuk mendukung pencapaian tujuan peningkatan kualitas lingkungan.

Perumusan Strategi Perbaikan Bagi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program

Untuk dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan pembudidaya di wilayah pesisir, dirumuskan strategi perbaikan bagi pelaksanaan dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir berdasarkan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui pada pembahasan. Beberapa hal perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong capaian tujuan program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pengelolaan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, setidaknya terdapat tiga opsi kebijakan yang perlu

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Logistik.
Table 7. Result of Logistic Regression Analysis.

Variabel dalam Persamaan / Variables in The Equation							
	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	
X1	-.026	.048	.296	1	.586	.974	
X2	-18,472	7709,496	.000	1	.998	.000	
X3	-.012	.039	.092	1	.761	.988	
X4	.491	.377	1,692	1	.193	1,633	
Step 1 ^a	X5	.003	.006	.324	1	.569	1,003
	X6	1,720	.759	5,136	1	.023	5,584
Constant	-7,000	2,506	7,799	1	.005	.001	

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6.

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS/ Source: Primary data processed with SPSS

dilakukan, yaitu: (1) penyesuaian waktu penyaluran bantuan dengan musim tanam untuk meningkatkan efektifitas capaian tujuan dalam dimensi ekonomi, berupa peningkatan produksi; (2) peningkatan dukungan terhadap aktivitas pendampingan oleh tenaga penyuluh, untuk meningkatkan capaian tujuan dalam dimensi sosial, berupa peningkatan kelembagaan kelompok, dan (3) peningkatan capaian tujuan dalam dimensi ekologis melalui pemberian intensif bagi pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB.

a. Penyesuaian Waktu Penyaluran Bantuan Dengan Musim Tanam

Berdasarkan penilaian atas kesesuaian pelaksanaan program pemberdayaan sebagaimana terdapat pada bahasan sebelumnya, variabel ketepatan waktu penyaluran bantuan teridentifikasi di lapangan sebagai variabel yang memperoleh kategori paling buruk. Hal ini membawa implikasi perlunya upaya perbaikan guna pencapaian kategori yang lebih baik atas variabel ketepatan waktu penyaluran. Terlebih jika melihat hasil pengidentifikasian pengaruh variabel pelaksanaan terhadap capaian tujuan dalam dimensi ekonomi, ternyata variabel ketepatan waktu penyaluran bantuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian tujuan peningkatan produksi, sehingga ketepatan waktu penyaluran bantuan merupakan hal efektif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi budidaya.

Sebagaimana dinyatakan pada Tabel 4, 94 pembudidaya yang berada di lokasi penelitian menerima bantuan tidak sesuai musim tanam, yaitu diantaranya menerima bantuan pada bulan Desember yang merupakan bulan dengan curah hujan yang sangat tinggi, yaitu pada Kecamatan Tirtajaya sebesar 110 mm³, dari rata-rata curah hujan / bulan sebesar 38,33 mm³ (BPS Kabupaten Karawang, 2012^a), dan pada Kecamatan Cilamaya Wetan sebesar 25 mm³ dari rata-rata curah hujan sebesar 20,75 mm³ (BPS Kabupaten Karawang, 2012^b). Terkait hal tersebut, Rusmiyati (2012) dalam publikasinya menyatakan bahwa pada musim hujan, klekap sebagai makanan utama bagi bandeng tumbuh tidak sebanyak pada musim kemarau, dan cenderung mudah lepas dari tanah dasar petakan, mengapung, dan mengelompok di sisi petakan akibat dihembus oleh angin sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh ikan bandeng yang dipelihara. Penurunan kadar garam (salinitas) akibat curah hujan yang terlalu tinggi juga menghalangi pertumbuhan klekap, dan dapat menyebabkan

kerusakan dari klekap bila terjadi perubahan yang mendadak terhadap salinitas air.

Memperhatikan hal ini, perbaikan kebijakan perlu dilakukan dengan menyalurkan bantuan sesuai musim tanam. Proses pengusulan dan penetapan kelompok penerima bantuan yang selama ini memerlukan waktu beberapa bulan, dapat dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun berjalan, proses pencairan bantuan dapat segera dilakukan dengan sesuai musim tanam.

b. Peningkatan Dukungan terhadap Aktivitas Pendampingan oleh Tenaga Penyuluh

Berdasarkan hasil pengidentifikasian pengaruh variabel pelaksanaan terhadap capaian tujuan dalam dimensi sosial, ternyata dari enam variabel pelaksanaan, hanya variabel aktivitas pendampingan yang memengaruhi peningkatan kelembagaan kelompok. Sementara di sisi lain, hasil penilaian atas capaian tujuan program, menunjukkan bahwa variabel capaian tujuan program dalam dimensi sosial, berupa peningkatan kelembagaan kelompok masih berada pada kategori cukup, yang tentu saja perlu ditingkatkan untuk pencapaian kategori yang lebih baik.

Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi kegiatan pendampingan dengan penambahan kegiatan berupa fasilitasi dinamika kelompok melalui pertemuan, diskusi, dan musyawarah antar anggota kelompok, sehingga tercipta kesamaan gerak dan pikiran dari pembudidaya sebagai anggota kelompok. Pertemuan rutin bulanan untuk membentuk kelompok-kelompok yang kuat perlu dilakukan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di tambak, seperti halnya penanganan dan pemberantasan hama, pembagian air melalui saluran, dan pengaturan jadwal panen untuk menghindari turunnya harga jual dapat bersama-sama mereka atasi.

Hingga saat ini, belum terdapat pendampingan berkelanjutan atas usaha budidaya yang dilakukan oleh penerima bantuan. Tenaga pendamping, baik Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) maupun Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) melaksanakan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan hanya sebatas pada tahun berjalan. Pada tahun berikutnya, perhatian tenaga penyuluh sudah tercurah pada proses pengusulan dan penetapan anggota kelompok, sehingga proses pendampingan terhadap usaha budidaya yang

dilakukan oleh penerima bantuan tidak lagi dilakukan. Hanafi *et al.* (2011) menyebutkan bahwa saat ini komposisi jumlah penyuluh perikanan dan jumlah petambak yang ada sangat tidak berimbang, sehingga proses alih ketrampilan dan teknologi budidaya ikan tidak maksimal dilakukan. Pengawasan dan bimbingan langsung kepada petambak sulit dilakukan, sehingga hanya sebagian kecil kelompok yang dapat dikunjungi oleh penyuluh perikanan. Penambahan jumlah tenaga penyuluhan perikanan melalui perekrutan tenaga penyuluh yang berasal dari masyarakat lokal atau kontrak kerja dengan Sekolah Tinggi Perikanan dengan model magang mahasiswa perikanan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Perbaikan kebijakan perlu dilakukan KKP dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan penyuluhan, baik berupa pemenuhan tenaga penyuluhan maupun operasionalisasi fasilitasi dinamika kelompok.

c. Pemberian Insentif Bagi Pembudidaya yang Memiliki Sertifikat CBIB

Hasil penilaian sebagaimana pada Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemberdayaan adalah tetap, yaitu 0, atau sebelum dan sesudah pelaksanaan program tidak terdapat satupun pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB. Keengganan pembudidaya memenuhi persyaratan untuk memiliki sertifikat tersebut dikarenakan tidak adanya insentif dari pemerintah bagi pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB, baik berupa peningkatan harga jual bandeng, kepastian pemasaran, maupun subsidi harga pengadaan sarana produksi perikanan. Untuk itu, pemerintah melalui KKP perlu mengusahakan terciptanya insentif bagi pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB, sehingga peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung budidaya yang berkelanjutan dapat direalisasikan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Indeks Pelaksanaan Program yang menyatakan tingkat kesesuaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebesar 2,39 dengan kategori baik. Indikator pelaksanaan yang memerlukan upaya perbaikan guna pencapaian kategori yang lebih baik, yaitu indikator ketepatan

waktu penyaluran bantuan.

2. Indeks Pencapaian Tujuan yang menyatakan tingkat capaian tujuan program pemberdayaan adalah sebesar 2,11 dengan kategori cukup. Seluruh indikator capaian tujuan yang meliputi peningkatan produksi, peningkatan kelembagaan (kelas) kelompok, dan peningkatan kualitas lingkungan berada pada kategori cukup dan memerlukan perhatian dan upaya perbaikan guna pencapaian kategori yang lebih baik.
3. Terhadap pencapaian tujuan dalam dimensi ekonomi berupa peningkatan produksi budidaya, variabel ketepatan waktu penyaluran, kecukupan jumlah bantuan, dan aktivitas pendampingan berpengaruh positif, sedangkan variabel kejadian kekeringan berpengaruh negatif.
4. Untuk pencapaian tujuan dalam dimensi sosial, hanya variabel aktivitas pendampingan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kelembagaan (kelas) kelompok.
5. Keseluruhan variabel pelaksanaan tidak berpengaruh terhadap capaian tujuan dalam dimensi ekologis berupa peningkatan kualitas lingkungan.

Implikasi Kebijakan

1. Dengan memperhatikan hasil analisis, beberapa opsi kebijakan yang perlu dilakukan oleh KKP yaitu berupa: 1) Peningkatan capaian tujuan program pemberdayaan dalam dimensi ekonomi, melalui penyesuaian waktu penyaluran bantuan dengan musim tanam, 2) Peningkatan capaian tujuan dalam dimensi sosial melalui dukungan terhadap aktivitas pendampingan oleh tenaga penyuluh, dan 3) Peningkatkan capaian tujuan dalam dimensi ekologis melalui pemberian insentif bagi pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB.
2. Untuk lebih dapat meningkatkan capaian tujuan program pemberdayaan, perlu dilakukan kajian atas pengaruh variabel lain yang diduga diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang efektif, selain yang diatur dalam pedoman pemberdayaan, diantaranya yaitu: penggunaan teknologi budidaya yang sesuai, yaitu dengan pengintegrasian antara pengetahuan ekologi tradisional pembudidaya dengan penelitian sains dan pengetahuan manajemen modern, penyediaan fasilitas

kredit mudah dengan menghubungkan pembudidaya dengan lembaga-lembaga institusional, ataupun peningkatan alokasi bantuan dana untuk kegiatan pengembalian kesuburan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I.G.N. 2002. Statistika: Aplikasi Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik. *In* Baroroh, A. 2013. Analisis Multivariat dan Time Series dengan SPSS 21. Elex Media Komputindo. Jakarta. 220 hal.
- Baroroh, A. 2013. Analisis Multivariat dan Time Series dengan SPSS 21. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- BPS Kabupaten Karawang. 2012^a. Statistik Daerah Kecamatan Tirtajaya Tahun 2012. BPS Kabupaten Karawang. Karawang. 72 hal.
- BPS Kabupaten Karawang. 2012^b. Kecamatan Cilamaya Wetan dalam Angka 2012. BPS Kabupaten Karawang. Karawang. 72 hal.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 2009. Pedoman Pemberian Input Produksi kepada Pembudidaya Ikan Penerima Manfaat Proyek Safver. Satker Pengembangan Akuakultur untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Proyek Safver Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Jakarta. 52 hal.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 2012. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: KEP.45/DJ-PB/2012 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Jakarta. 79 hal.
- Hanafi, A., A.I. Supii, W. Adriyanto, A.B. Prasetyo & A. Sudradjat. 2011. Kebijakan Strategis Pengembangan Bisnis Budidaya Bandeng. Analisis Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya:137-151.
- Karim, M. 2005. Analisis Kemiskinan dan Kesenjangan Pembangunan di Kawasan Pesisir Kabupaten Karawang dan Sukabumi Jawa Barat. Tesis. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 228 hal.
- KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 2007. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 11 hal.
- KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 2012. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 33 hal.
- Latan & Temalagi. 2013. Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Penerbit Alfabeta. Bandung. 152 hal.
- Mulyanto. 2012. Analisis Faktor Penyebab dan Karakteristik Model Pengentasan Kemiskinan di Kota Surakarta. Jurnal Sosial Ekonomi STIE AUB Surakarta: 87 - 102.
- Rusmiyati, S. 2012. Budidaya Bandeng Super, Langkah Jitu Menuju Kemapanan Finansial. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 205 hal.
- Suriadarma. 2011. Dampak Beberapa Parameter Faktor Fisika Kimia Terhadap Kualitas Lingkungan Perairan Wilayah Pesisir Karawang-Jawa Barat. *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol 21: 19-33.
- Qtt, W.R. 1978. Environmental Indices, Theory and Practice, An Arbor Science. Publ Inc Ann. Arbor Mich.

Lampiran / Appendix

Lampiran 1. Anggota Kelompok Penerima Bantuan dan Responden Kueisoner.

Appendix 1. The Member of The Group Beneficiary and Responden's Study.

Program/ Program	Lokasi Penelitian (Kecamatan) / Study Location (District)	Σ Kelompok Penerima Bantuan / Total Amount of Group Beneficiary	Nama Kelompok/ The Name of The Group Beneficiary	Σ anggota klpk/ Total Amount of The Member	Responden/ Respondent
PUMP-PB TA 2012	Tirtajaya	2	1. Mina Sari	10	8
			2. Tambak Sejahtera	10	10
	Cilamaya Wetan	1	1. Samudera Timbul Jaya	10	10
			Sub total 1	30	28
Safver TA 2011	Tirtajaya	6	1. Wana Sari 1	25	2
			2. Wana Sari 2	19	1
			3. Wana Jaya 1	13	1
			4. Wana Lestari 1	19	5
			5. Wana Lestari 2	22	5
			6. Wana Lestari 3	15	3
			Sub total 2	113	17
Safver TA 2012	Tirtajaya	10	1. Mina Lestari	18	1
			2. Mina Warsa	8	1
			3. Minahasa Jaya	4	0
			4. Minajaya Subur	9	5
			5. Windu mandiri	15	9
			6. Windu jaya	23	5
			7. Nener jaya	22	8
			8. Nener mandiri	20	3
			9. Mina Tirta	24	15
			10. Mina Bakti	27	18
			Sub total 3	170	65
			Total		

Lampiran 2. Perhitungan Jumlah Sampel Mengacu Pada Rumus Slovin

Appendix 2. Calculation of The Sample Size Refers to The Slovin Formula

$$n = N / 1 + (Ne^2)$$

$$n = 313 / 1 + (313 \times 0,12)$$

$$n = 75,79 \text{ dibulatkan / Accomplished } 76$$

dimana:

n = Jumlah sampel yang dicari / The number of samples sought

N = Jumlah populasi / The number of population

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel / The level of error in sampling (= 0,1)

ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN PENYEDIA INPUT PRODUKSI DAN TENAGA KERJA DALAM USAHA TAMBAK GARAM

Analysis of Institutional Roles in the Input Production Providers and Labours in Salt Business

***Rizki Aprilian Wijaya, Rikrik Rahadian dan Tenny Apriliani**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

*email: rizkiaprilian@yahoo.co.id

Diterima 1 Mei 2014 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan penyediaan sarana input produksi dan tenaga kerja pada usaha tambak garam skala tradisional di Kabupaten Sumenep dan Jenepono. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei melalui wawancara kepada 80 orang petambak garam dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada delapan orang informan kunci. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabulasi silang. Hasil kajian menunjukkan kelembagaan penyedia input produksi lebih berperan dalam penyediaan akses permodalan dan kelembagaan tenaga kerja berperan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Kata Kunci: analisis peran, kelembagaan input, tenaga kerja, garam tradisional

ABSTRACT

The objectives of this paper is analyzing institutional role of production input and labour institution in the traditional scale of salt pond business at Sumenep and Jenepono Regencies. This study used a qualitative method. Survey method was used to collect data by interviewing 80 respondents and compounded by an in-depth interview to eight key informants. Data analyzing used descriptive technique and presented in cross-tabulation. Results show that production input institution has a role in providing capital access, while labour institution has a role in labour recruitment process.

Keywords: contribution analysis, input and labour institutional, salt traditional

PENDAHULUAN

Sektor industri memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian nasional. Sektor industri sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menghasilkan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya garam merupakan sumber daya kelautan hayati yang dapat diperbaharui, memiliki prospek yang cukup baik untuk masa mendatang karena merupakan salah satu komoditas industri strategis (Nursaulah, 2013). Dikatakan strategis karena fungsinya yang sangat vital bagi kebutuhan manusia. Penggunaan garam secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu garam untuk konsumsi manusia, garam untuk pengasinan dan aneka pangan, serta garam untuk industri (Widiarto *et al.*, 2013). Pelaku usaha garam skala kecil yang tinggal di perdesaan dihadapkan kepada penguasaan teknologi yang rendah, kepemilikan modal yang lemah, minimnya akses dan informasi terhadap pasar, dan keterampilan manajemen usaha yang terbatas (Komaryatin, 2012).

Sebagai salah satu daerah penghasil garam skala kecil di Indonesia, petambak garam di Kabupaten Sumenep dan Jenepono menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan kemiskinan. Permasalahan tersebut berupa menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang membutuhkan biaya investasi besar, ketergantungan pada musim, minimnya luasan lahan, harga dan mutu garam yang rendah hingga masuknya garam impor (Rocwulaningsih, 2007; Widodo, 2011; Ihsannuddin, 2012). Akibatnya, banyak petambak garam tidak dapat bertahan dalam mengadakan usahanya; bahkan ada yang meninggalkan usahanya dan berpindah menekuni mata pencaharian lain. Permasalahan tersebut tidak hanya terkait dengan kondisi sumber daya yang ada (alam, manusia, finansial, fisik), tetapi juga terkait permasalahan relasi sosial (kelas sosial, pendidikan, gender, kesukuan), kebijakan pemerintah (ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan sektoral), maupun gejolak/shock (cuaca buruk, bencana, penyakit, perubahan iklim), tetapi juga berkaitan dengan permasalahan kelembagaan (aturan main, penguasaan, kepemilikan, organisasi) yang ada di masyarakat pesisir (Allison & Ellis, 2001; Allison & Horemans, 2006).

Anatomi permasalahan kelembagaan pada sektor usaha garam secara umum setidaknya dapat dilihat berdasarkan kondisi usaha produksi yang dimulai dari kelembagaan input produksi dan pemasaran. Pada kelembagaan input, permasalahan yang terjadi adalah petambak garam kesulitan untuk mengakses permodalan untuk sarana input produksi dan menghadapi peningkatan biaya tenaga kerja. Pada kelembagaan pemasaran, petambak garam berada pada posisi tawar yang lemah sehingga tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan kebutuhan petambak garam. Jika dilihat secara seksama, permasalahan pada kelembagaan input produksi secara langsung akan mempengaruhi kelembagaan pemasaran. Dengan kata lain, masalah yang ada pada kelembagaan input produksi harus terlebih dahulu dipecahkan daripada masalah pada kelembagaan pemasaran.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan penyedia sarana input produksi dalam kelembagaan tenaga kerja pada usaha tambak garam skala kecil di Kabupaten Sumenep dan Jenepono. Di samping itu dapat menjelaskan dan membandingkan bagaimana peran kelembagaan penyedia input produksi dan tenaga kerja pada masyarakat petambak garam skala kecil di Kabupaten Sumenep dan Jenepono. Tulisan ini penting karena aspek kelembagaan input produksi memiliki peranan strategis dalam aktivitas produksi garam. Secara tidak langsung aspek kelembagaan input produksi juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat petambak garam.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui lebih jauh komparasi peranan kelembagaan penyedia sarana input produksi dan tenaga kerja dalam usaha tambak garam skala kecil. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang berguna untuk menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta atau sifat-sifat populasi atau daerah tertentu serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki (Nazir, 2003).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kali Anget, Kabupaten Sumenep Jawa Timur dan Desa Pacellanga, Kelurahan Pallenggu, Kabupaten Jenepono Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*Purposive*)

dengan alasan kedua lokasi tersebut merupakan pusat penghasil garam dengan skala usaha kecil tradisional dan memiliki kesamaan dalam hal proses produksi garam. Waktu penelitian Juni – Agustus 2013.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden sebanyak 80 orang yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan alat bantu kuesioner. Data primer juga dikumpulkan dari informan kunci melalui teknik wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ketua kelompok pengangkut, ketua pengurangan garam dan tokoh masyarakat. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil penelitian dan laporan statistik.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif berbasis data tabulasi silang. Analisis deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Nawawi, 2005). Sedangkan komparatif menunjukan suatu perbandingan antar subyek atau objek yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petambak garam berstatus pemilik-penggarap dan penyewa-penggarap pada usaha tambak garam tradisional di Kabupaten Sumenep dan Jenepono. Pada penelitian ini, perbandingan peran kelembagaan usaha tambak garam menggunakan dua aspek yang akan dilihat persamaan dan perbedaan di kedua lokasi penelitian. Kedua aspek tersebut yaitu, *pertama*, peran lembaga penyedia sarana input produksi yang dilihat dari sumber perolehan kebutuhan investasi dan sumber permodalan. *Kedua*, peran lembaga penyedia tenaga kerja yang dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja upahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Usaha Tambak Garam

Usaha pegaraman yang dilakukan oleh petambak garam rakyat di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang sederhana dan sangat bergantung kepada intensitas panas

matahari, kelembaban dan kecepatan angin (Adi *et al.*, 2012). Begitu pula yang terjadi pada usaha tambak garam di Kabupaten Sumenep dan Jenepono. Perbedaan diantara kedua lokasi yang cukup mencolok adalah luas lahan tambak dan metode memproduksi garam. Luasan lahan yang dikelola oleh petambak di Kabupaten Sumenep relatif lebih luas lahannya (0.5 – 2 Ha) dibandingkan dengan petambak garam di Kabupaten Jenepono (< 0.5 Ha). Di dalam memproduksi garam, petambak di Kabupaten Sumenep menggunakan metode kristalisasi bertingkat, sedangkan petambak di Kabupaten Jenepono menggunakan metode kristalisasi total.

Dilihat dari waktu panen, metode kristalisasi bertingkat menggunakan waktu produksi garam antara 7 – 10 hari sedangkan metode kristalisasi total membutuhkan waktu antara 3 – 5 hari. Dilihat dari perbandingan antara luas meja panen dan meja peminihan air garam, metode kristalisasi bertingkat komposisi luas meja panennya lebih kecil dibandingkan dengan meja peminihan air garam. Sedangkan metode kristalisasi total komposisi luas meja panennya lebih besar dibandingkan dengan meja peminihan air. Berdasarkan luas lahan dan metode produksi, maka petambak garam di Desa Pinggir Papas memproduksi garam secara kualitas lebih baik dan secara kuantitas lebih banyak yaitu sebesar 128 ton/Ha (Sholihah, 2013) dibandingkan dengan petambak garam di Desa Pacellanga.

Kelembagaan Sarana Input Produksi

Jenis sarana input produksi yang dikeluarkan untuk usaha tambak garam dibedakan menjadi dua macam yaitu barang investasi dan biaya operasional. Jenis barang yang dibutuhkan untuk barang investasi diantaranya adalah gudang penyimpanan garam, kincir angin, pompa air, pemadat tanah, pengkais dan penggaruk garam serta barang lainnya berupa sepeda dan alat pengukur kadar garam (Tabel 1).

- Sumber Perolehan Sarana Input Produksi

Pada usaha garam, gudang merupakan barang investasi yang cukup penting bagi petambak karena dapat digunakan untuk strategi peningkatan ekonomi rumah tangga (Wijaya & Rahadian, 2013) dan merupakan salah satu strategi petambak untuk menjaga kelangsungan usahanya (Haryatno, 2012). Umumnya, gudang penyimpanan dapat terbagi menjadi dua yaitu gudang permanen dan semi permanen. Gudang permanen terbuat

Tabel 1. Pilihan Membeli Barang Investasi dan Operasional Kepada Lembaga Penyedia Input Produksi pada Usaha Garam di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto (%), 2013.

Table 1. Choice of Buying Goods Investment and Operational by Production Input Providers on Salt Business in Sumenep and Jeneponto Regency (%), 2013.

Jenis Sarana Input Produksi / Type of Input Production Facilities	Kabupaten Sumenep / Sumenep Regency				Kabupaten Jeneponto / Jeneponto Regency			
	Toko / Store	Pasar/ Market	Individu / Individual	Tidak Beli / Not buy	Toko/ Store	Pasar/ Market	Individu / Individual	Tidak Beli / Not buy
A. Barang Investasi / Investment Goods								
1. Gudang / Salt storage	0	0	100	0	4	0	43	52
2. Kincir / Windmill	35	3	58	5	26	0	26	48
3. Pompa air / Water pump	23	0	13	65	4	0	52	43
4. Pemadat tanah / Soil compactor	48	15	38	0	48	0	39	13
5. Pengkais garam / Salt towing	50	15	35	0	52	0	35	13
6. Penggaruk garam / Salt rake	50	15	35	0	43	0	4	52
7. Lainnya / Another	58	10	15	18	57	0	26	17
B. Barang Operasional / Operational Goods								
1. Bahan bakar minyak / Fuel oil	23	0	15	63	13	9	17	61
2. Ransum / Supplies	3	3	28	68	43	0	0	57
3. Biaya air dan kincir / Water and windmill cost	0	0	0	100	9	0	22	70
4. Karung / Sack	3	10	18	70	26	4	0	70

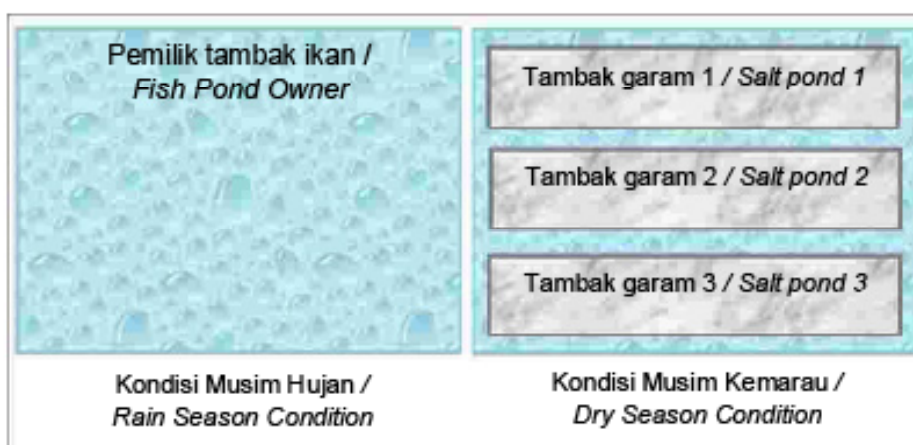
Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

dari bilik bambu yang diatur sedemikian rupa hingga menyerupai gubuk. Adapun gudang semi permanen, terbuat dari karpet yang dilapisi oleh plastik terpal. Petambak garam rata-rata memiliki gudang semi permanen karena murah biaya pembuatan. Terkait dengan kepemilikan gudang, petambak garam di Kabupaten Sumenep lebih banyak memiliki gudang penyimpanan garam dibandingkan dengan petambak di Kabupaten Jenepono. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan produksi. Petambak memanfaatkan di bawah rumah panggung yang mereka tinggali untuk gudang penyimpanan garam. Kondisi ini juga terkait dengan sumber perolehan gudang (Tabel 1), di Kabupaten Sumenep sebanyak 100% gudang petambak berasal dari individu (membuat sendiri) dan di Kabupaten Jenepono sebanyak 43% berasal dari Individu dan 52% tidak membeli (menyimpan di bawah rumah panggung).

Selain gudang, kincir angin juga merupakan barang yang penting bagi usaha tambak garam. Berdasarkan Tabel 1, sumber perolehan kincir di Kabupaten Sumenep berasal dari individu (membuat sendiri), namun hal berbeda terjadi di Kabupaten Jenepono yaitu sebagian besar petambak tidak membeli kincir angin. Penjelasan logis terkait hal ini karena di Kabupaten Sumenep, petambak garam sepenuhnya menguasai kincir angin (*ebor/senggot*), namun hal berbeda terjadi di Kabupaten Jenepono yaitu adanya dualisme penguasaan kincir angin oleh petambak garam dan pembudidaya ikan. Di Kabupaten Jenepono, kincir angin yang dikuasai oleh petambak garam merupakan kincir angin sekunder yang memompa

air dari saluran primer untuk masuk ke dalam petak-petak tambak garam. Sementara kincir angin utama/primer yang dikuasai oleh pembudidaya ikan digunakan untuk memompa air dari laut agar masuk ke dalam saluran primer. Kepemilikan kincir angin tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari dualisme kepemilikan lahan yang dibedakan berdasarkan musim penghujan dan kemarau (Gambar 1).

Pada saat musim penghujan, penggunaan lahan ditujukan untuk aktivitas usaha budidaya ikan dan udang yang dilakukan secara alami/tradisional. Pada saat musim kemarau, penggunaan lahan ditujukan untuk tambak garam (yang disebut masyarakat lokal sebagai *tonrang*). Kepemilikan lahan tersebut mengikuti pola musim dimana pada lahan yang sama terdapat dua pemilik yang akan dapat diketahui pada saat musim penghujan dan kemarau. Perubahan fungsi lahan tersebut sudah sejak lama terjadi yang dilakukan secara turun temurun. Dalam satu tambak pada saat musim kemarau biasanya memiliki 3 – 10 *tonrang* garam, tergantung dari luasan lahan tambak dan perjanjian yang telah disepakati pada jaman dahulu. Salah satu konsekuensi perjanjian tersebut adalah pada saat musim penghujan, pemilik tambak berhak untuk melakukan budidaya ikan dan hasil produksi ikannya hanya berhak untuk pemilik tambak. Pada saat musim kemarau, pemilik *tonrang* berhak untuk melakukan aktivitas produksi garam dan hasil produksinya ada sebagian kecil yang diberikan kepada pemilik tambak yang disebut juga sebagai *sima air* (pajak air) (Gambar 1).



Gmbar 1. Kepemilikan Lahan Berdasarkan Perbedaan Musim di Kelurahan Pallenggu Kabupaten Jenepono, 2013

Picture 1. Land Ownership Based on Season Activity in Pallenggu Village of Jenepono Regency, 2013

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Berdasarkan pola penguasaan lahan, petambak garam di Kabupaten Sumenep dapat dibedakan menjadi pemilik lahan, penyewa lahan, dan petambak penggarap/buruh (Azizi *et al.*, 2011; Rochwulaningsih, 2007). Pemilik lahan yaitu petambak garam yang memiliki hak milik dan penguasaan atas penggunaan lahan yang lahannya berasal dari pembelian maupun warisan orang tua. Penyewa lahan mendapatkan lahan dari proses sewa menyewa baik melalui lahan rakyat maupun kepada perusahaan garam (PT Garam). Besaran uang sewa lahan kepada pemilik rakyat cenderung lebih tinggi (Rp. 3 – 6 juta / Ha / Tahun) dibandingkan sewa kepada PT Garam (Rp. 750 ribu – 1 juta / Ha / Tahun). Petambak penggarap/buruh yaitu petambak yang tidak memiliki lahan, tapi semata-mata hanya menggarap baik dengan sistem sewa/bagi hasil maupun hanya menjual jasa tenaga kerja yaitu pada saat persiapan lahan tambak dan pemanenan. Banyaknya mekanisme sewa menyewa lahan pada masyarakat petambak garam disebabkan karena tidak semua petambak garam bertempat tinggal di sekitar lahan garam (Sukei, 2011).

Berdasarkan status bekerja menggarap atau tidak menggarap, pemilik maupun penyewa lahan terbagi menjadi dua yaitu pemilik/penyewa lahan yang mengerjakan sendiri lahannya dan pemilik/penyewa lahan yang lahannya dikerjakan oleh penggarap/*mantong* baik dengan sistem kemitraan (penyewa lahan kepada perusahaan garam) maupun dengan cara bagi hasil. Pemilik tambak yang lahannya dikerjakan oleh penggarap biasanya merupakan tokoh masyarakat, orang yang memiliki modal ataupun orang terpendang yang tidak memiliki waktu untuk mengerjakan sendiri lahan tambak garamnya. Hal tersebut dapat terlihat dari akumulasi aset dalam bentuk rumah, kendaraan maupun alternatif pendapatan selain tambak garam yang relatif lebih banyak dibandingkan status sosial lainnya. Adapun pemilik tambak yang menggarap sendiri lahannya, biasanya memang memiliki banyak waktu luang.

Terkait dengan investasi pompa air, kegunaan barang ini usaha tambak garam adalah sebagai alat pengganti maupun pendukung alat kincir apabila tidak dapat berfungsi (tidak ada angin sebagai tenaga penggerak utama). Berdasarkan Tabel 1, sumber perolehan pompa air di Kabupaten Sumenep sebagian besar tidak beli dan pada Kabupaten Jeneponto berasal dari individu (membeli sendiri) dan tidak beli. Petambak

garam di kedua lokasi pada tahun 2013, diberikan fasilitas pompa air melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dimana bantuan pompa air tersebut diberikan melalui mekanisme Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR).

Pada petambak di Kabupaten Sumenep, mekanisme penggunaan pompa air melalui kelompok tidak terjadi, yang terjadi adalah mekanisme penggunaan pompa secara individu. Hal yang berbeda terjadi pada petambak di Kabupaten Jeneponto, dimana petambak garam merasa sangat terbantu karena memang mekanisme penggunaan pompa air melalui KUGAR dapat berjalan. Mekanisme tersebut diantaranya adalah keberadaan pompa air disepakati berada di rumah ketua kelompok. *Kedua*, anggota kelompok yang menggunakan pompa air berkewajiban untuk merawat pompa agar dalam keadaan baik dan ditarik biaya perawatan untuk menjamin keberlanjutan pompa air apabila ada kerusakan di kemudian hari.

- Sumber Modal Sarana Input Produksi

Di dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan investasi, Tabel 2 menunjukkan bahwa petambak garam baik di Kabupaten Sumenep maupun Jeneponto dapat memenuhi sendiri kebutuhan modalnya. Pada masyarakat petambak garam di kedua lokasi tersebut, terdapat semacam perilaku di dalam masyarakat yang tidak ingin memiliki hutang untuk aktivitas usaha tambak garam. Petambak garam selalu berusaha untuk memanfaatkan dana yang tersedia agar usahanya terus dapat berlangsung. Selain itu, modal untuk investasi usaha garam juga dirasakan cukup murah karena teknologi yang digunakan cukup sederhana. Sebagai contoh pembuatan gudang dan kincir angin, petambak garam di kedua lokasi cenderung membuat sendiri barang tersebut dengan membeli bahan-bahan dari toko material. Namun pada beberapa kasus yang dialami oleh petambak garam, hutang biasanya menjadi pilihan sumber modal apabila petambak garam membutuhkan biaya operasional yang cukup besar dan adanya kejadian yang tidak terduga seperti rusaknya pematang tambak karena hempasan ombak maupun kejadian banjir.

Terkait dengan kelembagaan sumber pembiayaan barang investasi dan biaya operasional, umumnya petambak garam di kedua lokasi berasal dari tengkulak (pedagang pengumpul),

Tabel 2. Sumber Modal Investasi Pada Usaha Garam di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto (%), 2013.**Table 2. Source of Capital Investment of Salt Business in Sumenep and Jeneponto Regencies (%), 2013.**

Jenis Sarana Input Produksi / Type of Input Production Facilities	Kabupaten Sumenep / Sumenep Regency		Kabupaten eneponto / Jeneponto Regency	
	Sendiri/ Own	Campuran/ Mix	Sendiri/ Own	Campuran/ Mix
1.Gudang / Storage	87	13	71	29
2.Kincir / Windmill	86	14	85	15
3.Pompa air / Water pump	86	14	23	77
4.Pemadat tanah / Soil compactor	92	8	75	25
5.Pengkais garam / Salt towing	95	5	79	21
6.Penggaruk garam / Salt rake	95	5	92	8
7.Lainnya / Another	97	3	81	19

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

tetangga dan keluarga (Tabel 3). Sebagian kecil pembiayaan yang berasal dari pinjaman ke koperasi, bank formal dan bank harian (sekitar 2,5%). Pembiayaan operasional dari sumber pinjaman digunakan untuk persiapan lahan garam yaitu ketika mulai masuk musim kemarau dan pada saat pemanenan garam (untuk upah tenaga kerja).

Ketiga kelembagaan tersebut dipilih oleh petambak garam disebabkan karena kemudahan akses peminjaman uang dirasakan oleh petambak garam. Kemudahan yang dirasakan meliputi waktu peminjaman yang bisa kapan saja, tidak ada bunga pinjaman dan waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan petambak garam. Sumber

pinjaman dari kelembagaan keuangan formal seperti koperasi, bank atau kelompok petambak garam belum banyak diakses hal ini dikarenakan persyaratan peminjaman yang harus dipenuhi (jaminan), bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman hingga besar angsuran yang tidak dapat dipenuhi. Sukesi (2011) menyatakan bahwa minimnya petambak meminjam modal kepada lembaga keuangan formal disebabkan karena pola budaya masyarakat garam yang telah terbentuk. Petambak garam secara umum merupakan satu keluarga besar yang memiliki ikatan kekeluargaan yang cukup kental sehingga pilihan didasarkan kepada ikatan keluarga dan kedekatan. Kelembagaan Tenaga Kerja

Tabel 3. Frekuensi Meminjam Kepada Lembaga Permodalan pada Usaha Garam di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto (%), 2013.**Table 3. Frequency to Loan from Capital Institution of Salt Business in Sumenep and Jeneponto Regency (%), 2013.**

Jenis Lembaga Sumber Permodalan / Type of Source Capital Institution	Kabupaten Sumenep/ Sumenep Regency		Kabupaten Jeneponto/ Jeneponto Regency	
	Tidak Pernah/ Never	Pernah/ Ever	Tidak Pernah/ Never	Pernah/ Ever
1. Tengkulak / Collector	58	42	83	17
2. Koperasi / Cooperative	97	3	91	9
3. Bank formal / Formal bank	97	3	100	0
4. Kelompok / Group	97	3	91	9
5. Tetangga / Neighbors	72	28	87	13
6. Keluarga / Family	49	51	74	26
7. Bank informal / Informal bank	97	3	100	0

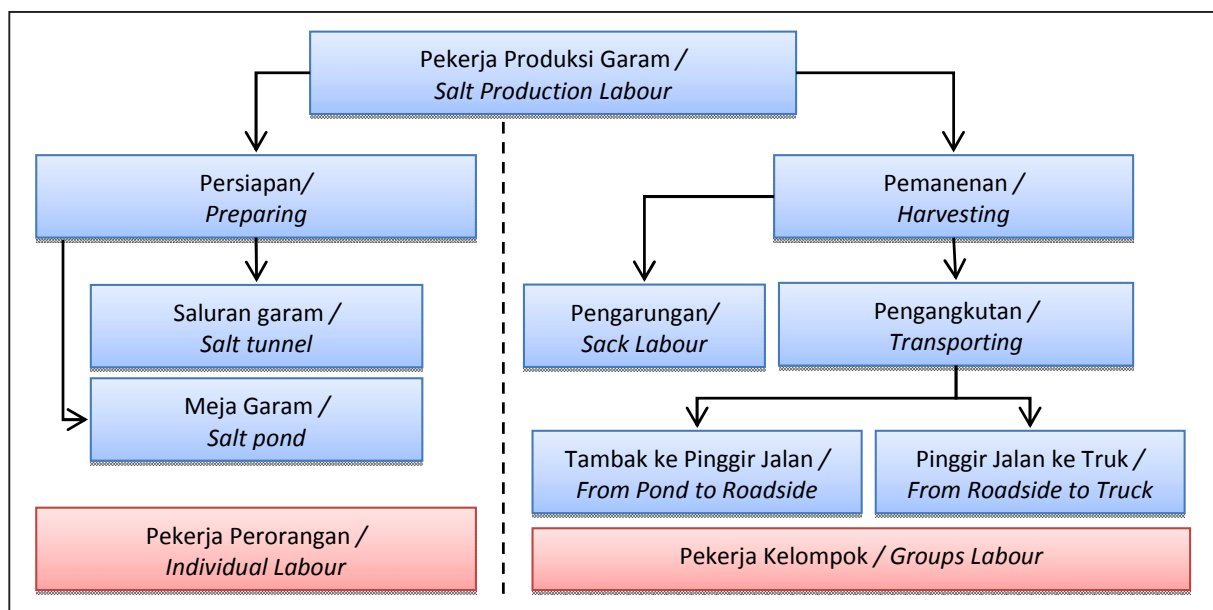
Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

Aktivitas usaha tambak garam di kedua lokasi penelitian secara umum masih menggunakan sistem produksi garam tradisional yang masih mengandalkan cahaya matahari (*solar evaporation*) dan penggunaan tanah langsung sebagai petak lantai produksi garam. Sistem produksi garam tradisional umumnya mengandalkan tenaga kerja sebagai sumberdaya utama untuk proses produksi. Proses produksi garam dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu *pertama*, proses persiapan lahan diantaranya adalah memperbaiki kincir angin, memperbaiki gudang garam, memperbaiki saluran tambak, mengeringkan lahan tambak, memperbaiki dan mengeraskan meja tambak garam, *kedua*, proses memasukkan air laut ke meja garam, dan *ketiga* proses pemanenan garam diantaranya yaitu menggaruk garam dari meja garam ke pinggir tambak, mengangkut garam dari pinggir ke gudang penyimpanan, memasukkan garam kedalam karung, mengangkut karung garam ke pinggir jalan, dan mengangkat karung garam ke atas truk pengangkut. Ketiga proses tersebut akan menentukan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Secara umum, pekerja pada persiapan lahan dan memasukkan air laut ke meja garam merupakan pekerja perorangan dan pada pemanenan garam merupakan pekerja yang tergabung ke dalam kelompok (Gambar 2).

- Tenaga Kerja Pada Proses Persiapan Lahan di Kabupaten Sumenep

Di Kabupaten Sumenep, aktivitas persiapan lahan merupakan aktivitas petambak garam 2 – 3 bulan sebelum masa panen tiba. Petambak garam biasanya memperhitungkan tanda-tanda alam yang muncul sebagai tanda untuk mempersiapkan lahan. Tanda-tanda tersebut adalah keluarnya bintang Karteka, Nanggele dan Lebelijen di sebelah timur yaitu biasanya pada saat bulan Mei (Mangsa desta) (Sukari, 2008). Aktivitas ini bisa dilakukan oleh petambak seorang diri, maupun menggunakan bantuan tenaga kerja yang dapat berasal dari keluarga sendiri maupun tenaga kerja di luar keluarga.

Penggunaan tenaga kerja untuk perbaikan tanggul (galengan), pematang tambak dan meja garam biasanya disesuaikan dengan seberapa besar kerusakan lahan tambak garam dan seberapa besar luasan lahan yang dikelola. Jumlah tenaga kerja yang biasa digunakan adalah antara 2 - 5 orang dengan ketentuan upah per harinya berkisar antara Rp. 40 – 80 ribu. Berdasarkan hasil perhitungan, petambak garam mengeluarkan biaya untuk upah tenaga kerja persiapan lahan antara Rp. 800.000 - Rp. 2.300.000/Ha/musim. Pada aktivitas memasukkan air laut ke meja garam, petambak biasanya tidak membutuhkan tenaga



Gambar 2. Kebutuhan Tenaga Kerja oleh Petambak Garam di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto, 2013.

Figure 2. Labour Required by Salt Farmer in Sumenep and Jeneponto Regencies, 2013.

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

kerja. Petambak memulai aktivitas pada pukul 6 – 8 pagi dengan menggerakkan kincir angin untuk memasukkan air dengan bantuan tenaga angin. Pada sore harinya, petambak garam akan kembali ke rumah apabila air laut dirasa telah cukup untuk memenuhi meja tambak garam.

- Tenaga Kerja Pada Proses Pemanenan di Kabupaten Sumenep

Pada proses pemanenan garam, terdapat setidaknya tiga kelembagaan tenaga kerja di Kabupaten Sumenep yaitu tenaga kerja pengarungan, pengangkut karung garam ke pinggir jalan dan kuli angkut truk. Terkait dengan tenaga kerja pengarungan, di Desa Pinggir Papas terdapat delapan kelompok pengarungan garam yang sebagian besar didominasi oleh kaum ibu-ibu / wanita. Jumlah anggota kelompok pengarungan dapat berkisar antara 6 – 15 orang. Struktur organisasi relatif masih sangat sederhana yang terdiri atas ketua dan anggota. Proses penentuan ketua maupun anggota dilakukan secara musyawarah diantara sesama anggota kelompok. Selain itu, kelompok yang terbentuk juga didasarkan atas hubungan kekeluargaan dan kedekatan lokasi tempat tinggal untuk memudahkan koordinasi dan efektivitas waktu apabila ada pekerjaan pengarungan garam. Mekanisme pergantian anggota hanya berdasarkan kesepakatan diantara anggota kelompok saja dan umumnya pergantian anggota dikarenakan faktor usia serta kondisi kesehatan anggota.

Pekerjaan pengarungan yang dilakukan dalam kelompok meliputi memegang karung, pengisian garam dan penjahitan karung. Tidak ada spesifikasi pembagian kerja diantara anggota kelompok, hal ini dikarenakan tidak diperlukannya keahlian tertentu dalam melakukan proses pekerjaan pengarungan. Penjadwalan kerja antar kelompok dilakukan pada saat musim panen garam, jika tidak memungkinkan dikerjakan oleh satu kelompok umumnya akan diserahkan kepada kelompok lain atau menambah anggota yang sifatnya tidak tetap. Informasi lokasi dan waktu pengarungan disampaikan oleh petambak garam atau pengepul dengan sistem pembayaran berkisar antara 3 - 10 hari, hal ini tergantung waktu pembayaran yang diterima oleh petambak garam dari pengumpul. Waktu kerja sangat bergantung pada kuantitas produksi garam, namun umumnya pengarungan garam dilakukan sejak pukul 04.00 - 16.00 WIB pada saat panen raya atau pukul 04.00 - 11.00 WIB pada saat awal musim.

Untuk menghindari tumpang tindih wilayah kerja, telah terdapat aturan yang tidak tertulis bahwa wilayah kerja antara kelompok satu dengan kelompok lainnya ditentukan secara mufakat antar kelompok tersebut. Masing-masing kelompok umumnya sudah memiliki langganan petambak atau pengumpul garam, sehingga tidak terjadi persaingan usaha antar kelompok. Upah pengarungan dihitung berdasarkan jumlah produksi garam yaitu Rp. 8.000 per ton (Tahun 2013) dan akan dibagi rata oleh ketua kelompok kepada seluruh anggota yang bekerja saja. Penetapan harga tersebut sifatnya dinamis yaitu didasarkan kepada kesepakatan antar kelompok dengan mempertimbangkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam satu hari, kemampuan maksimal satu kelompok dapat mengangkut garam hingga 50 ton ($\pm$ 1.000 karung).

Terkait dengan tenaga kerja pengangkutan garam, terdapat 13 kelompok pengangkut garam. Tugas kelompok ini adalah mengangkut garam yang telah dimasukkan ke dalam karung pada gudang garam menuju titik kumpul (Collecting point) yang berada di pinggir jalan besar yang bisa dilalui oleh truk pengangkut. Upah rata-rata pada setiap kelompok untuk mengangkut satu karung garam (50 Kg) adalah sebesar Rp. 1.250 pada jarak terdekat dan Rp. 3.200 pada jarak terjauh. Dengan kata lain upah per kilo untuk mengangkut garam adalah sebesar Rp. 25 – 65. Upah tersebut relatif lebih murah jika dibandingkan dengan upah angkut garam di Pulau Jawa yaitu Rp 70/kg (Widiarto *et al.*, 2013). Terkait dengan jenis alat angkut, pada awal mulanya alat angkut adalah pikulan garam yang mampu mengangkut 2 karung garam sekali jalan. Selanjutnya, sejak tahun 1982 hingga 2012 pekerja menggunakan sepeda jenis “onthel”, yang dapat mengangkut garam hingga 6 karung. Pada tahun 2013, penggunaan sepeda sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan sepeda motor karena faktor waktu yang lama untuk sampai ke titik kumpul dan tenaga yang cukup besar untuk mengangkut garam.

Penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut diawali oleh salah seorang pekerja yang memodifikasi motornya untuk mengangkut garam dan diikuti oleh pekerja lainnya. Dalam satu kali perjalanan, kuantitas garam yang dapat diangkut relatif lebih kecil yaitu sekitar tiga karung dibandingkan dengan sepeda onthel, namun faktor waktu yang lebih cepat menjadi alasan utama mengganti ke sepeda motor. Jenis sepeda motor yang digunakan sebagian besar merupakan

sepeda motor bodong (hasil curian dan lain-lain) dengan harga Rp. 3.500.000 / unit. Terkait dengan hal ini, kepolisian daerah setempat pernah melarang penggunaan sepeda motor bodong tersebut. Namun telah terjadi kesepakatan secara informal antara kepolisian, kelompok pengangkut dan pemerintah desa setempat bahwa sepeda motor bodong hanya boleh digunakan untuk mengangkut garam dan tidak boleh digunakan di luar lokasi tambak garam misalnya untuk bepergian ke wilayah kota.

Terkait dengan wilayah kerja kelompok pengangkut garam, terdapat kesepakatan yang tidak tertulis berdasarkan wilayah tempat angkut garam. Sebagai contoh, wilayah pertambakan bernama "tanomir" dengan luas lahan berkisar 80 Ha hanya dikerjakan oleh 3 kelompok pengangkut. Sama halnya dengan tenaga kerja pengangkutan, struktur organisasi kelompok tenaga kerja pengangkut hanya ketua dan anggota. Ketua kelompok dipilih berdasarkan kriteria kepemilikan modal. Hal tersebut dikarenakan proses pembayaran upah kerja dikoordinir oleh ketua dan lama pembayaran dilakukan antara seminggu hingga sebulan. Dalam konteks ini, ketua kelompok harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk menanggung pembayaran upah anggota kelompoknya. Waktu kerja untuk mengangkut garam biasanya dimulai pada pukul 6 pagi hingga 12 siang. Untuk menjaga kekompakan maka terdapat aturan – aturan yang disepakati secara informal diantara anggota kelompok, diantaranya adalah pengangkutan menggunakan sistem antri dengan kata lain pengangkut pertama yang datang ke lokasi adalah yang paling berhak mengangkut karung garam pertama, tidak boleh menyalip pada saat mengangkut garam menuju jalan, dan membantu

anggota kelompoknya apabila terjadi musibah jatuh dari motor pada saat mengangkut garam.

- Tenaga Kerja Pada Proses Persiapan Lahan dan Pemanenan di Kabupaten Jeneponto

Di Kabupaten Jeneponto, pada proses persiapan lahan dan pemanenan (proses pertama dan kedua) berbeda aktivitasnya dengan yang terjadi di Kabupaten Sumenep yakni petambak garam tidak memerlukan tenaga kerja dalam jumlah banyak, bahkan sebagian besar petambak mampu mengerjakan sendiri pada proses tersebut. Kondisi ini disebabkan karena luasan lahan garam yang dikelola di Kabupaten Jeneponto relatif lebih kecil yaitu 0,25 Ha jika dibandingkan dengan luasan tambak garam di Kabupaten Sumenep yang dapat mencapai lebih dari 1 Ha. Namun pada proses ini, dalam kondisi tertentu petambak garam tidak menutup kemungkinan menggunakan jasa tenaga kerja, seperti saat terjadi kerusakan pematang tambak yang besar pada awal tahun 2013. Pada saat itu, terjadi bencana banjir akibat dari curah hujan yang tinggi ditambah kondisi pasang air laut menyebabkan pematang tambak garam menjadi rusak parah. Selain itu, petambak garam juga mengalami kerugian akibat rusaknya gudang dan hilangnya garam yang disimpan.

Kebutuhan tenaga kerja yang cukup banyak terjadi pada saat penjualan garam yaitu memindahkan garam dari gudang (lontang) petambak ke gudang pedagang garam maupun ke mobil pengangkut garam. Penggunaan tenaga kerja pengangkut tersebut biasanya ditanggung oleh pedagang garam bukan oleh petambak garam (Huda *et al.*, 2011). Tata cara pembayaran tenaga kerja pengangkut dapat dibedakan menjadi dua

Tabel 4. Ketersediaan Tenaga Kerja Produksi Garam di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto, 2013.
Table 4. The availability of Salt Production Labour in Sumenep and Jeneponto Regencies, 2013.

Jenis Tenaga Kerja / Type of Labour	Dalam Desa/ In The Village		Luar Desa/ Out The Village	
	Mudah/Easy	Sulit/Difficult	Mudah/Easy	Sulit/Difficult
Kabupaten Sumenep / Sumenep Regency				
1. Persiapan / Preparation	97	3	0	0
2. Pemanenan / Harvesment	94	6	71	29
Kabupaten Jeneponto / Jeneponto Regency				
1. Persiapan / Preparation	100	0	0	0
2. Pemanenan / Harvesment	100	0	100	0

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source: Primary data processed (2013)

macam yaitu menggunakan uang tunai dan garam. Dilihat dari proporsinya, pekerja pengangkut yang memilih pembayaran dengan garam relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang tunai. Pertimbangan utama mereka adalah garam bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pekerja pengangkut akan memperoleh uang lebih apabila melakukan penjualan garam pada saat harga garam tinggi.

Terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh petambak garam dalam membantu proses produksi garam di Kabupaten Sumenep maupun Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 4. Petambak garam di kedua lokasi umumnya menggunakan jasa tenaga kerja yang berasal dari dalam desa. Mudah-mudahan mendapatkan jasa tenaga kerja dari dalam desa sendiri mengindikasikan bahwa garam memang menjadi komoditas andalan bagi masyarakat di kedua lokasi penelitian. Pada saat musim garam, banyak kelompok sosial diluar petambak garam yang juga ikut berperan dalam aktivitas pegaraman (pegawai, pedagang, dan lain-lain). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochwulaningsih (2007) kelompok tersebut memiliki peran sebagai penyetok, tengkulak maupun makelar garam.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Sumber penyedia sarana input produksi, baik barang investasi maupun barang operasional pada usaha tambak garam umumnya berasal dari toko, pasar dan membuat sendiri barang investasi. Terkait dengan sumber permodalan, sebagian besar petambak mengeluarkan modal sendiri untuk kebutuhan investasi dan sebagian kecil lainnya berasal dari modal campuran yang berasal dari tengkulak/pedagang garam, tetangga dan keluarga dekat. Lembaga penyedia sarana input produksi maupun sumber permodalan bagi petambak garam di Kabupaten Sumenep maupun Jeneponto memiliki peran penting bagi kelangsungan usaha tambak garam.

Terkait dengan kelembagaan tenaga kerja, kebutuhan pekerja dilihat berdasarkan proses produksi garam yaitu persiapan dan pemanenan. Pada proses persiapan, pekerja yang dibutuhkan bersifat perorangan. Pada proses pemanenan garam, pekerja yang dibutuhkan merupakan pekerja yang tergabung dalam kelompok. Di Kabupaten

Sumenep, peran penting tenaga kerja bagi usaha tambak garam terlihat pada proses persiapan dan pemanenan. Adapun di Kabupaten Jeneponto peran penting tenaga kerja bagi usaha tambak garam hanya terlihat pada proses pemanenan.

Implikasi Kebijakan

Usaha tambak garam merupakan sebuah aktivitas/siklus yang dimulai dari tahapan pra produksi, produksi dan pasca produksi. Masing-masing tahapan tersebut terdapat bentuk-bentuk kelembagaan usaha yang memiliki peran bagi keberlangsungan usaha. Program peningkatan produksi garam yang telah berjalan dengan baik selama ini masih terbatas dan terfokus kepada peningkatan sarana dan prasarana tambak garam. Ke depan program-program yang dirancang untuk usaha tambak garam harus menyentuh juga kepada penguatan kelembagaan-kelembagaan yang telah ada (*exist*) seperti misalnya kelompok pekerja persiapan lahan maupun pemanenan garam. Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tambak garam dan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tambak garam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. R., A. Supangat, B. Sulistiyo, B. Muljo, H. Amarullah, T.H. Prihadi, Sudarto, E. Soentjahjo & A. Rustam. 2012. Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam Artemia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, Jakarta.
- Allison, E.H. & B. Horemans. 2006. Putting the Principles of The Sustainable Livelihoods Approach Into Fisheries Development Policy and Practice. *Marine Policy*. 30 (2006): 757 – 766.
- Allison, E.H. & F. Ellis. 2001. The Livelihoods Approach and Management of Small – Scale Fisheries. *Marine Policy*. 25 (5): 377 – 388.
- Azizi, A., Manadiyanto & S. Koeshendrajana. 2011. Dinamika Usaha, Pendapatan dan Pola Pengeluaran Konsumsi Petambak Garam di Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 6 (2): 205 – 219.

- Haryatno, D.P. 2012. Kajian Strategi Adaptasi Budaya Petani Garam. *Komunitas*. 4 (2): 191 – 199.
- Huda, H.M., R. Rahadian & S. Astuti. 2011. Dinamika Usaha, Pendapatan, dan Konsumsi Rumah Tangga Petambak Garam Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Jeneponto. Tidak dipublikasikan.
- Ihsannudin. 2012. Pemberdayaan Petani Penggarap Garam Melalui Kebijakan Berbasis Pertanahan. *Activita*. 2 (1):
- Komaryatin, N. 2012. Pengembangan Faktor Produksi Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Garam. In Prosiding Seminar dan Konferensi Nasional Manajemen Bisnis: Memberdayakan UMKM dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menghadapi Persaingan Global, hal 193 – 200. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. 292 Hal.
- Nawawi, H. 2005. *Metode Penelitian ilmu – ilmu Sosial*. Cet.Ke-11. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 249 Hal.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-5. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 544 Hal.
- Nursaulah, S. 2013. Evaluasi Kelayakan Usaha Garam Rakyat Berpola Subsisten Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Pesisir (Studi Pada Kelompok Petani Garam Pugar Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Vol 1 No 1 Semester Ganjil.
- Rochwulaningsih, Y. 2007. Petani garam dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam di Rembang, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. 20 (3) : 53 – 62.
- Sholihah, I. 2013. Studi Perbedaan Produktivitas Tambak Garam di Desa Karang Anyar dan Desa Pinggir Papas Kecamatan Kali Anget Kabupaten Sumenep. *e-journal Swara Bhumi*. 2 (3): 56 – 63. (<http://www.ejournal.unesa.ac.id/article/5336/40/article.pdf> diakses 1 Mei 2014)
- Sukari. 2008. Kearifan Lokal Petani Garam dan Tambak Ikan di Kalianget Madura. In Salamun *et al* (eds). *Jurnal Jantra*. 3 (5): 328 – 336.
- Sukesi. 2011. Analisis Perilaku Masyarakat Petambak Garam Terhadap Hasil Usaha Di Kota Pasuruan. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. 2 (2): 225 – 244.
- Widiarto, S.B., M. Hubeis & K. Sumantadinata. 2013. Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Desa Losarang, Indramayu. *Manajemen IKM*. 8 (2): 144 – 154.
- Widodo, S. 2011. Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir. *Makara Sosial Humaniora*. 15 (1): 10 – 20.
- Wijaya, R. A. & R. Rahadian. 2013. Strategi Nafkah Rumah Tangga Petambak Garam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sumenep. Prosiding Seminar Nasional Sosial Ekonomi. Jakarta: Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

**PENGEMBANGAN SEKTOR PEMASARAN SEBAGAI DUKUNGAN
TERHADAP PROGRAM INDUSTRIALISASI PERIKANAN
(Studi Kasus: Komoditas Nila di Kabupaten Musi Rawas
Propinsi Sumatera Selatan)**

***Marketing Sector Development As A Support For Fisheries
Industrialization Program (Case Study: Tilapia Fish in the Musi Rawas
Regency, South Sumatera)***

***Hertria Maharani dan Rani Hafsaridewi**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

*email: hertria.maharani@gmail.com

Diterima 28 Februari 2014 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Industrialisasi perikanan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi. Peningkatan produksi yang tanpa disertai oleh upaya meningkatkan pemasaran akan berdampak pada kurang berhasilnya program tersebut. Penelitian ini mengkaji usaha budidaya, pasar, saluran pemasaran dan perdagangan ikan nila yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan. Studi lapangan dilakukan pada Bulan Maret-Juni 2012. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan bantuan kuesioner dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Responden terdiri dari pembudidaya, pengumpul, pedagang serta penentu kebijakan yang terkait dengan komoditas ikan nila. Metode analisis dilakukan secara analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan produksi budidaya ikan nila, namun pemasaran ikan terbatas pada pasar lokal. Pihak pembudidaya masih menjadi pihak *price taker* yang artinya tidak dapat meningkatkan posisi tawarnya. Struktur pasar pembudidaya bersifat persaingan sempurna, pada sisi lain dengan struktur pedagang bersifat oligopsoni sehingga harga di tingkat pembudidaya berada dibawah pengendalian pedagang. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani budidaya, dibutuhkan upaya menghilangkan pola *patron-client* dalam pembiayaan usaha dan pengembangan jalur pemasaran baru perlu dilakukan seperti dengan mencari pelanggan untuk keperluan restoran ataupun melakukan pemasaran ikan nila hingga ke daerah lain.

Kata Kunci: pemasaran, ikan nila, *price taker*, oligopsoni

ABSTRACT

Fisheries industrialization were announced by the Ministry of Marine and Fisheries Affairs aims to increase production, productivity and value-added of fishery products. But of course, increased production without increasing marketing efforts will make less successful impact for the program. This research will examine aquaculture business, market, marketing channel and trading of tilapia from Musi Rawas Regency, South Sumatra Province. Field studies conducted in March until June 2012. The main instrument of this study using a survey method with questionnaires and in-depth interviews with key informants. Respondents were consist of farmers, fish collectors, traders and policy makers related tilapia. Methods of analysis conducted with descriptive analysis. Results study showed that despite an increase in production experienced by farmers, but commodities marketed limited to the local market. Fish farmer is still as price takers meaning it cannot increasing their bargaining power. The structure of farmers markets are perfectly competitive, on the other hand the structure of merchant is oligopsonistic. So the prices at the farmers level are controlled by merchants. To improve the welfare of fish farmers, it should diminish patron client relationship and develop a new marketing channels, such as searching customer for restaurant or marketing tilapia to another region.

Keywords: marketing, tilapia fish, *price taker*, oligopsony

PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2011 telah mengeluarkan program industrialisasi perikanan yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi. Program ini sesuai dengan visi KKP yang ingin menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada tahun 2015.

Untuk mewujudkan visi tersebut tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini menggenjot sektor budidaya melalui industrialisasi perikanan dengan mengusung ikan nila sebagai salah satu komoditas unggulan. Nila menjadi komoditas unggulan karena komoditas ini mengalami peningkatan permintaan dari tahun ke tahun, baik dari pasar domestik maupun internasional. Setengah dari impor ikan nila di Amerika Serikat dipasok oleh Cina, sedangkan sisanya oleh Taiwan, Thailand dan Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). Produksi nila nasional pada tahun 2001 sebesar 34.122 ton, dan kemudian meningkat menjadi sebesar 214.514 ton pada tahun 2010 (Khairuman dan Amri, 2011). Peningkatan produksi menjadikan Indonesia sebagai peringkat keempat negara produsen nila terbesar di dunia setelah Cina, Mesir dan Filipina. Hingga saat ini sekitar 80% produksi ikan Nila masih diserap pasar lokal (Iriana, 2009).

Selain permintaan yang tinggi, alasan kedua ikan nila dijadikan sebagai komoditas unggulan adalah resistensi ikan tersebut terhadap berbagai virus karena, ikan nila memiliki daya tahan terhadap penyakit yang lebih kuat. Keunggulan ini membuat para pembudidaya bersemangat untuk memproduksi komoditas nila. Produksi ikan nila yang terus bertambah setiap tahunnya memberikan potensi dan harapan yang cerah untuk terus dikembangkan. Potensi yang besar ini juga dimiliki oleh Propinsi Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Selatan merupakan sentra budidaya ikan nila terbesar kedua secara nasional. Pada tahun 2010, produksi nila propinsi ini mencapai 16,82% dari total produksi nasional.

Peningkatan produksi yang diprioritaskan dalam program industrialisasi perikanan, tentunya juga harus diimbangi dengan kesiapan aspek pemasaran. Sebelum melakukan usaha, seorang pengusaha sebaiknya berpikir dan berorientasi ke

aspek pemasaran terlebih dahulu (Dardiani dan Intan, 2010). Tanpa adanya saluran pemasaran yang baik peningkatan produksi justru dapat menjadi bumerang bagi produsen dalam hal ini para pembudidaya. Banyak contoh kasus di daerah, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan bahwa Kabupaten Banjar tahun ini sedang mengalami kelebihan produksi sebanyak 2.000 ton untuk komoditas patin. Patin yang sudah diproduksi tidak dapat seluruhnya terserap oleh pasar dengan berbagai alasan. Hal ini salah satunya ditenggarai oleh saluran pemasaran yang kurang baik sehingga menyumbat rantai pasok dari komoditas itu sendiri. Terdapat juga contoh kasus kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga komoditas secara drastis yang terjadi di Kabupaten Jambi pada tahun 2010. Pada saat itu, peningkatan produksi secara bersamaan tidak diimbangi dengan serapan pasar sehingga banyak pembudidaya yang menjual hasil budidaya mereka dengan harga yang rendah. Oleh karena itu, aspek pemasaran merupakan bagian yang penting untuk dikaji.

Produksi yang terus meningkat di sektor hulu, akan menjadi lebih baik jika usaha budidaya ikan nila juga didukung dengan sistem pemasaran yang baik pada sektor hilir. Hal ini selain diharapkan untuk mempercepat tercapainya industrialisasi perikanan, juga dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya sehingga kesejahteraan dapat meningkat.

Sampai saat ini banyak komoditas nila yang tidak dapat dipasarkan dengan baik karena memiliki saluran pemasaran yang terbatas atau rantai pemasaran yang cukup panjang sehingga pembudidaya menerima sedikit sekali keuntungan dari penjualan ikan nila. Untuk itu cukup penting kiranya untuk dilakukan kajian terhadap sektor hilir dari komoditas ini. Berdasarkan hal tersebut penting untuk dikaji perkembangan usaha budidaya ikan nila, pola perdagangan komoditas nila dan saluran pemasaran komoditas nila. Dalam saluran pemasaran penting juga untuk ditelusuri saluran yang paling memberikan pendapatan tertinggi bagi pembudidaya. Dari kajian tersebut akan dapat terlihat tujuan penelitian yaitu identifikasi perkembangan usaha budidaya komoditas nila, analisa pola perdagangan yang terjadi pada komoditas ikan nila dan analisa saluran pemasaran yang efektif dan paling menguntungkan bagi pembudidaya nila.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan pada Bulan Maret- Juni 2012. Cara pengumpulan data adalah dengan melakukan survey dan wawancara mendalam dengan bantuan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada responden 30 orang. Pengambilan sampel dilakukan, secara *purposive* yang terdiri dari pelaku usaha pembudidaya, pengumpul, pedagang serta penentu kebijakan terkait ikan nila yang berada di sentra produksi ikan nila di lokasi penelitian. Metode analisis dilakukan secara deskriptif. Selanjutnya, guna menghitung margin pemasaran maka, digunakan formulasi berikut (Anwar,1994) :

$$M = Hp - Hb$$

Dimana:

M = Margin pemasaran/*Marketing margin*

Hp = Harga penjualan/*selling price*

Hb = Harga beli/*buying price*

Untuk menghitung keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran digunakan rumus :

$$\pi = M - Bp$$

Dimana :

π = Keuntungan pemasaran/*marketing profit*

M = Margin pemasaran/*marketing margin*

Bp = Biaya pemasaran/*marketing cost*

Sedangkan menurut Dahl dan Hammond (1977) untuk mengetahui struktur pasar, digunakan analisis sistem pemasaran yang mengkaji struktur pasar (*structure*), tingkah laku pasar (*conduct*), dan keragaan pasar (*performance*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Budidaya

Di antara jenis ikan budidaya perairan tawar, ikan nila merupakan salah satu komoditas andalan yang dapat dikembangkan untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Jenis ikan ini bahkan dapat dipelihara di perairan payau. Ikan nila mempunyai ciri-ciri yang diinginkan untuk komoditas budidaya yaitu cepat dari segi pertumbuhan, sedikit tulang, rasa daging yang enak, mudah berkembang biak, pasar yang baik dan mampu beradaptasi dengan kisaran yang lebar dari kondisi lingkungan (Pondaag, 2010). Dengan berbagai pertimbangan tersebut, ikan nila dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan yang masuk dalam program industrialisasi perikanan KKP.

Selain itu, peningkatan permintaan ikan nila sebagai salah satu pilihan sumber protein hewani dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia, serta di pasar internasional juga ikut mendorong meningkatnya usaha budidaya ikan nila. Seperti yang telah dijelaskan, pemasok utama untuk komoditas ikan nila di Amerika adalah Cina, Taiwan, Thailand dan Indonesia. Jika dilihat dari produksi, Indonesia merupakan negara keempat penghasil ikan nila di dunia setelah Cina, Mesir dan Filipina.

Tabel 1. Produksi Nila Berdasarkan Sentra Produksi Nila di Indonesia Tahun 2010.

Table 1. Tilapia Production Based on Tilapia Production Center in Indonesia, 2010.

No	Propinsi/Province	Produksi Nila/Tilapia Production	
		Volume/Volume (ton)	Persentase/Percentage (%)
1	Jawa Barat/West Java	106,889	23.03
2	Sumatera Selatan/South Sumatera	78,073	16.82
3	Sumatera Utara/North Sumatera	60,852	13.11
4	Sumatera Barat/West Sumatera	42,572	9.17
5	Jawa Tengah/Center Java	28,715	6.19
6	Kalimantan Selatan/ South Kalimantan	24,834	5.35
7	Jawa Timur/East Java	23,211	5.00
8	Sulawesi Utara/North Sulawesi	16,253	3.50
9	Jambi/Jambi	12,267	2.64
10	Bengkulu/Bengkulu	10,103	2.18

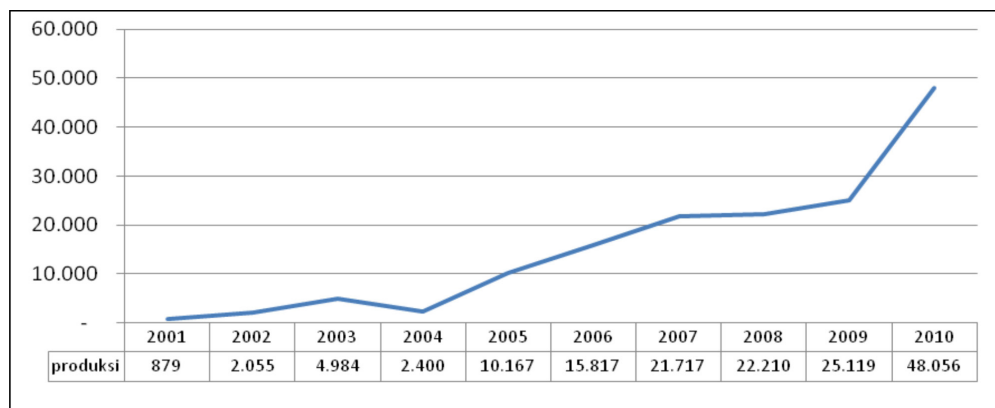
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010 / Source: Ministry of Marine and fisheries, 2010

Keberhasilan dari budidaya nila ini tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan membentuk sentra-sentra produksi nila. Untuk lokasi atau sentra produksi nila terbesar di Indonesia terletak di Propinsi Jawa Barat. Selain Propinsi Jawa Barat, sentra produksi Nila berada di Propinsi Sumatera Selatan. Produksi Nila di Jawa Barat sebesar 106.889 ton sedangkan untuk produksi nila di Sumatera Selatan sebesar 78.073 ton. Produksi Nila berdasarkan sentra produksi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Propinsi Sumatera Selatan, yang menjadi lokasi penelitian, merupakan produsen ikan nila terbesar kedua di Indonesia. Produksi ikan nila di Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan sistem budidaya kolam air deras ini diharapkan terus meningkat. Jumlah produksi ikan nila pada tahun 2010 yaitu sebesar 48.056 ton. Jumlah ini menguasai 16,82% produksi nasional komoditas ikan nila. Berikut adalah grafik yang menampilkan jumlah produksi nila propinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2001-2010¹².

Di Propinsi Sumatera Selatan, intensifikasi budidaya ikan nila berlangsung cepat sehingga ikan nila tidak hanya dipelihara di kolam seperti yang umum dilakukan, tetapi banyak juga yang menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) di waduk atau danau, karamba, sawah, kolam air deras, bahkan tambak air payau. Pada Kabupaten Musi Rawas, pengembangan budidaya ikan nila didukung oleh sarana jaringan irigrasi yang menyediakan sumber air tawar sepanjang tahun. Adanya jaringan irigrasi ini merupakan peluang untuk dapat meningkatkan produktivitas dari budidaya ikan nila di Propinsi Sumatera Selatan. Adapun jaringan irigrasi yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 2.

Di Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Tugumulyo merupakan kecamatan terbesar penghasil ikan nila yaitu sekitar 6.125 ton pada tahun 2011 dengan mengandalkan jaringan irigasi yang ada. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Muara Beliti (Kelurahan Priok, Ketuan Jaya, Air Satan), Kecamatan Tugu



Gambar 1. Produksi Ikan Nila di Propinsi Sumatera Selatan (ton), Tahun 2010
Figure 1. Tilapia Production in South Sumatra Province (Ton), 2010

Sumber: Dinas Propinsi Sumatera Selatan, 2010/Source: South Sumatra Provincial Agency, 2010

Tabel 2. Jaringan Irigasi di Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.
Table 2. Irrigation Network in the Musi Rawas Regency, South Sumatera.

No	Irigasi/ Irrigation	Kemampuan Pengairan/ Ability of Irrigation (Ha)
1	Kelingi Tugumulyo	36,000
2	Selangit Terawas	15,000
3	Kali Deres Babat	5,000
4	Jaya Loka	3,000
5	Pagar Sari (Megang Tikip)	2,000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan, 2011/
 Source: Fisheries and Marine Official Agency of South Sumatra Province, 2011

Mulyo (Tegal Redjo, Ketuan I), Kecamatan Purwodadi (Mardiardjo). Hal ini dikarenakan kecamatan-kecamatan tersebut merupakan penghasil nila dengan jumlah yang besar dalam kabupaten.

Berdasarkan hasil karakteristik responden, usaha budidaya ikan nila ini telah lama menjadi mata pencaharian masyarakat di Musi Rawas. Pembudidaya yang ada di Kabupaten Musi Rawas mayoritas memiliki pengalaman usaha 1-5 tahun. Karakteristik pembudidaya di Kabupaten Musi Rawas terlihat pada Tabel 3.

Sebagian besar pembudidaya yaitu sebanyak 57,1% berada pada kelompok kisaran umur produktif yaitu umur 19 hingga umur 49 tahun. Usia produktif akan memudahkan pengenalan terhadap inovasi dan teknologi untuk kelompok pembudidaya. Terlebih lagi sebanyak 39,5% pembudidaya minimal tamatan SD yang artinya dapat membaca dan menulis. Berdasarkan kesukuan, sebanyak 85,7% pembudidaya di Kabupaten Musi Rawas adalah transmigran dari Jawa. Secara aspek sosiologis, program-program yang dilakukan oleh pemerintah harusnya dapat diimplementasikan dengan baik karena sifat dari transmigran yang memiliki tingkat keuletan yang tinggi untuk memperbaiki hidupnya. Sekitar 39,5% pembudidaya mempunyai pekerjaan sampingan lain yaitu menjadi buruh. Hal ini menandakan masih kurangnya pendapatan yang mereka hasilkan sebagai pembudidaya ikan nila.

Karakteristik responden tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengembangkan program-program usaha budidaya sekaligus mengenalkan berbagai diseminasi teknologi untuk kelompok budidaya. Perhatian dari pemerintah diharapkan dapat memperluas peluang usaha budidaya baik dari sisi produksi maupun strategi pemasarannya.

Pola Perdagangan Komoditas Nila

Struktur pasar dan perilaku untuk perdagangan ikan Nila konsumsi di Kabupaten Musi Rawas dapat dikelompokkan menjadi 4 pelaku, antara lain:

1. Pembudidaya

Pendatang baru pada tingkat pembudidaya nila sangat terbuka luas. Hal ini dikarenakan teknologi budidaya cukup mudah dan modal yang relatif sedikit untuk memulai usaha budidaya. Pemasok benih pun saat ini sangat mudah untuk dijumpai. Pembeli dalam pasar juga cukup banyak walaupun saat ini kebanyakan hanya untuk konsumsi domestik. Dalam hal produk pengganti, justru ikan nila merupakan produk pengganti dari kakap merah yang berharga mahal. Namun, dengan tidak adanya hambatan untuk masuk dalam usaha ini menimbulkan persaingan dalam industri yang cukup ketat. Struktur pasar ikan Nila hidup di tingkat pembudidaya mendekati sifat persaingan sempurna. Hal ini berdasarkan ciri-ciri yang pasar persaingan sempurna, yaitu: (1) jumlah produsen yang sangat banyak dan tidak mempunyai kekuasaan secara individu untuk menentukan harga (pembudidaya sebagai *price taker*); (2) produk yang diperjualbelikan bersifat homogen; (3) pelaku bebas keluar masuk pasar; (4) pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang yang diperjualbelikan. Perilaku pelaku pembudidaya biasanya mengejar produksi sebanyak-banyaknya (kuantitas). (Arianto, 2008)

2. Agen Luar Kota

Struktur pasar yang terbentuk pada tingkat agen adalah oligopsoni. Oligopsoni, adalah keadaan

Tabel 3. Karakteristik Responden di Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2012.

Table 3. Respondent Characteristics in the Musi Rawas Regency, 2012.

No	Karakteristik/Characteristics	Persentase/Percentage (%)
1	Pengalaman Usaha/ Experience(1-5 tahun/year)	42.9
2	Umur/Age (30-39 tahun/year)	57.1
3	Suku/Tribe (Jawa/Java)	85.7
4	Pekerjaan sampingan/Side job (Buruh/labor)	57.1
5	Pendidikan/Education (SD/Elementary)	39.5

Sumber: Data primer diolah (2012) / Source: Primary data processed (2012)

dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas (Oentoro, 2010). Masing-masing penjual mempunyai pengaruh terhadap harga, tetapi tidak melakukan perubahan harga yang mencolok. Di Pasar Jakabaring Kota Palembang, terdapat 3-5 agen ikan Nila. Agen tersebut yang menentukan harga ikan Nila. Salah satu cara untuk menguasai pasar adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pembelinya dalam hal ini adalah pengecer ikan di pasar. Kemudahan-kemudahan tersebut seperti cara pembayaran yang ringan dimana pembeli boleh membayar produk yang diambil setelah produk tersebut laku terjual. Hal ini selain memperkuat agen dalam pasar juga membuat agen semakin berdaya dalam menentukan harga.

3. Pedagang Besar /Pengepul Lokal

Sama halnya dengan Agen, di tingkat pengepul atau pedagang besar lokal juga terbentuk struktur pasar oligopsoni karena jumlah pedagang besar. Pengepul mempunyai andil untuk menentukan harga ikan Nila di tingkat pembudidaya. Tetapi juga tidak dapat menentukan harga yang terlalu berbeda

dengan harga pasar. Untuk mempertahankan atau menguasai pasar, pengepul memberikan bantuan kepada pembudidaya. Bantuan tersebut seperti pemberian modal kerja (benih dan pakan), dengan demikian terjalin ikatan *patron-client* antara pengepul dan pembudidaya.

4. Pengecer

Di tingkat pengecer, struktur pasar yang terbentuk adalah pasar persaingan monopolistik, dimana jumlah penjual agak banyak namun masing-masing mempunyai sedikit pengaruh terhadap pasar dan produk yang diperjual belikan tidak homogen. Dalam hal ini, pengecer ikan nila di pasar-pasar yang menjadi lokasi penelitian berjumlah cukup banyak, kurang lebih 10 pengecer yang ditemui. Walaupun produk yang diperjualbelikan adalah ikan nila, tetapi ada perbedaan lokasi tempat berjualan sehingga masing-masing produk menjadi berbeda antara pengecer satu dengan yang lainnya. Pengecer yang berada di dalam lokasi pasar akan menjual produknya lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pengecer yang berlokasi di pintu masuk pasar. Hal ini sebagai upaya untuk menguasai pasar dan menarik pembeli.

Tabel 4. Struktur Pasar Produsen Nila di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Tahun 2012.
Table 4. Market Structure of Tilapia Producer in the Musi Rawas Regency, South Sumatera, 2012.

Segmentasi/ Segmentation	Jumlah pelaku/ Number of Actor	Hambatan Masuk/ Barrier to Entry	Diferensiasi Produk/Product Differentiation	Struktur Pasar/ Market Structure
Pembudidaya/Farmer	Banyak/Many	Rendah, teknologi mudah dan modal relatif kecil/Low, easy technology and small capital	Tidak ada/None	Persaingan sempurna/ Competitive rivalry
Agen luar kota/ outside trader	Sedikit/Few	Tinggi, modal yang besar/High, huge capital	Tidak ada/None	Oligopsoni/Oligopsony
Pedagang lokal/ Local trader	Sedikit/Few	Tinggi, modal yang besar/ High, huge capital	Tidak ada/None	Oligopsoni/Oligopsony
Pengecer/Retailer	Agak banyak/ Moderate	Rendah/Low	Tidak Ada/None	Persaingan monopolistik/ Monopolistic rivalry
Pengolahan ikan asap/Smoked fish processing	Sedikit/Few	Cenderung rendah, namun pasar masih terbatas/Moderate low, limited market	Tidak ada/None	Oligopsoni/Oligopsony
Pengolahan ikan asin/Salt fish processing	Hanya satu/Only one	Cenderung rendah, namun pasar masih terbatas/Moderate low, limited market	Tidak ada/None	Monopsoni/Monopsony

Sumber: Data primer diolah (2012) / Source: Primary data processed (2012)

4. Pengolah

Di tingkat pengolah, struktur pasar yang terbentuk untuk pengolah ikan asin adalah pasar monopsoni, dimana jumlah pembeli bahan baku ikan segar hanya satu dan dapat memberikan pengaruh terhadap harga pasar. Sedangkan untuk pengolah ikan asap, struktur yang terbentuk adalah oligopsoni dimana terdapat setidaknya 3 pembeli bahan baku ikan segar yang mampu memberikan pengaruh terhadap harga pasar.

Pemasaran Ikan Nila

Berdasarkan hasil pengamatan lapang, telah diperoleh informasi mengenai jenis produk akhir komoditas Nila yang diterima oleh konsumen dan saluran pemasarannya. Untuk produk akhir, yang dipasarkan adalah nila segar, ikan asap, ikan asin dan masakan nila. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 6 saluran pemasaran ikan Nila untuk konsumsi, (Tabel 5).

Tujuan pemasaran ikan nila segar dan masakan ikan nila yang disalurkan oleh para pengecer tersebar di daerah Propinsi Sumatera Selatan. Untuk olahan Ikan asap yang dipasarkan langsung oleh pengolah banyak dijual pada pasar-pasar lokal di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan

untuk produk akhir berupa olahan ikan asin, biasanya dipasarkan oleh pengolah ke pasar di daerah Bogor (Gambar 2).

Dari rantai pasok tersebut dapat terdeteksi bahwa untuk komoditas ikan nila di Kabupaten Musi Rawas setidaknya memiliki 6 saluran pemasaran. Dari saluran pemasaran ini setidaknya dapat dilihat margin pemasaran dan keuntungan yang diperoleh pembudidaya. Jika margin pemasarannya terlalu besar maka dapat diduga saluran pemasarannya tidak efektif. Selain komponen biaya pemasaran, margin pemasaran juga sangat ditentukan oleh harga beli para pelaku pasar dari produsen terkait komoditas yang diperjualbelikan. Berikut adalah tabel gambaran margin pemasaran di setiap saluran pemasaran (Tabel 6).

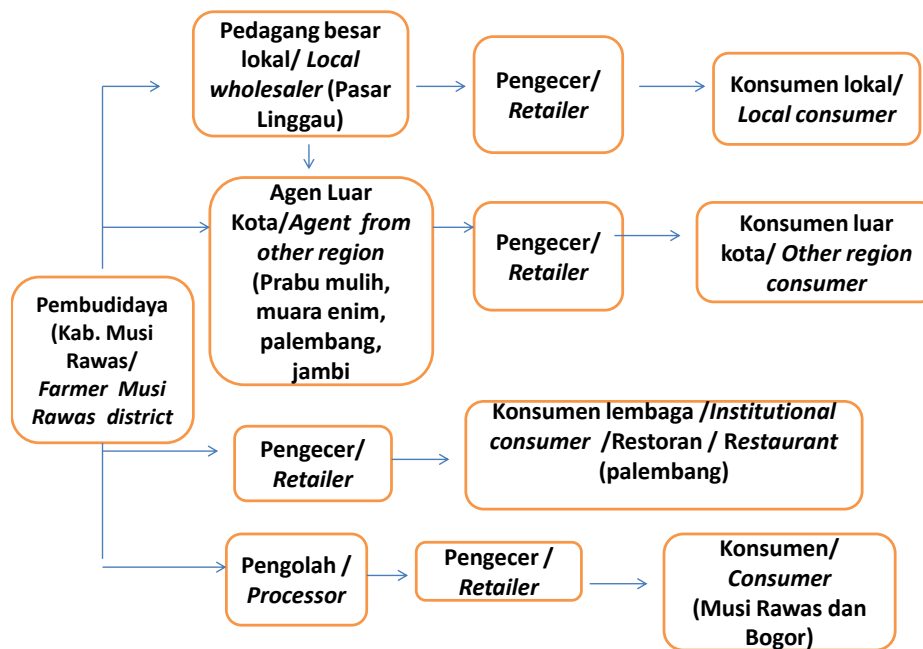
Untuk saluran 5 dan 6, pembudidaya menyalurkan langsung hasil panen ikan nila ke masing-masing pengolah, tidak dapat dilakukan penghitungan terhadap margin pemasarannya karena sudah terjadi proses perubahan bentuk dari ikan segar menjadi produk olahan. Tetapi bisa dilihat keuntungannya sebesar Rp. 1.343,- jika dijual ke pengolah ikan asin dan sebesar Rp. 4.843,- jika dijual ke pengolah ikan asap. Untuk pengolah ikan asin dihargai rendah karena biasanya yang diambil adalah ikan-ikan berukuran kecil.

Tabel 5. Saluran Pemasaran dan Produk Akhir Komoditas Nila di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Tabel 5. Tilapia's Channel Marketing and Its End Product in the Musi Rawas Regency, South Sumatera.

Saluran/ Channel	Rantai 1/ Chain 1	Rantai 2/ Chain 2	Rantai 3/ Chain 3	Rantai 4/ Chain 4	Rantai 5/ Chain 5	Produk Akhir/ End product
1	Pembudidaya/ Farmer	Pedagang besar Lokal/Local wholesaler	Pedagang Pengecer/ Retail trader	Konsumen akhir/End consumer		Ikan segar/ Fresh fish
2	Pembudidaya/ Farmer	Pedagang Besar Lokal/ Local wholesaler	Agen Luar Kota/ Agent from other region	Pedagang pengecer/ Retail trader	Konsumen akhir/ End consumer	Ikan Segar/ Fresh fish
3	Pembudidaya/ Farmer	Agen di Luar kota/ Agent from other region	Pedagang pengecer/ Retail trader	Konsumen akhir/End consumer		Ikan Segar/ Fresh fish
4	Pembudidaya/ Farmer	Pedagang Pengecer/ Retail trader	Pengecer Restoran/ Restaurant	Konsumen Akhir/End consumer		Masakan nila/ Tilapia food
5	Pembudidaya/ Farmer	Pengolah ikan/ Fish processor	Pedagang pengecer/ Retail trader	Konsumen akhir/End consumer		Ikan asin/ Salted fish
6	Pembudidaya/ Farmer	Pengolah ikan/ Fish processor	Pedagang pengecer/ Retailer	Konsumen akhir/End consumer		Ikan asap / Smoked fish

Sumber: Data primer diolah (2012) / Source: Primary data processed (2012)



Gambar 2. Rantai Pasok Pemasaran Ikan Nilai di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012.

Figure 2. Tilapia Marketing Supply Chain in the Musi Rawas Regency, 2012.

Sumber: Data primer diolah (2012) / Source: Primary data processed (2012)

Tabel 6. Harga Beli Awal Ikan Nila dan Margin Pemasaran Pedagang Besar Lokal, Agen Luar Kota, Pedagang Pengecer di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, 2012.

Table 6. Tilapia's Buyer Price and Local Wholesaler, Agent from Other Region, Retail Trader Marketing Margin in the Musi Rawas Region, South Sumatera, 2012.

Saluran/ Channel	Harga Beli Ikan Dari Pembudidaya/ Buyer Fish Price from Farmer (Rp/Kg)	Margin Pemasaran Pedagang Besar Lokal/ Marketing Margin Local Trader (Rp/Kg)	Margin Pemasaran Agen Luar Kota/ Outside Agent's Marketing Margin (Rp/Kg)	Margin Pemasaran Pedagang Pengecer/ Marketing Margin for Retail Trader (Rp/Kg)	Total Margin Pemasaran/ Total Marketing Margin (Rp/Kg)	Keuntungan Pembudidaya dari Penjualan/ Farmer Profit From Sales (Rp/Kg)
1	16,500	2,250	-	5,250	7,500	4,843
2	16,500	2,250	2,250	4,000	8,500	4,843
3	18,000	-	3,000	4,000	7,000	6,343
4	21,000	-	-	3,000	3,000	9,343
5	13,000	-	-	-	-	1,343
6	16,500	-	-	-	-	4,843

Sumber: Data primer diolah (2012) / Source: Primary data processed (2012)

Dari tabel di atas dapat dilihat pula rantai pemasaran terpendek dengan margin paling rendah hanya sebesar Rp. 3.000,- adalah saluran 4. Saluran yang menghubungkan antara pembudidaya dan konsumen lembaga/restoran juga ternyata memberikan keuntungan terbesar bagi pembudidaya yaitu sebesar Rp. 9.343,-. Namun, persyaratan ikan nila yang dapat dijual

untuk kebutuhan restoran tidaklah mudah. Ukuran nila yang diminta di atas 400 gram, sedangkan yang para pembudidaya dalam jangka waktu 4 bulan pemeliharaan biasanya ukuran ikan yang dihasil 3-6 ekor/kg atau paling besar 350 gram. Hal ini tentunya harus meningkatkan usaha dari pembudidaya agar bisa menghasilkan ikan yang ukurannya sesuai baik dengan pemberian

pakan yang ditingkatkan maupun waktu panen yang lebih lama. Jika pembudidaya berani untuk mengklasifikasikan segmentasi usahanya untuk masing-masing kebutuhan pasar, usaha ikan nila ini akan sangat menjanjikan.

Permintaan untuk kebutuhan restoran yang masih sedikit dan persyaratan ukuran yang diinginkan membuat pembudidaya harus menjual hasil panennya ke pelaku pemasaran lainnya. Dari tabel dapat terlihat bahwa saluran 3 memiliki margin pemasaran terkecil dan keuntungan terbesar jika dibandingkan dengan saluran 1 dan 2. Pada saluran 3, pembudidaya langsung memasarkan hasil panennya melalui agen luar kota. Namun, pada implementasinya, menjual ikan ke agen luar kota merupakan pilihan jika ikan hasil panen pembudidaya tidak habis dibeli oleh pedagang besar lokal. Padahal pedagang besar lokal membeli dengan harga yang rendah yaitu sebesar Rp. 16.500,- saja. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan *patron-client* antara pedagang besar lokal dengan pembudidaya terkait permodalan usaha. Banyak pembudidaya yang meminjam uang ke pedagang besar lokal dengan perjanjian harus menjual hasil panennya ke mereka dengan harga yang ditentukan pedagang. Dengan demikian, pembudidaya selalu menjadi *price taker* tanpa ada posisi tawar dengan pedagang.

Untuk mengatasi masalah pembudidaya sebagai *price taker*, hubungan *patron-client* harus dapat diputus. Pembudidaya harus dapat mandiri mengenai modalnya atau setidaknya bergantung pada pihak yang tidak akan mempengaruhi keputusan harga jual beli ikan seperti misalnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Jika pembudidaya tidak memiliki hubungan *patron client* terkait permodalan dengan pedagang besar lokal, maka pembudidaya memiliki pilihan pasar yang lebih luas dan pedagang pasar lokal akan secara alami mengikuti harga yang diberikan oleh agen luar kota. Perluasan pasar juga akan sangat berarti untuk mengatasi terjadi lonjakan produksi akibat panen secara bersamaan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Dari pengamatan usaha budidaya, produksi di Kabupaten Musi Rawas masih dapat ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas pembudidaya sebanyak 57,9 % berumur produktif

dengan tingkat pendidikan minimal SD. Hal ini memungkinkan terus dilakukannya peningkatan produksi melalui pengenalan teknologi. Selain itu peningkatan ini juga didukung sumber pengairan yang banyak di sepanjang Kabupaten. Karakteristik pembudidaya di Musi Rawas juga termasuk mudah untuk menerima pengenalan teknologi yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran seperti informasi pasar.

Dilihat dari struktur industri, peluang juga masih terbuka lebar bagi yang ingin berusaha di bidang pengolahan ikan nila mengingat jumlah pelaku yang masih sedikit dan peluang untuk usaha budidaya ikan nila masih terbuka lebar karena teknologi budidaya yang cukup mudah dan modal yang relatif sedikit. Namun sistem pemasaran yang ada belum memberikan keuntungan optimal bagi pembudidaya ikan. Banyak pembudidaya yang dirugikan akibat lemahnya posisi tawar mereka. Selain itu, kesempatan usaha juga masih terbuka untuk pelaku pasar karena jumlah pelaku pasar yang sedikit jika dibandingkan dengan pasokan ikan.

Dilihat dari tujuan pemasaran, pasar masih terbatas pada daerah sekitar (lokal), belum ada aktifitas ekspor. Tujuan pemasarannya untuk nila hidup, masakan ikan nila dan ikan asap adalah di sekitar Kabupaten Prabumulih, Kota Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang dan ada pula yang didistribusikan ke Propinsi Jambi. Sedangkan untuk ikan asin nila dipasarkan hingga ke Bogor.

Analisis menunjukkan, saluran pemasaran terbagi menjadi 6 saluran pemasaran. Saluran ini mengalirkan produk dengan pelaku pasar: pedagang besar lokal, agen besar luar kota, pengecer dan pengolah. Walaupun jumlah saluran pemasarannya banyak, pemain yang ada di dalamnya khususnya pada pedagang baik lokal dan luar kota sangatlah sedikit. Begitupun dengan jumlah pengolah. Ditambah lagi dengan adanya hubungan *patron client* antara pedagang besar lokal dan pembudidaya sehingga pembudidaya tidak leluasa memasarkan produknya ke saluran lain sebelum ditawarkan terlebih dahulu ke pedagang lokal. Hal ini dikhawatirkan akan menyumbat saluran pemasaran dan pembudidaya terus berada di posisi tawar yang lemah.

Untuk saluran pemasaran yang paling menguntungkan adalah jika pembudidaya menjual produknya ke pedagang pengecer untuk kebutuhan

restoran. Harga yang akan didapatkan tinggi namun perlu diingat biasanya jumlah yang dibeli tidak terlalu banyak sesuai dengan perkembangan permintaan dari sektor restoran dan ukuran yang lebih besar. Dalam jumlah besar, pembudidaya dapat memasarkan hasil panennya ke agen luar kota dengan margin pemasaran terendah dan untung tertinggi jika dibandingkan dengan menjual hasil ke pedagang besar lokal.

Implikasi Kebijakan

1. Untuk mengatasi kelemahan posisi dari pembudidaya, khususnya dalam hal harga, hubungan *patron-client* antara pembudidaya dan pedagang besar lokal harus dapat dihilangkan. Pemerintah dapat memberikan akses permodalan atau membantu untuk menguatkan kelembagaan finansial kelompok untuk melepas pola ketergantungan pembudidaya dan pedagang besar.
2. Pembudidaya harus dilengkapi dengan *market information* yang baik untuk pengembangan jaringan pasar, sehingga pembudidaya dihadapkan pada banyak opsi pembeli.
3. Pembudidaya baiknya melakukan segmentasi produk sehingga dapat dipasarkan pada masing-masing pelaku pasar sesuai dengan persyaratan yang diinginkan
4. Dikarenakan keuntungan yang diperoleh dari saluran pemasaran untuk tujuan konsumen lembaga (restoran) cukup tinggi, maka dapat diciptakan bentuk-bentuk *market creativity* untuk membuat masyarakat menyukai ikan nila. Ikan nila dapat diperkenalkan bukan hanya untuk kebutuhan restoran, tapi juga menu di hotel ataupun catering sehingga permintaan ikan nila akan terus meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, I.M. 1994. *Dasar-Dasar Marketing*. Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- Arianto, E. 2008. Mengukur Struktur Industri (Pasar). <http://strategika.wordpress.com/2008/08/04/mengukur-struktur-industri/> (Diakses tanggal 25 Februari 2013).
- Dahl & J. W. Hammond. 1977. *Market and Price Analysis: agricultural industries*. New York: Mc. Graw Hill Book Company.
- Dardiani & R. S. Intan. 2010. Mata Diklat 7 Manajemen Pemasaran. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan. 2010. *Profil Perikanan Budidaya 2009*. Sumatera Selatan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan. 2011. *Profil Perikanan Budidaya 2011*. Sumatera Selatan.
- Iriana, D. W. 2009. Kapan Menjadi Pemasok Utama. (<http://www.agrina-online.comredesign2.php?rid=7&aid=1994>). diunduh tanggal 7 januari 2013).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012 *Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011*. Jakarta: Direktorat Perbenihan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- Khairuman & Amri. 2011. *2,5 Bulan Panen Ikan Nila*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka.
- Pondaag, I.S. 2010. Budidaya Ikan Nila..(<http://epetani.deptan.go.id/budidaya/budidaya-ikan-nila-98>) (Diakses tanggal 22 Oktober 2013).
- Oentoro, D. 2010. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

ANALISIS POLA HUBUNGAN KERJA PONGGAWA SAWI PADA USAHA PERIKANAN TERIPANG DITINJAU DARI FUNGSI EKONOMI

An Analysis of Work Relationship Pattern of Ponggawa Sawi in The Sea Cucumber Business In Terms of Economic Function

***Naharuddin Sri dan Yusuf Kamlasi**

Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Jl. Adi Sucipto Penfui, P.O.Box. 1152, Kupang 85011
*email: na_sry@yahoo.com
Diterima 23 April 2013 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang ditinjau dari fungsi ekonomitelah dilaksanakan pada Bulan April sampai Juni 2011 di Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mewawancarai 8 orang *pongawa* dan 45 orang *sawi*. Pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Random Sampling*. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang dan analisis kuantitatif untuk menganalisis pendapatan *pongawa* dan *sawi*. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua (2) pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang, yaitu berdasarkan suku dan kontrak kerja. Sistem bagi hasil *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang ada dua (2) pola. Padapola pertamaponggawa mendapat bagian 25 persen dari hasil dan 75 persen dibagikan kepada *sawi*; sedangkan pada pola ke duaponggawa mendapat bagian 50 persen dari hasil dan 50 persen sisanya dibagikan kepada *sawi*. Pendapatan rata-rata per bulanpongawa pada sistem bagi hasil 25 : 75 berkisar Rp. 3.300.000 sampai Rp. 4.500.000sedangkan sawiberkisar Rp. 750.000 sampai Rp. 1.375.000. Pada sistem bagi hasil 50 : 50, pendapatan rata-rata per bulanpongawa berkisar Rp. 2.100.000,- sampai Rp. 2.980.000 dan sawi berkisar Rp. 480.000 sampai Rp. 1.650.000.

Kata Kunci: pola hubungan kerja, *pongawa sawi*, perikanan teripang

ABSTRACT

The study aimed to to analyze the ponggawa sawi workrelationship patternin the sea cucumberbusiness in terms of economic function was conducted April to June 2011 in Barrang Lompo Island, Makassar City. This was a case study involving 8 ponggawa and 45 sawi.Respondents were selected by purposive sampling. Qualitative analysis was used to analyse the work relationship patternof ponggawa sawi and quantitative analysis was used to analyzed ponggawa and sawi income.The study disclosed that there were two patterns of the work relationship in the sea cucumber business management: one was based on tribe and the other was based on work contract. There were two types of a profit shaing system. In type I, ponggawa had 25 percent of the share and sawi had 75 percent, while in type II, ponggawa has 50 percent and sawi had 50 percent. The average monthly incomes of ponggawa in the first system (25:75), respectively,was from IDR 750,000 to IDR 1,375,000 and sawi from IDR 3,300,000 to IDR 4,500,000. In the second system (50:50), the average monthly income of ponggawa and sawi respectively was IDR 2,100,000 to IDR 2,980,000 and IDR 480,000 to IDR 1,650,000.

Keywords: work relationship pattern, *pongawa sawi*, sea cucumber business

PENDAHULUAN

Masyarakat nelayan Indonesia sejak dahulu sudah memiliki pola hubungan kerjasama yang mendukung pelaksanaan aktifitasnya. Sistem hubungan kerja yang bersifat tradisional tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, walaupun pemerintah telah membangun sistem pengelolaan modern. Menurut Indar (2005), sistem pengelolaan perikanan bersifat tradisional yang diperuntukkan masyarakat sampai saat ini diyakini masih digunakan oleh sebagian besar masyarakatnya, antara lain adalah sistem *Sasi* di Maluku, *Panglima Laot* di Aceh, *Juragan Pandega* di Jawa dan *Ponggawa Sawi* di Sulawesi Selatan.

Nelayan dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi resiko, antara lain berupa resiko keselamatan di laut dan resiko ketidakpastian hasil tangkapan yang dapat diperoleh. Dalam menjalankan aktifitasnya, nelayan teripang membutuhkan sarana penangkapan seperti perahu, mesin, kompresor, masker dan kaki katak. Sarana tersebut tidak mampu dibeli oleh nelayan *sawi*. Upaya untuk mengatasi hal tersebut ditempuh dengan menjalin hubungan kerja dengan *pongawa*. Kondisi ini selanjutnya menjadi titik awal terjalinnya hubungan kerja antara *pongawa* dengan *sawi* pada usaha perikanan teripang, dimana mereka sepakat menjalin hubungan kerja karena masing-masing mempunyai tujuan yang ingin dicapai melalui hubungan tersebut.

Penelitian tentang *pongawasawi* telah dilakukan oleh beberapa pakar, Sallatang (1982) mengkaji hubungan *pongawa sawi* dari sudut pandang sosiologi dengan penekanan pada kelompok kecil dan Indar (2002) mengkaji hubungan *pongawa sawi* dari sudut pandang pengelolaan pesisir dan laut. Para peneliti yang telah disebutkan sudah ada yang membicarakan *pongawa sawi* dari sudut pandang fungsi ekonomi, tetapi waktu pelaksanaan penelitiannya sudah lama sehingga kemungkinan sudah mengalami perubahan dalam hal sumber modal *pongawa*, cara perekrutan *sawi*, lokasi penangkapan dan sistem bagi hasil. Khusus hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang, belum ada peneliti yang mengkajinya..

Hubungan kerja *pongawa sawi* memiliki kecenderungan yang tampak timpang, dimana diasumsikan bahwa hubungan kerja tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak. Untuk mengkaji

ketimpangan hubungan kerja *pongawa-sawi*, khususnya dari sudut pandang fungsi ekonomi dilakukan melalui pendekatan kerjasama operasi penangkapan, pembagian resiko dan distribusi pendapatan. Dari konteks inilah yang mendasari dan menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang ditinjau dari fungsi ekonomi. Penulis memilih usaha perikanan teripang karena pada usaha perikanan teripang terjalin hubungan kerja antara *pongawa* dengan *sawi*, dimana *pongawa* berperan sebagai pemilik sarana penangkapan, pemilik modal dan *sawi* yang mengoperasikannya, pada kerjasama produksi, terdapat pembagian kerja yaitu juragan laut, bas, penyelam, bagian selang dan koki yang berpengaruh pada pola hubungan kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bagaimana pola hubungan kerja antara *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang ditinjau dari fungsi ekonomi? Bagaimana bentuk sistem bagi hasil *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang dan berapa besar pendapatan yang diterima *pongawa sawi* berdasarkan pola hubungan kerja yang mereka jalin pada usaha perikanan teripang? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang ditinjau dari fungsi ekonomi, menganalisis sistem bagi hasil *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang dan menganalisis besar pendapatan yang diterima *pongawa sawi* berdasarkan pola hubungan kerja yang mereka jalin pada usaha perikanan teripang.

METODOLOGI

Penelitian telah dilakukan di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada bulan April sampai Juni 2011. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang di lokasi penelitian. Pendekatan kuantitatif untuk mengetahui jumlah pendapatan *pongawa sawi*. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus

(*case study*), yang merupakan bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan, dalam hal ini pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang di lokasi penelitian.

Populasi obyek penelitian ini adalah semua *pongawa* dan *sawi* pada usaha perikanan teripang yang ada di lokasi penelitian. Jumlah usaha perikanan teripang di lokasi penelitian sebanyak 15 usaha yang terdiri dari 15 *pongawa* dan 150 *sawi* (Barrang Lompo dalam Angka, 2010). Teknik penarikan sampel *pongawa* dan *sawi* dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu suatu proses penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu (Sugiyono, 2008). Jumlah sampel *pongawa* yang diambil dalam penelitian sebanyak 8 orang dan *sawi* sebanyak 45 orang. Jadi jumlah sampel *pongawa* dan *sawi* telah memenuhi kriteria pengambilan sampel, yaitu minimal 10% dari jumlah populasi (Nasution, 2004).

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah dan penelusuran pustaka. Metode pengambilan data lapangan meliputi observasi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial *pongawa* dan *sawi* di lokasi penelitian, khususnya mengenai pola hubungan kerja yang mereka jalin. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang berfungsi sebagai pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang fakta yang diketahui serta pendapat dan sikap responden yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pengisian kuesioner dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu sebagian pertanyaan dengan pilihan jawaban dan sebagian dengan pengisian. Kuesioner diberikan kepada responden yang ada di lokasi penelitian, yaitu *pongawa* dan *sawi* untuk memperoleh informasi yang selanjutnya akan dipergunakan dalam menganalisis hubungan kerja antara *pongawa* dengan *sawi* di lokasi penelitian. Diskusi mendalam dilakukan dengan responden *pongawa* dan *sawi* untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci tentang hubungan kerja yang terjalin antara *pongawa* dengan *sawi*.

Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dilakukan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif untuk menganalisis pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang, termasuk sistem bagi hasil dan besar pendapatan yang diterima *pongawa sawi*. Sistem bagi hasil didasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, Pasal 3 ayat 1, jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: 1. perikanan laut: a. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% dari hasil bersih; b. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% dari hasil bersih. 2. Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 lawan 1. Pasal 4. Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut: 1. perikanan laut: a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya; b. beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis biaya investasi dan biaya operasional yang dikeluarkan pada usaha perikanan teripang serta untuk menganalisis sistem bagi hasil sebagai dasar untuk mengetahui besar pendapatan *pongawa* dan *sawi*. Rumus yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah:

- $\text{Penerimaan} = \text{Jumlah hasil tangkapan} \times \text{harga jual}$
 $\text{Pendapatan} = \text{Penerimaan} -$

Biaya Total

- Selanjutnya pendapatan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil *Ponggawa sawi* sehingga diperoleh nilai pendapatan *pongawa* dan *sawi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Perikanan Teripang

Investasi yang dikeluarkan oleh *pongawa* sebagai pemilik usaha pada usaha perikanan teripang terdiri dari sarana penangkapan teripang. Sarana penangkapan yang digunakan terdiri dari kapal, mesin, kompressor, selang, *gps*, *fishfinder*, masker dan *finch*.

Untuk lebih jelasnya, jenis, jumlah dan harga sarana penangkapan teripang yang diinvestasikan *pongawa* oleh pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 menunjukkan, biaya investasi terbesar yang dikeluarkan oleh *pongawa* pada usaha perikanan teripang adalah biaya pembelian kapal sekitar Rp. 30.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- dan mesin dengan harga sekitar Rp. 30.000.000,- sampai Rp. 60.000.000,-.

Hasil identifikasi terhadap responden *pongawa* pada usaha perikanan teripang di Pulau Barrang Lompo menunjukkan bahwa jumlah biaya investasi *pongawa* bervariasi. Distribusi responden *pongawa* menurut biaya investasi yang dikeluarkan pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan biaya investasi rata-rata yang dikeluarkan responden *pongawa* sekitar Rp.158.300.000,- dengan kisaran Rp.125.200.000,- sampai Rp.192.200.000,-. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menjalankan usaha

Tabel 1. Jenis, Jumlah dan Harga Sarana Penangkapan yang Diinvestasikan oleh Ponggawa Pada Usaha Perikanan Teripang di Pulau Barrang Lompo, 2011.

Table 1. Type, Quantity and Price of Fishing Equipment Invested by Ponggawa in the Sea Cucumber (*Holothuria Scabra*) Business in Barrang Lompo Island, 2011.

Jenis/Type	Jumlah (Unit)/ Quantity (Unit)	Harga (Ribu Rupiah/unit)/ Price (thousands of IDR/unit)
Kapal/Boat	1 - 2	30,000 – 50,000
Mesin/Machine	2	30,000 – 60,000
Kompressor/Compressor	1- 2	6,000 – 10,000
Selang/hose	1 - 2	750 – 1,000
GPS	1	1,000
Fishfinder	1	5,000 – 6,000
Masker/Mask	2	350 – 500
Kaki katak/Finch)	2	500 – 750

Sumber : Data primer setelah diolah (2011)/Source : Primary data processed (2011)

Tabel 2. Biaya Investasi yang Dikeluarkan oleh Ponggawa Perkapal Pada Usaha Perikanan Teripang di Pulau Barrang Lompo, 2011.

Table 2. Investment Cost Incurred by Ponggawa in the Sea Cucumber (*Holothuria Scabra*) Business at Barrang Lompo Island, 2011.

Usaha Perikanan Responden Ponggawa/ Fishery Business Respondents	Total Biaya Investasi (Ribu Rupiah)/ Total Investment Cost (Thousands of IDR)
1	192,200
2	180,200
3	182,500
4	183,700
5	130,200
6	125,200
7	130,200
8	142,200
Jumlah/Total	1,266,400
Rata-rata/Average	158,300
Kisaran/Range	125,200 s/d 192,200

Sumber : Data primer setelah diolah (2011)/Source : Primary data processed (2011)

perikanan teripang diperlukan investasi yang besar. Oleh karena itu, skala usaha perikanan teripang sangat bergantung dari jumlah modal yang dimiliki oleh ponggawa.

Berdasarkan hasil penelitian di Pulau Barrang Lompo, diketahui bahwa jenis biaya operasional yang dikeluarkan pada usaha perikanan teripang terdiri dari biaya bahan bakar, air tawar, bahan pengawet, konsumsi sawi selama operasi penangkapan dan biaya lain-lain.

Distribusi rata-rata biaya operasional tiap kapal yang dikeluarkan per trip pada operasi penangkapan teripang berdasarkan lokasi penangkapan pada usaha perikanan teripang di Pulau Barrang Lompo dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 menunjukkan biaya operasional rata-rata perkapal setiap trip yang dikeluarkan responden *pongawa* untuk lokasi penangkapan di perairan Balikpapan rata-rata sekitar Rp. 21.002.500,- dengan kisaran Rp. 17.725.000,-

sampai Rp. 24.390.000,-, perairan Banjarmasin rata-rata sekitar Rp. 27.488.000,- dengan kisaran Rp. 22.815.000,- sampai Rp.32.460.000,- dan perairan Mamuju rata-rata sekitar Rp. 9.213.750,- dengan kisaran Rp. 8.550.000,- sampai Rp. 26.000.000,-.

Distribusi rata-rata biaya operasional rata-rata per tahun tiap kapal berdasarkan lokasi penangkapan pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan biaya operasional rata-rata per tahun setiap kapal yang dikeluarkan responden *pongawa* untuk lokasi penangkapan di perairan Balikpapan rata-rata sekitar Rp. 63.007.500,- dengan kisaran Rp. 53.175.000,- sampai Rp. 73.170.000,-, perairan Banjarmasin rata-rata sekitar Rp.27.488.000,- dengan kisaran Rp. 22.815.000,- sampai Rp. 32.460.000,- dan perairan Mamuju rata-rata sekitar Rp. 18.427.500,- dengan kisaran Rp. 17.100.000,- sampai Rp. 19.850.000,-. Hal ini mengindikasikan bahwa

Tabel 3. Biaya Operasional Rata-Rata Per Trip Tiap Kapal Berdasarkan Lokasi Penangkapan Pada Usaha Perikanan Teripang di Pulau Barrang Lompo, 2011.

Table 3. Average Operating Costs of Each Boat Trip According to Fishing Ground in The Sea Cucumber (*Holothuria Scabra*) Business in Barrang Lompo Island, 2011.

Responden/ Respondent	Lokasi/ Location	Biaya Operasional (Ribu Rupiah)/ Operational Cost (Thousands of IDR)	Lokasi/ Location	Biaya Operasional (Ribu Rupiah)/ Operational Cost (Thousands of IDR)	Lokasi/ Location	Biaya Operasional (Ribu Rupiah)/ Operational Cost (Thousands of IDR)
1	Perairan B.papan	23,350	Perairan B.Masin	31,350	Perairan Mamuju	9,925
2	Perairan B.papan	23,370	Perairan B.Masin	31,430	Perairan Mamuju	8,950
3	Perairan B.papan	24,390	Perairan B.Masin	32,460	Perairan Mamuju	8,550
4	Perairan B.papan	23,360	Perairan B.Masin	31,410	Perairan Mamuju	9,430
5	Perairan B.papan	18,775	Perairan B.Masin	23,312	Perairan Mamuju	-
6	Perairan B.papan	17,725	Perairan B.Masin	22,815	Perairan Mamuju	-
7	Perairan B.papan	18,775	Perairan B.Masin	23,312	Perairan Mamuju	-
8	Perairan B.papan	18,275	Perairan B.Masin	23,815	Perairan Mamuju	-
Jumlah/Total		168,020		219,904		36,855
Rata-rata/ Average		21,002.5		27,488		9,213.75
Kisaran/Range		17,725 s /d 24,390		22,815 /d 32,460		8,550 s/d 26,000

Sumber : Data primer setelah diolah (2011)/Source : Primary data processed (2011)

Tabel 4. Biaya Operasional Rata-Rata Per Tahun Tiap Kapal Per Trip Berdasarkan Lokasi Penangkapan Pada Usaha Perikanan Teripang di Pulau Barrang Lompo, 2011.

Table 4. Average Operating Costs of Each Boat Trip According to Fishing Ground in The Sea Cucumber (*Holothuria Scabra*) Business in Barrang Lompo Island, 2011.

Responden/ Respondent	Lokasi/ Location	Biaya Operasional (Ribuan Rupiah)/ Operational Cost (Thousands of IDR)	Lokasi/ Location	Biaya Operasional (Ribuan Rupiah)/ Operational Cost (Thousands of IDR)	Lokasi/ Location	Biaya Operasional (Ribuan Rupiah)/ Operational Cost (Thousands of IDR)
1	Perairan B.papan	70,050	Perairan B.Masin	31,350	Perairan Mamuju	19,850
2	Perairan B.papan	70,110	Perairan B.Masin	31,430	Perairan Mamuju	17,900
3	Perairan B.papan	73,170	Perairan B.Masin	32,460	Perairan Mamuju	17,100
4	Perairan B.papan	70,080	Perairan B.Masin	31,410	Perairan Mamuju	18,860
5	Perairan B.papan	56,325	Perairan B.Masin	23,312	Perairan Mamuju	-
6	Perairan B.papan	53,175	Perairan B.Masin	22,815	Perairan Mamuju	-
7	Perairan B.papan	56,325	Perairan B.Masin	23,312	Perairan Mamuju	-
8	Perairan B.papan	54,825	Perairan B.Masin	23,815	Perairan Mamuju	-
Jumlah/Total		504,060		219,904		73,710
Rata-rata/ Average		63,007.5		27,488		18,427.5
Kisaran/Range		53,175 s/d 73,170		22,815 s/d 32,460		17,100 s/d 19,850

Sumber : Data primer setelah diolah (2011)/Source : Primary data processed (2011)

jarak lokasi dan lama operasi penangkapan teripang mempengaruhi jumlah biaya operasional. Selain itu, biaya operasional penangkapan teripang juga dipengaruhi oleh ukuran kapal, besar mesin dan jumlah sawi.

Biaya operasional yang dikeluarkan untuk operasi penangkapan umumnya ditanggung oleh *pongawa*, tetapi jika operasi penangkapan mengalami kerugian, maka kerugiannya harus ditanggung bersama oleh para *sawi* sebagai konsekuensi. Apabila *sawi* belum memiliki dana untuk menutupi kerugian, maka besar kerugian tersebut dikategorikan sebagai utang oleh *pongawa*. Hal ini yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi *sawi* dalam mengakumulasi kapital, sehingga kehidupannya tetap berada dalam kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Pulau Barrang Lompo tidak semua biaya

operasional penangkapan teripang ditanggung oleh *pongawa*, tetapi ada juga *sawi* yang menanggung biaya operasional penangkapan teripang dengan cara patungan sesama *sawi*. Hal ini mereka lakukan untuk mengantisipasi resiko penambahan utang jika operasi penangkapan teripang mengalami kerugian.

Jenis biaya tetap yang dikeluarkan setiap tahun pada usaha perikanan teripang terdiri dari total biaya penyusutan kapal, mesin, kompressor, selang, *gps*, *fishfinder*, masker dan kaki katak ditambah pajak. Distribusi responden *pongawa* menurut biaya tetap yang dikeluarkan perkapal pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan responden *pongawa* sekitar Rp 29.020.000,- dengan kisaran Rp 23.250.000,- sampai Rp 35.550.000,-.

Tabel 5. Biaya Tetap yang Dikeluarkan Oleh Ponggawa Perkapal Pada Usaha Perikanan Teripang di Pulau Barrang Lompo, 2011.**Table 5. Fixed Cost Incurred By Ponggawa in The Sea Cucumber (*Holothuria Scabra*) Business at Barrang Lompo Island, 2011.**

Responden/ Respondent	Total Biaya Tetap (Ribuan Rupiah)/ Total Fixed Cost (Thousands of IDR)
1	35,550
2	33,350
3	34,050
4	34,110
5	23,750
6	23,250
7	23,750
8	24,350
Jumlah/Total	232,160
Rata-rata/Average	29,020
Kisaran/Range	23,250 s/d 35,550

Sumber : Data primer setelah diolah (2011)/Source : Primary data processed (2011)

Pola hubungan kerja

Dinamika hubungan kerja antara *pongawa* dengan *sawi* telah berlangsung cukup lama sejak kegiatan penangkapan berlangsung. Bahkan dapat dikatakan seumur dengan kegiatan usaha perikanan tangkap, yang fungsi dan peranannya terus berkembang sesuai dengan perkembangan jenis dan kebutuhan penangkapan. Menurut Lampe (2003), kelompok *pongawa sawi* yang disamping mengatur pembagian dan menyerap tenaga kerja, juga sekaligus berperan sebagai lembaga perolehan modal, pasar, penyelesaian urusan utang piutang, menetapkan aturan bagi hasil dan sebagai wadah sosialisasi kelompok dan jaminan-jaminan sosial ekonomi nelayan.

Pola hubungan kerja antara *pongawa sawi* pada usaha telah mengalami perubahan penting dari bentuk hubungan *patrón-klien* lama bersifat ketat dan tertutup ke bentuk yang longgar dan terbuka. *Pongawa* memberikan pelayanan ekonomi, sosial, perlindungan, pengetahuan, keterampilan kerja bahkan pandangan dan etos kerja. Sementara *sawi* memberikan pengabdian, ketaatan dan kepatuhan, kesetiaan, pengakuan, kepercayaan, kerja keras, disiplin dan tanggung jawab.

Pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu berdasarkan suku dan kontrak kerja. Pola hubungan kerja berdasarkan suku yaitu pola

menunjukkan adanya kesamaan suku/hubungan kekerabatan antara *pongawa* dengan *sawi*. Contohnya adalah suku Bugis Makassar masih mempergunakan pola hubungan kerja berdasarkan pertimbangan suku dalam menjalankan usaha perikanan teripang. Pada pola kontrak kerja, kesamaan suku/hubungan kekerabatan bukan pertimbangan utama dalam menjalin hubungan kerja, tetapi yang utama motivasi dan kemampuan kerja sawei. Hal ini menyebabkan lahirnya pola hubungan berdasarkan kontrak kerja. Dalam pola pertamani, ada kesepakatan kontrak kereja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian/kontrak tertulis. Pada usaha perikanan teripang di Pulau Barrang Lompo, telah terjadi pergeseran pola hubungan kerja, awalnya berdasarkan hubungan kekekrabatan/kesamaan suku bergeser ke pola hubungan berdasarkan kontrak kerja.

Pongawa dalam menjalankan usaha perikanan teripang memerlukan modal yang akan digunakan untuk membeli sarana penangkapan teripang dan membantu kebutuhan ekonomi *sawi* dan keluarganya. Sumber modal *pongawa* di pulau Barrang Lompo ada dua, yaitu sumber modal internal, yaitu modal mandiri dan sumber modal eksternal yang sebagian modalnya merupakan investasi orang Cina. Hal ini akan berpengaruh pada investasi sarana penangkapan, pola operasi penangkapan, sistem bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh *pongawa* dan *sawi*. Pada pola pertama, *pongawa* tidak terikat kepada seseorang sebagai tempat menjual teripang

sehingga *pongawa* bisa memilih pembeli yang menawarkan harga yang paling tinggi. Pada pola ke dua, *pongawa* harus menjual seluruh hasil tangkapan teripang kepada orang Cina yang menginvestasikan modalnya dan harga pembelian ditentukan oleh orang Cina. Hal tersebut diterima *pongawa* sebagai konsekuensi, walaupun harga yang ditawarkan pembeli lain lebih tinggi. Selama ini, responden *pongawa* lebih memilih menerima investasi modal dari orang Cina daripada meminjam tambahan modal dari lembaga permodalan formal seperti bank dan koperasi. Hal ini disebabkan umumnya *pongawa* telah menjalin hubungan kerja dengan orang Cina sejak lama, bahkan telah dijalankan secara turun-temurun dan sifat hubungan tidak ketat. Pada hubungan ini, *pongawa* tidak dibebankan bunga karena sifatnya bukan pinjaman dan tidak ada batas waktu pengembalian modal. Cara pengembalian investasi yaitu langsung dipotong dari hasil penjualan teripang. Pola hubungan kerja antara *pongawa* dengan orang Cina lebih mengutamakan motif ekonomi, dalam hal ini orientasi keuntungan lebih diutamakan. Pada pola hubungan II, *sawi* tidak berhubungan langsung dengan orang Cina, tetapi memperoleh dampak dari hubungan *pongawa* dengan orang Cina, yaitu mempengaruhi sistem bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh.

Kekuatan modal *pongawa* mempengaruhi ketergantungan *sawi* pada *pongawa*. Dalam arti, besarnya kepemilikan modal akan menggambarkan status *pongawa* tersebut sebagai tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai dasar menjalin hubungan kerja oleh para *sawi*. Oleh karena itu, harus diakui bahwa apabila kepemilikan modal kecil, maka lambat laun *pongawa* akan ditinggalkan oleh para *sawinya*. *Pongawa* harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan semua *sawinya* agar tidak pindah ke *pongawa* lain. Kondisi tersebut menuntut para *pongawa* untuk selalu menyediakan dana untuk pinjaman bagi para *sawinya* karena sewaktu-waktu *sawi* akan datang ke *pongawa* untuk meminta panjar sebelum pergi melakukan operasi penangkapan teripang untuk keluarga yang ditinggalkan atau pinjaman uang untuk kegiatan sosial keluarganya. Hal ini juga merupakan salah satu cara *pongawa* untuk mengikat *sawinya* sehingga bisa terus menjalin hubungan kerja dengan *pongawa*.

Sawi hanya terikat kerjasama jika masih memiliki utang kepada *pongawa*. Jika *sawi* sudah mampu melunasinya atau ada *pongawa* lain yang

sanggup membantu melunasi utangnya, maka *sawi* tersebut bisa pindah dari *pongawa* sebelumnya dan secara langsung akan terikat hubungan kerja dengan *pongawa* yang telah membayarkan utangnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pola hubungan kerja *pongawa sawi* semakin longgar dan terbuka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sutarni (2006) yang menyatakan bahwa bentuk hubungan *pongawa sawi* telah mengalami perubahan penting dari hubungan *patron-klien* lama bersifat ketat dan tertutup ke bentuk yang longgar dan terbuka.

Hasil penelitian di Pulau Barrang Lompo, menunjukkan bahwa perekrutan *sawi* dapat terjadi secara timbal balik, yakni *sawi* yang mencari *pongawa* atau sebaliknya *pongawa* yang mencari *sawi*. Hubungan kerja *pongawa sawi* disertai kesepakatan atau perjanjian kerja tidak tertulis yang disepakati oleh keduanya. Pola hubungan kerja *pongawa sawi* sangat dipengaruhi oleh awal terbentuknya hubungan. Terbentuknya hubungan menghasilkan hak dan tanggung jawab masing-masing. Proses awal hubungan kerja terjadi setelah perjanjian kerja tidak tertulis antara *pongawa* dengan *sawi* disepakati. Suatu perjanjian dimana pihak *sawi* mengikatkan dirinya untuk bekerja pada *pongawa* dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kerja ini tidak tertulis disebabkan karena adanya sifat saling percaya antara *pongawa* dan *sawi*.

Pola perjanjian kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang di Pulau Barrang Lompo ada 2 yang perbedaannya terletak pada sistem bagi hasil.. Pada perjanjian kerja pola pertama, *pongawa* sebagai pemilik usaha berperan sebagai manajer, yaitu mengorganisasikan keseluruhan kegiatan produksi, menyediakan sarana penangkapan teripang yang selanjutnya dioperasikan oleh *sawi*. Pada sistem bagi hasil, setelah pendapatan kotor dikurangi biaya operasional penangkapan, kapal atau dalam hal ini *pongawa* mendapatkan bagian 25%. *Pongawa* memperoleh bagian 25% karena dia yang memiliki sarana penangkapan dan resiko kerusakan kapal dan peralatannya menjadi tanggungan *pongawa*. Sisanya 75% kemudian dibagi sesama *sawi* yang besarnya berdasarkan peran yang telah dilakukan pada operasi penangkapan teripang. Jadi pendapatan yang diterima *sawi* berdasarkan sistem bagi hasil tidak sama. Khusus juragan laut, akan mendapat tambahan pendapatan 1% dari bagian yang diterima *pongawa*. *Sawi* akan

dibayar oleh *pongawa* setelah hasil tangkapan dijual. Pola perjanjian kerja I umumnya dijalankan oleh hubungan kerja *pongawa sawi* yang sumber modal *pongawa* merupakan modal mandiri.

Perjanjian kerja pola ke dua *pongawa sawi* pada dasarnya sama dengan perjanjian kerja pola pertama, perbedaannya hanya terletak pada sistem bagi hasil antara *pongawa* dengan *sawi*. Pada perjanjian kerja pola ke dua, bagian yang diperoleh *pongawa* lebih banyak daripada pola hubungan kerja I. Pola perjanjian kerja II umumnya dijalankan oleh hubungan kerja *pongawa sawi* yang sumber modal *pongawa* sebagian berasal dari pinjaman orang cina.

Sawi di Pulau Barrang Lompo dalam melakukan aktifitas penangkapan teripang umumnya hanya memiliki kemampuan menyelam bagi penyelam teripang, keahlian mesin untuk bas/masini sedangkan untuk bagian selang dan koki tidak terlalu memerlukan keahlian khusus. Bagi juragan laut biasanya mereka harus memiliki jiwa kepemimpinan karena juga berperan sebagai kapten kapal sekaligus penentu lokasi penangkapan dan lama operasi penangkapan teripang.

Operasi penangkapan teripang telah lama dijalankan oleh *sawi* di pulau Barrang Lompo. Berdasarkan hasil penelitian di Pulau Barrang Lompo, diketahui bahwa ada 2 pola operasi penangkapan yang dilakukan oleh responden, yaitu pada pola pertama, operasi penangkapan teripang dilakukan sepanjang tahun dan pada pola ke dua, operasi penangkapan teripang tidak dilakukan sepanjang tahun. Pola operasi penangkapan I umumnya dijalankan oleh etnik Bajo sedangkan pola ke dua dijalankan oleh etnik Bugis Makassar. Pola operasi penangkapan mempengaruhi sistem bagi hasil yang disepakati antara *pongawa* dan *sawi*. Pada pola operasi penangkapan I, sistem bagi hasil yang disepakati adalah 25 : 75 sedangkan pada pola operasi penangkapan teripang yang kedua, sistem bagi hasil yang disepakati adalah 50 : 50.

Distribusi responden berdasarkan pola penangkapan teripang pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo menunjukkan responden *sawi* yang melakukan operasi penangkapan teripang sepanjang tahun di tiga lokasi sebanyak 26 orang, yaitu 57,78% dan yang tidak melakukan operasi penangkapan teripang sepanjang tahun sebanyak 19 orang, yaitu 42,22%.

Pada pola pertama operasi penangkapan teripang dilakukan sepanjang tahun. Pada bulan September sampai bulan Februari operasi penangkapan berlokasi di perairan Balikpapan sebanyak 3 trip selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan per trip, jadi sekitar 3 trip per tahun. Pada bulan Maret sampai bulan Mei operasi penangkapan berlokasi di perairan Banjarmasin sebanyak 1 trip selama kurang lebih 1 sampai 3 bulan per trip, jadi sekitar 1 trip per tahun. Pada bulan Juni sampai bulan Agustus operasi penangkapan berlokasi di perairan Mamuju sebanyak 2 trip selama kurang lebih 1 bulan per trip, jadi sekitar 2 trip per tahun. Total trip per tahun sekitar 6 trip. Setelah pulang dari operasi penangkapan, mereka biasanya hanya tinggal sekitar satu minggu di pulau. Waktu luang ini umumnya digunakan untuk beristirahat sambil berkumpul dengan keluarga, mempersiapkan kebutuhan operasional operasi penangkapan berikutnya, mengecek kondisi kapal dan peralatan dan sekaligus menunggu upah dari *pongawa* berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Pada pola kedua, operasi penangkapan teripang tidak dilakukan sepanjang tahun. Pada bulan September sampai bulan Februari operasi penangkapan berlokasi di perairan Balikpapan sebanyak 3 trip selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan per trip, jadi sekitar 3 trip per tahun. Pada bulan Maret sampai bulan Mei operasi penangkapan berlokasi di perairan Banjarmasin sebanyak 1 trip selama kurang lebih 1 sampai 3 bulan per trip, jadi sekitar 1 trip per tahun. Pada bulan Juni sampai bulan Agustus responden istirahat karena cuaca pada bulan ini tidak menentu sehingga sangat beresiko melakukan penangkapan. Jadi, total trip per tahun sekitar 4 trip. Waktu luang ini umumnya digunakan untuk berkumpul bersama keluarga, memperbaiki perahu dan peralatan penangkapan yang rusak dan sebagian juga di antara mereka mempergunakan waktu luangnya dengan menjadi nelayan perorangan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan lokasi penangkapan di sekitar pulau Barrang Lompo.

Terbentuknya dua pola operasi penangkapan dipengaruhi oleh sumber dan jumlah modal yang dimiliki oleh *pongawa*. Pada pola pertama, sumber modal *pongawa* merupakan modal mandiri sehingga mereka bisa menginvestasikan modalnya untuk membeli sarana penangkapan teripang yang memiliki ukuran dan daya muat

yang memungkinkan bisa melakukan operasi penangkapan teripang sepanjang tahun. Pada pola ke dua, sumber modal *pongawa* sebagian merupakan investasi orang Cina sehingga mereka memiliki beban harus mengembalikan investasi tersebut. Untuk mengurangi pengeluaran, maka mereka menginvestasikan modalnya untuk membeli sarana penangkapan teripang yang ukurannya relatif kecil sehingga beresiko untuk melakukan penangkapan pada saat keadaan laut tidak menentu.

Pemasaran

Pemasaran hasil tangkapan teripang dilakukan oleh *pongawa*. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada 2 pola pemasaran hasil tangkapan teripang yang dijalankan oleh *pongawa*. Pola pemasaran hasil tangkapan teripang dipengaruhi oleh sumber modal *pongawa*. Pada pola pertama, *pongawa* tidak terikat pada seseorang sebagai tempat memasarkan teripang. Tetapi mereka bebas menjual teripang hasil tangkapan kepada pembeli yang menawarkan harga yang paling tinggi. Umumnya, responden *pongawa* yang menjalankan pola pertama menjual teripangnya kepada eksportir di Surabaya karena menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang pengumpul yang ada di Makassar. Selisih harga teripang di Makassar dengan Surabaya sekitar 5 sampai 10%. Pada pola ke dua, *pongawa* harus menjual seluruh teripangnya kepada orang Cina yang menginvestasikan modalnya kepada *pongawa*. Umumnya harga pembelian dari orang Cina lebih rendah sekitar 20% dari harga standar yang berlaku di pasaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa harga teripang bervariasi menurut jenis dan ukurannya. Jenis teripang yang memiliki harga yang tinggi adalah jenis Teripang Koro dan Teripang Biba. Hal ini disebabkan jenis teripang tersebut memiliki permintaan yang tinggi di pasaran. Harga teripang juga dipengaruhi oleh kualitas teripang hasil tangkapan.

Penerimaan dan Pendapatan

Penerimaan usaha perikanan teripang bervariasi karena dipengaruhi oleh hasil tangkapan dan harga jual teripang. Rata-rata penerimaan per trip berdasarkan lokasi penangkapan adalah pada pola operasi penangkapan pertama, penerimaan

rata-rata yang terbesar per trip diperoleh dari perairan Banjarmasin dengan rata-rata sekitar Rp. 63.750.000,- dan kisaran Rp. 60.000.000,- sampai Rp. 70.000.000,-. Pada pola operasi penangkapan II, hasil tangkapan teripang rata-rata terbesar per trip juga diperoleh perairan Banjarmasin dengan penerimaan rata-rata per trip sekitar Rp. 48.000.000,- dan kisaran Rp. 45.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,-. Apabila dibandingkan, penerimaan yang diperoleh pada pola pertama lebih banyak dibandingkan pola ke dua, Hal ini dipengaruhi oleh jenis, jumlah dan harga teripang hasil tangkapan.

Rata-rata penerimaan per tahun usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo berdasarkan lokasi penangkapan menunjukkan pada pola operasi penangkapan I, penerimaan rata-rata yang terbesar per tahun diperoleh dari perairan Balikpapan dengan rata-rata sekitar Rp. 161.250.000,- dan kisaran Rp. 150.000.000,- sampai Rp. 180.000.000,-. Pada pola operasi penangkapan II, hasil tangkapan teripang rata-rata terbesar per trip juga diperoleh perairan Balikpapan dengan penerimaan rata-rata per tahun sekitar Rp. 120.000.000,- dan kisaran Rp. 105.000.000,- sampai Rp. 135.000.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh *pongawa* dan *sawi* jumlahnya tidak tetap, tergantung dari jumlah, jenis dan harga teripang yang ditangkap sehingga mempengaruhi hasil sistem bagi hasil. Pendapatan *pongawa* dan *sawi* tidak bisa diprediksi karena tergantung dari hasil tangkapan yang sifatnya juga tidak menentu. Adanya ketidakpastian hasil tangkapan inilah yang mendorong *sawi* untuk melakukan hubungan kerja dengan *pongawa*.

Sistem bagi hasil merupakan alternatif yang dikembangkan rata-rata masyarakat nelayan untuk mengurangi resiko. Sistem bagi hasil dapat mengurangi resiko bagi *pongawa* sebagai pemilik kapal dan meningkatkan motivasi kerja *sawi*. Hal ini terjadi karena hasil tangkapan yang tidak dapat ditentukan kepastiannya. Terbentuknya sistem bagi hasil dipengaruhi oleh adanya perubahan hubungan kerja *pongawa sawi*. Perubahan ini disebabkan semakin terbukanya informasi bahwa sumberdaya pesisir selain untuk dikonsumsi, juga memiliki nilai ekonomi di pasaran. Hal ini mendorong semakin banyak *pongawa* yang memasuki daerah pesisir dengan tujuan yang sama dan pada akhirnya terjadi eksploitasi

besar-besaran terhadap sumberdaya pesisir yang mengakibatkan terjadinya *over fishing*. Sistem bagi hasil inilah yang merubah orientasi hubungan kerja *pongawa sawi* dari orientasi sosial menjadi orientasi ekonomi.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha perikanan teripang di lokasi penelitian ada 2 pola berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden *pongawa* dan *sawi*. Hal ini dipengaruhi pola hubungan kerja yang dijalankan antara *pongawa* dengan *sawi*. Pada pola hubungan kerja yang menerapkan gabungan antara suku dan kontrak kerja atau pola pertama, menetapkan sistem bagi hasil 25 : 75, sedangkan pola hubungan kerja yang masih menerapkan hubungan suku atau pola pertama, menetapkan sistem bagi hasil 50 : 50. Hal ini disebabkan pada pola pertama, motif ekonomi lebih diutamakan daripada motif sosial sedangkan pada pola pertama motif sosial masih dipertimbangkan. Jadi telah terjadi perubahan sistem bagi hasil pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo, Dahulu sistem bagi hasil yang diterapkan umumnya 50 : 50, tetapi sekarang telah bergeser ke sistem bagi hasil 25 : 75.

Sistem bagi hasil disepakati pada saat melakukan perjanjian hubungan kerja antara *pongawa* dengan *sawi* dan umumnya termasuk salah satu isi perjanjian. Sistem bagi hasil yang berlaku tidak sama untuk semua *pongawa*. Pola sistem bagi hasil antara *pongawa* dengan *sawi* usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo menunjukkan ada dua pola sistem bagi hasil pada usaha perikanan di lokasi penelitian. Pola pertama adalah 25 : 75, yaitu *pongawa* mendapatkan bagian 25% dan 75% sisanya dibagi kepada *sawi* berdasarkan perannya dalam operasi penangkapan teripang, sedangkan pola ke dua yaitu 50 : 50, dimana *pongawa* mendapatkan bagian 50% dan 50% sisanya dibagi kepada *sawi* berdasarkan perannya dalam operasi penangkapan teripang.

Jumlah bagian yang diperoleh *sawi* berbeda menurut perannya pada saat operasi penangkapan teripang. Khusus untuk juragan laut, memperoleh tambahan bagian 1% dari bagian *pongawa*. Sistem bagi hasil pola pertama menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sistem bagi hasil pada hubungan kerja *pongawa sawi*. Pada awalnya, sistem bagi hasil yang diterapkan antara *pongawa* dengan *sawi* adalah 50 : 50. Sistem bagi hasil ini berbeda dengan sistem bagi hasil yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutarni (2006) diketahui bahwa sistem bagi hasil antara *pongawa* dengan *sawi* di Kabupaten Sinjai adalah 75 : 25, yaitu *pongawa* memperoleh 75% dan 25% dibagi oleh sejumlah *sawi*. Hasil penelitian Nadjib (1998) menunjukkan pola umum bagi hasil di daerah Teluk Lampung dan Pasuruan adalah pemilik memperoleh bagian 50% dari hasil bersih tangkapan ditambah 15% dari jumlah kotor hasil tangkapan sebagai cadangan jika ada kerusakan kapal ataupun jaring.

Khusus untuk juragan laut, memperoleh bagian 30% dari bagian *pongawa* dan Rp. 5000,- tiap kilogram teripang hasil tangkapan. Sistem bagi hasil yang disepakati umumnya hanya merupakan dasar pembagian hasil. Apabila hasil yang diperoleh banyak, maka *pongawa* akan memberikan tambahan pendapatan kepada *sawi*. Tambahan ini kemudian dikenal dengan istilah bonus.

Pendapatan rata-rata per bulan yang diperoleh responden *pongawa* pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo menunjukkan pada sistem bagi hasil pola pertama, yaitu 25 : 75, pendapatan rata-rata per bulan *pongawa* sekitar Rp. 3.850.000,- dengan kisaran Rp. 3.300.000,- sampai Rp. 4.500.000,-, sedangkan, pendapatan rata-rata per bulan *sawi* sekitar Rp. 1.080.000,- dengan kisaran Rp. 850.000,- sampai Rp. 1.375.000,-. Pada sistem bagi hasil pola ke dua, yaitu 50 : 50, pendapatan rata-rata per bulan *pongawa* sekitar Rp. 2.550.000,- dengan kisaran Rp. 2.100.000,- sampai Rp. 2.980.000,-, sedangkan pendapatan rata-rata per bulan *sawi* sekitar Rp. 573.000,- dengan kisaran Rp. 480.000,- sampai Rp. 650.000,-. Pendapatan rata-rata per bulan yang diterima *pongawa* dan *sawi* dipengaruhi oleh sumber modal *pongawa*, pola operasi penangkapan dan sistem bagi hasil.

Pendapatan yang diperoleh *pongawa* dan *sawi* berdasarkan sistem bagi hasil yang disepakati, baik pola 25:75 maupun pola 50:50, masih menunjukkan ketimpangan. Hal ini disebabkan bagian yang diterima *sawi* berdasarkan sistem bagi hasil harus dibagi lagi berdasarkan jumlah *sawi*. Berdasarkan hasil analisis, pendapatan yang diperoleh *sawi* di atas standar upah minimum regional Sulawesi Selatan tahun 2010, yaitu Rp650.000,-. Sedangkan pada pola sistem bagi hasil II, pendapatan yang diterima *sawi* masih di bawah standar upah minimum regional Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara selama penelitian, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antara *pongawa* dengan *sawi* adalah ketimpangan dalam sistem bagi hasil, selain itu pengaruh yang lain adalah rendahnya pengetahuan manajemen keuangan *sawi*. Jadi, walaupun pendapatan rata-rata yang diterima *sawi* pada sistem bagi hasil pola pertama sudah di atas standar upah minimum regional, akan tetapi umumnya mereka masih sulit keluar dari kemiskinan.

Apabila *sawi* mendapatkan pendapatan, maka umumnya tidak langsung membayar panjar yang telah diambil sebelum melakukan operasi penangkapan, tetapi digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif. Hal ini umumnya terjadi pada *sawi* yang masih bujangan sehingga lama-kelamaan utangnya kepada *pongawa* semakin menumpuk dan ditambah lagi kalau operasi penangkapan mengalami kerugian, secara otomatis utangnya semakin bertambah. Setelah berkeluarga, kebutuhan mereka semakin meningkat dan di satu sisi mereka juga harus membayar utangnya kepada *pongawa*. Selain itu, permohonan pinjaman untuk kebutuhan sosial seperti pernikahan dan membiayai keluarga yang sakit semakin menambah jumlah utang *sawi* kepada *pongawa*. Hal inilah yang menyebabkan para *sawi* sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Institusi *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo, tata hubungannya mengacu pada tradisi yang ada dan telah dilakukan secara turun-temurun sehingga akan terus berkelanjutan sampai masa yang akan datang selama komoditas teripang masih bisa diperoleh dari perairan. Keberlanjutan hubungan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan cara berpikir *sawi*. Hal ini disebabkan selama ini *sawi* terkendala pada modal untuk membeli sarana penangkapan teripang dan *pongawa* bisa menangani kendala ini dengan jalan mempekerjakan *sawi* sebagai tenaga kerja pada sarana penangkapan teripangnya. Selain itu, *sawi* rata-rata tidak memiliki keahlian lain selain meyelam dan tingkat pendidikannya sebagian besar masih rendah. Di satu sisi, pendapatan yang mereka peroleh dari penangkapan teripang sangat menggiurkan sehingga anak-anak yang seharusnya masih sekolah lebih memilih menjadi *sawi* dan hal ini didukung oleh orang tua mereka.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan :

1. Pola hubungan kerja *pongawa sawi* pada usaha perikanan teripang di Pulau Barrang Lompo terdiri dari 2 pola berdasarkan suku/ hubungan kekerabatan dan kontrak kerja
2. Sistem bagi hasil antara *pongawa* dan *sawi* pada usaha perikanan teripang di pulau Barrang Lompo ada 2 pola, yaitu pola pertama *pongawa* mendapat bagian 25 persen dari hasil setelah dikurangi biaya operasional dan 75 persen sisanya dibagikan kepada *sawi*, sedangkan pada pola ke dua *pongawa* mendapat bagian 50 persen dari hasil setelah dikurangi biaya operasional dan 50 persen sisanya dibagikan kepada *sawi*
3. Pendapatan rata-rata per bulan yang diterima *pongawa* dan *sawi* pada sistem bagi hasil 25 : 75 berkisar Rp. 3.300.000,- sampai Rp. 4.500.000,- dan berkisar Rp. 750.000,- sampai Rp. 1.375.000,- untuk *sawi*. Pada sistem bagi hasil 50 : 50, pendapatan rata-rata per bulan yang diterima *pongawa* berkisar Rp. 2.100.000,- sampai Rp. 2.980.000,- untuk *pongawa* dan berkisar Rp. 480.000,- sampai 1.650.000,- untuk *sawi*.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Sebaiknya ada lembaga pemberi pinjaman untuk nelayan, khususnya *sawi* yang bersifat lebih fleksibel, baik dalam administrasi, agunan maupun angsuran sehingga mereka bisa menjadi nelayan mandiri tanpa terikat lagi dengan *pongawa*.
2. Perlu ditingkatkan lagi penyuluhan tentang bahaya dekompressi agar bisa meminimalisir jumlah penyelam/*sawi* yang terkena dekompressi dan bisa menggugah *pongawa* untuk mengganti kompresor dengan tabung selam yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Barrang Lompo. 2010. Baranglompo dalam Angka Tahun 2010. Makassar.
- Indar, Y.N. 2005. *Sistem Sosial dan Kelembagaan Tradisional Masyarakat dalam Pengelolaan Pesisir dan Laut*. Makalah disajikan dalam

- Training on Integrated Coastal Zone Management (ICZM). MCRMP Bappeda Gorontalo. Gorontalo 10-19 Agustus 2005.
- _____. 2003. *Budaya Bahari dalam Konteks Global dan Modern*. Makalah disajikan dalam Kongres Kebudayaan V. Bukit Tinggi. Bukittinggi 20-23 Oktober 2003.
- Lampe. 2003. *Budaya Bahari dalam Konteks Global dan Modern*. Makalah disajikan dalam Kongres Kebudayaan V. Bukit Tinggi. Bukittinggi 20-23 Oktober 2003.
- Nasution, S. 2004. *Metode Research*. PT. Bumi Askara. Jakarta.
- Sallatang, M.A. 1982. *Ponggawa-Sawi : Suatu Studi Kelompok Kecil*. Disertasi tidak diterbitkan. Unhas. Makassar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R n D*. PT. Alvabeta. Bandung.
- Sutarni. 2006. *Prilaku Kewirausahaan Ponggawa: Studi Kasus Unit Bagang di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai*. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

**ETOS KERJA PEREMPUAN DI SEKTOR PERIKANAN PADA
KAWASAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) DAN STRATEGI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
(Studi Kasus Perempuan Pembudidaya Rumput Laut di Nusa Penida, Bali)**
***Ethos Work of Women in Fishery Sector in The Regional Masterplan
for Acceleration and Expansion of Economic Development and Their
Strategies For Economics Empowerment and Development
(Case Study on Women Cultivator of the Seaweed in Nusa Penida, Bali)***

***Nurlaili dan Fatriyandi Nur Priyatna**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
*email: lelykesa_antrop@yahoo.com

Diterima 4 April 2014 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan etos kerja perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan dikaitkan dengan strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Penelitian dilakukan pada tahun 2013 dengan fokus pada kawasan minapolitan Nusa Penida di 3 (tiga) gugusan pulau: Nusa Besar atau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan (observasi). Analisis data menggunakan deskriptif eksplanatoris dimana data-data yang dikumpulkan digambarkan secara rinci kemudian digunakan untuk menjelaskan strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida memiliki etos kerja yang tinggi, rajin, memiliki kesungguhan serta kemauan bekerja keras membantu suami dalam mencari nafkah. Pandangan perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida tentang pekerjaan yaitu bahwa tidak ada pekerjaan yang berat, sudah ada pembagian kerja dan saling membantu antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Strategi pemberdayaan dan pengembangan perempuan pembudidaya rumput laut dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yaitu dengan membuat kebijakan yang memihak melalui pengakuan peran dan partisipasi mereka serta melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kata Kunci: etos kerja, strategi pemberdayaan, pengembangan ekonomi, MP3EI

ABSTRACT

This paper aims to describe the work ethos female seaweed farmers in Nusa Penida and strategies associated with empowerment and economic development in the concept MP3EI. The study was conducted in 2013 with a focus on Nusa Penida Minapolitan in three (3) group of islands: Nusa Large or Nusa Penida, Nusa Lembongan and Nusa Ceningan. Research method used was a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and observation. Analysis of the data used descriptive explanatory by which data collected were described in detail and then were used to explain the strategy of empowerment and economic development there. Results showed that women seaweed farmers in Nusa Penida has a high work ethos, diligent, a seriousness and willingness to work hard to help her husband in making a living. View of female seaweed farmers in Nusa Penida on the job is that there is no heavy work, the existing division of labor and mutual help between men and women in accordance with the faith that they profess. Women's empowerment and development strategy seaweed farmers in supporting the acceleration and expansion of economic development is to create policies that favor through recognition of their role and participation as well as mentoring and training appropriate to their needs.

Keywords: work ethic, empowerment strategies, economic development, MP3EI

PENDAHULUAN

Berbagai artikel mengenai perempuan sudah banyak dapat kita temui. Peran perempuan dari berbagai aspek, baik di lingkup rumah tangga maupun publik, baik dari kacamata kesetaraan maupun ketidaksetaraan gender. Tulisan mengenai perempuan Bali, sudah banyak digambarkan mengenai bagaimana peranannya di berbagai aspek kehidupan. Sebuah tulisan Luh Ayu Tirtayani menggambarkan tentang pemaknaan peran wanita Bali di Desa Adat Kuta yang menggambarkan tidak hanya di lingkup rumah tangga namun juga publik. Berbagai tulisan tentang peran perempuan tidak hanya pada sektor pertanian dan pariwisata, namun juga pada sektor perikanan. Tulisan Witomo & Hikmah (2012) menggambarkan peran perempuan pembudidaya rumput laut di Desa Batu Nunggal, Nusa Penida. Tulisan ini menggambarkan peran perempuan dalam lingkup rumah tangga dan publik dilihat dari etos kerja yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Bali dikaitkan dengan strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi yang harus dilakukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di koridor Bali-Nusa Tenggara.

Konsep MP3EI merupakan sebuah pola induk perencanaan pemerintah Indonesia untuk mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran sehingga dapat dinikmati secara merata di masyarakat. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut didukung berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan keuntungan geografis masing-masing daerah. Konsep ini lahir pada tahun 2011 dengan melibatkan berbagai lembaga yang ada di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu lembaga yang turut serta berada di dalam pokja (kelompok kerja) MP3EI dengan mengembangkan konsep industrialisasi dalam sektor kelautan dan perikanan.

Delapan faktor dalam mendukung industrialisasi dalam sektor kelautan dan perikanan yaitu 1) terjaminnya ketersediaan sumber daya ikan secara berkesinambungan, 2) sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, 3) pengembangan ragam inovasi dan penerapan teknologi secara masif, 4) komoditas kelautan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi, 5) SDM yang handal dan kompeten, 6) pasar potensial yang dikelola baik,

7) dukungan investasi dari para pelaku usaha, 8) regulasi pemerintah yang kondusif. Industrialisasi ini pada dasarnya ditujukan dalam rangka mendukung terlaksananya empat pilar pembangunan nasional yakni *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* (Antara, 2013).

Salah satu faktor penting dalam industrialisasi adalah sumberdaya manusia yang handal dan kompeten. Tanpa sumberdaya manusia yang handal dan kompeten, ketujuh faktor lainnya tidak akan berarti apapun dalam mencapai tujuan pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia adalah etos kerja karena etos menentukan penilaian manusia atas suatu pekerjaan sehingga etos kerja akan menentukan pula hasil-hasilnya. Semakin progresif etos kerja suatu masyarakat, semakin baik hasil-hasil yang akan dicapai baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Siswanto, 2011).

Tujuan tulisan ini adalah menggambarkan etos kerja pembudidaya rumput laut perempuan di Nusa Penida. Diharapkan dengan adanya tulisan ini maka kebijakan pembangunan dengan strategi pemberdayaan dan pengembangannya tidak lagi mengabaikan peran perempuan pembudidaya rumput laut khususnya di Nusa Penida.

METODOLOGI

Konsep Etos Kerja

Berbicara mengenai industrialisasi dan pembangunan ekonomi tidak akan pernah dapat kita lepaskan dengan faktor-faktor non ekonomi, dan kebudayaan. Faktor budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi sebuah masyarakat. Salah satu faktor yang sangat penting dalam perilaku ekonomi masyarakat adalah etos kerja. Etos kerja dapat dipandang dari dua perspektif, pertama menggambarkan sikap mental yang ada dan kedua sebagai sikap kehendak yang dituntut agar dikembangkan. Etos kerja merupakan nilai diri seseorang sebagai paduan dari kognisi (*cognition*), afeksi (*affection*), dan konasi (*conation*). Kognisi adalah proses memahami (*process of knowing*) yang bersangkutan dengan pikiran; afeksi adalah perasaan yang ditimbulkan oleh perangsang dari luar; dan konasi adalah aspek psikologis yang berkaitan dengan upaya atau perjuangan. Etos kerja dapat dilihat sebagai sikap dasar seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan pekerjaan (Siswanto, 2011).

Etos merupakan sumber motivasi seseorang dalam berbuat, misalnya apakah pekerjaan dianggap sebagai keharusan demi hidup, apakah pekerjaan terikat pada identitas diri dan sosial, atau lebih lanjut dapat ditanyakan apakah yang menjadi sumber pendorong partisipasi seseorang dalam berbagai hal. Etos juga merupakan landasan ide, cita, atau pikiran yang akan menentukan sistem tindakan (*system of action*). Sumber pendorong etos kerja adalah kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku.

Lokasi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali. Lokasi penelitian terdiri dari tiga gugus pulau yaitu Nusa Besar atau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Lokasi penelitian merupakan sentra usaha budidaya rumput laut. Waktu Penelitian dilakukan pada tahun 2013. Data dan informasi diperoleh dari studi literatur terkait dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di lokasi yang sama.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan (*observasi*). Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif eksplanatoris dimana data-data yang dikumpulkan digambarkan secara rinci kemudian digunakan untuk menjelaskan strategi pemberdayaan dan

pengembangan ekonomi masyarakat. Karakteristik informan yang dipilih adalah perempuan pembudidaya rumput laut. Data sekunder dikumpulkan untuk mendukung data-data primer yang ada. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terkait dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di lokasi yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Usaha Budidaya Rumput Laut Nusa Penida

Nusa Penida terletak di Kabupaten Klungkung, salah satu kabupaten di Propinsi Bali. Secara fisik, dua pertiganya merupakan kepulauan dengan luas wilayah 20.284 Ha, sedangkan sepertiga wilayahnya merupakan daratan yang menyatu dengan pulau Bali. Kecamatan Nusa Penida merupakan kecamatan kepulauan dengan 3 gugusan pulau yaitu pulau Nusa Penida atau Nusa besar, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan, dengan 16 desa administratif. Pulau Nusa Penida mempunyai luas wilayah 192,72 km² dan secara administratif terbagi dalam 14 desa, Pulau Nusa Lembongan memiliki luas 8,89 km² yang terbagi atas 2 desa, serta Pulau Nusa Ceningan dengan luas 3,16 km². Batas utara dan barat Nusa Penida adalah Selat Badung, sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok dan sebelah selatan dengan Samudra Indonesia.

Mata pencaharian masyarakat di Nusa Penida umumnya di sektor perikanan, pertanian, peternakan, perdagangan dan sektor jasa. Selain di perikanan, pemanfaatan lahan di masyarakat



Gambar 1. Peta Kecamatan Nusa Penida
Figure 1. Map of Nusa Penida Sub-district

Sumber/Source : Nasution et al. (2013)

umumnya digunakan untuk tegalan, perkebunan, dan pekarangan. Khusus di Nusa Lembongan, pemanfaatan tanah termasuk juga untuk hutan lindung (mangrove). Peternakan sapi dan babi juga cukup intensif di Nusa Penida. Kondisi geografis kepulauan di Nusa Penida memberikan kekayaan potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan sumberdaya yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai mata pencaharian di Nusa Penida. Panjang pantai kepulauan Nusa Penida yang mencapai 83,50 km dapat dimanfaatkan untuk sumber perekonomian baik perikanan tangkap, budidaya, maupun wisata bahari. Namun, potensi yang besar tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara keseluruhan, peningkatan produktivitas usaha perikanan dan volume perdagangan hasil perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dinilai belum mencapai hasil yang maksimal.

Selain perikanan tangkap, di Nusa Penida berkembang usaha budidaya rumput laut. Hampir 90% nelayan Nusa Penida juga memiliki areal budidaya rumput laut. Di Desa Suana 100% nelayan memiliki areal rumput laut. Di Batununggul 90% nelayan memiliki areal rumput laut. Hal ini menjadi salah satu dasar penetapan Nusa Penida sebagai salah satu lokasi kawasan minapolitan budidaya rumput laut. Komoditas rumput laut merupakan produk unggulan di sektor perikanan, bahkan budidaya rumput laut menjadi salah satu mata pencaharian utama di kepulauan Nusa Penida.

Pada tahun 2008, melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2008 Kecamatan Nusa Penida ditetapkan sebagai kawasan minapolitan khususnya untuk komoditas rumput laut. Metode budidaya rumput laut yang digunakan oleh masyarakat adalah sistem lepas dasar dengan jenis yang dibudidayakan *E. spinosum* dan *E. cottonii*. Luas lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya rumput laut di Nusa Penida dari hasil survey The Nature Conservancy (TNC) pada tahun 2009 adalah 308 Ha (Welly *et al.*, 2012). Hingga saat ini pengembangan budidaya rumput laut telah mencapai 45% dari luas areal pantai di Nusa Penida. Jenis rumput laut *cottonii* tumbuh subur di Nusa Lembongan tepatnya di selat antara Lembongan dan Ceningan. Total hasil panen rumput laut setiap rumah tangga rata-rata mencapai 40 - 50 ton per panen (35 hari). Namun hingga saat ini harga rumput laut masih sangat berfluktuasi, pada bulan September 2013, harga rumput laut jenis *spinosum* sp dengan kadar air 30% antara

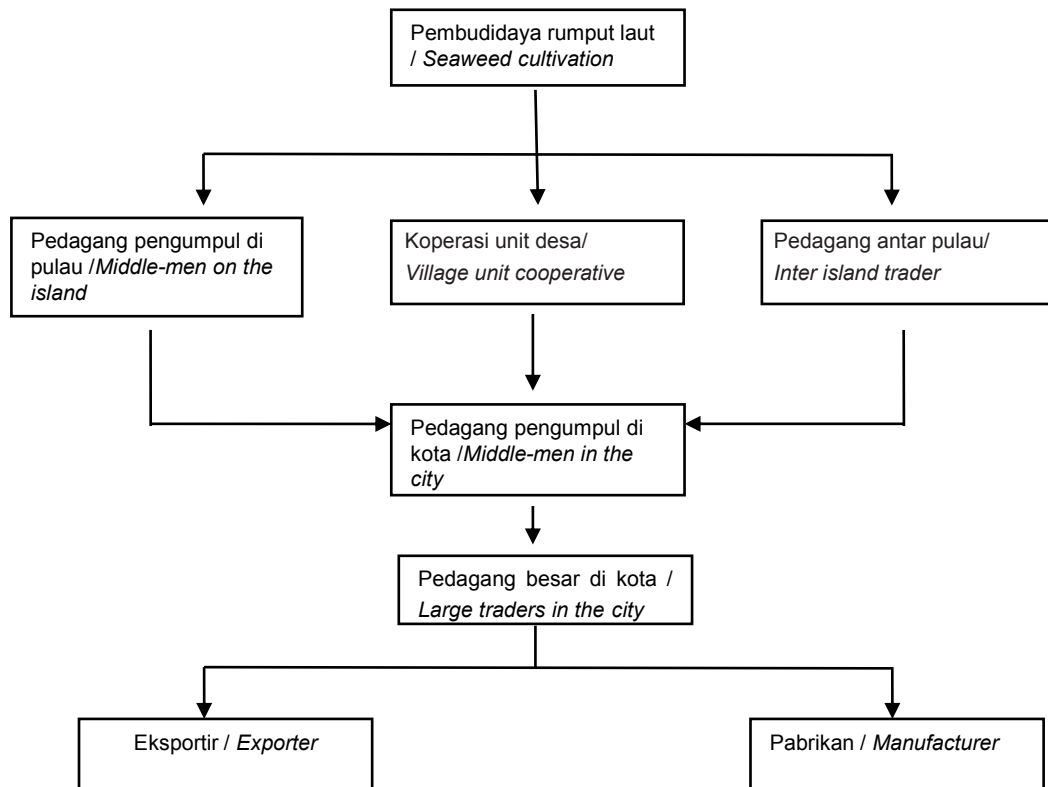
Rp 2.000 – 3.900 per kg, untuk jenis *Cottonii* Rp 10.000 per kg. Kisaran pendapatan bersih rata-rata Rp. 300.000 / petak (10x10 m²).

Penjemuran menggunakan meja jamur dan *para-para* masih belum banyak dilakukan, hanya beberapa pembudidaya. Alasannya selain keterbatasan lahan/tanah untuk bangunan dan harga rumput laut tidak didasarkan kualitasnya.

Pengecekan kualitas kebersihan rumput laut biasanya dilakukan oleh pedagang pengumpul di lokasi pembudidaya. Hal ini dilakukan karena tingginya tingkat persaingan diantara para pedagang, sehingga mereka mau menerima rumput laut dalam kondisi kurang bersih. Pedagang pengumpul melakukan pekerjaan untuk memisahkan rumput laut dengan pasir ketika akan dijual kepada pedagang di luar kota. Hal ini dilakukan karena perbedaan harga terhadap kualitas rumput laut.

Hasil budidaya rumput laut umumnya dijual kepada pedagang pengumpul yang ada di masing-masing lokasi pembudidaya rumput laut. Penjualan rumput lautnya kepada pedagang pengumpul mana saja. Pada umumnya mereka sangat tergantung pada pengumpul untuk menjual hasil panen. Pembudidaya rumput laut yang sudah bergabung dalam kelompok menjual hasil panennya kepada koperasi kelompok yang sudah terbentuk. Selain kepada pengumpul lokal, pembudidaya rumput laut juga menjual kepada pedagang antar pulau. Pedagang pengumpul dan koperasi tingkat desa, rumput laut dijual ke pedagang pengumpul yang ada di Kota Nusa Penida. Saluran pemasaran rumput laut berikutnya adalah pedagang besar di Kota Denpasar dan dijual kepada eksportir, di Surabaya atau Makassar. Ekspor rumput laut ke China, Taiwan, Korea dan Jepang. Gambar rantai pemasaran rumput laut di Nusa Penida dapat dilihat pada Gambar 2.

Satu tradisi unik yang ditemui masyarakat di Nusa Penida adalah tradisi *munuh*. Tradisi *munuh* adalah tradisi mengambil sisa panen rumput laut yang dilakukan bukan oleh pemilik areal rumput laut atau boleh siapa saja. Tiap desa memiliki aturan *munuh* yang berbeda. Di Desa Semaya, tradisi *munuh* tidak boleh dilakukan oleh orang lain, sisa hasil panen hanya boleh diambil oleh pemilik areal rumput laut. Namun, jika sisa panen rumput laut masuk ke tambak milik orang lain maka pemilik tambak tersebut berhak mengambil munuhnya. Perbedaan aturan *munuh* ini disebabkan karena tiap lokasi memiliki jenis rumput laut yang berbeda.



Gambar 2. Saluran Pemasaran Rumput Laut di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung
Figure 2. Marketing Channel Seaweed in Nusa Penida, Klungkung District

(Diadopsikan/Adoption: Nasution *et al.* (2013))

Lokasi yang dominan ditanami jenis rumput laut *cottonii* maka tradisi *munuh* dilarang. Hal ini disebabkan karena jenis rumput laut *cottonii* memiliki harga jual yang tinggi. Di lokasi lain yang didominasi oleh jenis rumput laut *spinosum* maka tradisi *munuh* diperbolehkan, siapa saja berhak mengambilnya.

Selain perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, pengolahan hasil perikanan di Nusa Penida juga memiliki potensi yang cukup besar. Perkembangan sektor pariwisata membuka peluang lebih luas. Hingga saat ini pengolahan hasil perikanan di Nusa Penida masih belum berkembang. Pemasaran produk olahan hasil perikanan masih sebatas dijual ke pasar atau warung-warung lesehan. Untuk rumput laut, jenis olahan yang sudah diproduksi adalah dodol, manisan, kerupuk, pepes, selai dan jus rumput laut dengan jumlah produksi yang masih sedikit dan masih sebatas pesanan. Pola pemasaran hasil pengolahan produk ini masih sangat sederhana dan membutuhkan perluasan akses pasar. Hal ini menyebabkan pola produksinya masih sangat bergantung pada pemasar.

Sudah ada pelaku usaha pengolahan yang memproduksi olahan yang dipasarkan di satu tempat objek wisata. Hal ini disebabkan karena tempat wisata tersebut merupakan milik pribadi keluarganya sehingga lebih mudah untuk memantau penjualan. Umumnya jumlah produksi rata-rata 10 kg/panen siklus produksi dua kali dalam seminggu. Kegiatan pengolahan hasil perikanan hanya dilakukan di lokasi Nusa Lembongan. Pengolahan hasil perikanan di Nusa Penida baru pada tahapan inisiasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) introduksi teknologi, dan pengetahuan beberapa jenis pengolahan.

Prospek pemasaran pengolahan hasil perikanan di Nusa Penida cukup besar mengingat sektor wisata cukup berkembang di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini usaha pengolahan hasil perikanan masih termasuk dalam kategori sederhana baik dari jenis olahan maupun teknologi pembuatan dan pengemasannya. Bantuan teknologi pengolahan dari pemerintah maupun pihak lain belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan belum berkembangnya jenis usaha pengolahan hasil perikanan adalah

karena alokasi waktu perempuan yang lebih banyak bekerja di usaha budidaya rumput laut.

Peran Perempuan dalam Rumah Tangga dan Usaha Budidaya Rumput Laut

Berdasarkan data statistik di bawah ini, jumlah perempuan di Nusa Penida lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan di Nusa Penida seperti pada umumnya di Bali bahwa perannya mereka tidak hanya sebagai istri/ibu rumah tangga juga dalam berbagai aspek kehidupan termasuk menyumbang pendapatan rumah tangga.

Peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sudah banyak dilihat baik di ruang privat maupun ruang publik. Perempuan tidak hanya mengerjakan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, mereka juga membantu suami dalam mencari nafkah. Bahkan terkadang peran perempuan dalam aktivitas ekonomi menunjukkan dominasinya. Hal ini sudah ditunjukkan dari berbagai hasil penelitian (Chrysantini (2010); Nurlaili & Koeshendrajana (2010); Witomo & Hikmah (2012):

Nasution *et al.* (2013)) serta masih banyak lagi penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa kaum perempuan memberikan alokasi waktu yang besar bahkan melebihi porsi waktu yang diberikan oleh kaum laki-laki.

Budidaya rumput laut telah berkembang di Nusa Penida sejak tahun 1980-an dan sudah merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di samping nelayan dan pertanian. Usaha rumput laut ini dilakukan mayoritas oleh kaum perempuan, mulai dari tahap persiapan, produksi, dan pasca produksi. Hasil penelitian Witomo & Hikmah (2012) menunjukkan bahwa sebanyak 76,8 % perempuan di Desa Batununggul di Nusa Penida terlibat dalam pekerjaan pembudidaya rumput laut. Besarnya peran perempuan dalam usaha budidaya rumput laut berpengaruh pada besarnya kontribusi perempuan dalam pendapatan ekonomi rumah tangga di Nusa Penida.

Alokasi waktu yang diberikan kaum perempuan pada usaha budidaya rumput laut lebih besar dibandingkan laki-laki, mulai dari persiapan, penanaman, pemeliharaan, panen dan

Tabel 1. Komposisi Jumlah Laki-laki dan Perempuan Menurut Data di Kecamatan Nusa Penida Tahun 2011

Table 1. Composition Number of Men and Women Based on Data on Nusa Penida District in 2011.

Desa/Village	Laki-laki/Men	Perempuan/Women	Total/Total
Sakti	1,770	1,791	3,561
Bunga Mekar	1,176	1,297	2,473
Batumadeg	1,206	1,175	2,381
Klumpu	1,658	1,663	3,321
Batukandik	1,886	2,354	4,240
Sekartaji	770	843	1,613
Tanglad	1,013	1,167	2,180
Pejukutan	1,660	1,780	3,440
Suana	1,645	1,684	3,329
Batununggul	2,048	2,260	4,308
Kutampi	1,507	1,561	3,068
Kutampi Kaler	1,393	1,286	2,679
P e d	1,927	1,897	3,824
Toyepakeh	279	318	597
Lembongan	2,203	2,088	4,291
Jungutbatu	1,566	1,689	3,255
Jumlah/amount	23,707	24,853	48,560

Sumber: BPS (Registrasi Penduduk) / Source: BPS (Civil Registration), 2012

pasca panen. Laki-laki umumnya hanya terlibat pada kegiatan penanaman dan panen rumput laut. Pada tahap persiapan kaum perempuan memiliki peran mempersiapkan tali yang akan digunakan untuk mengikat rumput laut, mengikatkan bibit rumput laut ke tali-tali yang sudah dipersiapkan dan mempersiapkan yang akan diikat. Biasanya waktu yang dibutuhkan pada tahap persiapan ini tidak terbatas, dilakukan sejak selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga sampai menjelang tidur malam. Umumnya kaum perempuan memanfaatkan waktu luangnya dengan mengikat tali temali, bahkan sambil bersenda gurau mereka juga melakukan pekerjaan tersebut.

Hal lainnya yang dilakukan oleh kaum perempuan pada tahap persiapan adalah memilah bibit dari hasil panen. Tahapan persiapan yang dilakukan oleh perempuan meliputi mempersiapkan tali pengikat rumput laut, mempersiapkan bibit yang akan diikat, mengikatkan bibit rumput laut ke tali-tali / mengikat bibit dari hasil penelitian rumput laut yang dipanen dipilah dan dipisahkan antara yang akan dijual atau dijadikan bibit. Setelah mendapatkan bibit rumput laut, maka tugas selanjutnya adalah mengikatkan bibit ke tali temali yang sudah disiapkan. Kaum perempuan sangat

mahir melakukannya. Pekerjaan ini dilakukan bersama-sama dengan beberapa anggota kerabat (Tabel 2).

Setelah ikatan-ikatan rumput laut sudah selesai maka tahap berikutnya adalah membawanya ke pantai untuk ditanam. Umumnya pekerjaan ini dilakukan bersama-sama dengan suami. Waktu penanaman rumput laut adalah pada saat air laut surut, biasanya pada pagi hari. Pasang surut air laut memang sangat berpengaruh pada usaha budidaya rumput laut. Jika pukul 02.00 WITA dini hari air sudah surut maka mereka harus segera bangun dan memulai pekerjaan mereka seperti memanen atau memasang rumput laut. Pada tahap penanaman biasanya kaum perempuan membantu memegang tali bersama dengan laki-laki. Perempuan juga terlibat dalam pemeliharaan. Umumnya mereka menggunakan perahu kecil dan mendayung ke lokasi lahan budidaya rumput laut. Sambil menunggu panen, para perempuan tidak serta merta menganggur, mereka umumnya tiap hari membantu kerabat yang membutuhkan tenaga pada tahap persiapan atau pasca panen. Mereka yang bukan pemilik rumput laut biasanya terlibat dalam proses pasca panen dan persiapan. Bantuan ini mereka berikan secara ikhlas tanpa

Tabel 2. Keterlibatan Peran Perempuan pada Tahap Persiapan.

Table 2. The Involvement of Women Role on Preparation Stage.

Waktu/Time	Aktivitas/Activity
Tidak terbatas, sejak selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga sampai menjelang tidur malam (05.00-22.00 WITA) / <i>An limited, since finished do housework until at bedtime night (05.00-22.00 WITA)</i>	• Mempersiapkan tali yang akan digunakan untuk mengikat rumput laut / <i>Prepare a rope used to fasten seaweed.</i> • Mempersiapkan bibit rumput laut / <i>Prepare seaweed seed</i> • Mengikatkan bibit rumput laut ke tali-tali yang sudah dipersiapkan / <i>Fastens seaweed seed to ropes that already prepared</i>

Sumber: Data primer diolah (2013) / *Source primary data processed (2013)*

Tabel 3. Keterlibatan Peran Perempuan pada Tahap Penanaman.

Table 3. The Involvement of Women Role on Cultivation Stage.

Waktu/Time	Aktivitas/Activity
Pada saat air laut surut, biasanya pada pagi hari/Jika pukul 02.00 WITA air sudah surut maka mereka harus segera bangun dan memulai pekerjaan / <i>When sea water recede usually in the morning lif 2 am wita water ran off and they should get up and began the work</i>	Bersama-sama dengan suami membawa rumput laut ke pantai untuk ditanam perempuan membantu memegang tali bersama dengan laki-laki/ <i>Together with the husband bring seaweed to beach for planted women help held ropes together with men</i>

Sumber: Data primer diolah (2013) / *Source primary data processed (2013)*

diminta dan diberi bayaran (Tabel 3).

Keterlibatan perempuan pada usaha budidaya rumput laut tidak hanya pada tahap persiapan, penanaman dan pemeliharaan. Pada tahap panen, kaum perempuan terlibat dalam mengambil rumput laut di tambak. Pekerjaan ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan laki-laki, namun juga dapat dilakukan sendiri. Mereka dapat menggunakan perahu kecil atau yang disebut dengan *kole* untuk menjangkau tambak yang jaraknya tidak jauh dari pantai. Setelah panen, rumput laut dibawa ke pantai untuk kemudian dicuci dan dibawa ke daratan. Pada tahap pasca panen, kaum perempuan terlibat dalam pekerjaan memilah rumput laut yang bisa dijual dengan rumput laut yang akan dijadikan bibit. Setelah memilah, rumput laut yang siap untuk dijual dibawa ke penjemuran. Bibit rumput laut kemudian diikat kembali dengan tali yang sudah disiapkan (Tabel 4).

Perempuan menjadi tulang punggung usaha budidaya rumput laut di Nusa Penida. Tidak ada pemisahan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan, umumnya dapat dilakukan secara bersama-sama. Kaum perempuan melakukan pekerjaan seperti mengangkat rumput laut dari pantai ke daratan dan juga rumput laut yang akan dijemur. Besarnya alokasi waktu yang diberikan

oleh kaum perempuan dibandingkan laki-laki dalam setiap siklus usaha budidaya rumput laut menunjukkan betapa besarnya peran mereka dalam usaha rumput laut. Menurut mereka hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mengisi waktu santai mereka. Jika tidak ada pekerjaan rumput laut, maka waktu santai mereka hanya diisi dengan kegiatan mencari kutu atau bergosip saja (Tabel 5).

Etos Kerja Perempuan Pembudidaya Rumput Laut

Berbicara mengenai Bali tidak hanya berbicara mengenai potensi alam dan seninya yang indah yang dapat dijadikan obyek wisata. Bali juga memiliki kebudayaan yang merupakan hasil interaksi antara alam dengan sistem keyakinan Hindu yang mendominasi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, Bali memiliki potensi pembelajaran bagi kaum perempuan untuk memerankan diri dalam lingkup rumah tangga maupun publik. Perempuan Bali yang terikat pada adat harus menjalankan tiga peran (*triple-roles*) sekaligus yaitu: (1) peran rumah tangga, (2) peran ekonomi, dan (3) peran adat baik di keluarga, *banjar* maupun di desa adat sebagai tuntutan keseimbangan. Pemaknaan peran perempuan Bali terkait dengan empat tujuan

Tabel 4. Keterlibatan Peran Perempuan pada Tahap Panen.

Table 4. The Involvement of Women Role on Harvest Stage.

Waktu/Time	Aktivitas/Activity
Pada saat air laut surut, biasanya pada pagi hari/Jika pukul 02.00 WITA air sudah surut maka mereka harus segera bangun dan memulai pekerjaan/ <i>When sea water recede usually in the morning if 02.00 am WITA water ran off and they should get up and began the work</i>	Mengambil rumput laut di tambak. Pekerjaan ini bisa dilakukan bersama-sama dengan laki-laki maupun sendirian / <i>Take seaweed in the ponds. This work can be done together with men or alone</i>

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source primary data processed (2013)

Tabel 5. Keterlibatan Peran Perempuan pada Tahap Pasca Panen.

Table 5. The Involvement of Women Role in Post Harvest Stage.

Waktu / Time	Aktivitas/Activity
Umumnya sejak selesai panen atau sejak pagi hari sampai sore atau pukul 14.00 WITA/ <i>Generally since finished harvest or since morning till noon or wita 2 p.m. WITA</i>	Memilah rumput laut untuk dijual atau dijadikan bibit, rumput laut yang siap untuk dijual dibawa ke penjemuran / <i>Sorting seaweed for sale or become seeds, seaweed ready for sale brought to dried place</i>

Sumber: Data primer diolah (2013) / Source primary data processed (2013)

hidup yang hendak dicapai (*catur purusa artha*) dan harmonisasi Bali yang tertuang dalam konsep *Tri Hita Karana*. Konsep-konsep inilah yang tidak terlepas dari pemaknaan dan penyajian peran perempuan Bali.

Kebudayaan Bali merupakan salah satu kebudayaan yang menganut sistem patriarki dimana kedudukan laki-laki dinilai lebih tinggi dalam keluarga. Salah satu implementasi sistem patriarki yaitu dalam masalah waris dimana anak laki-laki memiliki hak waris sedangkan perempuan tidak. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kaum perempuan Bali menjadi pekerja keras. Mereka tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga namun juga dapat melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki seperti mengambil air dan bekerja di ruang publik.

Etos kerja perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dikaitkan dengan konsep industrialisasi dan pembangunan ekonomi menunjukkan hal-hal yang positif. Hal ini karena didorong oleh kebudayaan yang dipengaruhi oleh konsep *Tri Hita Karana*. Sikap mental perempuan Bali yang rajin, ulet dan semangat dalam memberikan peran, baik dalam lingkup rumah tangga maupun publik menunjukkan bahwa sikap tersebut merupakan sebagai sikap kehendak yang dituntut agar dikembangkan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak merasa berat dalam menjalankan setiap peran yang mereka jalankan karena ada perasaan malu jika mereka tidak dapat menjalankan peran-peran tersebut.

Sumber motivasi yang membuat perempuan pembudidaya rumput laut mau ikut terlibat dalam mata pencaharian adalah keharusan saling bahu membahu antara laki-laki dengan perempuan. Sumber pendorong etos kerja ini adalah konsep *Tri Hita Karana* dimana bekerja dalam pandangan kaum perempuan pembudidaya rumput laut adalah 1) Tugas dan tanggung jawab yang sudah dibagi yang harus dipenuhi dalam relasi hubungan laki-laki dan perempuan; 2) Sebagai media untuk membantu suami dalam mencari nafkah; 3) Tugas dan tanggung jawab dalam relasi hubungan kerabat; 4) Kegiatan untuk mengisi waktu santai yang luang. Sistem nilai, keyakinan dan tuntutan akan kebutuhan menjadi faktor yang mempengaruhi etos kerja kaum perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida.

Sistem nilai dan keyakinan yang sudah tertanam pada diri perempuan Bali diwariskan

secara turun temurun dalam keluarga dan diperkuat dengan keberadaan lembaga adat yaitu Desa Pekraman yang merupakan kumpulan dari desa adat banjar. Saat ini banyak terjadi pemekaran banjar yang disebabkan oleh karena faktor kependudukan, wilayah dan juga politik. Di Nusa Penida terdapat 16 desa administrasi dan lebih dari 100 *desa pakraman*. Satu *desa pakraman* terdiri paling sedikit 3 *banjar* dan paling banyak 7 *banjar*. Sistem kekerabatan yang ditunjukkan berdasarkan cakupan pura atau disebut *Paibon* juga menjadi menjadi dasar dalam melestarikan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat. Sistem *Paibon* menjadi dasar kerjasama di dalam masyarakat. Aktivitas ekonomi, sosial dan kemasyarakatan berlangsung di dalam *Paibon*, salah satunya dalam kegiatan *Ngaben* (upacara pembakaran mayat). Setiap anggota masyarakat terikat dengan kewajiban pelaksanaan upacara-upacara adat di tempat mereka tinggal. Kewajiban adat ini bersifat kolektif dan mengikat setiap keluarga, sehingga tidak dimungkinkan seluruh anak atau keturunan dari satu keluarga untuk merantau, sementara orang tua atau aset yang dimiliki masih ada di desa tersebut. Keterikatan secara kolektif ini memberikan dampak yang positif dalam aktivitas ekonomi tertentu. Sebagai contoh, desa adat yang memiliki wilayah pesisir dan banyak terdapat usaha budidaya rumput laut membuat aturan adat (*awik awik*) yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pencurian atau sengketa lahan.

Budidaya rumput laut saat ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Sebelum ada budidaya rumput laut, para nelayan di Nusa Penida banyak yang melaut sampai ke Perairan Lombok hingga bermalam. Perkembangan industri pariwisata di Bali menciptakan pergeseran-pergeseran budaya di Nusa Penida. Sejak tahun 1990-an, adat istiadat semakin ketat dan mulai ada pertemuan secara rutin sehingga nelayan tidak lagi dapat melaut hingga sehari-hari. Budidaya rumput laut dinilai dapat menjadi solusi dari ketatnya adat istiadat yang harus dipatuhi.

Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Pembudidaya Rumput Laut

Strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat membutuhkan pemahaman mendasar mengenai etos kerja sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan program dan implementasinya sehingga program dapat berhasil. Besarnya peranan perempuan dalam

bidang ekonomi tidak secara otomatis membuat perempuan memiliki kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki masih dianggap memiliki kekuasaan yang besar baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya, walaupun kaum perempuan mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan namun hanya sebagai orang kedua atau subordinat. Perempuan masih belum mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki (Murniati dan Nunuk, 2004: 55-56). Untuk meningkatkan peran perempuan dalam ruang publik maka perempuan dan laki-laki dapat bekerja sama saling mengembangkan diri melalui relasi dalam bekerja. Saling ketergantungan antara perempuan dan laki-laki diwujudkan dalam bentuk *partner-relationship* dengan pola hubungan horisontal bukan vertikal (hubungan kekuasaan) (Murniati dan Nunuk, 2004: 62-63).

Perempuan memiliki peluang yang besar dalam pembangunan. Strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi pada kaum perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida antara lain dengan memberikan peluang-peluang kegiatan ekonomi yang lebih besar lagi dengan menyertakan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan terkait dengan usaha budidaya rumput laut. Kaum perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pemeran pembantu dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut namun menjadi pemeran utama yang setara dengan kaum laki-laki.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan adalah dengan pemberdayaan perempuan. Salah satu upaya peningkatan peran perempuan berdasarkan konvensi organisasi dan undang-undang adalah perempuan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup baik lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya. Dengan meningkatkan peran perempuan dalam usaha budidaya rumput laut maka mereka akan lebih memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, penasihat teknis, pimpinan, dan sekaligus menjadi pengelola lingkungan hidup. Peningkatan peran perempuan tersebut pada akhirnya akan dikuatkan melalui hukum, konstitusi, administrasi, budaya, perilaku, sosial, dan ekonomi (Murniati dan Nunuk, 2004: 72-73).

Peran para perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida sangat besar. Hal ini didorong oleh etos kerja yang mereka miliki, sehingga mereka mendominasi peran dalam usaha budidaya

rumput laut. Dengan etos kerja yang besar maka keberhasilan pemberdayaan perempuan akan lebih mudah terwujud.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Peran perempuan di Nusa Penida terlihat dalam lingkup privat (rumah tangga) dan publik. Pada lingkup publik, kaum perempuan di Nusa Penida melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa mengenal konsep ringan dan berat dalam suatu pekerjaan. Pada usaha budidaya rumput laut di Nusa Penida, peran perempuan sangat besar. Etos kerja perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida sangat besar. Etos kerja perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida yaitu rajin, semangat, pantang menyerah, kebersamaan, dan memiliki kemauan untuk maju. Etos kerja tersebut didorong oleh kebudayaan Bali yang mereka miliki sebagai sebuah penjabaran dari konsep *Tri Hita Karana*. Etos kerja perempuan pembudidaya rumput laut tersebut sangat mendukung pembangunan ekonomi.

Strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi yang dapat dilakukan pada pembudidaya rumput laut di Nusa Penida adalah dengan memberikan peluang-peluang kegiatan ekonomi yang lebih besar lagi dengan menyertakan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan terkait dengan usaha budidaya rumput laut. Kaum perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pemeran pembantu dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut namun menjadi pemeran utama yang mampu setara dengan kaum laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, 2012. "Menteri: Percepatan Industrialisasi Perikanan Ditentukan Delapan Faktor", 23 November 2012. <https://id.berita.yahoo.com/menteri-percepatan-industrialisasi-perikanan-ditentukan-delapan-faktor-040407991.html> (diakse tanggal 18 Februari 2014).
- Chrysantini, P. 2010. Di Balik Panggung Reforma Agraria: Perjuangan Tersembunyi Perempuan Tani. *Antropologi Indonesia Vol. 31 (3): 185-199*.
- Murniati, A. & Nunuk P. 2004. Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga. Magelang: Indonesiatara.

- Nasution, Z., N. Kurniasari, F. Nurpriyatna, C. Yuliaty & Nurlaili. 2013. Laporan Akhir Kajian Sosio Antropologi Masyarakat Perikanan Pada Kawasan MP3EI. Jakarta: Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Nurlaili & S. Koeshendrajana. 2010. Peran Perempuan Bajo dalam Rumah Tangga Perikanan Tangkap di Desa Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol 5(2): 199-210.
- Siswanto, D. 2011. Urgensi Falsafah Penyuluhan Pembangunan dan Etos Kerja dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Makalah unpublished*.
- Tirtayani, L.A. 2010. Wanita Bali dalam Pemaknaan Peran (Studi Fenomenologis terhadap *Triple-Roles* Wanita Bali, di Desa Adat Kuta). *Makalah unpublished*.
- Welly, M., W. Sanjaya, D. Trimudya & W.G. Yanto. 2012. Profil Perikanan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali. Bali: Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Coral Triangle Center.
- Witomo, C.M. & Hikmah. 2012. Peran Perempuan Pesisir dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pembudidaya Rumput Laut di Desa Batu Nunggul, Nusa Penida). *Prosiding Seminar Nasional Perikanan Indonesia*, 13-14 November 2012. Jakarta: Sekolah Tinggi Perikanan.

**RESILIENSI KOMUNITAS DALAM MERESPON
PERUBAHAN IKLIM MELALUI STRATEGI NAFKAH
(Studi Kasus Desa Nelayan di Pulau Ambon Maluku)**

***Communities' Resilience in Responding Climate Change through
Livelihood Strategy: A Case Study in Fisher's Village in Ambon
Island of Maluku***

***Subair¹, Lala M. Kolopaking², Soeryo Adiwibowo² dan M. Bambang Pranowo³**

¹Staf Pengajar Jurusan Sosiologi Agama IAIN Ambon

²Staf Pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB

³Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

*email: bairbone1976@gmail.com

Diterima 15 Januari 2014 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Studi ini dilakukan dengan dua tujuan: (1) mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan modal-modal dalam praktek strategi nafkah nelayan, dan (2) menganalisis dan menilai resiliensi komunitas nelayan dalam merespon perubahan iklim. Penelitian dilakukan pada komunitas nelayan perikanan tangkap di desa Asilulu, Pulau Ambon Maluku. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan berperan serta, *focus group discussion*, wawancara mendalam dan didukung oleh studi pustaka. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Asilulu Pulau Ambon Maluku sudah mengoptimalkan penggunaan modal (modal alami, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal sosial) dan aktivitas (ditengahi oleh hubungan sosial dan institusi) dalam membangun sistem nafkah yang diperlukan untuk hidup. Mereka juga telah memodifikasi modal-modal tersebut untuk mereduksi kerentanan dan meningkatkan resiliensi sosialnya. Hasilnya, sistem nafkah yang ada pada satu konteks kekinian, berkelanjutan dan oleh karenanya resilien tetapi dalam konteks ancaman dampak perubahan iklim, resiliensi yang ada adalah resiliensi yang terbatas (*limited resilience*). Pada skenario iklim yang sangat ekstrim, resiliensi yang berdasar kepada sistem nafkah yang tertekan terus menerus dan masih bergantung kepada sumber daya alam rapuh dan memiliki ambang batas.

Kata Kunci: perubahan iklim, adaptasi, strategi nafkah, kerentanan, resiliensi sosial

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) identifying and analyzing the use of capitals in the fisher's livelihood strategy; and (2) analyzing and assessing fisher's community resilience in responding climate change. It is conducted at fisher's community in Asilulu Village, Ambon, Maluku. Data was collected using participant observer, focus group discussion, in-depth interview techniques and also supported by literature study. Data was analyzed by using qualitative method. The result show that fisher's community in Asilulu Village, Ambon, Maluku have already optimized the use of their capitals (natural, physical, human, financial, and also social capital) and also their activities (mediated through social and institutional relationship) in developing necessary livelihood strategy to survive. They have also modified those capitals to reduce vulnerability and increasing their social resilience. Thus, in the present context, their livelihood system is resilience and sustain, however in the context of climate change threat, it is actually a limited resilience. In the very extreme climate scenario, resilience based on livelihood system which is continuously under pressure and highly depends on vulnerable natural resources has a threshold.

Keywords: climate change, adaptation, livelihood strategy, vulnerability, social resilience

PENDAHULUAN

Sebelum mulai menjadi isu penting pasca laporan penilaian kedua dari *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* tahun 1995, sesungguhnya tingkat keparahan dari dampak perubahan iklim sudah lebih dulu terjadi, dimana masyarakat miskin dan rumah tangga pedesaan yang bergantung pada sumber daya alam menanggung dampak beban merugikan yang tidak proporsional (Hardy, 2003; Mendelsohn *et al.*, 2007). Di banyak bagian dunia, efek itu sudah terjadi dengan konsekuensi yang berpotensi bencana bagi masyarakat miskin. Di Indonesia sendiri telah terjadi peningkatan suhu udara sebesar 0,3 °C sejak tahun 1990. Suhu udara mencapai titik tertinggi pada tahun 1998 yaitu sekitar 1 °C di atas suhu rata-rata tahun 1961-1990 (Hulme & Sheard, 1999). Beberapa skenario proyeksi kenaikan suhu udara di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi CO₂ sebesar dua kali lipat akan diikuti oleh peningkatan suhu udara rata-rata sebesar 3 - 4,2 °C (Meiviana, 2004: 20). Selain itu, berdasarkan hasil studi Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia (DNPI) diketahui bahwa secara umum hampir semua elemen masyarakat di Indonesia telah mengetahui adanya perubahan yang terjadi pada iklim saat ini. Setidaknya masyarakat mengetahui dan merasakan adanya perubahan iklim itu sejak sepuluh tahun terakhir (DNPI 2011).

Dalam ringkasan teknisnya, IPCC (2007) menyebutkan bahwa sistem sosial ekologi pesisir adalah sistem yang paling rentan terhadap dampak negatif yang dikarenakan dua faktor. *Pertama*, pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim meningkatkan frekuensi badai di wilayah pesisir. Pada periode 1905 - 1930 di wilayah pantai Teluk Atlantik terjadi rata-rata enam badai tropis per tahun. Rata-rata tahunan itu melonjak hampir dua kali lipat (10 kali badai tropis per tahun) pada periode tahun 1931-1994 dan hampir tiga kali lipat (15 kali badai tropis) mulai tahun 1995 hingga 2005. Pada tahun 2006 yang dikenal sebagai "tahun tenang" saja masih terjadi 10 badai tropis di wilayah pesisir di dunia. Pola peningkatan kejadian badai tropis ini tetap akan berlangsung sepanjang pemanasan global masih terjadi. *Kedua*, pemanasan global diperkirakan akan meningkatkan suhu air laut berkisar antara 1 – 3 °C. Dari sisi biologis, kenaikan suhu air laut ini berakibat pada meningkatnya potensi kematian dan pemutihan terumbu

karang di perairan tropis.

Sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 80.000 kilometer garis pantai, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Kenaikan permukaan air 1 meter saja dapat menenggelamkan 405.000 hektar wilayah pesisir dan menenggelamkan 2.000 pulau yang terletak dekat permukaan laut beserta kawasan terumbu karang (UNDP, 2007). Perubahan iklim akan semakin menambah rentan bagian di wilayah pesisir yang sebelumnya memang sudah rentan oleh erosi dan diperparah oleh aktivitas manusia seperti pembangunan dermaga dan tanggul di laut, pembendungan sungai, penambangan pasir dan batu dan perusakan hutan mangrove.

Dampak negatif perubahan iklim memaksa masyarakat pesisir untuk beradaptasi. Adaptasi adalah suatu penyesuaian dalam sistem manusia atau alam dalam menanggapi rangsang iklim yang sebenarnya atau yang diperkirakan atau efeknya, yang meringankan kerusakan atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang menguntungkan (McCarthy *et al.*, 2001). Meskipun dampak perubahan iklim berkonotasi negatif di banyak tempat, di beberapa tempat lainnya ancaman itu juga telah berhasil dihadapi, bahkan jika perubahan iklim mungkin diperkirakan meningkatkan frekuensi dan intensitas ancaman tersebut sekalipun (Mortimore & Adams, 2001). Pengalaman-pengalaman yang kaya dalam masyarakat akar rumput sebagaimana hasil studi Lassa (2009) menunjukkan bahwa dalam realitas akar rumput, agenda adaptasi selalu terintegrasi dengan strategi nafkah (*livelihood*) baik soal pengelolaan modal dan ruang maupun sumber daya alam dan lingkungan, serta berbagai aspek pangan, sandang dan papan. Pengetahuan tentang sifat-sifat yang mendukung resiliensi dapat membantu pengelola dan masyarakat pengguna sumber daya untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang meminimalkan dampak terhadap masyarakat sambil memaksimalkan keberlanjutan ekosistem (Adger, 2000). Tulisan ini merupakan hasil studi yang menganalisis strategi nafkah komunitas nelayan perikanan tangkap di wilayah pesisir Pulau Ambon, Maluku dalam melakukan adaptasi iklim. Tujuannya ialah menilai resiliensi komunitas nelayan lokal dalam konteks perubahan iklim yang diyakini telah menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup nelayan dan komunitas pesisir di Indonesia.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri (Furchan, 1992). Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi pemahaman informan tentang berbagai aspek sosial yang berkaitan dengan proses perubahan iklim strategi adaptasi komunitas nelayan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk studi kasus historis. Predikat 'historis' menekankan bahwa pokok kajian penelitian ini bukan suatu kejadian sosial pada suatu waktu tertentu, melainkan suatu gejala atau proses sosial dalam suatu rentang waktu tertentu. Istilah 'kasus' sendiri memberi pembatasan bahwa proses sosial yang dikaji tidak berada dalam cakupan sejarah non-kontemporer (klasik), melainkan dalam cakupan sejarah kontemporer yang sebagian pelakunya masih hidup. Sebuah gejala yang mengandung dimensi-dimensi struktural (sosiologis) dan prosesual (historis) sekaligus seperti pada adaptasi perubahan iklim, agar kedua dimensi itu tertangkap, pilihan strategi studi kasus harus memadukan dua strategi sekaligus yaitu sosiologi sejarah (sejarah struktural) dan sejarah sosiologi (sejarah prosesual). Strategi pertama menjelaskan 'mengapa terjadi sesuatu' (konteks sosial kejadian) sedangkan yang kedua menjelaskan 'bagaimana proses terjadinya sesuatu itu' (urutan kejadian) (Kartodirdjo, 1992). Dengan memadukan kedua strategi tersebut, maka penelitian ini tidak lagi semata-mata studi sosiologi sejarah (*historical sociology*) yang bersifat statis tetapi lebih dan itu telah menjadi studi sosiologi tentang sejarah sosial dengan tema utama dinamika perubahan sosial, termasuk ekonomi dan politik. Implisit di sini bahwa metode tersebut di atas merupakan suatu kajian yang bersifat multi-disiplin, dalam hal ini melibatkan disiplin ilmu-ilmu sosiologi, ekologi, antropologi dan ekonomi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Negeri Asilulu yang terletak di semenanjung utara Pulau Ambon pada posisi geografis 03°39'50"-03°42'07,6"BT dan 127°54'00"- 127°56'08,5" LS. Secara administrasi, Asilulu masuk ke dalam wilayah pemerintah Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah,

memiliki tiga dusun yang merupakan daerah petuanan (dusun) yaitu Batu Lubang, Kasuari Lauma (Tanjung Sial) dan Lain di Pulau Tiga. Di wilayah kampung induk sendiri terdiri dari 4 (empat) Wik (pembagian wilayah setingkat dusun) yaitu Wik I, Wik II, Wik III dan Wik IV (Pemerintah Negeri Asilulu, 2010). Keadaan geografis yang terletak di sepanjang wilayah pesisir utara Pulau Ambon memungkinkan penduduk di wilayah ini memilih nelayan sebagai mata pencaharian utama. Nelayan di wilayah ini seluruhnya adalah nelayan perikanan tangkap dengan komoditas terbanyak ikan tuna.

Penelitian dirancang untuk menghasilkan penilaian atas resiliensi sosial masyarakat nelayan di wilayah pesisir kepulauan melalui analisis atas strategi nafkah sebagai rangkaian dari tindakan adaptasi atas perubahan iklim yang menjadi pembicaraan aktual akhir-akhir ini. Penelitian dilakukan pada komunitas nelayan perikanan tangkap (komoditas ikan Tuna) di lokasi penelitian, Pulau Ambon Maluku. Pengumpulan data dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 tahun dari April 2010 - Juni 2012. Penelitian dilakukan di Maluku dengan pertimbangan utama bahwa Maluku adalah provinsi kepulauan yang merupakan gambaran karakteristik wilayah Indonesia secara keseluruhan. Karakteristik seperti itu membuat Maluku rentan terpapar dampak dari perubahan iklim.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif artinya data dilaporkan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar bukannya dalam bentuk angka (Cresswell, 2003). Peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran informasi melalui upaya menjalin interaksi dengan informan dengan tetap menjaga sikap senetral mungkin sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi secara minimal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode hermeutik dan dialektika yang difokuskan pada konstruksi, rekonstruksi dan elaborasi suatu proses sosial. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengamatan berperan serta (*participant-observation*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung pada subjek penelitian. Untuk mendukung validitas data yang dikumpulkan, dilakukan pula pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, terutama terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada metode fenomenologi (Rahardjo, 2005). Untuk lebih memperkuat analisis dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan strategi analisis data kualitatif-verifikatif yang dirujuk kepada Bungin (2007), strategi analisis data kualitatif-verifikatif merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian. Format analisis ini lebih mengutamakan memperoleh data sebanyak-banyaknya di lapangan kemudian dilakukan analisis terhadap teori yang digunakan. Analisis kualitatif dalam format ini tidak hanya sekedar mendeskripsikan sebuah fenomena, namun yang terpenting adalah menjelaskan makna dan mendeskripsikan fenomena sosial yang muncul pada komunitas nelayan di Asilulu. Analisis induktif dilakukan pada proses memahami pengetahuan nelayan tentang gejala dan dampak perubahan iklim. Subjek penelitian diminta mengeskpresikan pengetahuannya berdasarkan pemahaman, pengetahuan dan pengalamannya sendiri tanpa sebelumnya diterpa oleh informasi tentang tema penelitian (perubahan iklim) dan peneliti kemudian mendeskripsikan hasil penelitian seperti apa adanya untuk mempertahankan keaslian konteks lokalitas hasil penelitian. Termasuk dalam bagian analisis ini adalah pemahaman subjek tentang kerentanan pada tahap awal dan penilaian resiliensi pada tahap akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Iklim dan Kerentanan Sosial Masyarakat Nelayan

Kerentanan merupakan suatu terminologi yang kompleks dan tidak pasti sehingga masih banyak terdapat pengertian tentang kerentanan tergantung pada lingkup penelitian. Secara garis besar kerentanan merupakan kondisi dimana sistem tidak dapat menyesuaikan dengan dampak dari suatu perubahan (Olmos, 2001; Fussel, 2007). Kerentanan berbeda secara temporal dan spasial (IPCC, 2001). Secara lebih spesifik, kerentanan didefinisikan sebagai kecenderungan sistem kompleks adaptif mengalami pengaruh buruk dari keterbukaannya terhadap tekanan eksternal dan kejutan (Turner *et al.*, 2003). Kerentanan adalah manifestasi dari struktur sosial, ekonomi dan politik, dan pengaturan lingkungan. Kerentanan dapat dilihat dari dua unsur yaitu paparan terhadap risiko dan kemampuan adaptasi. Manusia yang lebih memiliki

kemampuan untuk mengatasi kejadian ekstrem sedikit lebih rentan terhadap risiko. Semakin rentan sebuah sistem, maka semakin rendah kemampuan kelembagaan dan masyarakat untuk beradaptasi dan membentuk perubahan. Dengan demikian pengelolaan resiliensi bukan hanya berhubungan dengan mempertahankan kemampuan dan pilihan bagi pembangunan di masa kini dan yang akan datang, tetapi juga menyangkut permasalahan lingkungan, sosial dan resiliensi ekonomi (Adger *et al.*, 2002).

Kerentanan dalam penelitian ini dilihat sebagai faktor eksternal dari sistem sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak langsung dari perubahan iklim. Dalam aspek ini, kerentanan dilihat sebagai tingkatan dari suatu sistem terhadap kemudahan sistem tersebut terkena dampak atau ketidak mampuan mengatasi dampak dari perubahan iklim termasuk iklim yang berubah-ubah dan ekstrim. Di sini kerentanan merupakan fungsi dari karakter, magnitude, laju dari variasi iklim karena terekspose, sensitivitas dan kapasitas adaptasinya (McCarthy *et al.*, 2001). Dengan kata lain, kerentanan dalam konteks ini dipahami sebagai faktor eksternal (non psikologis) dalam sistem nafkah yang menyebabkan kesulitan atau penderitaan yang dihadapi oleh nelayan. Konsepsi ini sesuai dengan rumusan Twigg (2007) bahwa konteks kerentanan adalah kumpulan dari tekanan eksternal yang merupakan faktor kunci penyebab kesulitan atau penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

Dimensi kerentanan dalam usaha penangkapan tuna yang diidentifikasi berikut ini, digolongkan berdasarkan tingkat modal dalam komunitas. Pada aspek modal manusia, dimensi kerentanan yang dihadapi antara lain terbatasnya lapangan pekerjaan karena usaha penangkapan tuna merupakan pekerjaan utama dari nelayan, tapi jika tidak ada kegiatan penangkapan maka sebagian besar nelayan masih bisa melakukan pekerjaan *off fishing*. Hal ini mengindikasikan adanya lapangan pekerjaan lain selain usaha penangkapan tuna. Terbatasnya pengetahuan manajemen, penanganan dan pengolahan ikan tuna dapat menjadi faktor penyebab kerentanan yang serius bagi keberlanjutan sistem nafkah nelayan. Indikatornya dapat dilihat pada sulitnya pengembangan usaha penangkapan tuna oleh nelayan dan kebiasaan penanganan dan pengolahan hasil tangkapan oleh orang lain (pengumpul dan karyawannya) yang mengakibatkan ketidaktahuan nelayan terhadap kualitas produk

dan harga jual produk. Sarana penangkapan yang disebut armada tadi juga berkontribusi besar pada kerentanan nelayan, selain karena teknologi yang digunakan masih tradisional (mengandalkan pengalaman dalam mengoperasikannya), armada yang dimiliki nelayan kebanyakan masih berstatus kredit mesin atau kredit *boat*. Ketiadaan sarana lembaga keuangan juga semakin menambah konteks kerentanan nelayan karena nelayan tidak memiliki tabungan sehingga modal usaha secara terus menerus diperoleh dengan cara mengutang kepada pengumpul.

Sarana pendukung perikanan sangat penting artinya dalam sistem perikanan tangkap untuk menjaga mutu ikan tuna sehingga memenuhi kualitas untuk dapat dipasarkan keluar daerah (dalam lingkup regional) dan dapat diekspor ke luar negeri. Keterbatasan fasilitas pendukung oleh karenanya juga menjadi faktor kerentanan nelayan. Pada praktek nafkah yang ada, keterbatasan itu ditutupi oleh *cold storage* yang multi fungsi milik setiap pengumpul yang ada tetapi di satu sisi itu menjadi masalah ketika *cold storage* sekaligus menjadi pasar karena ia akan dimonopoli oleh pengumpul. Faktanya, nelayan memang tidak memiliki pasar alternatif untuk memasarkan produknya sehingga pedagang pengumpul menjadi satu-satunya alternatif pilihan pemasaran bagi nelayan. Sesungguhnya, selain *cold storage*, sarana-sarana pendukung usaha perikanan yang masih minim di Asilulu masih banyak seperti sarana penyedia BBM (misalnya SPBU khusus nelayan), pabrik es/*ice storage* dan fasilitas perbaikan unit penangkapan (*docking*, perbengkelan).

Pada aspek modal finansial, keterbatasan modal oleh nelayan bisa diatasi dengan cara berutang kepada pedagang pengumpul. Tetapi sebagai implikasinya, ketergantungan ekonomi nelayan terhadap pedagang pengumpul sangat tinggi sehingga hasil tangkapan hanya boleh dijual kepada pedagang pengumpul yang memberikan modal. Pemasaran produk yang terbatas hanya pada pedagang pengumpul menyebabkan skenario penentuan harga dikendalikan oleh pedagang pengumpul. Pendapatan nelayan sangat rendah jika dibandingkan dengan resiko kehilangan nyawa yang tinggi, hal ini harus dihadapi oleh nelayan setiap melakukan aktifitas penangkapan sehingga banyak nelayan memilih untuk tidak melakukan aktifitas penangkapan jika cuaca tidak memungkinkan dengan konsekuensi berkurangnya pendapatan untuk keluarga.

Pada aspek modal sosial, faktor kerentanan bersumber pada tingginya arogansi kelompok yang ada pada kelompok-kelompok nelayan, ditunjukkan dengan kurangnya kerja sama antara kelompok nelayan dan perbedaan standar harga beli ikan oleh pedagang pengumpul yang merupakan pimpinan kelompok nelayan tersebut. Budaya konsumerisme nelayan sangat tinggi dimana jika hasil tangkapan dalam kondisi maksimal maka tingkat ekonomi di lokasi penelitian juga meningkat, terjadi peningkatan harga barang dan jasa serta frekuensi bepergian ke kota. Keterbatasan jaringan pada lembaga keuangan dan institusi pasar oleh nelayan sangat tinggi, dimana tidak terdapat lembaga keuangan dan pemasaran produk nelayan terbatas hanya pada pedagang pengumpul hasil yang mengambil alih fungsi institusi pasar. Hal ini menyebabkan nelayan sulit untuk akses terhadap modal dan keengganan untuk menabung, serta terjadi skenario penentuan harga produk oleh pedagang pengumpul. Aspek lainnya yang berkontribusi kepada kerentanan nelayan ialah hubungan *patronage* yang terbentuk sangat kuat. Kekuasaan pengumpul yang begitu besar serta ketergantungan nelayan yang sangat tinggi di sisi lain cenderung melahirkan keharmonisan semu terutama pada tingkat nelayan dan pengumpul, walaupun kebanyakan hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan. Hubungan itu sangat merugikan nelayan karena tidak dapat menjual produk kepada pembeli lain dengan standar harga lebih tinggi akibat dominasi patron. Hal ini menyebabkan bentuk perlawanan nelayan yaitu dengan cara menjual secara sembunyi-sembunyi ikan hasil tangkapan yang disebut *kambulaku*. Cara *kambulaku* dilakukan pada saat melaut, biasanya dititipkan kepada nelayan lain yang berada di bawah pedagang pengumpul yang membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Status sosial nelayan dalam struktur sosial lokal yang rendah merupakan menjadi faktor kerentanan terakhir. Status sosial yang rendah menyebabkan nelayan sangat kecil pengaruhnya dalam struktur Negeri (sistem stratifikasi sosial desa) yang secara tidak langsung berpengaruh dalam pengambilan keputusan nelayan dalam merubah hidupnya.

Kerentanan sosial nelayan bukan hanya disebabkan oleh faktor di luar diri nelayan saja sebagaimana sudah diuraikan di atas. Kerentanan juga ternyata bisa bersumber dari sistem nafkah atau modifikasinya. Modifikasi modal terjadi karena adanya struktur dan proses pada komponen-

komponen modal, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

(1). Relasi Sosial antara lain gender dan umur.

Masyarakat menyadari bahwa pekerjaan perikanan tangkap adalah pekerjaan yang membutuhkan fisik yang prima, tidak cukup hanya pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, pemanfaatan tenaga kerja perikanan tangkap hanya pada laki-laki dan berumur 50 tahun ke bawah. Sebagai akibatnya, banyak anggota keluarga yang menganggur dan hanya menjadi beban rumah tangga belaka. Selain orang tua dan anak-anak, potensi yang tidak dimanfaatkan itu adalah kaum perempuan. Dengan alasan kegiatan usaha penangkapan tuna membutuhkan kekuatan dan ketahanan fisik yang besar dan prima, perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam usaha ini. Sebelumnya, perempuan dalam sektor perikanan di Asilulu berperan sebagai pedagang perantara, yang dalam bahasa lokal disebut *jibu-jibu*. Sejak tuna menjadi komoditas ekspor, otomatis peran *jibu-jibu* sedikit demi sedikit menghilang karena ikan tuna memang tidak dijual untuk konsumsi lokal. Hal ini tentu saja merupakan faktor kerentanan karena mengabaikan sumberdaya manusia yang begitu potensial seperti perempuan. Berdasarkan data pada Monograf Desa Asilulu (Pemerintah Negeri Asilulu, 2010), jumlah penduduk perempuan adalah 3.070 jiwa (50,67%) sedikit melebihi jumlah penduduk lelaki yakni sebanyak 2.988 jiwa (49,33%). Distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa kelompok perempuan memiliki potensi yang cukup kuat dalam mendukung usaha perikanan tuna sebagai usaha perikanan utama di lokasi penelitian. Walaupun tidak terlibat langsung dalam operasi penangkapan ikan, namun perannya dalam tahapan persiapan usaha penangkapan tuna dan pasca tangkap menjadi potensial.

(2). Kebiasaan dan pasar

Kebiasaan yang terjadi dalam usaha penangkapan tuna adalah jika seorang ingin memulai usaha penangkapan tuna maka modal diperoleh dengan cara meng-kredit dari pedagang pengumpul. Kredit itu bisa hanya *body boat*nya saja, bisa juga kedua-duanya: *body* dan mesin sekaligus. Kebiasaan itu mendorong terbentuknya hubungan patron-klien antara nelayan dengan pedagang pengumpul karena pedagang pengumpul memiliki alasan untuk mengontrol atau mengkoordinir nelayan yang berutang

kepadanya. Di sisi lain, perasaan telah dibantu untuk membiayai rumahtangganya dengan dipinjami modal yang sangat besar untuk ukurannya, nelayan sepanjang keterlibatannya dalam sektor perikanan selalu merasa berutang budi kepada pedagang pengumpul. Kebiasaan itu juga lebih lanjut menciptakan pasar dengan mekanisme satu arah, di mana nelayan "merasa berkewajiban" menjual hasil tangkapannya berikut menyerahkan pengolahannya kepada pedagang pengumpul. Rasa balas budi dan "tidak enak hati" memaksa nelayan untuk tetap menjual hasil tangkapannya kepada pedagang pengumpul yang meminjaminya modal, bahkan sampai ketika utangnya sudah lunas sekalipun. Jadi, nelayan terbentur pada pasar tunggal di mana mereka tidak kuasa mengembangkan jaringan pemasaran untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi.

(3). Kelembagaan

Masyarakat nelayan di lokasi penelitian mengalami kesulitan untuk secara mandiri mengelola usahanya. Disamping karena alasan ketiadaan modal, pekerjaan nelayan dilingkupi oleh banyak resiko yang sewaktu-waktu dapat mengancam keberlangsungan pekerjaan tersebut. Resiko itu mulai dari persoalan teknis seperti kerusakan peralatan tangkap (sudah karakteristik dari mesin untuk mengalami kerusakan sebagai akibat dari nilai susut yang melekat kepadanya), ketiadaan modal untuk melakukan rutinitas penangkapan (*trip*), sampai kepada menjaga keselamatan selama melaut dengan berangkat secara berombongan. Resiko yang terakhir ini menjadi ancaman yang paling serius dalam keadaan lautan yang tidak lagi seperti dalam prediksi dan pengetahuan nelayan. Dengan resiko-resiko seperti itu, dan ditambah resiko lain yang berakibat pada kerentanan nelayan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mau tidak mau nelayan membutuhkan kelompok untuk meminimalisir resiko dan meningkatkan resiliensi mereka. Nelayan tangkap Tuna di Asilulu selama ini terorganisir dalam kelompok-kelompok nelayan di bawah pimpinan pedagang pengumpul yang sekaligus pemberi kredit modal sehingga memudahkan modal nelayan terhadap modal komunitas.

Pada sisi lain, kelembagaan seperti ini ditengarai menghambat dalam pembangunan usaha nelayan mengingat kendali atas sistem nafkah nelayan ada pada pedagang pengumpul dan membatasi kebebasan nelayan.

(4). Tingkat pendidikan

Merujuk pada data Monograf Desa Asilulu Tahun 2010, masih banyak penduduk Negeri Asilulu yang memiliki pendidikan di bawah tingkat dasar. Terdapat hanya 0,01% penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi, 5,38% yang menamatkan pendidikan menengah atas dan 14,24% yang menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama. Tingkat kualitas sumber daya manusia seharusnya didukung dengan pendidikan, sedikitnya pada tingkat menengah ke atas. Dalam kaitan dengan pengembangan usaha perikanan tuna, keterampilan individu menjadi faktor yang cukup menentukan keberhasilan suatu usaha. Namun demikian, tingkat pendidikan individu juga menjadi penting ketika pengembangan usaha akan dilakukan dengan dukungan manajemen usaha yang lebih baik, termasuk dalam menjangkau pasar yang mampu mengakomodasi peningkatan pendapatan nelayan. Nelayan menganggap bahwa pendidikan formal bukanlah sesuatu yang penting karena yang dibutuhkan pada sebagai nelayan lebih pada pengetahuan dan keterampilan melaut, bukan ijazah pendidikan formal. Bagi mereka, pendidikan formal itu sudah cukup hanya dengan bisa membaca saja karena kemampuan membaca dibutuhkan agar tidak dibodohi orang lain.

Struktur dan modifikasi modal seperti yang digambarkan di atas membentuk suatu pola di mana modifikasi modal kemudian mempengaruhi modal nelayan pada modal komunitas dan kemudian pada gilirannya menyebabkan nelayan berhadapan kondisi yang memicu kerentanan mereka.

Strategi Nafkah dan Resiliensi Komunitas Nelayan

Perspektif resiliensi komunitas adalah sebuah cara lain dari studi resiliensi yang selama ini ada (Bahadur *et al.*, 2010). Perspektif ini muncul sebagai konsep penting untuk membimbing dan mendukung perspektif yang lebih inklusif dan efektif untuk pengelolaan gabungan dari sistem sosial dan ekologi (sosial-ekologis) (Ludwig *et al.*, 1997; Liverman, 2008). Konsep pengelolaan untuk resiliensi sosio-ekologis berkaitan dengan pemeliharaan sistem yang memberi sifat resiliensi tanpa mengorbankan kemampuan mereka untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap perubahan masa depan (Holling & Meffe, 1996). Resiliensi komunitas memiliki dimensi ekonomi, politik, tata ruang/spasial, kelembagaan dan sosial (Adger, 2000). Sebuah komunitas yang resilien adalah

komunitas yang mampu menanggapi perubahan atau tekanan dengan cara yang positif, dan mampu mempertahankan fungsi inti sebagai sebuah komunitas meskipun mereka dalam tekanan (Maguire & Cartwright, 2008: 3).

Resiliensi sering digambarkan sebagai lawan (*opposite*) dari kerentanan (Bahadur *et al.*, 2010). Meskipun masih ada ruang untuk debat tentang semantik, tetapi sebagian besar pemahaman tentang resiliensi memposisikan konsep resiliensi sebagai konsep yang bertentangan dengan konsep kerentanan. Pemahaman ini dinyatakan dalam sejumlah cara yang berbeda, beberapa melihat peningkatan kerentanan sebagai penurunan resiliensi, yang lain menganggap konsep ini sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, yang lain melihat kerentanan sebagai properti yang perlu dimentahkan oleh resiliensi. Brooks (2003) misalnya menyatakan bahwa keduanya berlawanan (dengan mengurangi kerentanan, maka meningkatkan resiliensi). Sementara Manyena (2006) menyebutkan bahwa resiliensi dan kerentanan bisa tampak seperti berada pada dua ujung kontinum yang berbeda.

Di sisi lain, Gallopin (2006) berpendapat kerentanan tidak muncul untuk menjadi kebalikan dari resiliensi, karena resiliensi didefinisikan sebagai: *'state shifts between domains of attraction'*, sementara kerentanan mengacu pada *"structural changes in the system, implying changes in its stability landscape"*. *Robustness*, menurut Gallopin, dapat dianggap sebagai sisi lain dari kerentanan. Perbedaan mendasar antara kerentanan dan resiliensi adalah bahwa kerentanan mengacu pada *"the capacity to preserve the structure of the system"* sementara resiliensi mengacu pada *"capacity to recover from non-structural changes in dynamics"*.

Studi ini melihat kerentanan sebagai salah satu komponen dari suatu masyarakat yang menentukan resiliensinya. Perspektif ini memuat gagasan bahwa masyarakat (dan kerentanan, sumber daya dan kemampuan adaptasi) adalah dinamis dan beragam. Resiliensi tidak berarti bahwa masyarakat kebal (Marshall *et al.*, 2007). Masyarakat dapat resilien dan rentan pada saat yang sama. Misalnya, masyarakat mungkin termasuk kelompok yang rentan terhadap penurunan ketersediaan air karena ketergantungan mereka pada air untuk irigasi. Namun, masyarakat yang sama mungkin memiliki sumber daya sosial dan kemampuan adaptasi untuk membangun

basis ekonomi lain misalnya, ekowisata yang tidak bergantung pada ketersediaan air. Masyarakat yang berbeda juga rentan dan resilien terhadap tantangan yang berbeda.

Selanjutnya akan dipaparkan strategi nafkah atau mata pencaharian nelayan sebagai tindakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di wilayah penelitian. Suatu sistem nafkah dapat digambarkan sebagai satuan kemampuan (modal alam, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal sosial) dan aktivitas (ditengahi oleh hubungan sosial dan institusi) yang diperlukan untuk hidup. Sistem nafkah tersebut menjadi berkelanjutan manakala seseorang dapat tinggal dengan tekanan dan gangguan, memelihara atau meningkatkan modal dan kemampuan mereka selagi tidak berdasarkan sumberdaya alam (Chambers & Conway, 1991; Ashley & Carney, 1999; Ellis, 2000). Strategi nafkah dianalisis melalui penggunaan modal sosial, ekonomi, manusia, fisik dan alam. Berdasarkan hasil penelitian Subair (2013), nelayan di Negeri Asilulu telah mengalami berbagai bentuk peristiwa iklim yang ekstrim. Seiring waktu, mereka telah mengembangkan berbagai tanggapan adaptif untuk mengatasi risiko lingkungan terhadap mata pencaharian. Strategi nafkah sendiri dipandang sebagai kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim yang tujuannya adalah mempertahankan resiliensi komunitas dengan mengurangi kerentanan yang ditimbulkan oleh ancaman negatif dari perubahan iklim. Strategi nafkah yang dilakukan oleh aktor sebagai tanggapan terhadap dampak iklim yang spesifik (*ex-post*) merupakan bagian dari adaptasi reaktif (otonom). Adaptasi ini mengharuskan aktor sadar akan dampak dan mampu bereaksi dengan tepat. Strategi yang *ex-ante* berguna karena meminimalkan dampak potensial pada masyarakat, tapi karena strategi tersebut dikembangkan dalam konteks iklim yang tidak pasti, kemungkinannya lebih mahal. Strategi *ex-post* bereaksi terhadap suatu kejadian dan harus berurusan dengan dampak setelah fakta-fakta dan ini juga dapat lebih mahal daripada mengantisipasi. Pengambil keputusan harus membuat keputusan dibawah ketidakpastian.

Pemahaman ini memahami resiliensi masyarakat terhadap bencana bersumber dari pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan di mana modal sosial, ekonomi, manusia, fisik dan alam dilihat sebagai faktor penentu resiliensi (Mayunga, 2007). Masing-masing lima modal sesuai dengan sejumlah karakteristik sistem yang

resilien. Misalnya, dasar yang kuat dari modal sosial dalam bentuk kepercayaan, norma dan jaringan akan menyebabkan tingkat koordinasi dan kerjasama yang tinggi dalam masyarakat, dibuktikan dengan adanya sejumlah besar organisasi nirlaba. Demikian pula, sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, kesehatan, pengetahuan keterampilan, dan informasi akan menyebabkan, misalnya, kemampuan yang tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengurangan risiko yang efektif. Indikator ini akan mencakup pencapaian pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang baik. Manyuga memahami bahwa resiliensi komunitas bersumber dari pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan di mana modal sosial, ekonomi, manusia, fisik dan alam dilihat sebagai faktor penentu resiliensi. Masing-masing lima modal sesuai dengan sejumlah karakteristik sistem yang resilien.

Terkait dengan lima modal yang dianalisis pada studi ini, Kolopaking (2011) merumuskan indikator penilaian kemampuan adaptasi pada level rumah tangga, yaitu; (1) Aset Ekonomi (*economy capital*) yang meliputi besar pendapatan dan sumbernya, jumlah tanggungan keluarga, tingkat kecukupan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, status kepemilikan aset dan nilai aset, keberadaan tabungan keluarga, akses untuk mendapatkan dana melalui pinjaman dan besar pengeluaran; (2) Aset sosial (*social capital*) yang meliputi keikutsertaan dalam organisasi, dukungan dari pihak lain kalau mendapat masalah, kedekatan dengan pusat kekuasaan/pimpinan organisasi; (3) Aset SDM yang meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan tentang iklim, pengetahuan lokal, pengetahuan tentang teknologi modern; dan (4) Aset fisik (*physical capital*) yang meliputi akses ke jalan, akses pada transportasi, sarana komunikasi, akses ke lokasi aman pada waktu bencana, akses pada sumber air bersih dan akses pada sumber air irigasi. Berbeda dengan Mayunga, Kolopaking tidak memasukkan aspek modal atau aset alam padahal dalam konteks perubahan iklim, terutama pada kajian sosiologis, tingkat ketergantungan kepada sumberdaya alam merupakan faktor yang sangat penting. Keterpaparan, kerentanan dan kemampuan adaptasi sangat ditentukan oleh tingkat ketergantungan sebuah rumah tangga atau komunitas terhadap sumberdaya alam. Rumah tangga atau komunitas yang tingkat ketergantungannya tinggi pada sumberdaya alam biasanya akan lebih terpapar, lebih rentan dan lebih memiliki kemampuan adaptasi yang lebih rendah

dibanding dengan rumah tangga atau komunitas yang tingkat ketergantungannya pada sumberdaya alam yang rendah.

Berbagai bentuk strategi nafkah masyarakat dan informasi tentang kondisi sumberdaya alam di lokasi penelitian diidentifikasi dalam penelitian studi ini dengan maksud untuk mengkaji interaksi antara masyarakat pesisir dan sumberdaya alam (ekosistem). Kerentanan terkait perubahan iklim sangat ditentukan oleh faktor ketergantungan terhadap sumberdaya alam. Ketergantungan sumber daya berkaitan dengan komunitas yang memiliki sistem nafkah yang berfungsi langsung dari produksi sumber daya dan ekonomi lokal (Machlis *et al.*, 1990). Ketergantungan langsung dari komunitas pada ekosistem berpengaruh terhadap resiliensi mereka dan kemampuan untuk menghadapi guncangan, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan mengatasi bahaya. Resiliensi dapat dirusak oleh variabilitas tinggi (atau gangguan dalam hal ekologis) dalam sistem pasar atau sistem lingkungan. Oleh karena itu resiliensi tergantung pada keragaman ekosistem serta aturan-aturan kelembagaan yang mengatur sistem sosial, termasuk sistem nafkah.

Dari serangkaian pengamatan dan wawancara serta *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan selama periode pengumpulan data penelitian, teridentifikasi beberapa strategi nafkah nelayan untuk mereduksi kerentanan dan meningkatkan resiliensi mereka terhadap tekanan pada sistem nafkah mereka, khususnya dampak negatif dari perubahan iklim.

1. Modal Manusia

- a. Menggunakan sumber pendapatan yang lain seperti perdagangan, pertanian, jasa transportasi untuk meningkatkan pendapatan sehingga dengan sendirinya tingkat kesejahteraan meningkat, terutama ketika terjadi musim paceklik ikan. Umumnya kegiatan sampingan yang dilakukan adalah ojek, tani, dagang dan kios..
- b. Memberdayakan sumberdaya keluarga dekat sebagai *helper* untuk meminimalisir konflik sekaligus memperkuat jaringan kekerabatan. *Helper* sebagai satu bagian dari sistem nafkah nelayan di Asilulu berfungsi sebagai 'sekolah pengalaman' yang membentuk nelayan-nelayan baru setelah pengalaman dirasa cukup untuk itu.

- c. Memperbarui pengetahuan tentang cuaca dan iklim serta pola ruaya ikan tuna dan pengetahuan lain yang mendukung keberlanjutan sistem nafkah dengan cara membuka diri terhadap adopsi teknologi baru dan membuat catatan/rekaman perubahan-perubahan di laut untuk dijadikan pedoman pada pengembangan strategi berikutnya.
- d. Memperkuat kelembagaan lokal dan jaringan sosial yang sudah ada khususnya kelembagaan 'pengumpul' untuk semakin memaksimalkan fungsinya terutama sebagai sumber dukungan sosial pada saat terjadi krisis.
- e. Meningkatkan partisipasi dalam kelompok dengan tingkat keaktifan yang tinggi, aksi kolektif dan kerja sama dengan anggota/ kelompok yang lain dengan asas saling percaya untuk memecahkan masalah bersama serta akses terhadap informasi dan komunikasi tentang sumberdaya perikanan khususnya ikan tuna, sehingga keeratn sosial antar nelayan semakin kokoh. Kekokohan keeratn sosial menjadi modal untuk mengurangi resiko melaut karena selalu berangkat secara bersama-sama ke laut dengan tingkat kepedulian yang tinggi antar sesama nelayan.

2. Modal Alam

- a. Fluktuasi musim-musim ikan dihadapi nelayan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya tentang keadaan laut yang digunakan untuk menentukan *fishing ground* dan musim penangkapan yang tepat, kemudian akses ke sumberdaya yang mudah memungkinkan untuk nelayan berpindah-pindah *fishing ground*. Menggunakan modal sosial seperti partisipasi dalam kelompok nelayan dengan keaktifan tinggi, aksi kolektif dan kerja sama serta saling percaya untuk dapat saling membantu jika dalam kesulitan dan memecahkan masalah bersama serta akses terhadap informasi dan komunikasi khususnya tentang keadaan sumberdaya.
- b. Menggunakan pengalaman nelayan tentang keadaan sumberdaya untuk mengantisipasi resiko alam, sumberdaya yang luas dan akses yang mudah memungkinkan untuk pindah ke lokasi lain yang resiko alamnya kecil. Pendayagunaan alternatif kegiatan *off fishing* diimbangi dengan modal pemberdayaan ketika resiko alam tinggi.

- c. *Fishing ground* yang tak terbatas dan kemudahan akses disertai dengan pengefisienan trip penangkapan serta penggunaan alat tangkap dan metode penangkapan yang tepat merupakan modal yang dapat digunakan untuk menghadapi sifat sumberdaya yang tidak dapat diperkirakan. Selain itu penting untuk nelayan menggunakan asas saling percaya, aksi kolektif dan kerja sama serta akses terhadap informasi dan komunikasi untuk menghadapi kendala bersama.
 - d. Sasaran tangkapan yang berpindah-pindah sejauh ini masih bisa dihadapi dengan menggunakan trip penangkapan yang maksimal serta peningkatan teknologi alat tangkap dan jumlah armada. Aksi kolektif dan kerja sama berdasarkan asas saling percaya juga diterapkan untuk bisa saling membagi informasi dan komunikasi dan saling membantu memecahkan masalah.
 - e. Untuk menghadapi sumberdaya yang *open access* nelayan memaksimalkan menggunakan *fishing ground* yang tak terbatas dengan mengefektifkan alat tangkap dan armada penangkapan yang terbatas dan memaksimalkan trip penangkapan. Infrastruktur seperti tempat timbang ikan, pabrik es mini, jalan dan transportasi juga sangat mendukung pemberdayaan nelayan. Selain itu partisipasi dalam kelompok dengan tingkat keaktifan yang tinggi, aksi kolektif dan kerja sama dengan asas saling percaya mendorong komunitas nelayan untuk saling mendukung. Tingkat pemyerapan informasi dan komunikasi serta aspek keamanan sangat penting sebagai modal untuk akses pada sumberdaya alam tersebut.
- b. Keterbatasan infrastruktur seperti *cold storage* dapat diatasi dengan menggunakan tempat timbang sebagai *cold storage* mini/ sementara dengan didukung adanya pabrik es mini untuk pengadaan es sebagai bahan pengawetan fasis. Menggunakan rumah sebagai infrastruktur pendukung. Sarana jalan dan transportasi yang lancar sangat membantu untuk akses kepada *cold storage* yang terdekat, tentu saja dengan modal partisipasi dalam kelompok, saling percaya, serta aksi kolektif dan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memperlancar kegiatan nelayan.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi dapat direduksi dengan infrastruktur seperti jalan dan transportasi yang lancar sehingga masyarakat dapat meminimalisir keterasingan akibat minimnya sarana dan prasarana telekomunikasi tersebut. Tingkat keaktifan dalam mengakses informasi dan komunikasi serta kohesi sosial dan kesupelan juga merupakan modal untuk mengantisipasi minimnya sarana dan prasarana telekomunikasi.
 - d. Kepemilikan armada penangkapan yang terbatas direduksi dengan menambah armada penangkapan melalui sumber modal seperti kredit atau pinjaman dari orang ketiga yang diperoleh melalui partisipasi dalam kelompok nelayan dengan berlandaskan saling percaya serta aksi kolektif dan kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama.
 - e. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti *cold box* oleh nelayan direduksi dengan penggunaan tempat timbang ikan yang menyediakan *cold box*, yang dapat diakses melalui partisipasi dalam kelompok nelayan.

3. Modal Fisik

- a. Tingkat teknologi penangkapan yang rendah dihadapi dengan pengalaman nelayan tentang kebiasaan sasaran penangkapan yang diadaptasi dalam bentuk metode penangkapan yang sesuai disertai trip penangkapan yang maksimum dan pengefisienan armada tangkap dengan ditunjang akses yang mudah pada *fishing ground* yang luas. Aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi serta kohesi sosial memudahkan nelayan untuk mengadopsi teknologi penangkapan ikan yang lebih maju.

4. Modal Finansial

- a. Keterbatasan modal yang sering dihadapi oleh nelayan bisa diakomodir dengan mendapatkan sumber modal dari kredit melalui partisipasi dalam kelompok nelayan. Pengumpul dalam hal ini menjadi penyedia modal yang diyakini oleh nelayan berprinsip kekeluargaan dan kepedulian sosial.
- b. Ketergantungan ekonomi pada pedagang pengumpul hasil bisa diminimalisir dengan menggunakan sumber pendapatan tambahan seperti perdagangan, pertanian, jasa transportasi/angkutan sebagai pemasukan tambahan sehingga tidak bergantung

seluruhnya untuk pedagang pengumpul (*patron*). Menggunakan alat penangkapan dan armada penangkapan yang dikredit sehingga pendapatannya dapat disisihkan sebagai modal awal untuk usaha.

- c. Skenario penentuan harga oleh pengumpul disebabkan keterbatasan akses nelayan terhadap pasar, untuk itu transportasi serta informasi dan komunikasi penting digunakan oleh nelayan dengan tujuan mengetahui perkembangan dan mekanisme harga di institusi pasar. Modal sosial seperti solidaritas dalam berhubungan dengan orang lain serta kerja sama untuk saling membantu terus ditingkatkan untuk mengurangi keinginan untuk saling mengambil keuntungan.
- d. Pendapatan yang rendah dibandingkan dengan resiko kehilangan nyawa sehingga nelayan lebih memilih musim penangkapan yang rendah resiko alamnya dan trip penangkapan yang disesuaikan dengan cuaca dan iklim. Kegiatan *off fishing* sejauh ini dilakukan sebagai sumber penghasilan pada saat tidak melaut. Modal sosial seperti keputusan dalam merubah hidup menjadi salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan cara-cara tersebut.
- e. Biaya operasional yang tinggi direduksi nelayan dengan tidak melakukan aktivitas penangkapan pada saat musim yang tinggi resiko alamnya dan melakukan pekerjaan *off fishing* diantaranya kembali merawat kebun atau bekerja sementara di sektor jasa seperti menjadi tukang ojek.

5. Modal Sosial

- a. Pada strategi mengejar musim, nelayan mengubah kebiasaan *one day fishing* karena terkadang mereka harus menetap di pulau terdekat dari lokasi *fishing ground* sampai musim panen di lokasi tersebut selesai. Dalam hal ini, nelayan dibantu dan difasilitasi oleh pengumpul dalam hal informasi dan kordinasi, suplai es dan BBM, dan transportasi hasil tangkapan ke kota atau ke Asilulu.
- b. Menghadapi resiko melaut yang semakin tinggi karena intensitas badai dan gelombang yang tidak lagi sesuai dengan prediksi, nelayan memaksimalkan jaringan sosial yang ada khususnya yang didasari hubungan kekerabatan. Nelayan pada beberapa tahun terakhir melaut secara berkelompok, biasanya

5-7 armada yang dimaksudkan untuk saling menolong di lautan, menyatukan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam membaca tanda-tanda alam dan menyatukan energi untuk mengejar ruaya ikan.

- c. Keharmonisan tercipta antara nelayan sebagai *klien* dan pedagang pengumpul sebagai *patron* meskipun pada prakteknya dominasi *patron* terlihat sangat menonjol yang disebabkan oleh rasa percaya dan nilai saling tukar kebaikan yang tinggi. Modal-modal sosial seperti kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama terutama untuk saling membantu yang tidak beruntung serta kohesi sosial seperti skala kebersamaan sejauh ini cukup membantu nelayan dalam beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Hubungan baik antara nelayan dan pengumpul terus dijaga dan didukung oleh perasaan kedua pihak sebagai saling membutuhkan, satu kerabat, sekampung dan solidaritas sesama nelayan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Perspektif resiliensi komunitas berguna untuk memahami keputusan-keputusan pengelolaan sumber daya alam dan perubahannya, khususnya perubahan yang mempengaruhi (mengganggu sistem nafkah masyarakat) yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari perubahan akses terhadap sumber daya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dipraktekkan oleh nelayan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan resiliensinya untuk tetap menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas yang normal. Faktor utama yang membuat komunitas resilien ialah memaksimalkan lima modal: modal sosial, ekonomi, manusia, fisik dan alam. Resiliensi juga diperkuat oleh faktor-faktor kebersamaan masyarakat dalam kegiatan perikanan, kerukunan nelayan, dan ketahanan pangan yang bersandar kepada pengetahuan lokal komunitas nelayan tentang makanan yang “pro iklim” yang bersumber dari sumber-sumber pangan lokal.

Resiliensi komunitas nelayan di lokasi penelitian terkait dengan adaptasi melalui strategi nafkah dalam konteks perubahan iklim yang sudah nyata terjadi adalah resiliensi yang terbatas (*limited resilience*). Saat ini, pembaruan dan modifikasi pengetahuan lokal tentang strategi nafkah serta dukungan eksternal kelembagaan yang

menfasilitasi penerapan strategi itu masih mampu menjamin komunitas nelayan dalam keadaan yang resilien. Akan tetapi apabila merujuk kepada skenario terkini bahwa perubahan iklim secara sistematis akan terus terjadi dan terus menekan sumber daya alam tempat di mana nelayan menggantungkan kehidupan dan menekan sistem nafkahnya, diprediksi strategi-strategi nafkah yang telah dikembangkan pada titik tertentu akan mengalami keterbatasan. Di sinilah perlunya kajian perubahan iklim, terutama pada aspek kerentanan dan resiliensi, perlu terus dilakukan pada skala yang lebih luas.

Implikasi Kebijakan

Isu perubahan iklim merupakan hal baru yang secara keilmuan relatif tidak diketahui oleh masyarakat secara umum di lokasi penelitian, terlebih lagi oleh komunitas nelayan. Sebaliknya, anggota komunitas sudah mulai merasakan indikator-indikator dari perubahan iklim (yang dirujuk kepada skenario IPCC) sejak 10 tahun terakhir. Seiring dengan perubahan-perubahan ekologi lautan yang dirasakan dan dialami, nelayan pada level komunitas dan kelompok mulai mengembangkan strategi-strategi adaptasi untuk mempertahankan sistem nafkah yang telah digeluti sebagai warisan nenek moyang mereka. Praktek adaptasi tersebut sesungguhnya akan lebih “berhasil” apabila dilandasi oleh pengetahuan yang proporsional dan tentang fenomena global perubahan iklim. Oleh karenanya, informasi tentang perubahan iklim secara keilmuan harus segera disampaikan secara benar kepada komunitas di desa khususnya kepada nelayan yang sangat bergantung kepada keramahan alam dalam sistem penghidupannya. Pemerintah dan stakeholder lainnya terutama perguruan tinggi harus bekerja sama dalam program sosialisasi informasi keilmuan perubahan iklim ini melalui kegiatan workshop, penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah eksis dalam sistem sosial komunitas.

Dalam rangka mempertahankan resiliensi komunitas nelayan dan mungkin meningkatkannya, diperlukan adanya perhatian yang lebih terhadap fenomena perubahan iklim yang berdampak pada usaha nelayan. Para nelayan mungkin akan lebih tangguh menghadapi perubahan iklim bila mereka memiliki perkiraan cuaca yang akurat dan tahu bagaimana harus merespon perubahan itu. Dalam kondisi iklim yang berubah, ketersediaan dan akses yang mudah tentang informasi cuaca dan lokasi penangkapan ikan secara rutin dan mutakhir

sangat penting bagi nelayan untuk meningkatkan produksi ikan. Terlebih jika para nelayan diajarkan cara menginterpretasikan informasi cuaca ini ke dalam bahasa mereka agar mudah dimengerti dan menjadikan mereka lebih mudah melakukan adaptasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N., P. M. Kelly, A. Winkels, L. Q. Huy & C. Locke. 2002. Migration, Remittances, Livelihood Trajectories, and Social Resilience. *Ambio* 31: 358-366.
- Adger, W. N. 2000. Social and Ecological Resilience: Are They Related?. *Progress in Human Geography* 24: 347-64.
- Ashley, C. & D. Carney. 1999. Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience. London: DFID. Source: <http://www.livelihoods.org/info/docs/nrcadc.pdf>.
- Bahadur, A. V., M. Ibrahim & T. Tanner. 2010. The Resilience Renaissance?: Unpacking of Resilience for Tackling Climate Change and Disasters. *Strengthening Climate Resilience Discussion Paper 1*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Brooks, N. 2003. Vulnerability, Risk, and Adaptation: A Conceptual Framework. Working Paper 38. Norwich: Tyndall Center for Climate Research.
- Bungin, B. M. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik, dan Ilmu Sosial. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Chambers, R. & G. R. Conway. 1991. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts For the 21st Century. *IDS Discussion Paper No.* 296.
- Cresswell, JW. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). 2011. Pemetaan Kerentanan di Daerah Provinsi serta Inventarisasi Kebijakan dan Kelembagaan dalam Rangka Antisipasi Dampak Perubahan Iklim. Jakarta: Dewan Nasional Perubahan Iklim.
- Ellis, F. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.

- Furchan, A. 1992. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fussel, H. M. 2007. Vulnerability: A Generally Applicable Conceptual Framework for Climate Change Research. *Global Environmental Change* 17: 155-167.
- Gallopin, G. 2006. Linkages Between Vulnerability, Resilience, and Adaptive Capacity. *Global Environmental Change* 16: 293-303.
- Hardy, J. T. 2003. *Climate Change: Causes, Effects, and Solutions*. John Wiley.
- Holling, C. S. & G. K. Meffe. 1996. Command and Control and The Pathology of Natural Resource Management. *Conservation Biology* 10 (2): 328-337.
- Hulme, M. & N. Sheard. 1999. *Climate Change Scenarios for Indonesia*. Leaflet CRU and WWF.UEA, Norwich, UK: Climatic Research Unit. Source: <http://www.cru.uea.ac.uk>.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2001. *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. J.J. McCarthy, O.F. Canziani, N.A. Leary, D.J. Dokken & K.S. White (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2007. *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for Policy Makers, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Paris, February 2007. Source: <http://www.ipcc.ch/2007>.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kolopaking, L. M. 2011. Konsep, Metode, dan Instrumen Penilaian Kerentanan Rumah Tangga di DAS Citarum. Materi pada Workshop TAADB 7189 – Paket E, Bandung 12-13 Desember 2011.
- Lassa, J. (ed.). 2009. *Conference Proceeding 5th National Conference Community Based Disaster Risk Reduction (Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas V)*. Jakarta: MPBI.
- Liverman, D. 2008. *Assessing Impacts, Adaptation and Vulnerability: Reflections on the Working Group II Report of The Intergovernmental Panel on Climate Change*. Global Environmental Change 18: 4-7.
- Ludwig, D., B. Walker & C.S. Holling. 1997. Sustainability, Stability and Resilience. *Conservation Ecology* 1. Source: <http://www.consecol.org/vol1/iss1/art7>.
- Machlis, G. E., J.E. Force & R.G. Balice. 1990. Timber, Mineral and Social Change: An Exploratory Test of Two Resource-Dependent Communities. *Rural Sociology* 55 (3): 411-424.
- Maguire, B. & S. Cartwright. 2008. *Assessing A Community's Capacity to Manage Change: A Resilience Approach to Social Assessment*. Australia: Bureau of Rural Sciences.
- Manyena, S. B. 2006. The Concept of Resilience Revisited. *Disasters* 30 (4): 433-50.
- Marshall, N. A., D.M. Fenton, P.A. Marshall & S. Sutton. 2007. How Resource-Dependency Can Influence Social Resilience Within a Primary Resource Industry. *Rural Sociology* 72: 359-390.
- Mayunga, J. S. 2007. *Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience: A Capital-Based Approach*. Working Paper Prepared for The Summer Academy, Megacities as Hotspots of Risk: Social Vulnerability and Resilience Building, Munich, Germany, 22-28 July 2007.
- McCarthy, J. J., O. F. Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken & K. S. White. 2001. *Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Meiviana, A. 2004. *Bumi Makin Panas: Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, JICA & Pelangi.
- Mendelsohn, R., A. Basist, P. Kurukulasuriya & A. Dinar. 2007. Climate and Rural Income. *Climatic Change* 81(1): 101 -18.
- Mortimore, M. & W. M. Adams. 2001. Farmer Adaptation, Change, and Crisis in The Sahel. *Global Environmental Change* 11: 49-57.
- Olmos, S. 2001. *Vulnerability and Adaptation to Climate Change: Concepts, Issues, Assessment Methods, Climate Change Knowledge*. Source: <http://www.cckn.net>.
- Pemerintah Negeri Asilulu. 2010. *Monografi Negeri Asilulu*. Tidak dipublikasikan.

- Rahardjo, T. 2005. Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Subair. 2013. Adaptasi Perubahan Iklim dan Resiliensi Komunitas Desa Nelayan: Studi Kasus di Kawasan Pesisir Utara Pulau Ambon, Maluku. Disertasi, tidak dipublikasikan. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Turner, B. L., E. Roger, Kasperson, P. A. Matsone, J. J. McCarthy, R. W. Corell, L. Christensen, N. Eckley, J. X. Kasperson, A. Luers, M. L. Martello, C. Polsky, A. Pulsipher & A. Schiller. 2003. A Framework for Vulnerability Analysis in Sustainability Science. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 100:8074–8079.
- Twigg, J. 2007. Characteristics of A Disaster-Resilient Community. A Guidance Note to The DFID DRR Interagency Coordination Group.
- United Nation Development Programme (UNDP). 2007. The Other Half of Climate Change: Why Indonesia must Adapt to Protect its Poorest People. Jakarta: UNDP Indonesia.

ANALISIS KEBERLANJUTAN LILIFUK: TINJAUAN PERSEPSI MASYARAKAT LOKAL

Sustainable Analysis of Lilifuk: Review Perceptions of Local Communities

*Maharani Yulisti, Nendah Kurniasari dan Christina Yuliaty

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang Kp I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

*email: maharani2811@yahoo.com

Diterima 4 April 2014 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dalam bentuk kearifan lokal merupakan wujud tanggung jawab mereka dalam melestarikan sumber daya sehingga dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Kearifan lokal tersebut bernama *Lilifuk*, yaitu kawasan di laut berbentuk kolam yang tergenang saat surut sehingga ikan terperangkap di dalamnya. Tulisan ini mengkaji persepsi masyarakat mengenai keberlanjutan *Lilifuk* di Kabupaten Kupang. Penelitian dilaksanakan di Desa Bolok dan Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang pada Oktober 2012 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus dan triangulasi digunakan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan terhadap tetua adat, kepala desa, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Data persepsi masyarakat dikumpulkan dari 30 responden. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis persepsi menunjukkan bahwa sebesar 93,3% masyarakat mengetahui tentang keberadaan *Lilifuk*, 60% tahu sejarahnya, 93,3% tahu lokasinya dan 26,7% tahu batas-batasnya. Sebanyak 44% masyarakat menyatakan otoritas pengambilan keputusan pengelolaan *Lilifuk* adalah pemiliknya. Keterlibatan Masyarakat dalam *Lilifuk* hanya sebagai pemanfaat saat *Lilifuk* dibuka (63%). Manfaat *Lilifuk* dapat diidentifikasi sebagai berikut: menambah penghasilan, menjalin hubungan sosial, rekreasi, menjaga sumber daya ikan, menjaga lingkungan dan menjaga tradisi. Faktor-faktor yang mengancam keberlanjutan *Lilifuk* adalah lahan yang sempit, penurunan produksi ikan, pencemaran perairan dan tidak adanya penjagaan. Prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan *Lilifuk* adalah (1) Menjaga dan melindungi serta memperbaiki kelestarian lingkungan; (2) Dukungan dan pengawasan pemerintah; (3) Menerapkan aturan dan sanksi hukum; (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelestarian, dan; (5) Menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Lilifuk*, keberlanjutan, masyarakat lokal, persepsi

ABSTRACT

Community participation in the fish resources management in the form of local wisdom is a form of community responsibility to preserve the resources in order to ensure its sustainable benefits. This paper examined community perceptions about the local wisdom sustainability of Lilifuk management in Kupang district. The study was conducted in Bolok and Kuanheum villages, West Kupang, Kupang Regency during October 2012 using a qualitative approach. A case study and triangulation methods were used in this study. In-depth interviews were conducted to the elders, village leaders, and representatives of NGOs. Data of community perceptions were collected from 30 respondents. Data were analyzed by qualitative and quantitative. Based on the analysis of perception, 93.3% of people know about the existence of Lilifuk, 60% know the history of Lilifuk, 93.3% know the location of Lilifuk and 26.7% knew its limits. As many as 44% of people said that the owner has the decision-making authority on Lilifuk management. Community Involvement in Lilifuk is only as beneficiaries when Lilifuk is open (63%). Benefits of Lilifuk were identified as factors: income increasing, social relationships, recreation, fish resource preservation, environment conservation and tradition protection. Lilifuk is threatened by factors such as a narrow area, fish production declining, water pollution and unprotected area. The main priorities in maintaining the sustainability of Lilifuk are: (1) Maintaining, protection and improving the environment; (2) Government supporting and supervision; (3) Applying the rules and legal sanctions; (4) Increasing public awareness of sustainability, and; (5) Using environmental friendly fishing gear.

Keywords: *Lilifuk*, sustainability, local community, perception

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya-upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman biologi pada tingkat genetik, spesies dan ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang dan tumbuhan di seluruh Kepulauan Indonesia. Sumber daya alam yang lestari dapat menjamin keberlanjutan produksi dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Mitchell *et al.*, 2000). Hal ini sejalan dengan pernyataan Fauzi (2004) bahwa pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang arif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan degradasi lingkungan.

Kearifan tradisional dalam masyarakat adat merupakan segala bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman maupun wawasan serta adat istiadat atau etika masyarakat yang menuntun perilaku kehidupan mereka di dalam komunitas ekologisnya (Keraf, 2010). Seluruh kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik sesama manusia maupun manusia terhadap alam. Keberadaan *Lilifuk* di Kabupaten Kupang merupakan suatu bentuk kearifan lokal pengelolaan sumber daya perikanan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan kepentingan-kepentingan lain seperti faktor-faktor ekonomi menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya laut dan ekosistemnya. Selain itu, terjadi tekanan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat akibat adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya secara intensif oleh pihak-pihak tertentu atau perusahaan besar mengakibatkan sulitnya akses masyarakat terhadap sumber daya perikanan. Sehubungan dengan hal itu, upaya pengelolaan lingkungan terutama sumber daya pesisir dan laut merupakan langkah yang penting dan strategis untuk keberlanjutannya. Berbagai contoh pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat berdasarkan hukum adat (kearifan lokal) di berbagai daerah di Indonesia yang secara tidak disadari justru menerapkan kaidah-kaidah konservasi sumber daya yang dapat menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan suatu daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dalam bentuk kearifan lokal merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya tersebut harus menyelaraskan antara aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya yang menopangnya (Sugandhy & Hakim, 2007). Persepsi masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya perikanan didapatkan untuk mengetahui pentingnya kelestarian sumber daya perikanan dalam menopang kehidupannya. Kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap suatu pengelolaan sumberdaya mutlak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Persepsi masyarakat ini juga dilakukan untuk mengetahui posisi dan peran serta masyarakat di sekitar kawasan tersebut, apakah masyarakat menjadi penghalang bagi keberlanjutan kawasan konservasi, atau masyarakat justru dapat diharapkan memiliki peran aktif dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji persepsi masyarakat mengenai keberlanjutan *Lilifuk* di Kabupaten Kupang.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Kajian Kearifan Lokal Dalam Mendukung Kelestarian Sumber Daya, Peningkatan Produksi dan Pendapatan pada tahun 2012. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Kombinasi metode studi kasus dan triangulasi digunakan dalam penelitian ini yang memadukan pengamatan, wawancara dan analisis dokumen (Sitorus, 1998). Menurut Idrus (2009), studi kasus merupakan desain penelitian pada pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang mempelajari suatu individu maupun unit sosial tertentu secara mendalam yang bersifat alami, holistik, mengandung unsur budaya, serta memiliki pendekatan fenomenologi. Kelebihan dari metode ini adalah dapat saling menutupi kelemahan antara satu metode tersebut dengan metode lainnya sehingga hasil yang diharapkan mengenai realitas sosial ini lebih valid menggambarkan kearifan lokal masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya *Lilifuk* dan mekanismenya.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Bulan Oktober 2012. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen yang bersifat hasil penelitian seperti buku, makalah dan skripsi. Untuk pengumpulan data primer, dilakukan dengan pengamatan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) serta wawancara yang dipandu dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kondisi sosial kultural kemasyarakatan dan kondisi sumber daya perikanan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya, kearifan lokal, serta persepsi masyarakat. Analisis dokumen dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal dan dokumen lainnya.

Informasi mengenai pengelolaan sumber daya *Lilifuk* dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat seperti tetua adat, kepala desa, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan pedoman wawancara/ topik data dan menggunakan alat bantu rekam. Penentuan informan dilakukan secara purposif dimana informan ditentukan karena alasan khusus. Tetua adat dipilih sebagai informan untuk menjawab pertanyaan terkait sejarah, latar belakang dan pengetahuan mengenai *Lilifuk*. Kepala desa membantu dalam menjawab pertanyaan seputar desa dan sejarahnya serta peran pemerintah dalam *Lilifuk*. Perwakilan lembaga swadaya masyarakat menjadi informan dalam penelitian dengan alasan peran serta yang besar dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES) terkait *Lilifuk*.

Data persepsi masyarakat dikumpulkan dari 30 contoh masyarakat Desa Bolok sebagai responden yang dipilih secara acak terkait dalam pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya perikanan *Lilifuk* di Kupang Barat. Pengumpulan data persepsi menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil wawancara *indepth interview* dianalisis dengan cara deskriptif interpretatif, yaitu peneliti memaparkan data secara keseluruhan kemudian

menginterpretasikan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengorganisasian data, pada proses ini data dipilih dan diurutkan yang sesuai dengan kajian yang dilakukan
2. Pemaknaan dengan ciri signifikansi , selanjutnya dihubungkan dengan idealisasi deskripsi yang dihasilkan disesuaikan dengan teori
3. Mendeskripsikan data sebagai hasil analisis dalam bentuk laporan
4. Membuat simpulan tentang hasil analisis
5. Verifikasi atau memeriksa kembali

Data mengenai persepsi yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Sumber Daya Perikanan

Kabupaten Kupang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang cukup besar diantaranya hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, berbagai jenis ikan laut, krustasea serta rumput laut. Berdasarkan hasil pengamatan, masyarakat memanfaatkan sumber daya tersebut sebagai bahan makanan dan sumber mata pencahariannya. Hasil tangkapan masyarakat nelayan umumnya digunakan sebagai bahan makanan keluarga dan sisanya dijual untuk mendapatkan uang.

Desa Bolok merupakan salah satu desa yang berada di kawasan pesisir Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Desa Bolok memiliki lokasi yang strategis dengan perairan pantai yang cocok untuk budidaya rumput laut sekaligus penangkapan ikan pelagis dan ikan karang. Hal ini yang menjadikan sebagian besar masyarakat Desa Bolok bermata pencaharian sebagai nelayan.

Melimpahnya ikan karang di sekitar Desa Bolok dikarenakan masih banyaknya terumbu karang di pesisir pantai desa, meskipun dalam kondisi yang rusak. Terumbu karang yang terdapat di pesisir Desa Bolok terdiri dari beberapa jenis yaitu karang lunak, karang bercabang dan karang otak. Selain itu, masih terdapat banyak padang lamun diantaranya jenis *Thalassia hempricii* dan *Enhalus acoroides*. Tutupan lamun yang sangat tinggi juga menjadikan potensi ikan karang yang cukup besar. Potensi sumber daya ikan karang

di pesisir Desa Bolok yang merupakan daerah pasang surut tersebut diantaranya ikan Beronang (*Siganus spp.*), Alu-alu (*Sphyrnidae*), Kerapu (*Ephinephelus spp.*), dan Peperek (*Leigonathidae*).

Terumbu karang yang berada di sekitar perairan Desa Bolok sudah mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penangkapan ikan terutama penangkapan pada saat surut. Selain itu juga kerap dilakukan pengeboman oleh nelayan yang dianggap mudah karena tidak memakan biaya yang banyak serta menghasilkan banyak tangkapan dalam waktu singkat. Penambangan karang juga sering dilakukan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan bangunan seperti dermaga, rumah dan pagar, pembuatan kapur serta pembuatan jalan.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Kupang terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Tetun, Helong, Flores, dan Rote. Penduduk desa Bolok terdiri dari berbagai suku asli Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berbagai suku dari luar NTT. Dominasi suku yang ada di Desa Bolok berasal dari suku Helong. Sekarang, dari suku-suku tersebut terdapat 13 marga yang mendiami desa tersebut yang awalnya hanya 7 marga asli. Meskipun terdapat berbagai etnis dengan berbagai budaya yang berbeda, namun masyarakat desa ini tinggal secara akur dan damai hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari (Boikh, 2010).

Meskipun diketahui dari Data Monografi Desa Bolok (2010) bahwa mata pencaharian penduduknya adalah petani sawah tadah hujan (38,8%) dan hanya 14,2% merupakan nelayan, namun mereka lebih menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dalam pemenuhan proteinnya. Mereka menangkap ikan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga, tidak untuk dijual. Selain itu, 38,8% petani tersebut dapat berganti pekerjaan sebagai nelayan atau pembudidaya rumput laut pada saat musim kemarau. Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan pekerjaan sesuai dengan kondisi atau musim yang ada yaitu pada musim hujan mengerjakan sawah tadah hujan, sedangkan pada musim kemarau melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Masyarakat juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang ojek, penggali tanah dan buruh di pelabuhan.

Pekerjaan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh musim ini menyebabkan pendapatan atau penghasilan masyarakat sehari-hari cukup kecil. Penghasilan ini rata-rata hanya untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja. Misalnya pedagang atau buruh hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000 per bulannya. Nikijulw (2001) menyatakan bahwa sebagian masyarakat nelayan pesisir adalah pengusaha skala kecil dan menengah yang bersifat subsisten yang menjalani usaha dan kegiatan ekonominya hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu yang sangat pendek sehingga hasilnya hanya cukup untuk menghidupi keluarganya saja.

Mayoritas penduduk desa ini adalah penganut agama Kristen Protestan. Sebagian kecil masyarakat memeluk agama Islam dan Kristen Katolik. Namun begitu, kerukunan beragama tetap terjalin yang dibuktikan dengan tidak pernah adanya konflik antara penganut agama yang berbeda.

Kearifan Lokal Pengelolaan Sumberdaya Laut bernama *Lilifuk*

Pengelolaan sumber daya laut yang dikenal oleh masyarakat Kupang adalah *Lilifuk*. *Lilifuk* merupakan suatu kawasan di perairan laut yang berbentuk kolam yang tergenang pada saat air laut surut. Pada saat surut ini ikan banyak yang terperangkap di dalamnya. Karena itu, masyarakat kemudian mengelola sumber daya ini untuk ditutup dari aktivitas penangkapan ikan sehari-hari dan dibuka¹ untuk sekali atau dua kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan untuk dapat dimanfaatkan. *Lilifuk* tersebut merupakan hak milik dari suatu suku tertentu dengan pengelolaannya dilindungi oleh hukum adat.

Lilifuk yang ada di Kabupaten Kupang terdapat 3 buah yaitu *Lilifuk* Baimusu dan *Lilifuk* Gatal di Desa Bolok, serta *Lilifuk* Baineo di Desa Kuanheum. Batas-batas wilayah *Lilifuk* yang ditutup sebagai daerah konservasi yaitu sejajar dengan garis pantai dengan luas: a) *Lilifuk* Gatal: 200 x 100 m, b) *Lilifuk* Gatal: 370 x 30 m, dan c) *Lilifuk* Baineo: 100 x 50 m. Batas-batas wilayah tersebut juga diberi tanda. Awalnya tanda yang diberikan berupa batu. Namun karena batu-batu tersebut sering dibongkar pada saat dibuka, maka batas tersebut diganti dengan menggunakan kayu.

¹Dibuka artinya bahwa sumber daya *Lilifuk* tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat dengan cara penangkapan ikan yang ada di dalamnya

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Pendapatan, Suku, Tingkat Pendidikan dan Mata Pencaharian Utama di Desa Bolok, Kupang Barat, 2012.**Table 1. Characteristics Of Respondent By Age, Income, Ethnicity, Level of Education and Main Livelihood in The Bolok Village of West Kupang, 2012.**

Nomor/ Number	Kategori/ Category	Persentase Responden/ Percentages of Respondent (%) n=30
1	Umur/Age	
	<25 tahun/ less than 25 years old	3.33
	25-64/ between 25 to 64	90.00
	>64/ more than 64 years old	6.67
2	Pendapatan / Income	
	< Rp. 1 juta/ Less than IDR 1 million	93.33
	Rp. 1 - 2 juta/ Between IDR 1 – 2 million	6.67
	> Rp. 2 juta/ More than IDR 2 million	0.00
3	Suku / Ethnic	
	Helong	76.67
	Sumba	10.00
	Sabu	3.33
	Timor	6.67
	Alor	3.33
4	Tingkat pendidikan / Level of education	
	Tidak sekolah/ No formal education	10.00
	SD / Elementary School	43.33
	SMP/ Junior High School	13.33
	SMA/ High School	26.67
	Universitas/University	6.67
5	Mata pencaharian utama / Main livelihood	
	Nelayan / Fishermen	43.33
	Petani / Farmers	30.00
	Pegawai atau wiraswasta / Employees or Entrepreneurs	10.00
	Lainnya / Others	16.67

Sumber: Data primer diolah (2012) / Sources: Primary data proceed (2012)

Kepemilikan *Lilifuk* oleh suatu suku tertentu adalah karena sejarah awalnya ditemukan wilayah tersebut oleh salah satu anggota suku tersebut sehingga dapat diklaim sebagai miliknya secara adat. Kesepakatan untuk menutup daerah tersebut dilakukan atas keinginan bersama dan diprakarsai oleh tokoh adat, pemerintah desa, tokoh agama serta masyarakat. Suku Holbala merupakan suku yang menguasai *Lilifuk* di Desa Bolok saat ini.

Komponen masyarakat yang berperan dalam kearifan lokal pengelolaan *Lilifuk* terbagi dalam 5 unsur yaitu tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, masyarakat dan orang luar desa.

Tokoh adat memiliki peran sebagai penjaga sumber daya tersebut khususnya ikan yang ada di dalam *Lilifuk* serta membantu pemerintah desa dalam menghimpun informasi tentang adanya gangguan pencurian ikan di dalam wilayah tersebut. Tokoh agama dan pemerintah desa bersama-sama memiliki peran sebagai pengambil kebijakan, pertimbangan serta pemberian dukungan di dalam penerapan aturan yang sudah dibuat. Pemerintah desa juga berperan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas saat waktunya *Lilifuk* dibuka. Masyarakat memiliki peran menjaga daerah tersebut dan mentaati peraturan yang sudah dibuat dalam rangka *Lilifuk* tersebut.

Tabel 2. Pemenuhan Unsur-unsur Hak Ulayat pada Lilifuk di Kabupaten Kupang, tahun 2012.
Table 2. Compliance Elements of Communal Property Right to Lilifuk in Kupang, 2012.

Nomor/ Number	Unsur-unsur Hak Ulayat/ Elements of Communal Property Right	Fakta/ Evidance	Keterangan/ Information
1	Ada sekelompok/ persekutuan (masyarakat) hukum adat yang mendiami daerah tertentu <i>There are group / community (society) customary law inhabited a particular area</i>	Ada sekelompok masyarakat berdasarkan sistem marga (marga Baimusu, marga Holbala-Buitbesi-Klapeka, dan marga Baineo) yang mempunyai wilayah di dekat Lilifuk (Kupang) sebagai pemukiman dan tempat nafkah / <i>There are group of people based on the clan system (Baimusu clan, Buitbesi-Holbala-Klapeka clan, and Baineo clan) having areas near Lilifuk (Kupang) as settlements and livelihood</i>	Memenuhi/ Conform
2	Masyarakat membuat dan menciptakan serangkaian peraturan peraturan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota persekutuan atau Masyarakat / <i>Community develops laws and creates a set of rules as guidances for each member of the responding community.</i>	Terdapat peraturan mengenai pemanfaatan Lilifuk (meskipun tidak tertulis) serta larangan menjualnya tanpa ijin dari Kepala Suku / <i>There are regulations on the use of Lilifuk (though not written) as well as the prohibition to sell it without the permission of the Chief</i>	Memenuhi/ Conform
3	Masyarakat hukum adat tersebut berhak menguasai atas tanah, air dengan segala macam isinya. Hak tersebut merupakan hak tertinggi di dalam masyarakat hukum adat dan tidak dapat dipecah-pecahkan atau dipindahtangankan / <i>Indigenous and tribal peoples are entitled to retain the land, water with all kinds of content. These rights is the highest indigenous peoples, can not be parted or transferred</i>	Marga Baimusu menguasai perairan Lilifuk Baimusu, marga Holbala-Buitbesi-Klapeka menguasai Lilifuk Gatal, dan marga Baineo menguasai Lilifuk Kuanheun, yang berdasarkan batas-batas alamiah (Lilifuk merupakan kolam ikan di pantai dengan batas-batas yang sudah terbentuk secara alamiah)/ <i>Baimusu clan controlled waters Lilifuk Baimusu, clan-Buitbesi Holbala-Klapeka master Lilifuk Itching and clan master Baineo Lilifuk Kuanheun, based on natural boundaries (Lilifuk is a fish pond on the beach with boundaries naturally formed)</i>	Memenuhi/ Conform
5	Obyek yang dikuasai adalah tanah, air, sungai-sungai, pantai, tumbuh-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu) dan satwa-satwa liar/ <i>Controlled objects are soil, water, rivers, coast, wild herbs (the trees) and wild animals</i>	Disamping wilayah yang dikuasai, juga adanya penguasaan atas sumberdaya alam seperti ikan dan rumput laut/ <i>In addition to controlled areas, there as well as the control of natural resources such as fish and seaweed</i>	Memenuhi/ Conform
6	Obyek tersebut untuk keperluan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya serta untuk keperluan orang luar yang pemanfaatannya terbatas dengan membayar uang pemasukan (retribusi atau <i>recognitie</i>) / <i>The object is for the purposes of community and its members and so the outsiders, however, limited access is applied by paying cash income (retribution or recognitie)</i>	Masyarakat memanfaatkan Lilifuk sebagai sumberdaya untuk peningkatan ekonominya. Orang luar memanfaatkannya dengan harus membayar retribusi pada saat dibuka/panen dengan membayar Rp. 2.500 per orang/ <i>Lilifuk people use as a resource for economic gain. Outsiders use it must pay a fee at the time of opening / harvest by paying IDR. 2,500 per person</i>	Memenuhi/ Conform

Keterangan: Unsur-Unsur Hak Ulayat Menurut Hanaf (1994) / Description: Elements of Customary Rights According Hanaf (1994)

Penangkapan ikan pada saat dibukanya *Lilifuk* dilakukan oleh masyarakat desa maupun dari luar desa tersebut. Penangkapan ikan tersebut biasanya dilakukan dalam dua hari tergantung dari keputusan pemilik *Lilifuk*. Pembukaan *Lilifuk* biasanya dimulai dengan pesta adat dan ritual agama sebelum dilakukannya panen ikan di wilayah tersebut.

Lilifuk merupakan suatu bentuk hak ulayat laut. Hak penguasaan masyarakat hukum atas tanah, air sungai, pantai, tumbuh-tumbuhan liar, satwa liar di dalam lingkungan guna kepentingan masyarakat hukum sendiri dan anggota-anggotanya serta orang luar yang membayar retribusi untuk itu dinamakan hak ulayat (Hanaf, 1994 *dalam* Yulianto, 2008). Hal ini diperkuat oleh UU No. 22 Tahun 1999 yang merupakan kekuatan hukum yang mengakui eksistensi institusi lokal yang ada di beberapa daerah dalam mengelola sumber daya ikan.

Lilifuk merupakan salah satu pengelolaan sumber daya perikanan *Community Based Management* (CBM). Menurut Nikijuluw (2002), CBM merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan, tujuan dan aspirasinya.

Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sumber daya *Lilifuk*

Persepsi masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya perikanan difokuskan pada sikap dan

anggapan masyarakat terhadap sumber daya *Lilifuk* dan pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian dan pengetahuan mengenai keberadaan *Lilifuk* sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil survey bahwa masyarakat mengetahui keberadaan *Lilifuk*, sejarah pembentukan dan lokasi *Lilifuk* (Tabel 3).

Masyarakat atau responden mengetahui keberadaan *Lilifuk* dengan berbagai persepsinya masing-masing. Hal ini terbukti dengan jawaban responden mengenai arti dari *Lilifuk* bermacam-macam diantaranya:

- Kolam ikan (16,7%)
- Tempat atau kolam berlindungnya ikan yang dilindungi (6,7%)
- Kolam ikan yang pemiliknya adalah sub suku tertentu saja (dikelola oleh adat) (40%)
- Suatu tempat/kolam ikan alami di laut saat air surut yang dikelola secara adat untuk dapat dipanen pada waktunya (33,3%)
- Pelestarian budaya lokal (3,3%)

Sejarah mengenai *Lilifuk* umumnya diketahui masyarakat dari orang tua, masyarakat, dan kerabat. Menurut persepsi masyarakat, sejarah *Lilifuk*:

- *Lilifuk* diwariskan oleh leluhur sejak tahun 1950 hingga sekarang dan dijaga oleh beberapa suku, dan kemudian pada saat panen maka akan dipanen oleh seluruh masyarakat sekitar melalui penyebaran undangan

Tabel 3. Persepsi Masyarakat Mengenai Keberadaan, Sejarah dan Lokasi serta Batas-batas *Lilifuk* di Kabupaten Kupang, Tahun 2012.

Table 3. Public Perception Regarding the Presence, History, Location and Boundaries of *Lilifuk* at Kupang Regency, 2012.

Nomor/ Number	Daftar Pertanyaan/ Question List	Persentase Jawaban / Percentage of Responses (%) (n=30)		
		Ya/Yes	Tidak tahu/ Do not know	Tidak menjawab/ No answer
1	Apakah anda tahu tentang <i>Lilifuk</i> ?/ Do you know about <i>Lilifuk</i> ?	93.3	6.7	-
2	Apakah anda tahu sejarah <i>Lilifuk</i> ?/ Do you know the history of <i>Lilifuk</i> ?	60	40	-
3	Apakah anda tahu lokasi <i>Lilifuk</i> ?/ Do you know the location of <i>Lilifuk</i> ?	93.3	6.7	-
4	Apakah anda tahu batas wilayah <i>Lilifuk</i> ?/ Do you know the boundaries of <i>Lilifuk</i> ?	26.7	53.3	20

Sumber: Data primer diolah (2012) / Sources: Primary data proceed (2012)

- *Lilifuk* sudah ada atau ditemukan sejak tahun 1960-an oleh para orang tua (suku tertentu) yang kemudian dijaga dan diwariskan kembali ke generasi penerusnya hingga sekarang
- *Lilifuk* dianggap sebagai sebuah kolam yang sudah ada sejak dahulu untuk menangkap ikan dan kemudian dijaga oleh suku-suku dan kemudian diklaim menjadi milik mereka
- Awalnya *Lilifuk* hanyalah sebuah kolam alami tetapi kolam tersebut memberi hasil yang memuaskan kepada masyarakat setempat namun beberapa orang yang berasal dari suku yang berbeda saling membantu untuk menjaga kolam alami tersebut dengan diberi pembatas atau dipagari dengan batu karang dan pada waktu panen *Lilifuk* dibuka oleh para pemiliknya dengan mengundang masyarakat sekitar untuk secara bersama-sama memanen hasil (ikan) yang ada di kolam
- *Lilifuk* merupakan suatu peninggalan dari suku Baimusu dan sampai sekarang dilanjutkan oleh keturunannya sampai sekarang dan dilindungi oleh pemerintah dan adat

Persepsi masyarakat terhadap kepemilikan *Lilifuk* sekarang dibandingkan dulu adalah bahwa:

- *Lilifuk* merupakan warisan dari orang tua pada zaman dahulu (suku-suku tertentu) yang kemudian sekarang ini telah diwariskan kepada anak dan cucu mereka sebagai generasi penerus
- Pemiliknya adalah beberapa suku dari suku helong di Desa Bolok
- Pemilik *Lilifuk* adalah orang-orang atau suku-suku yang menjaga dan menemukan *Lilifuk* sejak dahulu yang sekarang ini diwariskan kepada anak dan cucu mereka sendiri
- Kepemilikan *Lilifuk* dulu dan sekarang tetap
- Kepemilikan tetap seperti dulu tetapi terkesan tidak terpelihara secara baik
- Dulu lebih bagus dari sekarang
- Luasnya kurang lebih 250 x 100 m², kepemilikan *Lilifuk* dikelola oleh keturunan dari suku Baimusu dari dulu sampai sekarang

Aturan dan sanksi diterapkan dalam pengelolaan sumber daya *Lilifuk* ini. Aturan yang terdapat dalam pengelolaan ini diantaranya tidak boleh mengambil hasil laut apapun yang terdapat di dalam wilayah *Lilifuk*, penggunaan alat tangkap yang dibolehkan pada saat buka *Lilifuk* adalah alat tangkap yang ramah lingkungan (serok dan tombak), serta mekanisme keikutsertaan dalam waktu buka *Lilifuk* yaitu membayar biaya masuk sebesar Rp. 2.500 per orang. Sanksi yang diterapkan bila terjadi pelanggaran diantaranya berupa uang sebesar Rp. 50.000 bagi masyarakat desa dan Rp. 250.000 bagi masyarakat di luar desa. Selain itu dikenakan denda babi/kambing, beras dan sarung. Selain itu dikenakan denda babi/kambing, beras dan sarung.

Otoritas pengambilan keputusan berkaitan erat dengan distribusi hak dalam pengelolaan sumber daya perikanan *Lilifuk*. Hak penguasaan *Lilifuk* dipegang oleh pemilik dan aparat desa, namun otoritas penentuan waktu pembukaan (panen) atau penutupan *Lilifuk* tersebut adalah hak pemilik beserta keluarganya dan aparat desa hanya mengesahkan dan menyebarkan informasi saja. Peran masyarakat dalam perlindungan sumber daya adalah mengawasi dan memelihara sumber daya laut dan pesisir. Begitu pula dalam hak pemindahtanganan *Lilifuk* sepenuhnya ada di pihak pemilik atas sepengetahuan pemerintah desa. Pemindahtanganan ini pernah terjadi pada *Lilifuk* Baimusu dimana awalnya dimiliki oleh marga Laiskodat, namun dengan pertimbangan kekeluargaan dan kepentingan kedua belah pihak kemudian disepakati untuk dipindahtangankan kepada marga Baimusu.

Apakah mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan *Lilifuk* sudah tepat?. 10% responden menyatakan bawa pengambilan keputusan sudah tepat, namun sebanyak 73% responden menyatakan tidak tepat, karena masyarakat tidak terlibat dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan mengenai *Lilifuk*. Hanya pemilik dan aparat desa yang memiliki hak dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *Lilifuk*.

Hak mengakses pada zona *Lilifuk* adalah untuk kegiatan pariwisata, pendidikan, dan penelitian. Masyarakat tidak memiliki hak untuk mengakses terhadap zona *Lilifuk* untuk mencegah terjadinya pengrusakan dan pencurian. Hak pemanfaatan di zona *Lilifuk* hanya untuk pemiliknya. Hak pemanfaatan bagi pemilik dilakukan pada

zona *Lilifuk* untuk budidaya rumput laut, sedangkan masyarakat tidak berhak memanfaatkan wilayah *Lilifuk* kecuali pada saat wilayah tersebut dibuka atau panen (Gambar 1). 63% responden menyatakan bahwa masyarakat hanya sebagai pemanfaat saat panen atau saat *Lilifuk* dibuka. Masyarakat sekitarnya mengawasi dan memelihara *Lilifuk* tersebut dengan menjaga batas-batas yang telah disepakati yaitu pagar-pagar laut pada zona *Lilifuk*.

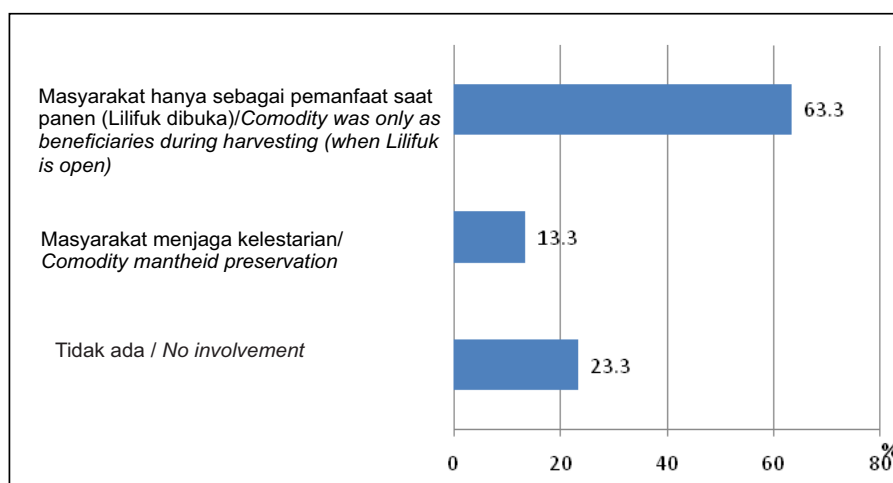
Selain itu masyarakat juga menjaga dan mengawasi kawasan perairan sekitarnya dengan tidak merusak terumbu karang dan padang lamun pada saat penangkapan ikan, serta menegur dan memberikan laporan kepada Pokmaswas dan aparat desa bila terdapat hal-hal yang merusak sumber daya perikanan. Berdasarkan hasil survey seperti pada Gambar 1, 13,3% responden memberikan respon bahwa masyarakat terlibat dalam menjaga kelestarian *Lilifuk*, sedangkan 23,3% responden menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki peran atau keterlibatan apapun dalam *Lilifuk* (Gambar 1).

Analisis Keberlanjutan *Lilifuk*

Beberapa manfaat dapat diperoleh oleh masyarakat dari *Lilifuk* ini, baik manfaat secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah manfaat untuk individu maupun rumah tangganya karena dapat menambah penghasilan dari penangkapan ikan pada saat buka *Lilifuk*. Manfaat sosial dirasakan oleh masyarakat untuk kehidupan kelompok atau lingkungan sosialnya seperti

meningkatkan hubungan sosial antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya serta menjaga hubungan sosial dengan tetangga sekitarnya yang ikut pada waktu buka *Lilifuk*, bahkan dengan masyarakat di luar desa tersebut. Manfaat sosial lainnya adalah waktu buka *Lilifuk* memberikan hiburan gratis bagi masyarakat dengan berekreasi menonton acara buka *Lilifuk* tersebut. Selain itu, *Lilifuk* menjaga tradisi setempat karena *Lilifuk* merupakan warisan orang tua. Selain itu, *Lilifuk* ini memberi manfaat menjaga budaya daerah setempat karena pada saat dibukanya dilakukan pesta adat yang menampilkan acara-acara seni setempat (Tabel 4).

Lilifuk ini juga memberikan manfaat bagi lingkungan ekologi. Dengan menerapkan penutupan *Lilifuk* selama setahun, maka ikan yang ada di sekitarnya ikut terjaga. Ikan akan terlebih dahulu besar dan memijah sehingga keberlanjutan sumber daya ikan terjaga, disamping sumber daya perikanan lainnya. Dengan adanya *Lilifuk*, masyarakat akan menjaga lingkungannya dengan baik dengan tidak membuang sampah sembarangan di laut dan pantai dan tidak menggunakan alat tangkap yang merusak sumber daya. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat menyadari pentingnya keberadaan *Lilifuk* dengan segala manfaatnya yang langsung dirasakan oleh mereka. Keberlanjutan *Lilifuk* akan selalu dijaga oleh masyarakat, karena dengan merusaknya berarti masyarakat akan mendapatkan dampaknya juga. Oleh karena itu masyarakat berusaha untuk menjaga kawasan perairan di sekitar *Lilifuk* baik dari dalam lingkungan maupun dari luar lingkungannya.



Gambar 1. Respon Responden Terhadap Keterlibatan Masyarakat dalam *Lilifuk*.

Figure 1. Respond of the Respondents on Community Involvement in Managing Local Wisdom of *Lilifuk*.

Sumber: Data primer diolah (2012) / Sources: Primary data proceed (2012)

Tabel 4. Persepsi Masyarakat Mengenai Manfaat Lilifuk untuk kehidupannya.
Table 4. Communities Perception Regarding Benefits of Lilifuk for Their Daily Live.

Nomor/ Number	Manfaat Lilifuk / Benefits of Lilifuk	Frekuensi/ Frequency (n)	Persentase/ Percentage (%)
1	Menambah penghasilan / <i>Additional income</i>	28	93.3
2	Menjalin hubungan sosial/ <i>Liaise social relationship</i>	11	36.7
3	Rekreasi / <i>Recreation</i>	7	23.3
4	Sumber daya ikan tetap terjaga/ <i>Prevent fisheries resources</i>	8	26.7
5	Lingkungan terjaga/ <i>Protect environment</i>	15	50
6	Menjaga tradisi atau budaya/ <i>Preserve tradition or culture</i>	6	20

Sumber: Data primer diolah (2012) / Sources: Primary data proceed (2012)

Masyarakat di sekitar *Lilifuk* berusaha menjaga lingkungan pesisir karena sebagian besar wilayah perairan tersebut digunakan masyarakat untuk usaha penangkapan ikan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Apabila lingkungan tidak dijaga maka akan berdampak pada produksi penangkapan ikan. Namun begitu, beberapa hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat yang dapat mengancam sumber daya perairan di sekitar *Lilifuk* dan pengelolaannya baik pengaruh dari luar maupun dari dalam. Tabel di bawah menunjukkan secara rinci mengenai hal-hal yang dianggap sebagai ancaman terhadap sumber daya serta kualitas lingkungan pesisir dan juga ancaman terhadap keberlanjutan *Lilifuk* berdasarkan persepsi masyarakat.

Pertanyaan rinci yang diajukan kepada responden lebih jauh memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat akan kegiatan industri kelautan dan kegiatan yang berkaitan sumberdaya laut. Berikut ini adalah butir-butir yang mencerminkan sikap dan persepsi tersebut:

- Lahan perairan semakin sempit karena adanya rakit-rakit budidaya rumput laut oleh masyarakat dan adanya larangan yang dibuat oleh perusahaan budidaya mutiara
- Pencemaran limbah cucian dari perusahaan budidaya mutiara tersebut
- Perairan semakin kotor dan tercemar dari beberapa kegiatan lainnya. Permasalahan utama adalah minyak dan pembuangan

Tabel 5. Faktor-faktor Ancaman terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perairan di Lilifuk di Kupang Barat Menurut Persepsi Masyarakat

Table 5. Threat Factors to Resources Management of Lilifuk According to Communities Perception.

Nomor/ Number	Permasalahan Utama/ Main Issues	Frekuensi/ Frequency (n)	Persentase/ Percentage (%)
1	Lahan sempit / <i>Incapacious area</i>	12	40
2	Produksi menurun / <i>Production decreased</i>	8	27
3	Perairan tercemar atau terganggu/ <i>Waters polluted or disturbed</i>	7	23
4	Tidak dijaga atau dilindungi / <i>Not guarded or protected</i>	1	3
5	Tidak tahu / <i>Abstain</i>	2	7
	Total / <i>Total</i>	30	100

Sumber: Data primer diolah (2012) / Sources: Primary data proceed (2012)

sampah sembarangan

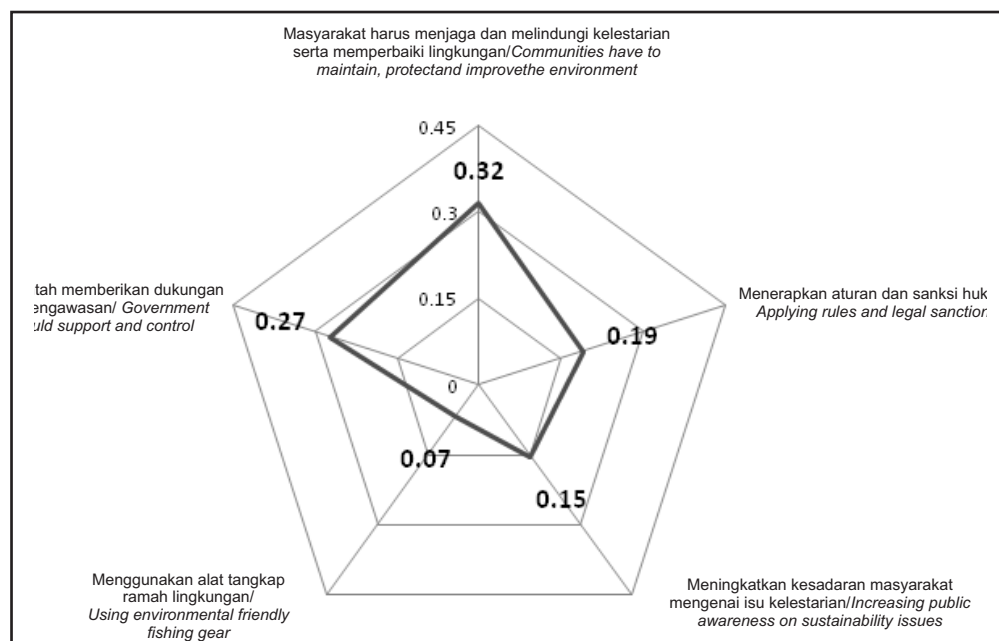
- Ikan-ikan di perairan berkurang dan kerusakan terumbu karang

Selain manfaat dan kendala dalam *Lilifuk*, mekanisme pengambilan keputusan dalam *Lilifuk* juga penting dalam keberlanjutan *Lilifuk*. Hal ini akan mempengaruhi masyarakat untuk mengambil sikap dalam mendukung keberlanjutan atau sebaliknya menghilangkan *Lilifuk*. Sebanyak 73% responden memiliki persepsi bahwa mekanisme pengambilan keputusan belum tepat karena mekanisme *Lilifuk* hanya menurut pemilik semata. Menurut mereka pula, mekanisme seharusnya dibentuk bersama tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dengan dimusyawarahkan bersama untuk mendapat keputusan yang tepat bagi kepentingan bersama.

Sayangnya, dalam pelaksanaan pengelolaan *Lilifuk* ini tidak ada zona inti di dalamnya yang dapat menjaga kelestarian sumber daya secara berkelanjutan. Setiap tahun *Lilifuk* dibuka, semua wilayah pengelolaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat (tidak ada pembagian zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan) meskipun dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana dan ramah lingkungan (serok dan tombak). Perdes yang sedang disusun oleh pemerintah desa atas keinginan masyarakat yang didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat menginisiasi zona inti yang harus dikelola dalam *Lilifuk*.

Lilifuk memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, maka perlu dipikirkan bagaimana menjaga keberlanjutan *Lilifuk*. Menurut persepsi masyarakat, beberapa faktor yang harus diperhatikan sebagai prioritas adalah menjaga dan melindungi serta memperbaiki kelestarian lingkungan, adanya dukungan dan pengawasan pemerintah, menerapkan aturan dan sanksi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelestarian, serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan (Gambar 2). Dalam rangka pencapaian keberlanjutan *Lilifuk* tersebut, beberapa hal harus dilakukan bersama-sama baik oleh masyarakat, pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat seperti tetua adat dan tokoh agama.

Berdasarkan persepsi masyarakat mengenai aspek prioritas dalam menjaga keberlanjutan *Lilifuk* seperti yang terilustrasi pada Gambar 2, bahwa sebanyak 31% responden menyatakan bahwa masyarakat harus menjaga dan melindungi kelestarian serta memperbaiki lingkungan merupakan prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan *Lilifuk*. Masyarakat belum menyadari secara menyeluruh pentingnya pengelolaan sumber daya berkelanjutan bagi kehidupannya di masa depan. Banyaknya pencurian ikan di kawasan *Lilifuk* menyebabkan masyarakat berpendapat pentingnya aspek tersebut untuk lebih diperhatikan.



Gambar 2. Persepsi Masyarakat mengenai Aspek Prioritas dalam Menjaga Keberlanjutan Lilifuk.
Figure 2. Communities Perception on the Sustaining the Lilifuk Prioritization.

Sumber: Data primer diolah (2012) / Sources: Primary data proceed (2012)

Dukungan dan pengawasan pemerintah diperlukan dalam keberlanjutan *Lilifuk* merupakan prioritas kedua menurut masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 27,3%, karena menurut pendapat masyarakat bahwa perhatian pemerintah daerah masih kurang dalam menjaga kelestarian *Lilifuk*. Sebagai contoh, sampai saat ini hanya ada satu *Lilifuk* yang memiliki Peraturan Desa (PERDES) mengenai *Lilifuk* yaitu di desa Kuanheum. Lebih lanjut, sebanyak 19,1% responden menyebutkan perlunya penerapan aturan dan sanksi hukum yang tegas, sehingga pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati harus diberi sanksi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan persepsi masyarakat mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan (sebanyak 6,7% responden). Selama ini, alat tangkap ramah lingkungan seperti serok dan tombak digunakan pada saat buka *Lilifuk*, hanya saja masih banyak penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan yang digunakan di perairan sekitar *Lilifuk* seperti bom, racun dan pukat garu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Lilifuk dapat bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungannya namun harus memperhatikan aspek-aspek pengelolaan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal yang terlibat dan yang mendapatkan dampak dari pengelolaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung dapat berperan serta memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga keberadaan *Lilifuk*. Berdasarkan persepsi tersebut diperoleh cara pandang masyarakat mengenai pentingnya *Lilifuk* untuk kelestarian sumber daya dalam menopang kehidupannya, dan bagaimana masyarakat menjaga keberadaannya sehingga dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Manfaat *Lilifuk* bagi masyarakat berdasarkan persepsinya adalah menambah penghasilan (93%), menjalin hubungan sosial (367%), rekreasi (23,3%), menjaga sumber daya ikan (26,7%), menjaga lingkungan (50%) dan menjaga tradisi atau budaya (20%). Faktor-faktor ancaman terhadap *Lilifuk* berdasarkan persepsi masyarakat adalah lahan sempit (40%), produksi menurun (27%), perairan tercemar (23%) dan tidak dijaga (3%). Prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan *Lilifuk* berdasarkan urutannya adalah 1. Menjaga dan melindungi serta memperbaiki kelestarian

lingkungan (31,6%), 2. Dukungan dan pengawasan pemerintah (27,3%), 3. Menerapkan aturan dan sanksi hukum (19,1%), 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelestarian (15,3%), dan 5. Menggunakan alat tangkap ramah lingkungan (6,7%).

Implikasi Kebijakan:

- Menekankan pentingnya zona inti di dalam pengelolaan *Lilifuk* untuk menjaga kelestarian sumber daya
- Diperlukan upaya penyadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumberdaya berkelanjutan untuk manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitarnya
- Dukungan pemerintah daerah dalam penguatan regulasi dan pengawasan sumber daya serta pelestarian tradisi dan budaya
- Menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap orang yang melanggar pengelolaan *Lilifuk*.

DAFTAR PUSTAKA

- Boikh, L.I. 2010. Persepsi Masyarakat Terhadap Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat dengan Kearifan Lokal di Desa Bolok. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Artha Wacana. Kupang, Nusa Tenggara Tlmur. 83 hal.
- Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 259 hal.
- Idrus, M. 2009. Metode Penelitian Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga. 266 hal.
- Keraf, A.S. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 408 hal.
- Mitchell, B., B. Setiawan & H.R. Dwita. 2000. Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 498 hal.
- Nikijuluw, C. 2001. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu dalam Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wiyalah Peisir Terpadu. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor: 14-27.

- Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo. 254 hal.
- Sitorus, M.T.F. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB. Bogor. 73 hal.
- Sugandhy, A. & R. Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 157 hal.
- Yulianto, G. 2008. *Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni*. *Buletin Ekonomi Perikanan Volume VIII (2): 82-89*.

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLA TAMAN NASIONAL LAUT KEPULAUAN SERIBU

Institutional Analysis of the 'Kepulauan Seribu' National Marine Park Management

***Hariyani Sambali¹, Fredinan Yulianda², Dietrieck G. Bengen² dan M. Mukhlis Kamal²**

¹Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado

²Dosen FPIK Institut Pertanian Bogor, Bogor

*email: hari.sambali@gmail.com

Diterima 23 April 2014 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Permasalahan kewenangan secara kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasikhususnya Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) masih terus mengemuka, hal ini dapat berpotensi konflik kewenangan yang berdampak terhadap keberlanjutan pengelolaan. Penelitian ditujukan untuk mengetahui kelembagaan yang paling berwenang dalam pengelolaan TNKpS dan dampak penambangan karang terhadap sumber daya terumbu karang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner. Analisis data menggunakan metode ISM (*Interpretative Structural Modelling*) dan data lapangan menggunakan metode *Line Intercept Transects* (LIT). Hasil penelitian menunjukkan Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah adalah kelembagaan yang mempunyai pengaruh kuat terhadap keberlangsungan pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Agar pengelolaan sumber daya Taman Nasional Kepulauan Seribu dapat berkelanjutan, maka elemen Tujuan Program yang dapat dirujuk sebagai kebijakan pengelolaan bersama kedua kelembagaan tersebut adalah Kelestarian Sumber daya Taman Nasional.

Kata Kunci: konservasi, taman nasional laut, *interpretative structural modelling*

ABSTRACT

Institutional authority is one of the problem in the management of protected areas, especially on Kepulauan Seribu National Park does still exist and it could have an impact on management sustainability because of any potential authority conflicts. The objectives of this study are: (1) analyzing and determining the most influential management institution of TNKpS; and (2) analyzing the impact of coral mining at coral reef resources. Data was collected using interviews and questionnaires. Data was analyzed using ISM (Interpretative Structural Modelling) for institutional data and Line Intercept Transects (LIT) for field data. The results showed that Ministry of Forestry and Local Government are the most influence institution in the authority context for management of Kepulauan Seribu National Marine Park. Ensuring the sustainability of Kepulauan Seribu National Park resource then the program elements that can be referred as joint resource management policies of the two institutions is the National Park Resource Sustainability.

Keywords: conservation, institutional, *interpretative structural modelling*, national park

PENDAHULUAN

Kawasan konservasi sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tujuan utamanya agar dapat dicapai kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Sumber daya alam sangat berperan dalam menunjang perekonomian nasional, sehingga mempunyai peran sebagai penopang sistem kehidupan dan modal pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk kawasan konservasi adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) yang termasuk dalam kategori kawasan yang dilindungi. TNKpS sejak tahun 2002 ditetapkan sebagai salah satu taman nasional laut, secara yuridis terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan manfaat fisik. Namun demikian dalam pengelolaannya masih dijumpai beberapa permasalahan pokok yang merupakan potensi konflik, terutama konflik kewenangan.

Pengelolaan TNKpS pada tataran kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) melalui Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (BTNKpS) sebagai pengelola dan Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan yang berbeda berkaitan dengan pengelolaan kawasan TNKpS. Disharmoni berkaitan dengan kewenangan pengelolaan antara kedua pemangku kepentingan tersebut menyebabkan peraturan sulit diterapkan lintas sektoral. Konflik kewenangan dalam pengelolaan kawasan TNKpS pada akhirnya mengakibatkan kinerja pengelolaan kurang optimal. Beberapa aspek yang diidentifikasi yang menjadi latar belakang konflik kewenangan tersaji pada Tabel 1.

Hal ini jika tidak dilakukan pembenahan maka permasalahan ini dapat menjadi ancaman terhadap pengelolaan TNKpS yang pada akhirnya akan berdampak pada keberlangsungan sumber daya. Dalam rencana pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu tahun 1999 dinyatakan bahwa isu konflik dalam pengelolaan kawasan TNKpS adalah masih tumpang tindihnya pemanfaatan ruang dan benturan kepentingan para pemangku kepentingan yang berdampak terjadinya perambahan di zona inti dan zona pemanfaatan (BTNKpS, 2011). Hal ini telah dikemukakan sebelumnya oleh Amanah (2004) adanya tumpang tindih pemanfaatan dan kewenangan antar berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan Kepulauan Seribu. Selanjutnya Cadoret (2009) menyatakan isu konflik

merupakan tantangan dalam pengelolaan baik secara sosial, politik dan lingkungan karena konflik merupakan bagian integral dari semua kegiatan pengelolaan. Hilyana (2011), menyatakan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Gili Sulat-Gili Lawang Kabupaten Lombok Timur masih rendahnya sinkronisasi kebijakan lintas sektoral. Gomes *et al.* (2008), mensinyalir bahwa pemerintah terkadang tidak konsisten dalam perencanaan, pengawasan dan tingkat implementasi kebijakan.

Implikasi dari permasalahan kewenangan dalam pengelolaan adalah tekanan yang kuat berupa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sehingga terjadi ancaman degradasi fisik habitat, pencemaran perairan, tangkap lebih (*over fishing*), pemanfaatan zona peruntukan, penambangan pasir dan batu karang untuk dijadikan bahan bangunan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI (2001) sejak awal telah mengindikasikan terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan dan sumber daya dari rencana peruntukannya, antara lain pemanfaatan sumber daya perikanan berlebihan, sehingga menimbulkan usaha lain yang merusak sumber daya laut terutama terumbu karang yang merupakan salah satu ikon pariwisata TNKpS.

Makalah ini bertujuan mengidentifikasi kelembagaan yang paling berperan dalam pengelolaan dan keberlanjutan pengelolaan kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, serta strategi yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya alam TNKpS dengan kebijakan pengelolaan. Adanya kebijakan bersama yang nantinya sebagai pedoman dalam mengatur, mengarahkan serta mengendalikan berbagai aktivitas pengelolaan tentunya akan berimplikasi yang baik untuk ekosistem dan sumber daya pesisir, serta mampu menunjang usaha pemerintah, pengelola taman nasional serta masyarakat yang mendiami kawasan secara berkelanjutan.

METODOLOGI

Analisis kelembagaan menggunakan metode *Interpretative Structural Modelling* (ISM) yang dikembangkan oleh Saxena *et al.* (1992) untuk mengetahui kelembagaan yang paling berperan dalam pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Metodologi dan teknik ISM menghasilkan struktur hirarki elemen sistem dan klasifikasi sub elemen kunci berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan pakar yang diseleksi secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu Bupati Kabupaten

Tabel 1. Aspek-Aspek yang Tidak Harmonis Teridentifikasi dari Pihak Pemerintah Daerah dan BTNKpS, Sejak Tahun 2002 - Sekarang.

Table 1. Unharmonized Aspects Identified Between Local Government and Kepulauan Seribu National Park Authority, Since 2002 to Date.

No.	Objek/Object	Kab. Administrasi Kep. Seribu/ Administration Regency of Seribu Islands	TNKpS
1	Dasar hukum / Primary legislation	UU No.32 Tahun 2004 / Act No.32 of 2004 UU No.26 Tahun 2007 / Act No. 26 of 2007 UU No.27 Tahun 2007 / Act No.27 of 2007	UU No.5 Tahun 1990 / Act No.5 of 1990
2	Dasar acuan rencana operasional/ Basic reference of operational plan	Perda No.1 Tahun 2012 / Local government decree No. 1 of 2012	RPTN 1999 – 2019 / Management plan of National park 1999-2019
3	Pemanfaatan kawasan perairan/ Utilization of the waters	Basis demografi dan aktivitas ekonomi / Demographics and economic activities	Berbasis zonasi / Zoning based
4	Pulau kecil (daratan)/ Small Island (land)	Dikembangkan untuk kepentingan ekonomi / Developed to economic interest	Tidak masuk kewenangan taman nasional tetapi dapat mempengaruhi kawasan TN / Not in the national park authority but can affect to management of national park
5	Terumbu karang/ Coral reef	Boleh dimanfaatkan dan ditambang / Exploited and mined	Degradasi dan pemanfaatn dan jasa terbatas / Degradation and utilization and limited of services
6	Tata ruang / Land use	Basis pemanfaatan / Base of utilization	Sistem zonasi / Zoning system
7	Masyarakat / Community	Perlakuan umum seperti di luar kawasan konservasi / Treated as non reserves area	Tidak berkewajiban diakomodir / Not required to be accomodated
8	Perikanan / Fisheries	Perlakuan umum / General treatment	Tidak diakomodir / Not accomodated
9	Pasir laut / Sand	Dilarang diambil / Prohibited	Pemanfaatan terbatas / Limited use

Administrasi Kepulauan Seribu dan Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Penentuan sub elemen juga melibatkan staf pegawai dilingkungan Propinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten dan BTNKpS (17 orang). Informasi dari sistem yang dikaji kemudian distrukturisasi dalam bentuk matriks yang disebut *Structured Self Interaction Matrix* (SSIM) yang menggambarkan hubungan kontekstual antar sub elemen dan elemen-elemen sistem. SSIM kemudian ditransformasi menjadi *reachability matrix* (RM), yaitu matriks bilangan biner

yang dikaji memiliki sifat transvitas dan reflektivitas, dan penilaiannya menggunakan empat simbol V, A, X, dan O yang mengikuti aturan :

V jika $e_{ij} = 1$ dan $e_{ji} = 0$ (sub elemen (1) mempengaruhi sub elemen (2), tetapi tidak sebaliknya)

A jika $e_{ij} = 0$ dan $e_{ji} = 1$ (sub elemen (2) mempengaruhi sub elemen (1), tetapi tidak sebaliknya)

X jika $e_{ij} = 1$ dan $e_{ji} = 1$ (sub elemen (1) dan sub elemen (2) saling mempengaruhi)

O jika $e_{ij} = 0$ dan $e_{ji} = 0$ (sub elemen (1) dan sub elemen (2) tidak saling mempengaruhi)

Nilai e_{ij} adalah 1 ada hubungan kontekstual antara sub elemen ke- i dan ke- j

Nilai e_{ij} adalah 0 tidak ada hubungan kontekstual antara sub elemen ke- i dan ke- j

Pengambilan data lapangan untuk menghitung laju kerusakan akibat penambangan karang dilakukan dengan menggunakan SCUBA dan *underwater camera*, serta wawancara dengan pelaku penambangan karang (23 orang). Pengukuran tutupan karang menggunakan metode *Line Intercept Transect* (LIT) dan nilainya dihitung berdasarkan rumus English *et al.* (1997) yaitu:

$$L_i = \frac{n_i}{L} \times 100 \%$$

L_i = Persentase penutupan biota ke- i ; / L_i = Percentage cover of biota to- i ;

n_i = Panjang total kelompok biota karang ke- i ; / n_i = Total length of the reef biota group to- i ;

L = Panjang total transek garis/ L Total length of the transect line

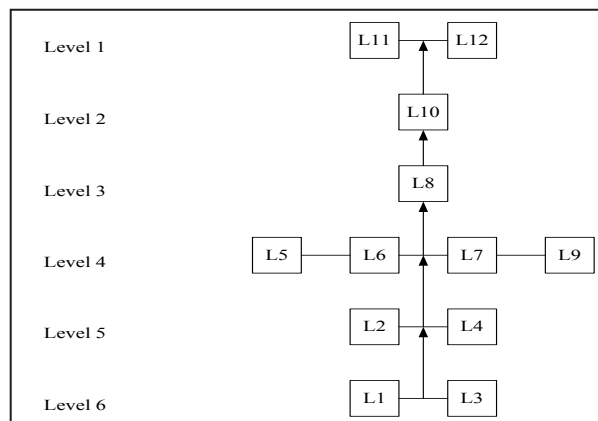
Pengukuran jumlah batu karang yang dapat diambil oleh penambang dilakukan secara langsung *in situ* ketika penambang sedang bekerja, kemudian dipadukan dengan hasil wawancara terhadap para penambang yang rata-rata menambang batu karang sebesar 24,1 m³/bulan/orang. Diasumsikan 1 m³ batu karang berukuran sama dengan luas 1 m x 3 m di alam. Penelitian dilakukan pada periode bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2012 dengan melibatkan responden yaitu nelayan dan masyarakat (285 orang) berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan para penambang dan dampaknya terhadap hasil tangkapan ikan nelayan, serta peran dan kebutuhan masyarakat akan batu karang untuk mereklamasi pantai dan perumahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elemen Kelembagaan

Hasil analisis dengan metode ISM untuk kelembagaan atau pelaku, Gambar 1 memperlihatkan bahwa sub elemen kunci dari

elemen kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan (L1) dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (L3) atau merupakan elemen yang paling berpengaruh, kemudian diikuti oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (L2) dan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (L4) yang masuk dalam sektor IV sebagai *independent factor* (*strong driver-weak dependent variables*) yang memiliki kekuatan penggerak yang besar terhadap keberhasilan program pengelolaan (Gambar 2).

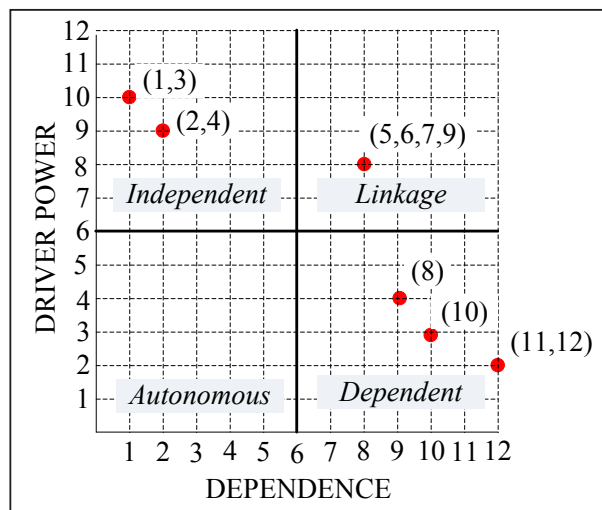


Gambar 1. Diagram Model Struktural Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu.

Figure 1. Diagram Model of Structural Institutional on Management of The Kepulauan Seribu National Marine Park.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (L5), Masyarakat/nelayan (L6), Perguruan tinggi (L7), dan Lembaga Kemasyarakatan Non Formal (SPKP, APL, Sentra Penyuluh) (L9) sebagai *linkage factor* (*strong driver-strong dependence variables*). Lembaga Swadaya Masyarakat (L8), LIPI (L10), Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok (L11), dan Badan Informasi Geospasial (L12) merupakan *dependen factor* (*weak driver-strongly dependent variables*). Analisis juga menunjukkan Kementerian Kehutanan yang membawahi pengelola taman nasional merupakan faktor penggerak yang kuat, demikian juga Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (*independent variables*), berdasarkan diagram model struktural kelembagaan berada pada level 6. Pada level 5 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (*independent variables*) juga merupakan lembaga yang memberikan pengaruh kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk efektivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan

Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu bergantung pada ke-empat lembaga tersebut. Berdasarkan kajian pengaruh kelembagaan, maka dukungan oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan terhadap Balai Taman Nasional sangat menentukan efektivitas pengelolaan.



Gambar 2. Matriks Driver Power-Dependence Kelembagaan (Transitivity 92,6%).

Figure 2. Matrix of Institutional Driver Power-Dependence (Transitivity 92,6%).

Perencanaan pembangunan di Kepulauan Seribu ditetapkan oleh Pemda DKI Jakarta, berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 pasal 4 yang menyatakan bahwa kewenangan otonomi berada pada Propinsi DKI Jakarta bukan Kabupaten dan Kota seperti ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diberi kewenangan dalam mengatur wilayahnya dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Masyarakat/nelayan, Perguruan tinggi dan Lembaga Kemasyarakatan Non Formal (SPKP, APL dan Sentra Penyuluh) masuk dalam sektor III (*Linkage*) dari sistem, artinya peubah dalam sektor ini harus dikaji secara hati-hati, sebab hubungan antar peubah tidak stabil. Setiap tindakan pada peubah tersebut akan memberikan dampak terhadap peubah lainnya dan umpan balik pengaruhnya bisa memperbesar dampak (Marimin, 2009). Dampak yang dimaksud adalah dapat memperbesar peluang keberhasilan program pengelolaan, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui programnya melalui Suku Dinas

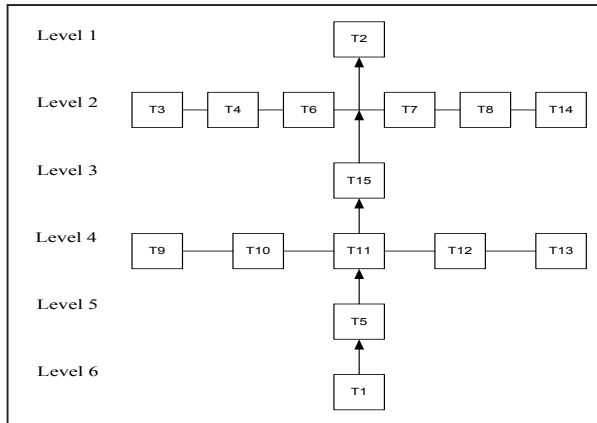
Kelautan dan Pertanian, perguruan tinggi yang melalui riset dan teknologi, serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan non formal dapat menunjang upaya pengelolaan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak pengelola. Walaupun demikian sub elemen dalam sektor *linkage* memiliki ketergantungan pada faktor-faktor kunci *independent*.

Sub elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (L8), LIPI (L10), Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok (L11), dan Badan Informasi Geospasial (L12) masuk dalam sektor *Dependent* (sektor II) serta berada pada level 3, level 2 dan level 1 yang berdasarkan kajian pengaruh kelembagaan, kurang berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan taman nasional. Walaupun demikian sub elemen yang masuk dalam sektor *dependent* ini dapat memberikan informasi maupun data penunjang untuk pengelolaan, namun pengaruh secara langsung yang berkaitan dengan kebijakan seperti yang dapat dilakukan oleh lembaga yang berpengaruh kuat di sektor *independent*, tidak terlalu kuat. Ketergantungan sub elemen L8, L10, L11, dan L12 terhadap lembaga di sektor *independent* tidak ada, walaupun sering terjadi kerjasama dalam bidang penelitian.

Elemen Tujuan

Analisis tujuan memperlihatkan yang menjadi sub elemen kunci adalah Kelestarian Sumber daya Taman Nasional (T1) pada posisi level 6 (Gambar 3) merupakan tujuan yang kuat pengaruhnya, namun demikian sub elemen pada level 5 dan level 4 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 masuk dalam sektor IV atau sektor *independent* (*strong driver-weak dependent variable*) juga mempunyai pengaruh kuat. Sub elemen T1 menjadi tujuan utama atau faktor penggerak utama diikuti sub elemen Terjaganya Keseimbangan Ekosistem Perairan (T5), Penegakan Hukum (T9), Adanya Koordinasi Antar Kelembagaan (T10), Mengimplementasikan Strategi Pengelolaan (T11), dan Mewujudkan Kelembagaan yang Kuat (T12). Sub elemen T1 merupakan prioritas utama dalam pengelolaan taman nasional yang berdasarkan analisis kelembagaan sangat dipengaruhi oleh sub elemen Kementerian Kehutanan (L1) dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (L3). Berdampak Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (T15) pada level 3 adalah sektor *dependent* yang terpengaruh atau bergantung pada terwujudnya sub elemen sektor *independent*. Jika ditelusuri

pada elemen kelembagaan terkait dengan sub elemen kunci tujuan, pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendukung program transplantasi karang melalui suku Dinas Kehutanan dan Kelautan yang bermitra dengan Lembaga Kemasyarakatan Non Formal (L9), yaitu Area Perlindungan Laut (APL).



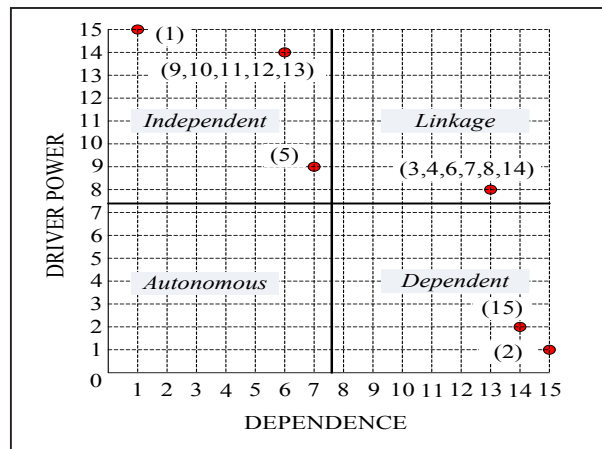
Gambar 3. Diagram Model Tujuan Program Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu.

Figure 3. Diagram Model the Goal of Program on Management of The Kepulauan Seribu National Marine Park.

Demikian juga Kementerian Kehutanan yang membawahi Balai Taman Nasional bermitra dengan Sentra Penyuluh Konservasi Pedesaan (SPKP) untuk mendukung program penanaman mangrove di kawasan taman nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua lembaga yang berpengaruh, mempunyai kepentingan yang sama terkait dengan pengelolaan sumber daya.

Sektor III atau sektor *linkage* terdapat sub elemen Berdampak Pada Produksi Ikan Berkelanjutan (T3), Berdampak Memperluas Lapangan Kerja (T4), Berdampak Terhadap Kelestarian Sumber daya Perikanan (T6),

Berdampak Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Taman Nasional (T7), Monitoring perubahan Perairan (T8), dan Berdampak Pada Peningkatan PAD/PNBP (T14).



Gambar 4 Matriks Driver Power-Dependence Tujuan Program (Transitivity 76,4%).

Figure 4. Matrix Driver Power-Dependence of The Goal Program (Transitivity 76,4%).

Sub elemen dalam sektor *linkage* saling berkaitan satu dengan lainnya, secara teoritis tindakan terhadap peubah dalam sektor dapat memberikan dampak terhadap peubah lainnya, namun harus ditangani dengan hati-hati karena hubungan antar peubah dalam sektor ini tidak stabil. Sub elemen kunci Kelestarian Sumber daya Taman Nasional (T1) jika tercapai maka akan berdampak atau berpengaruh terhadap sub elemen lainnya dalam elemen tujuan (Tabel 2).

Adanya perbedaan persepsi terkait dengan lembaga yang terlibat yaitu Kementerian Kehutanan yang membawahi Balai Taman Nasional dan Pemerintah Kabupaten Propinsi Administrasi Kepulauan Seribu yang mendapat kewenangan dari Propinsi DKI Jakarta untuk mengelola wilayah. Hasil wawancara dengan pakar, menunjukkan

Tabel 2. Elemen Sistem dan Sub elemen Kunci Pengelolaan TNKpS.

Table 2. Element System and Sub Element Keys on the Management of TNKpS.

No.	Elemen / Element	Sub Elemen Kunci / Key of Sub Element
1	Kelembagaan / Institutional	- Kementerian Kehutanan / Ministry of Forestry - Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu / Local Government of District Administration Kepulauan Seribu
2	Tujuan program / Programme objective	Kelestarian sumberdaya taman nasional / Resource sustainability of national park

bahwa perbedaan terletak pada undang-undang yang menjadi dasar lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan. Kementerian Kehutanan dalam mengelola Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu berdasarkan kewenangan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa pengelolaan kawasan pelestarian alam yang meliputi taman nasional merupakan kewajiban pemerintah. Sementara Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadikan dasar pengelolaan kawasan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 18 yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.

Terkait dengan kegiatan masyarakat yang bersifat merusak di Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu dan solusi bagi permasalahan, maka harmonisasi dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya sangat dibutuhkan. Hasil analisis kelembagaan dengan metode ISM menunjukkan empat lembaga dalam sektor *independent* mempunyai pengaruh kuat, yang untuk mencapai efektivitas dalam perannya menurut Sholahuddin (2001) lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan harus memperhatikan tiga aspek, yaitu 1) aspek struktur organisasi yang fleksibel dalam menghadapi kondisi tertentu dan mampu untuk menyesuaikan terhadap lingkungan yang dihadapi, 2) aspek kejelasan fungsi dari setiap lembaga berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, 3) aspek tata nilai atau norma, dalam setiap organisasi harus mempunyai tata nilai yang dipatuhi oleh elemen-elemen dalam organisasi.

Secara garis besar untuk pemanfaatan yang lestari diperlukan kelembagaan yang kuat serta efektif dan efisien. Pengelolaan kawasan taman nasional akan tercapai jika perbedaan perspektif dalam pengelolaan kawasan dapat diatasi dalam rangka untuk keberlanjutan jasa ekosistem. Diperlukan pemahaman yang mendalam dan pengelolaan yang bijak dalam mencapai tujuan bersama untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pemanfaatan jasa ekosistem yang berlebihan dan bersifat merusak tentunya akan berdampak dalam jangka panjang dengan berkurangnya ketersediaan jasa tersebut untuk masa mendatang. Kelembagaan yang efektif dan efisien dapat mengatur akses terhadap sumber daya melalui mekanisme kesetaraan, keadilan dan keselarasan. Memahami perbedaan persepsi dalam pengelolaan sumber daya antara

kelembagaan yang terlibat, serta faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam ekosistem dan jasa ekosistem merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat merumuskan kebijakan yang memiliki dampak positif dan sekaligus meminimalisir dampak negatif.

Salah satu permasalahan berkaitan dengan perbedaan kebijakan adalah perijinan untuk kegiatan usaha budidaya perikanan skala besar di Zona Pemanfaatan Wisata Taman Nasional oleh Pemerintah daerah yang mengembangkan pola pemanfaatan, berbenturan dengan kebijakan pengelolaan BTNKpS yang menerapkan sistem zonasi yang melarang adanya kegiatan budidaya skala besar dalam zona tersebut. Perbedaan tersebut bersumber pada undang-undang yang menjadi dasar kebijakan BTNKpS yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 yang belum mengakomodir kegiatan perikanan dalam kawasan konservasi dan Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 18 ayat 1 yang menyatakan kewenangan daerah untuk mengelola kawasan pesisir.

Kegiatan yang bersifat merusak di Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah aktifitas penambangan batu karang untuk kebutuhan reklamasi dan pembangunan rumah warga sudah berlangsung selama beberapa tahun sebelumnya. Kegiatan penambangan hanya akan berhenti pada pertengahan Bulan Desember sampai Bulan Januari saat musim barat berlangsung laut bergelombang cukup tinggi atau cuaca buruk. Aktivitas yang cukup tinggi terjadi pada musim timur pada saat laut relatif tenang dan tidak bergelombang. Aktivitas penambangan berlangsung sekitar 11 bulan dalam setahun, yang diprediksi dalam setahun degradasi terumbu karang dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebesar 6.097,3 m³, dengan nilai Rp. 640.216.500 berdasarkan harga jual penambang kepada masyarakat. Di lain pihak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana untuk rehabilitasi terumbu karang berupa proyek transplantasi karang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000 setiap tahun. Hasil perhitungan memperlihatkan kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu kehilangan hamparan karang sepanjang 18.312,6 m yang setara dengan 1,83 hektar setiap tahunnya. Upaya rehabilitasi dapat efektif dari segi anggaran dan waktu apabila penelitian yang berkaitan dengan data kemampuan alami terumbu karang dalam kawasan Kepulauan Seribu untuk perbaikan diri dalam jangka panjang terus dilakukan.

Strategi yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan, yaitu:

1. Peninjauan dan revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Substansi yang perlu direvisi adalah pasal 17 dan 18 dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 belum mengakomodir kegiatan perikanan dan lebih menitik-beratkan pada pengelolaan sumber daya laut, sementara UU Nomor 5 Tahun 1990 lebih terfokus pada konservasi kehutanan/wilayah daratan dan belum mengatur pengelolaan konservasi pesisir dan laut.
2. Peninjauan dan revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 pasal 186 yang hanya melarang penambangan pasir laut, sementara Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu Tahun 1999 – 2019 melarang penambangan pasir dan batu karang.
3. Pemanfaatan kawasan perairan dalam kawasan Taman Nasional oleh kegiatan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya harus ditujukan untuk menunjang fungsi kawasan.
4. Pengawasan dan Pengendalian penambangan karang dan pasir disertai dengan pengadaan material batu dan pasir melalui kebijakan subsidi oleh pemerintah daerah.
5. Pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam kawasan konservasi ditingkatkan disertai upaya pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat.
6. Kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya hayati antara pemerintah daerah dan BTNKpS.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kelembagaan dengan menggunakan ISM-VAXO diperoleh struktur kelembagaan yang paling berperan terhadap keberlanjutan pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, adalah Kementerian Kehutanan

melalui Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang secara yuridis kawasan TNKpS berada dalam wilayahnya. Kewenangan BTNKpS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan taman nasional, dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang intinya kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Perbedaan undang-undang dalam pengelolaan TNKpS oleh kelembagaan yang berperan, melatar belakangi perbedaan dalam pengambilan kebijakan, sehingga kondisi lapangan sering terjadi perbedaan berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Implikasi Kebijakan

Sub elemen dari Elemen Tujuan Program yang dapat dirujuk sebagai kebijakan pengelolaan bersama kedua kelembagaan tersebut adalah Kelestarian Sumber daya Taman Nasional. Saran yang dapat dikemukakan untuk pemangku kepentingan adalah harmonisasi kebijakan dan program pengelolaan berbasis ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk kawasan Kepulauan Seribu dapat mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan. Harmonisasi dapat diimplementasikan dalam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dengan Review Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu periode tahun 1999-2019 BTNKpS.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. 2004. Perencanaan Strategis Pengelolaan Sumber daya Pesisir Terpadu di Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. *Buletin Ekonomi Perikanan Vol. 5. (2)*.
- Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (BTNKpS). 2011. *Review Rencana pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Kepulauan Seribu Periode Tahun 1999-2019*. Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Jakarta.

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. 2001. *Pemantapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2001*. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Cadoret, A. 2009. Conflict dynamics in Coastal Zones: a perspective using the example of Languedoc-Rousillon (France). *J Coast Conserv* 13:151-163
- English, S., C. Wilkinson & V. Baker. 1997. *Survey Manual for Tropical Marine Resources*. ASEAN-Australian Marine Project. Australia.
- Hilyana, S. 2011. Optimasi pemanfaatan ruang kawasan konservasi Gili Sulat-Gili Lawang Kabupaten Lombok Timur. [Disertasi]. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Gomes, V.F., A. Barocco, A.R. Pereira, C.S. Reis, H. Calado, J.G. Ferreira, M.D.C. Freitas & M. Biscoito. 2008. Basis for a national strategy for integrated coastal zone management-in Portugal. *J. Coast Conserv* 12: 3-9
- Marimin, K. 2009. Aplikasi teknik pemodelan interpretasi struktural (*Intrepetive Structural Modelling*). Materi Mata Kuliah *Interpretive Structural Modelling*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Saxena, J.P., Sushil & P. Vrat. 1992. Hierarchy and classification of program plan elements using interpretative structural modeling: a case of study of energy conservation in the Indian cement industry. *System Practice*. 5(6): 651-670
- Sholahuddin, A. 2001. Analisis Kelembagaan Pengembangan Agroindustri (Studi Kasus Kabupaten Tebo, Jambi). Thesis. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

LUBUK LARANGAN: DINAMIKA PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERAIRAN SUNGAI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Lubuk Larangan : Local Community Knowledge Dynamics of Inland Fisheries Resources Management in Lima Puluh Kota Regency

***Christina Yuliaty dan Fatriyandi Nur Priyatna**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang Kp I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

*email: yuliaty.christina@gmail.com

Diterima 4 April 2014 - Disetujui 6 Juni 2014

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan bagaimana masyarakat lokal memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai. Pengetahuan ini berwujud nilai kearifan lokal, falsafah hidup, religi dan norma-norma hukum lokal yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 pada masyarakat Minang Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang menetap di daerah aliran sungai Batang Kapur. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan melalui pendekatan studi kasus terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya perikanan perairan sungai secara lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lubuk larangan tidak hanya sebuah praktek pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ikan tetapi didalamnya terdapat aturan, mekanisme distribusi hak dan organisasi adat. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, maka pengetahuan pengelolaan lubuk larangan pun mengalami perubahan. Nilai Islam dan politik pemerintahan menjadi pendorong terjadinya perubahan dalam pengelolaan Lubuk Larangan.

Kata Kunci: pengetahuan lokal, pengelolaan sumber daya, Lubuk Larangan

ABSTRACT

This paper aimed to describe how the local community has knowledge in the resources management of inland fisheries. This knowledge consists value of local wisdom, philosophy of life, religion and local legal norms used in resource utilization. This study was conducted in 2012 at Nagari Sialang, Kapur IX, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatera the Minang community who settled in the Batang Kapur watershed as the unit of analysis. This study used anthropological approach. Data were collected by direct observation, in-depth interview and focus group discussions. Analysis of qualitative descriptive approach used a case study regarding the used and utilization of fish resources in the local river waters. The results showed that 'Lubuk Larangan' is not only resource used and utilization practices but also a set of rule, rights distribution mechanisms and customs. Knowledge regarding management of 'Lubuk Larangan' is also changing dynamically. Islamic values and political governance become driving forces for the management of Lubuk Larangan changes.

Keywords: local knowledge, resource management, Lubuk Larangan

PENDAHULUAN

Pengetahuan lokal menjadi akhir-akhir ini menjadi wacana yang ramai diperbincangkan karena dianggap sebagai bagian penting dalam program pembangunan dalam upaya pengelolaan sumber daya. Pengetahuan lokal yang bersumber dari kebudayaan masyarakat dianggap memberi banyak solusi dalam pembangunan karena merupakan hasil 'belajar' dari masyarakat lokal dalam mengikuti dinamika perubahan lingkungan mereka (Lubis, 2005). Pengetahuan lokal yang ada memberikan indikasi bahwa masyarakat lokal berpartisipasi dalam melakukan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya yang ada karena merekalah yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan umumnya muncul dalam bentuk pantangan atau larangan. Keduanya memiliki landasan filosofis yang berbeda. Pantangan memiliki corak religio-magis sementara larangan terkait dengan aturan hukum adat (Lubis, 2005). Meskipun memiliki landasan yang berbeda. Keduanya berpihak pada keseimbangan alam dan jaminan kehidupan bagi anggota masyarakatnya. Pengetahuan lokal tersebut sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya diekspresikan dalam tradisi dan mitos.

Upaya masyarakat melakukan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya sejalan dengan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut UU No. 23 Tahun 1997 Jo UU No.32 Tahun 2009 disebutkan sebagai upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu azas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 adalah kearifan lokal. Solihin & Satria (2007) menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sumber daya adalah dengan pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat lokal sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan karakteristik sumber daya di sekitarnya.

Kondisi sosial masyarakat setempatlah yang membentuk pola pengelolaan sumber daya yang ada oleh karena itu sangatlah penting untuk memperhatikan faktor masyarakat dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber

daya yang ada (Priyatna, 2003). Masyarakat lokal memiliki kebudayaan sebagai pedoman hidup mereka dalam menghadapi lingkungan di mana mereka hidup.

Lubuk larangan merupakan salah satu bentuk kearifan yang berkembang pada masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya perikanan perairan sungai di Sumatera Barat. Lubuk larangan tersebut merupakan perwujudan prinsip konservasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya perikanan perairan sungai.

Tulisan ini bertujuan, pertama; untuk menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat Minang dalam pengelolaan sumber daya perikanan di sungai yang dinamakan Lubuk Larangan. Kedua, mengkaji dinamika pengetahuan yang terjadi.

Tulisan ini mencoba melihat dinamika pengetahuan pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai dalam hal ini konservasi melalui kajian Antropologi. Antropologi dapat berperan serta banyak dalam mengkaji masalah-masalah pembangunan yang tidak hanya sekedar melihat pembangunan dari sisi ekonomi melainkan dari semua sektor termasuk sosial, politik, agama dan budaya (Kasniyah, 2005). Menurut Alam (1998), antropologi dapat memberikan sumbangsih dengan mengungkapkan kodrat setiap kebudayaan yang bersifat dinamis, cair dan hibrid dengan menghindari serta mengkritik representasi budaya yang bersifat esensialis dan statis. Atas dasar pernyataan di atas maka perlu melihat bagaimana masyarakat lokal memformulasikan kearifan lokal agar sesuai konteks saat ini tanpa meninggalkan esensi dasar dalam pengelolaan sumber daya.

Antropologi adalah studi tentang manusia dalam memahami dunianya. Agar dapat memahami suatu masyarakat kita harus berusaha memahami bagaimana mereka, diri mereka dan bagaimana mereka merepresentasikan dunianya. Ini yang membedakan Antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya (Lowe, 2006). Untuk itulah pentingnya meneliti pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai dalam hal ini konservasi melalui kajian Antropologi. Tulisan ini menekankan pada dinamika pengetahuan pengelolaan sumberdaya yang dinamakan Lubuk Larangan, bukan pada organisasi adat Lubuk Larangan itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tan (1994) menuliskan bahwa

penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu-individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan frekuensi atau persebaran. Moleong (2007) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam tulisan ini pengetahuan lokal dilihat sebagai produk kebudayaan yang akan digunakan sebagai: (1) alat metodologi untuk memahami corak sistem sosial yang dimiliki oleh masyarakat; (2) alat untuk dapat mengarahkan dan menambah kekayaan budaya warga masyarakat; dan (3) alat untuk membantu kita lebih memahami jika ada perubahan di satu bagian maka akan menimbulkan perubahan dalam berbagai pranata yang dapat merugikan masyarakat tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi lingkungan hidupnya (Syahyuti, 2010).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Lubuk Larangan Anak Nagari Pantai Lok Na pada bulan April 2012. Lubuk Larangan ini berada pada Batang (Sungai) Kapur yang secara administratif berada di Nagari Sialang, kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Ada 74 Lubuk Larangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan baru 11 diantaranya yang sudah diatur dalam Peraturan Nagari (PERNAG) termasuk di dalamnya Lubuk larangan Anak Nagari.

Lubuk Larangan Anak Nagari memiliki nama lain yaitu Lubuk Larangan Batu Pelana. Saat ini Lubuk Larangan ini terkenal dengan nama Lubuk Larangan Pantai Lokna, nama yang diberikan oleh seorang peneliti asal Perancis yang dahulu pernah meneliti mengenai Lubuk Larangan ini namun meninggal dunia sebelum selesai tugas penelitiannya. Ada 3 Lubuk Larangan di Nagari Sialang, yaitu Lubuk Larangan Anak Nagari, yang kedua adalah Lubuk Larangan Tanjung Gadang Sakato dan Lubuk Larangan Mudik Mudo. Lubuk Larangan Anak Nagari dipilih sebagai kasus kajian dalam tulisan ini. Lubuk larangan ini memiliki panjang 700 m dan lebar 30 m yang memanjang mulai dari Ampang Gadang 1 sampai ke Pantai Lokna dan berakhir di Ngungun.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk observasi lapangan, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*). Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung dan mencatat kondisi lubuk larangan, pembagian zona lubuk dan aktivitas masyarakat di sekitar lubuk larangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci (*key informant*) untuk memperoleh data mengenai sejarah, aturan lubuk larangan, pelaksanaan penegakan aturan serta pengawasannya. Kami juga melaksanakan diskusi kelompok terarah yang mempertemukan kesemua informan dengan tujuan mendapat informasi secara utuh mengenai lubuk larangan.

Penentuan informan dilakukan secara purposif dimana informan ditentukan karena alasan khusus atas dasar kriteria tertentu. Informan kunci (*key informant*) adalah yang dianggap mampu menjelaskan mengenai sejarah, aturan dan pelaksanaan Lubuk larangan. Mereka adalah tokoh masyarakat seperti tetua adat yang didalamnya adalah ninik mamak, wali nagari (kepala desa) dan ketua POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas). Informan kunci dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 1.

Sementara data sekunder diperoleh dari kepustakaan (*library research*) terkait dengan hasil penelitian sebelumnya baik mengenai kearifan lokal, pengetahuan lokal dan pengelolaan sumber daya.

Analisis dan Interpretasi

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, meliputi proses editing data, kategorisasi dan penafsiran data (Moleong, 2006). Tulisan ini mencoba melihat pengetahuan lokal sebagai bagian dari kebudayaan yang sifatnya dinamis. Kedinamisannya dipengaruhi beberapa faktor, termasuk kekuasaan dan kepentingan para pelaku. Implikasinya adalah adanya dinamika dalam kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan Lubuk Larangan.

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita membatasi dahulu pengertian pengetahuan lokal tentunya dalam konteks pengelolaan sumber daya. Pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui pengalaman hidupnya dalam berinteraksi dengan manusia,

Tabel 1. Metode yang Digunakan, Status Informan dan Jenis Informasi.**Tabel 1. Methode Used, Type of Informant, and Type of Information.**

Metode yang Digunakan Informan / Method Used	Status Informan / Status of Informant	Jenis Informasi / Type of Information
<i>Purposive Sampling</i>	Tetua Adat/ <i>Elders</i>	Sejarah dan latar belakang pengelolaan sumber daya / <i>History and background of resource management</i>
	Wali Nagari(Kepala Desa)/ <i>Chief of village</i>	Sejarah desa dan peran serta pemerintah dalam pengelolaan sumber daya/ <i>The history of the village and the role of government in resource management</i>
	Ketua POKMASWAS / <i>Head of POKMASWAS</i>	Pelaksanaan pengawasan pada kawasan lubuk larangan/ <i>Supervision in Lubuk Larangan</i> peran sertanya dalam pengelolaan sumber daya dan pembentukan peraturan desa(nagari)/ <i>Participation in resources management and the formation of village regulation</i>

sumber daya alam dan benda-benda yang ada di sekitarnya di suatu wilayah tertentu dari generasi ke generasi. Teknologi pembuatan kapal pinisi, Awig-Awig, Sasi, termasuk pada pengetahuan lokal.

Pengetahuan lokal masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama dalam menunjang keberlanjutan suatu ekosistem. Namun sayangnya, pengetahuan lokal ini seringkali terabaikan oleh pengetahuan ilmiah dan pranata sosial hasil ciptaan para pengambil kebijakan (Winarto & Choesin, 2001). Di sisi lain, pengetahuan lokal juga mengalami perubahan yang disebabkan perubahan sumberdaya secara fisik maupun perubahan sosial, politik, agama dan budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya perairan sungai merupakan salah satu tipologi sumber daya perairan umum daratan. Perairan umum adalah suatu genangan air yang relatif luas yang dimiliki dan dikuasai negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik sebagai mata pencaharian, sumber air bersih, transportasi. Luas perairan umum di Indonesia sendiri sekitar 55 juta ha (Maskur, 2002). Perairan umum meliputi sungai, danau, rawa, saluran irigasi teknis, dan waduk.

Wilayah Propinsi Sumatera Barat memiliki luas perairan umum daratan 64.200 ha yang terdiri

dari danau, sungai, telaga, dan rawa yang tersebar di 19 Kabupaten/kota. (Anonymous, 2012). Hal ini memperlihatkan sumber daya perikanan, terutama perikanan perairan umum di wilayah ini memiliki potensi sangat besar. Sumber daya perikanan perairan umum daratan merupakan suatu sumber daya alam yang bersifat terbuka (*open access*) dan milik umum (*common property*). Hal ini dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi berlebih sehingga sumber daya alam tersebut harus dikelola secara bijak. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya sungai secara arif dan bijak adalah Lubuk Larangan yang dilakukan Masyarakat Minang di Sumatera Barat.

“Alam Takambang menjadi Guru”, pepatah inilah yang mendasari kearifan lokal masyarakat Minang di Nagari Ikan Banyak, Sumatera Barat dalam pengelolaan sumber daya ikan di sepanjang Batang (Sungai) Sinamar. Pepatah tersebut memiliki makna alam yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya berperilaku dan bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam yang sudah menyediakan sumber kehidupan bagi manusia.

Pengetahuan lokal yang kemudian terbentuk sebagai hasil dari pemaknaan filosofi hidup tersebut adalah berupa kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan. Kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut dinamakan Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah model pengelolaan perikanan yang berbasiskan

masyarakat dengan cara melakukan penutupan sementara suatu kawasan penangkapan ikan di perairan umum daratan, khususnya daerah aliran sungai dalam kurun waktu tertentu. Lubuk Larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang aliran sungainya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, karena umumnya pada daerah yang tenang ikan berkembang biak (Suhana, 2009).

Lubuk Larangan terdiri dari dua kata yaitu lubuk dan larangan. Lubuk sendiri bagian yang dalam dari sebuah sungai, dimana umumnya menjadi tempat berkembangbiaknya ikan sementara larangan adalah aturan yang melarang suatu perbuatan. Jadi artinya lubuk larangan adalah suatu areal dari sungai yang secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya, di areal tersebut merupakan areal terlarang untuk diambil hasil ikan dan biota lainnya dalam jangka waktu tertentu. Areal ini dikelola oleh masyarakat melalui peraturan nagari.

Pemanfaatan ikan pada lubuk larangan ditujukan untuk pembangunan mesjid dan pembiayaan kegiatan nagari. Masyarakat atau warga nagari hanya dapat melakukan penangkapan ikan di zona pemanfaatan yang terletak di luar zona inti. Masyarakat dapat melakukan penangkapan ikan di zona pemanfaatan saat dilakukan panen bersama atau disebut 'buka lubuk'. Jenis ikan yang terdapat di Lubuk Larangan adalah jenis asli ikan sungai (ikan lokal) yang banyak terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu jenis ikan Kapiék (*Puntius schwanefeldi*), Ikan Salimang, Ikan Garing (*Tor tambroides*), Ikan Sibahan, Ikan Baung, Ikan Barau, Ikan Paweh, Ikan Mas, dan Ikan Nila.

Lubuk Larangan memiliki 3 fungsi, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Fungsi ekologis. Ekologis adalah melindungi keberadaan jenis ikan lokal, menjadi lokasi penijahan ikan, menjaga kebersihan lingkungan sungai. Secara ekonomi berfungsi membuka lapangan pekerjaan saat lubuk larangan menjadi sarana rekreasi dan menjadi sumber penghasilan tambahan saat lubuk larangan dibuka, sumber dana bagi pembangunan desa, menjadi sumber ketahanan pangan bagi masyarakat. Secara sosial budaya, lubuk larangan berfungsi melestarikan kearifan lokal yang berasal

dari nenek moyang mereka, kelestarian lubuk larangan juga ikut serta melestarikan kelembagaan adat, menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung terhadap kelestarian sumber daya (Yuliaty *et al.*, 2012).

Lubuk larangan merupakan contoh praktek konservasi yang dilandaskan pada pengetahuan lokal masyarakat terhadap lingkungannya. Masyarakat (penduduk lokal) mempunyai kapasitas pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, hal ini secara tidak sengaja telah memberikan konsekuensi terhadap upaya konservasi (Tambunan, 2008). Prinsip konservasi merupakan usaha-usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya yang mereka miliki untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ini bertujuan sumber daya dapat bertahan terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, politik, agama dan teknologi modern (Tambunan, 2008).

Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya perairan sungai yang dinamakan Lubuk Larangan merupakan bukti bagaimana masyarakat lokal memahami diri mereka, kebutuhan mereka terhadap sumber daya berdasarkan pengalaman yang mereka lalui. Pada dasarnya kebudayaan adalah hasil konstruksi sosial yang 'diciptakan' sebagai hasil interpretasi dan pengalaman (Lowe, 2006). Lubuk Larangan tidak hanya sebuah praktek pengelolaan sumber daya tetapi harus dilihat sebagai aturan (buka tutup lubuk), mekanisme distribusi hak dan organisasi adat yang mengatur mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang dalam perjalanannya mengalami dinamika.

Lubuk Larangan Sebagai Aturan

Aturan dalam Lubuk Larangan mengatur bagaimana masyarakat memperlakukan alamnya, sumber daya yang menjadi sumber penghidupan mereka. Aturan ini berisi pertama tentang wilayah mana dari sungai yang menjadi lubuk larangan. Kedua, pembagian zona dalam lubuk larangan, mana yang menjadi zona inti, pemanfaatan maupun zona penyangga. Ketiga, sanksi yang diberikan bagi pelanggar, baik berupa sanksi sosial maupun sanksi ekonomi atau denda. Pengelolaan Lubuk Larangan Anak Nagari merupakan hasil kesepakatan atau keputusan bersama dari

¹Wali nagari : kepala nagari. Nagari sendiri adalah satuan administrasi pemerintahan terkecil

Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari¹, tokoh pemuda dan tokoh agama. Kerapatan adat Nagari sendiri adalah lembaga permusyawaratan nagari.

Lubuk larangan Anak Nagari hanya membagi wilayah perairan menjadi dua zona, yaitu zona inti dan zona produktif (pemanfaatan). Hal ini sedikit berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang membagi zona konservasi menjadi tiga, yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan. Zona inti di dalam lubuk larangan berfungsi sebagai zona konservasi, kawasan khusus dilarangnya aktivitas penangkapan ikan yang berada di Ngungun dengan panjang 100 m dan lebar 30 m. Zona ini merupakan zona perlindungan dan pelestarian sumber daya perikanan yang dikhususkan bagi perkembangbiakan ikan sehingga tidak boleh dimanfaatkan. Sementara zona produktif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (zona pemanfaatan) yang meliputi Ampang Gadang I, Pantai Lokna, Lubuk Jao dan Like Lunguo dengan panjang 600 m dan lebar 30 m. Zona ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya yang sudah diatur di dalam Peraturan Nagari (PERNAG).

Awalnya, pengikatan wilayah larangan pada lubuk dilakukan melalui proses pemberian mantra atau yang disebut dengan "uduh". Uduh berfungsi sebagai mantra yang bertujuan untuk memagari lubuk sehingga tidak ada pencurian. Uduh sendiri berbentuk semacam do'a yang menurut sejarahnya dipanjatkan pemuka agama. Masyarakat yang melanggar aturan lubuk larangan terkena dampaknya seperti sakit bahkan kematian. Lubuk larangan dapat ditutup dan dibuka untuk dimanfaatkan ikannya oleh masyarakat dengan do'a-do'a dari salah satu pemuka agama tersebut. Penggunaan uduh di wilayah lubuk larangan memiliki fungsi yaitu untuk mengikat ikan supaya tidak berpindah tempat dan untuk menjaga keamanan lubuk dari pencurian dari nagari tetangga.

" di kecamatan ini pertama kali adanya lubuk larangan....ini lubuk larangan kami tradisional, menggunakan uduh, jadi seperti dipagari oleh ilmu magis. Jadi ikan tidak bisa keluar. Yang mendoakan adalah orang pintar, juru kuncinya"

Pengunduhan dinilai efektif dalam pelaksanaan lubuk larangan. Pengunduhan ini membuktikan bahwa kearifan lokal dalam

pengelolaan sumber daya memang umumnya dikemas dalam terminologi pantangan yang menunjukkan corak religius-magis dan larangan yang berbentuk aturan hukum adat, yang meskipun memiliki landasan yang berbeda namun keduanya memberi efek positif bagi konservasi sumber daya (Lubis, 2005).

Masyarakat percaya ikan di dalam lubuk larangan adalah "ikan yang sudah mempunyai mistik", sehingga tidak akan bisa ditangkap, tulah yang akan menimpa orang yang mengambil ikan ataupun memanfaatkan sumber daya di lokasi lubuk larangan sangat efektif dan fungsional dalam membatasi perilaku warga. Beberapa pantangan yang terdapat di Lubuk Larangan Anak Nagari adalah larangan mengambil ikan bahkan tidak diperbolehkan memegang ikan dan mengekstraksi segala macam sumber daya yang berada di zona inti, pantang mandi siang hari di zona inti yang dapat menyebabkan pelaku menjadi 'masuk angin', larangan mengambil ikan di zona pemanfaatan kecuali pada hari tertentu sesuai hasil kesepakatan bersama, larangan mengganggu ikan, serta pantang berbicara dan berperilaku yang tidak baik. Keberadaan mitos yang terkait dengan lubuk larangan di tengah masyarakat ikut menjamin keberlanjutan keberadaan dan pengelolaan lubuk larangan. Hal yang diperbolehkan di wilayah lubuk larangan adalah kegiatan memberi pakan ikan, berwisata (berenang), mandi, mencuci pakaian dan memanfaatkannya sebagai jalur transportasi.

Pelanggaran terhadap pantangan dan larangan terhadap aturan lubuk larangan dapat menimbulkan akibat dari sekedar kembang, demam, disorientasi yang berakibat oknum yang melanggar datang terus menerus ke lubuk, hingga dipercaya dapat menimbulkan kematian.

Peng'uduh'an, mistifikasi ikan yang hidup dalam lubuk, takhyul yang menyertai keberadaan lubuk larangan merupakan satu kesatuan dalam pengetahuan masyarakat lokal mengenai Lubuk Larangan. Kesemuanya menjadi acuan dalam memperlakukan sumber daya yang mereka miliki, dalam hal ini sumber daya perikanan perairan sungai. Menurut Syahyuti (2010), dalam Antropologi, kebudayaan adalah keterkaitan pola pikir, perilaku dan artefak pada suatu kelompok etnik tertentu. Pola pikir termasuk di dalamnya falsafah hingga takhyul menjadi pedoman perilaku. Ketiganya merupakan kesatuan sehingga tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Lubuk Larangan Sebagai Mekanisme Distribusi Hak

Biasanya Lubuk Larangan ini dibuka atau buka lubuk diadakan setelah panen hasil kebun (gambir, kakao, karet, dan kelapa sawit), menjelang puasa, atau setelah lebaran sesuai hasil kesepakatan awal saat musyawarah menentukan pelaksanaan buka lubuk. Masa buka Lubuk bisa mencapai satu minggu lamanya.

Berdasarkan Peraturan Nagari (PERNAG) Sialang No. 02 Tahun 2011, Distribusi penerima manfaat hasil panen untuk Lubuk Larangan Anak Nagari atau Pantai Lokna, sebagai berikut :

- a. Kas Pemuda Nagari dan Pemuda Jorong sebesar 50%
- b. Operasional Pokmaswas sebesar 20%
- c. Pemberdayaan Adat sebesar 10%
- d. Pemerintah Adat Nagari Sialang 10%
- e. Lembaga Swadaya Nagari 10%

Namun pada tataran pelaksanaan, berdasarkan hasil wawancara, distribusi penerima manfaat sebagai berikut :

- a. Pemerintahan Nagari sebesar 30%
- b. Pemerintahan Adat sebesar 30%
- c. Kegiatan kepemudaan sebesar 40%

Pembukaan Lubuk Larangan umumnya untuk membiayai kegiatan nagari, seperti pembangunan fisik nagari dan kegiatan kemasyarakatan. Antara lain pembiayaan kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, Upacara Adat 'Pulang Mamak' yaitu acara dimana semua anggota masyarakat nagari berkumpul termasuk yang sudah merantau yang diadakan bertepatan dengan Hari Raya Lebaran.

Lubuk Larangan Sebagai Organisasi

Pengelolaan lubuk larangan dilakukan oleh organisasi adat, yang terdiri dari ninik mamak². Ninik mamak ini dianggap sebagai pemilik nagari, mereka berperan besar secara adat dalam sebuah nagari. Mereka memegang keputusan-keputusan penting bagi kelangsungan sebuah nagari.

Lubuk larangan akan dibuka berdasarkan hasil kesepakatan antara Pokmaswas, Kerapatan Adat Nagari, pemuda dan tokoh agama dan dipimpin oleh Wali Nagari selaku pemimpin pemerintahan nagari. Pengawasan penegakan peraturan di Lubuk Larangan anak Nagari ini diserahkan kepada POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang didalamnya terdiri dari ninik mamak, tokoh agama, pemuda dan masyarakat.

Pelanggaran terhadap aturan dalam Lubuk Larangan diselesaikan melalui pengadilan adat. Pengadilan adat terdiri dari para ninik mamak yang memutuskan bersalah atau tidaknya dan sanksi atau denda yang akan dikenakan. Keputusan yang diambil merupakan hasil keputusan bersama dan jika terjadi pelanggaran maka pengadilan adat (ninik mamak) akan memanggil mamak³ pelaku, saksi, dan wali nagari. Mamak merupakan lembaga yang mengurus kaum, menjaga martabat kaum sehingga peran mamak lebih besar dibandingkan peran ayah dalam sebuah keluarga. Hal inilah yang menyebabkan mamak yang harus bertanggungjawab jika terjadi pelanggaran termasuk terhadap aturan lubuk larangan.

Rapat untuk memutuskan sanksi melalui pengadilan adat Kerapatan Adat Nagari yang dipimpin oleh wali nagari. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah dengan mengakui perbuatannya yang disiarkan langsung dari mesjid dan dikenakan denda berupa bahan bangunan seperti semen dan seng. Pelanggaran terhadap aturan pengelolaan lubuk larangan terakhir kali terjadi pada tahun 2008, seorang anak kecil memberi makan ikan yang didapatkannya dari lubuk larangan kepada hewan peliharaannya. Tidak lama kemudian anjing tersebut mati.

Peraturan terkait Lubuk Larangan saat ini juga sudah dijadikan Peraturan Nagari (PERNAG) yaitu Peraturan Nagari Sialang No. 02 Tahun 2011.

Kontekstualisasi dan Dinamika Lubuk Larangan

Pengetahuan lokal seperti hal nya budaya bukan sesuatu yang terberikan dan memiliki sifat yang tetap, melainkan bersifat dinamis karena manusia sebagai bagian dari masyarakat

²Ninik mamak adalah pemangku adat yang dipilih dari mamak dari setiap kaumnya. Mamak (paman) memegang peranan penting dalam kehidupan Masyarakat Minang yang menganut garis keturunan matrilineal.

³Mamak : saudara laki-laki tertua atau dituakan dari pihak ibu (*saparuik*)

mengalami proses belajar sepanjang hidupnya. Kontak dengan pihak luar, interpretasi individu dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan (Winarto & Choesin, 2001). Hal ini juga terjadi dalam Lubuk Larangan. Saat ini penggunaan uduh mengalami pergeseran. Dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, peng-uduh-an mengalami proses kontekstualisasi. Konteks yang ada saat ini, agama Islam mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minang. Bagi Orang Minang, nilai agama serta organisasi keagamaan memegang peranan penting. Aturan adat yang berlaku mengakar pada aturan agama yang tergambar pada falsafah mereka yang berbunyi:

“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai”
-Artinya adat berdasarkan syariat Islam, syariat berdasarkan Al-Quran”

Falsafah di atas memperlihatkan adat istiadat yang menjadi sumber aturan kehidupan masyarakat Minangkabau, dibentuk dan dijalankan sesuai dengan aturan dan ajaran yang terdapat dalam Agama Islam dan berbagai ketentuan dalam agama Islam berdasarkan pada Al-Quran (Gani, 2006).

Berdasarkan falsafah di atas tersebut, maka uduh saat ini diganti dengan doa yang bernafaskan Islam yang kemudian termanifestasi dalam pembagian wilayah zona pemanfaatan lubuk larangan berdasarkan kepentingan organisasi keagamaan yang ada di nagari. Taatnya masyarakat nagari atas aturan lubuk larangan lebih berdasar pada kesadaran masyarakat akan fungsi sungai dan ketaatan terhadap ninik mamak (Kurniasari *et al.*, 2012). Ninik mamak berperan besar dalam kehidupan Orang Minang, mereka dianggap sebagai pemilik nagari. Kepatuhan masyarakat terhadap ninik mamak, menjadikan ninik mamak sebagai tokoh sentral dalam membentuk perilaku kolektif (Kurniasari *et al.*, 2012).

“ninik mamak adalah yang punya nagari, secara adat, sementara wali nagari adalah pelaksananya”

Dinamika pengelolaan Lubuk Larangan juga terjadi akibat adanya perubahan struktur pemerintahan. Perubahan struktur pemerintahan menimbulkan perubahan struktur sosial, politik, nilai serta aturan. Menurut Franz von Benda-Beckman, Nagari merupakan pemerintahan terkecil di Minangkabau sejak jaman pra-kolonial. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Naim (1990) menyatakan bahwa Nagari tidak hanya merujuk pada teritorial, darimana seseorang berasal, namun juga menyangandung makna dari keluarga atau keturunan siapa seseorang itu berasal (genealogis). Ini yang membedakan nagari dengan desa yang ada di Jawa (Noer, 2004). Nagari tidak hanya merupakan wilayah kediaman (*Bakarong Bakampuang*) namun juga kesatuan hukum adat dimana di dalam sebuah nagari juga harus memenuhi prinsip *Basuku Banagari* dimana warga nagari minimal terdiri dari empat suku yang masing-masing suku dipimpin oleh Penghulu (Astuti *et al.*, 2009).

Dalam sistem pemerintahan tradisional, struktur pemerintahan nagari terdiri dari Wali nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)⁴. Pemilihan wali nagari sebagai pemimpin nagari dilakukan secara langsung oleh komunitas adat dan kelompok genealogisnya. Artinya, yang menjadi wali nagari adalah penduduk asli nagari (bukan pendatang). Jalannya Pemerintahan nagari tidak hanya melibatkan wali nagari sebagai pemimpin nagari, namun juga memperhatikan kepemimpinan adat yang terdiri dari *Ninik Mamak*, atau yang biasa disebut dengan Penghulu, yang bertugas mengurus adat istiadat, Alim Ulama yang bertugas mengurus masalah keagamaan dan *Cadiak Pandai* (Cerdik Pandai) yang bertugas dalam hal peraturan, atau perundang-undangan⁵. Sistem kepemimpinan adat ini mewarnai sistem pengelolaan Lubuk Larangan. Kala ini, pengelolaan lubuk larangan, berada di bawah pemerintahan adat, sebab lubuk larangan termasuk ke dalam hak ulayat (Akmal, 2008). Pembentukan, pengelolaan, serta pengawasan Lubuk Larangan diatur oleh pemerintahan adat melalui organisasi Kerapatan Adat Nagari.

⁴Kerapatan Adat Nagari menurut Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat, KAN merupakan himpunan ninik mamak dalam sebuah nagari

⁵Ketiganya memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan nagari, mereka dinamakan *tungku tigo sajarangan* yang diatur dalam Perda Nomor 134 Tahun 1978. Falsafah ini berasal dari istilah didalam kegiatan memasak, yaitu tiga batu yang dibentuk menyerupai segitiga difungsikan sebagai tungku yang digunakan untuk memasak (Gani, 2005).

Masa selanjutnya adalah masa berlakunya sistem pemerintahan desa sebagai pemerintahan daerah terendah, hasil adopsi dari sistem pemerintahan di Jawa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1979. Saat ini pemilihan Kepala desa ditentukan langsung oleh pejabat di atasnya (Camat). Pemerintah membentuk Lembaga Musyawarah Daerah (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang di dalamnya terdapat unsur ninik mamak. Namun fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak dapat dilakukan oleh kedua lembaga ini sebab keduanya dipimpin oleh Kepala Desa (Astuti *et al.*, 2009). Tidak hanya masalah kepemimpinan, masalah wilayah teritorial pun menjadi berubah. Sistem pemerintahan desa membuat lembaga adat yang ada di pemerintahan nagari sebelumnya kehilangan peran. Masa ini, tidak ada yang secara langsung mengelola Lubuk Larangan.

Saat ini lubuk larangan hanya pakai uduh saja...siapa yang berani ambil ikan, kumbang perutnya...ngga ada yang kelola masa ini...

Masa ketiga adalah masa kembali kepada sistem pemerintahan nagari sebagai sistem pemerintahan daerah terendah. Masa diberlakukannya kembali sistem pemerintahan nagari, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Wali Nagari menjadi pemimpin dalam pemerintahan sebuah nagari dengan sistem pemilihan yang terbuka, namun tetap harus berdasarkan perda provinsi. Melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, Kerapatan Adat Nagari (KAN) kembali difungsikan dalam menjalankan pemerintahan sebuah nagari yang salah satunya adalah mengurus hak ulayat nagari, termasuk di dalamnya lubuk larangan. Nagari Sialang memiliki 8 ninik mamak yang mewakili 8 suku yang mendiami Nagari Sialang. Para ninik mamak inilah yang duduk dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari. Pengelolaan Lubuk Larangan diserahkan kepada POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas), sementara pemerintah adat (KAN) dan pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan.

Pengetahuan lokal merupakan faktor potensial dalam menunjang keberlanjutan pengelolaan sumber daya. Namun pengetahuan lokal ini harus terus diperbaharui dan diperkaya karena memiliki kekurangan dalam membantu para pendukungnya untuk memahami dinamika

lingkungan hidup yang kompleks dan kondisi ketidakpastian yang besar. Pengayaan pengetahuan mengenai ekosistem disertai pengembangan institusi sosial dapat membantu mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Winarto & Choesin, 2001).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Pengetahuan lokal yang terwujud dalam praktek konservasi sumber daya menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya dan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini karena secara langsung merekalah yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut.

Pengetahuan lokal ini bersifat dinamis. Dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya alam perikanan menggambarkan bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan fungsional dalam kehidupan masyarakat.

Lubuk Larangan merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya yang berasal dari pengetahuan lokal masyarakat Minang di Sumatera Barat. Lubuk Larangan selain memiliki fungsi ekologi juga memiliki fungsi ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai salah bentuk pengetahuan lokal, Lubuk larangan yang dalam perjalanannya mengalami dinamika. Dinamika pada Lubuk larangan terjadi karena perubahan sumber daya, agama dan sistem pemerintahan.

Implikasi Kebijakan

Praktek pengelolaan sumber daya seperti Lubuk Larangan ini dapat menjadi bahan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di Indonesia. Yang perlu diperhatikan, pertama, penyempurnaan bentuk pengelolaan Lubuk Larangan ataupun praktek pengelolaan sumber daya lainnya sehingga tidak terjebak dalam romantismenya saja. Kedua, pengelolaan sumber daya yang ada di suatu masyarakat tidak serta merta dapat diterapkan di masyarakat lain. Penyempurnaan bentuk pengelolaan sumber daya dengan melalui pengayaan dan pembaharuan pengetahuan lokal perlu dilakukan tanpa melupakan kedinamisan sebuah pengetahuan sehingga tercipta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu perlu dipertimbangkan peran antropologi dalam menentukan kebijakan pemerintah terutama

terkait dengan otonomi daerah yang di dalamnya mengatur hal pengelolaan sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. 2008. Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. *Jurnal Demokrasi*, Volume 7 (1): 1-16.
- Alam, B. 1998. Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 54: 1 - 11.
- Anonimous, 2012. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan. <http://padangtoday.com/info/wp-content/uploads/2013/09/perda-pengelolaan-perlindungan-sumberdaya-ikan.pdf> (Diakses pada 21 Januari 2014).
- Astuti, N.B., L.M. Kolopaking & N.K. Pandjaitan. 2009. Dilema Dalam Transformasi Desa Ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Volume 3 (2):167 - 186.
- Gani, R. 2005. "Tungku Tigo Sajarangan": Analisis Pola Komunikasi Kelompok dalam Interaksi Pemimpin Pemerintahan di Sumatera Barat. *Jurnal Mediator* Volume 7 (2): 243 - 258.
- Kasniyah, N. 2005. Antropologi Pasca "Pembangunan": Dimensi Antropologi Terapan. *Humaniora* Volume 17 (3): 293 - 300.
- Kurniasari, N., M. Yulisti & C. Yuliaty. 2012. *Lubuk dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network. Jakarta. 107 hal.
- Lubis, Z.B. 2005. Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber daya Alam di Tapanuli Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia* Volume 29 (3): 239 - 254.
- Lowe, C. 2006. Kajian Antropologi Tentang Globalisasi: Catatan Tentang Studi- Studi keterkaitan Dunia. *Jurnal Antropologi Indonesia* Volume 30 (3): 263 - 272.
- Maskur. 2002. Program Pelestarian Plasma Nutfah Ikan-Ikan Perairan Umum. *Jurnal Akuakultur Indonesia* Volume 1(3): 139-144.
- Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, hal 5 - 6. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Naim, M. 1990. Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural. dalam Mohammad Hasbi, et all (Eds). Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat. Padang: Yayasan Genta Budaya.
- Noer, M. 2004. Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari dalam Perencanaan Wilayah di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Mimbar* Volume XXII (2) April-Juni: 234 - 257.
- Priyatna, F.N. 2003. Model Pengelolaan Sumber daya Perikanan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Karangjaladri, Parigi, Jawa Barat: Tinjauan Sosiologi-Antropologi. Skripsi.(Tidak dipublikasikan) Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan Kelautan. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. 114 hal.
- Solihin, A. & A. Satria. 2007. Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berlanjut : Kasus Awig- Awig di Lombok Barat. *Sodality, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Volume 1 (1): 67-86.
- Suhana. 2009. Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung Kabupaten Kuantan Senggigi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup . <http://pk2pm.wordpress.com/2009/12/13/pengakuan-keberadaan-kearifan-lokal-lubuk-larangan-indarung> (Diakses 17 Juli 2012).
- Syahyuti. 2010. Konsep dan Strategi Pendekatan Kultural dalam Pembangunan Pertanian: Studi Kasus Pembangunan Pertanian di Thailand. http://www.ut.ac.id/html/suplemen/luht4210/Pendekatankultural_pembangunanpertanian.pdf (Diakses pada 12 Agustus 2013).
- Tambunan, R. 2008. *Perilaku Konservasi pada Masyarakat Tradisional*. *Jurnal Harmoni Sosial* Vol. 2 (2): 83 - 87.
- Tan, M.G. 1994. Masalah Perencanaan Penelitian In Koentjaraningrat (ed). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, hal 24 - 60. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Winarto, Y.T & E.M. Choesin. 2001. Pengayaan pengetahuan Lokal, Pembangunan Pranata Sosial : Pengelolaan Sumber daya Alam dalam Kemitraan. Jurnal Antropologi Indonesia Volume 25 (64): 91 - 106.

Yuliaty, C., N. Kurniasari & M.Yulisti. 2012. Lubuk Larangan Anak Nagari: Studi Bentuk Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Prosiding Konferensi Nasional (KONAS) VIII Pengelolaan Sumber daya Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil, Mataram, 22-24 Oktober 2012, ISBN : 978-979-3556-91-8.

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Adiwibowo Soeryo	77 - 90
Apriliani Tenny	29 - 40
Bengen, Dietrich G	105 - 113
Firdaus Maulana	1 - 12
Hafsaridewi Rani	41 - 50
Kamal, M. Mukhlis	105 - 113
Kamlasi Yusuf	51 - 63
Kolopaking, Lala M	77 - 90
Kurniasari Nendah	91 - 103
Maharani Hertria	41 - 50
Nurlaili	65 - 75
Pranowo, M. Bambang	77 - 90
Priyatna, Nur Fatriyandi	65 - 75
	115 - 125
Rachmanzah Dicky	13 - 27
Rahadian Rikrik	29 - 40
Ramadhan Andrian	1 - 12
Sambali Hariyani	105 - 103
Sri Naharuddin	51 - 63
Subair	77 - 90
Wardiatno Yusli	13 - 27
Widigdo Bambang	13 - 27
Wijaya, Rizki Aprilian	1 - 12
	29 - 40
Yulianda Fredinan	105 - 113
Yuliaty Christina	91 - 103
	115 - 125
Yulisti Maharani	91 - 103



LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA



SERTIFIKAT

Nomor: 524/AU2/P2MI-LIP/04/2013

Akreditasi Majalah Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nomor 377/E/2013 Tanggal 16 April 2013

Nama Majalah : Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN : 2088-8449

Redaksi : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah

TERAKREDITASI

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun

Cibinong, 16 April 2013

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ketua Panitia Penilai Majalah Ilmiah-LIP

Prof. Dr. Rochadi
NIP 195007281978031001,





BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Balitbang KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Web : www.bbrse.kkp.go.id

email : pt.losek@gmail.com

pt_losek@yahoo.co.id

ISSN 2088-8449

